

Sejarah **Gerakan** Kepemudaan di Kalimantan Selatan



TIM PENYUSUN

WAJIDI, MANSYUR, FAZLUR RAHMAN, ABDAN SYAKURA,
SITI MAULIANA, MELISA PRAWITA SARI

TIM PENYUSUN
WAJIDI, MANSYUR, FAZLUR RAHMAN, ABDAN SYAKURA,
SITI MAULIANA, MELISA PRAWITA SARI

Sejarah **Gerakan**
Kepemudaan
di Kalimantan Selatan

SEJARAH GERAKAN KEPEMUDAAN DI KALIMANTAN SELATAN



Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta

Lingkup Hak Cipta:

Pasal 2:

1. Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ketentuan Pidana

Pasal 72:

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak mengumumkan atau menyebarkan suatu ciptaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau hal terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

SEJARAH GERAKAN KEPEMUDAAN DI KALIMANTAN SELATAN



**DINAS PEMUDA DAN OLAMRAGA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
TAHUN 2018**

SEJARAH GERAKAN KEPEMUDAAN DI KALIMANTAN SELATAN

Copyright@2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Penyusun:

- Pendahuluan
(Mansyur)
- Bab I Pemuda, Pendidikan, dan Kesadaran Nasional
(Wajidi)
- Bab II Pemuda Gemblengan Tentara Pendudukan Jepang
(Mansyur)
- Bab III Gelora Pemuda Masa Revolusi Kemerdekaan
(Wajidi)
- Bab IV Gerakan Pemuda Pasca Periode Pengakuan Kedaulatan Sampai Orde Lama
(Mansyur dan Melisa Prawita Sari)
- Bab V Gerakan Pemuda Masa Orde Baru Hingga Munculnya Masa Reformasi
(Siti Mauliana Hairini)
- Tantangan Pemuda di Masa Depan
(Abdan Syakura, Fazlur Rahman)

Penyunting:

Wajidi

Layout & Sampul:

Percetakan Graha Cendekia

Penerbit:

Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan
JL. Pramuka, No. 4, Sungai Lulut, Banjarmasin Timur, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan, 70653.

Gambar sampul depan:

Pemuda yang tergabung dalam organisasi Parindra Cabang Barabai, saat memperingati Hari Kartini, tanggal 23 April 1939. Sumber Foto: koleksi Wajidi diperoleh dari Abdul Muis, Barabai.

Pencetak:

Graha Cendekia, Yogyakarta

Cetakan pertama, Desember 2018

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang. Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini dalam bentuk apa pun tanpa izin tertulis dari penulis.

ISBN



SAMBUTAN GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN

PUJI SYUKUR ke hadirat Allah SWT atas ridho-Nya, sehingga penyusunan buku *Sejarah Gerakan Kepemudaan di Kalimantan Selatan*, dapat diselesaikan. Kami menyambut gembira atas terbitnya buku ini yang memuat sejarah kepemudaan sejak awal abad ke 20 sampai era Reformasi dalam kehidupan masyarakat di Kalimantan Selatan.



Peran pemuda sangat urgen dalam perjalanan sejarah bangsa. Di semua periode sejarah, dari masa Perang Banjar sampai dengan Periode Reformasi, anak-anak muda dengan karakter yang dinamis, bergejolak, kritis, dan optimis selalu muncul di garis terdepan sebagai pioner perubahan.

Dengan hadirnya buku ini, kami berharap bisa menjadi inspirasi sekaligus motivasi. Betapa para pemuda di Kalimantan Selatan telah menunjukkan eksistensi di dalam panggung sejarah perjalanan bangsa. Mereka dengan kemurnian idealismenya, pemikiran, keberanian, inovatif dan kreatif, dan keterbukaan menyerap nilai-nilai dan gagasan baru, serta memiliki keberanian bertindak yang terkadang melampaui zamannya.

Kita lihat tokoh Tumenggung Jalil (Adipati Anom Dinding Raja) baru berusia 19 tahun ketika membantu Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah berperang melawan Belanda. Atau Letkol Hassan Basry ketika melalui Proklamasi 17 Mei 1949 membentuk Pemerintah Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, baru berusia 26 tahun.

Begitupula rekan-rekan seperjuangan beliau yang umumnya muda belia.

Tokoh-tokoh sejarah itu telah memberikan teladan kepada kita bahwa sudah seharusnya para pemuda untuk senantiasa tampil di garis depan membawa perubahan ke arah lebih baik. Perubahan tidak bisa kita tunggu tetapi harus kita kejar, dan sudah selayaknya setiap perjuangan membutuhkan kerja keras, dan dibutuhkan kapabilitas. Paling tidak buku ini bisa menjadi penyemangat berprestasi dari segi intelektual yang didukung kematangan emosional.

Pemuda dan pembangunan daerah, sejalan dengan semangat desentralisasi, dengan pelimpahan keewenangan yang lebih luas kepada pemerintah daerah, membuka kesempatan bagi setiap masyarakat mengisi pembangunan daerah. Pemuda sebagai elemen penting masyarakat dalam pembangunan daerah, sudah sepatutnya memaknai dan mewarnai setiap kebijakan pembangunan daerah.

Terlebih lagi, Indonesia diprediksi akan mengalami masa bonus demografi, yakni jumlah penduduk usia produktif di tengah dunia yang serba digital, atau milenial, serba smart, ringkas, cepat, dan pusat kendali ada di ujung jari.

Kita harus mampu memanfaatkan bonus demografi itu. Di sinilah pentingnya pemuda memposisikan diri menghadapi tantangan global dan mengambil peran-peran strategis dalam pembangunan daerah saat ini. Semoga kehadiran buku ini membawa manfaat dan kemajuan bagi perkembangan dunia kepemudaan khususnya di Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, 28 Oktober 2018

GUBERNUR KALIMANTAN SELATAN,



H. SAHBIRIN NOOR

SAMBUTAN KEPALA DINAS PEMUDA DAN OLAHRAGA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN



*Assalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.*

SEGALA puji dan syukur hanya bagi *Allah Subhanahu Wata'ala* yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya. Kami menyambut baik dan memberikan apresiasi yang tinggi atas terbitnya buku *Sejarah Gerakan Kepemudaan di Kalimantan Selatan*.

Melalui buku ini, kita bisa mempelajari dan mengenal peran dari pemuda yang menjadi aset tak ternilai. Apalagi di tengah tengah gejolak sejarah yang seakan tidak pernah usai. Seiring berjalannya waktu pada abad ke 20 ini, warna-warni modernisasi begitu kental terlihat di setiap sendi-sendi kehidupan masyarakat.

Modernisasi merasuk ke berbagai belahan dunia seolah tanpa batas, bebas masuk dan dengan cepat ke wilayah Banjar Kalimantan Selatan dengan dampak yang dimunculkannya berupa kemajuan di samping eksese negatif yang dimunculkannya.

Sesuai dengan konsep tridimensi sejarah (dahulu, kini, dan akan datang), maka dengan adanya buku ini diharapkan dapat memberikan pencerahan untuk memotivasi pemuda yang baru saja terbangun dari tidur lelap dan tengah bersiap-siap untuk membangun negeri ini, menjawab tantangan global, guna meraih cita-cita bangsa ke arah perubahan yang lebih baik.

Ada yang mengatakan pada istilah “PEMUDA”, terkandung akronim: **P**ergilah **E**ngkau **M**enuntut **U**ntuk **D**unia **A**khirat. Maknanya adalah hendaknya pemuda selalu menuntut ilmu, meningkatkan kualitas, dan kompetensi diri. Hal yang wajar, karena pada diri pemuda dibebani bermacam-macam

harapan, terutama dari generasi lainnya untuk mengisi dan melangsungkan estafet pembangunan secara berkelanjutan.

Oleh karena itu, kepada para pemuda marilah kita melupakan sejenak keglamoran modernisasi, globalisasi dan sebagainya. Lupakan pertikaian antar sesama dengan tujuan yang tidak jelas. Asahlah kemampuan emosional, seperti kemampuan membawa diri, kemampuan bergaul dengan sesama, kemampuan membaca akar permasalahan, kemampuan untuk menelorkan gagasan atas sebuah permasalahan.

Apalagi pada setiap momentum Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober, momen ini perlu diresapi dan dimaknai. Paling tidak sebagai langkah awal menuju generasi muda yang tangguh yang mampu membangun dan mengangkat marwah kebesaran negeri ini. Semoga Allah Subhanahu Wata'ala senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya bagi kita semua.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Banjarmasin, 28 November 2018

**KADISPORA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**



ZAKLY ASSWAN

Pengantar Penyusun

Syukur alhamdulillah dihaturkan ke hadirat Allah SWT, karena atas segala anugerah dan perlindungan-Nya, akhirnya penyusunan buku *Sejarah Gerakan Kepemudaan di Kalimantan Selatan*, dapat dirampungkan seperti adanya di tangan para pembaca. Buku ini hadir setelah melalui proses penelitian dengan menggunakan Metode Sejarah untuk merekonstruksi, dengan tahap-tahap heuristik, kritik (eksternal dan internal), interpretasi, hingga tahapan historiografi. Penelitian ini melalui seleksi atas sumber primer maupun sekunder yang relevan, dalam rangka mewujudkan penulisan sejarah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

Ucapan terimakasih tak terhingga kami haturkan dan kepada Bapak Gubernur Kalimantan Selatan dan Bapak Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Kalimantan Selatan, atas sambutannya dan arahnya dalam penulisan buku ini. Ucapan terimakasih juga dihaturkan kepada narasumber Bapak La Ode Rabbani, M.Hum, Dosen Departemen Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya Universitas Airlangga Surabaya, serta narasumber lainnya yang tidak dapat disebutkan satu persatu, yang banyak membantu memberikan masukan dalam penyusunan buku ini.

Tidak lupa pula ucapan terimakasih secara khusus kepada semua pihak, yang telah banyak membantu kami mulai dari proses pengumpulan data lapangan (observasi dan wawancara), pengumpulan arsip klasik, tempat berdiskusi dan konsultasi dalam merekonstruksi perjalanan sejarah kepemudaan di Kalimantan Selatan.

Terima kasih kepada Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Perpustakaan dan Arsip Daerah (Perpustarda) Kalimantan Selatan, Museum Negeri Lambung Mangkurat Kalimantan Selatan (Banjarbaru), dan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia (Jakarta), yang telah membantu kami dalam upaya pengumpulan data berupa arsip.

Tim penyusun menyadari bahwa sebagai sebuah karya sejarah, mungkin saja isi buku ini belum memuaskan semua

pihak, khususnya bagi pelaku sejarah yang mengalami peristiwa di masa Orde Lama, Orde Baru, dan masa Reformasi sekarang ini. Memang tidak mungkin semua nama dan peristiwa yang berkaitan dengan gerakan kepemudaan dicantumkan dalam buku ini karena terbatasnya tempat, waktu penyelesaian buku, belum lagi menyangkut interpretasi yang mungkin berbeda atas peristiwa yang sama. Oleh karena itu, tim penyusun terbuka untuk menerima saran-saran konstruktif untuk perbaikan buku ini.

Akhirnya dengan satu doa, semoga Allah SWT memberikan balasan kebajikan atas peran serta dalam membantu merampungkan buku ini. Hal ini penting untuk ilmu pengetahuan, dokumentasi sejarah, sosial dan nilai-nilai budaya yang tercermin dalam gerakan kepemudaan di Kalimantan Selatan.

Banjarmasin, November 2018

Tim Penyusun

Daftar Isi

Sambutan Gubernur Kalimantan Selatan ~v
Sambutan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga ~vii
Pengantar Penyusun~ix

Pendahuluan ~1

Bab 1	Pemuda, Pendidikan, dan Kesadaran Nasional ~13
A.	Pemuda Intelektual dan Kesadaran Nasional 13
B.	Partisipasi Pemuda Dalam Sekolah Pergerakan 23
C.	Andil Kaum Muda Dalam Organisasi Pergerakan ~29
D.	Perjuangan Tokoh Muda Dalam Pers Kebangsaan ~56
Bab 2	Pemuda Gemblengan Tentara Pendudukan Jepang ~65
A.	Gerakan Pemuda di Bawah Pendudukan Jepang ~67
B.	Gemblengan Pemuda Dalam Organisasi Politik dan Sosial ~83
C.	Propaganda dan Mobilisasi Dalam Nipponisasi Pemuda ~91
D.	Peran Pemuda Sekitar Proklamasi ~94
Bab 3	Gelora Pemuda Masa Revolusi Kemerdekaan ~99
A.	Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan ~99
B.	Reaksi Pemuda Terhadap Proklamasi Kemerdekaan ~105
C.	Gerakan Pemuda Melawan NICA ~107
D.	Partisipasi Pemuda di Bidang Sosial Politik ~115
E.	Laskar Muda Dalam Perjuangan Bersenjata ~122
F.	Perjuangan Wartawan Muda di Jalur Media Massa ~133

- Bab 4 Gerakan Pemuda Pasca Pengakuan Kedaulatan
Sampai Orde Lama Tahun 1950-1966 ~141
- A. Pemuda di Era Proklamasi Hingga
Pengakuan Kedaulatan ~141
 - B. Pemuda Dalam Nuansa Konstitusi RIS 1949 -
1950 ~144
 - C. Pemuda Pejuang Dalam Kodam X Lambung
Mangkurat ~154
 - D. Kekecewaan Pemuda & Kesatuan Rakyat
Yang Tertindas~158
 - E. Politik Pemuda Era Peralihan Hingga Orde
Lama~162
 - F. Pelarangan Kegiatan PKI & Ormasnya ~164
- Bab 5 Gerakan Pemuda Masa Orde Baru Tahun 1966-
1998 ~173
- A. Pemuda di Tengah Gejolak Politik dan
Pemerintahan ~173
 - B. Eksponen'66: Gejolak Politik di Jakarta dan
Embrio Gerakan pemuda di Kalimantan
Selatan ~176
 - C. Pahlawan Ampera dan Pemuda Pejuang
Martabat Bangsa Indonesia di
Kalimantan Selatan ~178
 - D. Gerakan Pemuda Kalsel, Kontrol Sosial dan
Modal Politik Penguasa Orde Baru ~183
 - E. Reformasi Sunyi: Pemuda Kalimantan
Selatan Berduka~207

Penutup ~217

Daftar Pustaka ~225

Riwayat Hidup Penyusun ~242

Daftar Gambar

- Gambar 1.1. Merah Djohansjah.) ~17
Gambar 1.2. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) cabang Kandangan. ~ 19
Gambar 1.3. Para Pengurus Sarekat Islam Cabang Banjarmasin pada tahun 1920 ~ 22
Gambar 1.4. “Sekolah Rajat Parindra Aloeian Soemoer”.~ 27
Gambar 1.5. Amir Hasan Kiai Bondan, Pendiri Seri Budiman ~ 33
Gambar 1.6. Pemberitaan Soerabaijasch handelsblad ~ 40
Gambar 1.7. Persatuan Pemuda Marabahan (PPM).~ 42
Gambar 1.8. Kepanduan Bangsa Indonesia di Marabahan ~ 43
Gambar 1.9. BINDO di Banjarmasin dengan bendera Merah Putih yang dikibarkan, 30 April 1934~ 46
Gambar 1.10. Pengurus Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan ~ 47
Gambar 1.11. *Bond Indonesische Chauffeur* (BIC) di Barabai ~ 49
Gambar 1.12. Sekolah Rukun Puteri yang dikelola Parindra ~ 53
Gambar 1.13. Pengurus dan Anggota Parindra Cabang Banjarmasin ~56
Gambar 2.1. Tentara Jepang bersama pejabat sipil di onderafdeling Barabai ~ 66
Gambar 2.2. Lirik *Lagoe Seinendan Borneo Selatan* ~72
Gambar 2.3. Lirik lagu Kecintaan Negeri atau *Aikokukoshinyoko* ~72
Gambar 2.4. Beberapa *header* Borneo Simboen (Borneo Shimboen) ~74
Gambar 2.5. Para tahanan di penjara Banjarmasin ~79
Gambar 2.6. Sketsa Romusha dan *Kinrohosi* ~90
Gambar 2.7. Dr. Vischer di Barimba Kapuas ~93
Gambar 2.8. A.A. Hamidhan ~96

- Gambar 2.9. Berita Borneo Simboen tentang pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka ~97
- Gambar 3.1. Sketsa menggambarkan semangat para pejuang kemerdekaan ~
- Gambar 3.2. Para Pemuda Saat Mengikuti Latihan Kemiliteran ~104
- Gambar 3.3. Semangat rakyat dari segala usia menyambut kemerdekaan ~107
- Gambar 3.4. Tiga wartawan republiken ~111
- Gambar 3.5. Konferensi Darurat IPK di Yogyakarta~112
- Gambar 3.6. Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ~115
- Gambar 3.7. Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) ~117
- Gambar 3.8. Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan ~124
- Gambar 3.9. Letnan Kolonel Hassan Basry ~129
- Gambar 3.10. Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan ~131
- Gambar 3.11. Penggemblengan Tentara Pelajar ~134
- Gambar 3.12. Wartawan Semarak dan Kalimantan Berjuang ~137
- Gambar 4.1. Pangeran Mohamad Noor Bersama Mohammad Hatta. ~144
- Gambar 4.2. Hassan Basry di Kandangan ~147
- Gambar 4.3. Ibnu Hadjar ketika berpidato di Ambutun ~149
- Gambar 4.4. Kedatangan Presiden Soekarno ~152
- Gambar 4.5. Presiden Soekarno di lapangan Merdeka Banjarmasin tanggal 13 September 1950 ~
- Gambar 4.6. Bung Karno di Lapangan Dwi Warna Barabai ~157
- Gambar 4.7. Hassan Basry didampingi Ibnu Hajar menginspeksi pasukan ~159
- Gambar 4.8. Kolonel Achmad Yani, Deputy II KASAD, ketika tiba di Lapangan Terbang Ulin ~166
- Gambar 4.9. Tokoh-tokoh putra daerah Kalimantan Selatan yang tampil menentang Komunisme ~167
- Gambar 4.10. Para pemuda di Lapangan Merdeka, Banjarmasin ~169

Gambar 4.11	Marching Band Pramuka di Banjarmasin ~171
Gambar 5.1	Para seniman Kalsel pada saat persiapan Musyawarah Daerah Seniman Kalsel tahun 1963 ~175
Gambar 5.2	Demonstrasi Kesatuan Pelajar dan Mahasiswa ~177
Gambar 5.3	Pemakaman Hasanuddin HM ~182
Gambar 5.4	Ekspone '66 ~184
Gambar 5.5	Kedatangan Presiden Soeharto di Kalimantan Selatan~186
Gambar 5.6	Birokrat muda Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan ~199
Gambar 5.7	Sebagian Panitia dan Peserta Musda Pertama KNPI di Banjarmasin~203
Gambar 5.8	Peserta Musda Pertama KNPI di Banjarmasin ~204
Gambar 5.9	Anang Adenansi Terpilih sebagai Ketua Umum dalam Musda Pertama KNPI 6-10 Mei 1975 ~205

Daftar Singkatan

ABDACOM	: American-British-Dutch-Australian Command
ALRI	: Angkatan Laut Republik Indonesia
AMS	: Algemene Middelbare School
APRI	: Angkatan Perang Republik Indonesia
APRIS	: Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat
AVC	: Algemene Vernielings Corps
BB	: Binnenlands Bestuur
BFO	: Bijeenkomst voor Federaal Overleg
BIC	: Bond Indonesische Chauffeur
BINDO	: Barisan Indonesia
Borpena	: Borneosche Pers en Nieuw Agentschap
BPM	: Bataafsche Petroleum Maatschappij
BPO	: Borneo Padvinder Organisatie
BPOC	: Badan Pengawas Onderwijs Commissie
BPOG	: Badan Pembantu Oesaha Gubernur
BPPKI	: Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia
BPRI	: Barisan Pemberontak Rakyat Indonesia
BPRIK	: Barisan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan
DJINTAN	Djenderal Jepang Ini Nanti Tolong Anak Negeri
DPR-GR	: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong
DWIKORA	: Dwi Komando Rakyat
ELS	: Europese Lagere School
Front ABCD	: American-British-Cina-Dutch
GAPI	: Gabungan Partai-Partai Politik Indonesia
GAPPIKA	: Gabungan Pemuda Pemudi Kalimantan
GAPPIKA	: Gabungan Persatuan Pemuda Indonesia Kalimantan
GEPERINDO	: Gerakan Pemuda Republik Indonesia
GERAK	: Gerakan Rahasia Kalimantan
GERINDO	: Gerakan Rakyat Indonesia
GERMERI	: Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia

GERPINDOM	: Gerakan Rakyat Pengejar Pembela Indonesia Merdeka
GERPINDOM	: Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka
GG	: Gouverneur Generaal
GMNI	: Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia
HCS	: Hollands Chinese School
HIS	: Hollands Inlandse School
HPB	: Hoofd van Plaatselijk Bestuur
IHS	: Inheemse Hollandse School
INI	: Ikatan Nasional Indonesia
IPI	: Ikatan Pelajar Indonesia
IPK	: Ikatan Perjuangan Kalimantan
IP-KI	: Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia
JOC	: Jeugd Oefen Corps
KAGI	: Kesatuan Aksi Guru Indonesia
Kalbar	: Kalimantan Barat
Kalpena	: Kalimantanische Pers en Nieuw Agentschap
Kalsel	: Kalimantan Selatan
Kalteng	: Kalimantan Tengah
Kaltim	: Kalimantan Selatan
KAMI	: Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia
KAPNI	: Kesatuan Aksi Pengusaha Nasional Indonesia
KAPPI	: Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia
KASI	: Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia
KAWI	: Kesatuan Aksi Wanita Indonesia
KBBI	: Kamus Besar Bahasa Indonesia
KBI	: Kepanduan Bangsa Indonesia
KBKI	: Kesatuan Buruh Kerakyatan Indonesia
KDM	: Komando Distrik Militer
KL	: Koninklijke Leger
KNI	: Komite Nasional Indonesia
KNIL	: Koninklijke Nederlands Indische Leger
KODAM	: Komando Daerah Militer
KODIM	: Komando Distrik Militer
KODIM	: Komando Onder Distrik Militer
KOJARSENA	: Korps Pelajar Serba Guna
KOTI	: Komando Operasi Tertinggi
KPBBI	: Komisi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Indonesia
KPM	: Koninklijk Pakketvaart Maatschappij
KRI	: Kepanduan Rakyat Indonesia

KRYT	Kesatuan Rakyat Yang Tertindas
KRYT	: Kesatuan Rakyat yang Tertindas
KSAP	: Kepala Staf Angkatan Perang
KTN	: Komisi Tiga Negara
KUHP	: Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
LBD	: Lucht Beschermings Dienst
LEKRA	: Lembaga Kebudayaan Rakyat.
LEKRI	: Lembaga Kebudayaan Rakyat Indonesia
LPKS	: Latihan Kemiliteran Pegawai Sipil
M.Th	: Musyawaratutthalibin
MANIPOL	: Manifesto Politik Indonesia
MASYUMI	: Majelis Syuro Muslimin Indonesia
MP	: Militaire Politie
MP	: Militair Politie
MPK	: Markas Besar Pertahanan Kalimantan
MTKI	: Mandau Telabang Kalimantan Indonesia
MULO	: Meer Uitgebreid Lager Onderwijs
NASAKOM	: Nasionalisme, Agama, Komunis
NBC	: National Borneo Conferentie
NIAS	: Nederlands Indische Artsen School
NICA	: Netherlands Indies Civil Administration
Nirub	: Nederland Indische Rubber Fonds
NKRI	: Negara Kesatuan Republik Indonesia
NMM	: Nederlands Militaire Missie
NU	: Nahdlatul Ulama
ORI	: Oeang Republik Indonesia
OSVIA	: Opleidingschool voor Inlandse Ambtenaren
OSVIA	: Opleidingschool voor Inlandse Ambtenaren
PAIM	: Partai Anti Indonesia Merdeka
PARINDRA	: Partai Indonesia Raya
PARTINDO	: Partai Indonesia
PBI	: Persatuan Bangsa Indonesia
PBM	: Pasukan Berani Mati
PEK	: Partai Ekonomi Kalimantan
PEKUMIL	: Pelaksana Kuasa Militer
PEKUMIL	: Pelaksana Kuasa Militer
PEKUPER	: Pemegang Kuasa Perang
PELMASI	: Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia
PEPELRADA	: Penguasa Pelaksana Komando Dwikora Daerah
PEPERDA	: Penguasa Perang Daerah

PEPERTI	: Penguasa Perang Tertinggi
PEPERTI	: Penguasa Perang Tertinggi
PERAK	: Persatuan Rumah Asap Kalimantan
PERPI	: Persatuan Pemuda Indonesia
PERSAMI	: Persatuan Sarjana Muslimin Indonesia
PERWANI	: Persatuan Wanita Indonesia
PESINDO	: Pemuda Sosialis Indonesia
PETER	: Pembantu Tentara Republik
PHIS	: Particuliere Hollands Inlandse School
PID	: Politieke Inlichtingen Dienst
PII	: Partai Islam Indonesia
PKDI	: Persatuan Kaum Dagang Indonesia
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PMC	: Penyelidik Militer Khusus
PMII	: Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia
PMM	: Pemuda Muslimin MULO
PNI	: Partai Nasional Indonesia
PNI	: Pendidikan Nasional Indonesia
POC	: Pengawas Onderwijs Commissie
PPI	: Persatuan Perguruan Islam
PPI	: Pelajar Islam Indonesia
PPI	: Persatuan Pemuda Indonesia
PPKI	: Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia
PPM	: Persatuan Pemuda Marabahan
PPRI	: Persiapan Pemerintahan Republik Indonesia
PPRI	: Persatuan Pemuda Republik Indonesia
PRI	: Pemuda Republik Indonesia
PRI	: Persatuan Rakyat Indonesia
PRIK	: Pemuda Republik Indonesia Kalimantan
PSI	: Partij Sarekat Islam
PSII	: Partai Sarekat Islam Indonesia
PWI	: Persatuan Wartawan Indonesia
RIS	: Negara Indonesia Serikat
RMG	: Rheinische Missions Gesellschaft
S.I.K	: Soeara Iboe Kalimantan
SERI	: Serikat Rakyat Indonesia
SERMI	: Serikat Muslimin Indonesia
SKI	: Serikat Kerakyatan Indonesia
SMA	: Sekolah Medan Antara
SOB	: Staat van Oorlog en Beleg
SOPIK	: Sentral Organisasi Pemberontakan

	Kalimantan
SORAK	: Soeara Rakyat Kalimantan
SRI	: Serikat Rakyat Islam
TKI	: Tentara Kerakyatan Indonesia
TKR	: Tentara Keamanan Rakyat
TNI	: Tentara Nasional Indonesia
TRI	: Tentara Republik Indonesia
UNCI	: United Nations Commission for Indonesia
UUDS-RI	: Undang-Undang Dasar Sementara Republik

Pendahuluan

PEMUDA adalah bagian masyarakat umumnya berusia muda. Batasan pemuda di setiap negara berbeda-beda tergantung kebijakan pemerintah negara bersangkutan. Ada yang mengatakan golongan yang dianggap sebagai pemuda adalah penduduk muda berusia tiga belas sampai dua puluh lima (13-25) tahun. International Youth Year tahun 1985 mendefinisikan penduduk berusia 15-24 tahun. Pada Pasal 1 Ayat (1) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dinyatakan pemuda adalah warga negara Indonesia yang memasuki periode penting pertumbuhan dan perkembangan yang berusia 16 (enam belas) sampai 30 (tiga puluh) tahun.¹

Pemuda tidak hanya ditinjau dari aspek umur tetapi juga dilihat dari perspektif semangat. Semangat bergerak dan berubah hingga berkontribusi bagi integritas bangsa. Semangat ini tentunya dibarengi sikap berani bertindak, optimis, berpendirian teguh, tidak gampang putus asa serta pantang mundur. Deretan sikap yang menjadi ciri sekaligus menggambarkan sosok pemuda sejati.²

Pemuda adalah satu diantara elemen bangsa yang menjadi garda terdepan menghadapi berbagai persoalan bersama. Dalam perspektif sejarah, kelompok ini selalu melahirkan berbagai pemikiran, gerakan menuju perubahan dan perbaikan Bangsa Indonesia. Peran mereka sudah mengemuka, mulai ber-

¹ Undang-undang Nomor 40 Tahun 2009 Tentang Kepemudaan

² Citra Yuliyanti Eka Pertiwi, Budiyo, & Sutjitro, "Peranan Pemuda Dalam Pergerakan Nasional Indonesia Tahun 1908-1928 (*Youngmen's Role in National Movement of Indonesia in 1908-1928*)", *Artikel Hasil Penelitian Pada Jurusan Ilmu Pendidikan, FKIP Universitas Jember (UNEJ)*, 2013, hlm.1.

kibar, jauh sebelum lahirnya Indonesia sebagai negara. Kiprah pemuda Indonesia bisa dilihat dari gerakan mereka sejak pra momentum kebangkitan nasional (tahun 1908) hingga pasca reformasi, tahun 1998-an.³

Dalam perjalanan sejarah Bangsa Indonesia, peran pemuda membawa perubahan terutama dalam perjuangan melawan dominasi kolonial Belanda. Berawal dari kebangkitan nasional tahun 1908 yang menandakan mulai tumbuhnya rasa nasionalisme. Kemudian disusul Sumpah Pemuda tahun 1928, dasar persatuan Indonesia hingga memasuki gerbang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pemuda senantiasa menjadi bagian dari sejarah, karena setiap peristiwa sejarah umumnya selalu dipelopori pemuda. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut pemuda mengedepankan wawasan dan pikirannya sebagai kekuatan utama perjuangan. Hal ini yang membuat pemuda mampu melakukan terobosan sejarah, dengan memadukan cara pandang dan gaya hidupnya.⁴

Tidak salah jika Anderson (1988) memuji keberadaan pemuda sebagai aset nasional potensial bagi pembangunan bangsa. Walaupun pada sisi lain, seakan akan menjadi beban masyarakat. Pasalnya, harus memikirkan pemenuhan kebutuhan kalangan pemuda dalam aspek pendidikan, rekreasi, dan lapangan kerja. Pemuda juga kerap dipengaruhi perubahan-perubahan berlangsung dalam masyarakat sekitarnya. Pengalaman-pengalaman baru pun ikut membentuk kerangka kesadaran nasional pada diri pemuda.⁵ Cukup beralasan juga ketika Soekarno, salah seorang bapak pendiri bangsa sangat mengharapkan peran pemuda di dalam revolusi Indonesia, dengan mengatakan: "*Beri aku 1.000 orang tua, niscaya akan kucabut semeru dari akarnya. Beri aku 10 pemuda niscaya akan kuguncangkan dunia*".

Dalam kurun waktu tahun 1908-1928 pada era pergerakan nasional, pemuda Indonesia mempunyai semangat tinggi bergerak dan berubah hingga dapat memberi peranan bagi ke-

³ *Ibid.*

⁴ A.M. Musa, *Menjadi Kaum Muda* (Jakarta: FRESHs, 1996), hlm. 20.

⁵ Benedict Anderson, *Revolusi Pemuda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 36.

majuan bangsa. Pergerakan nasional sendiri bertujuan memperbaiki dan membebaskan rakyat Indonesia dalam belenggu kolonialis Belanda. Meningkatnya kesadaran nasional kala itu akhirnya mendorong berkembangnya kesadaran berbangsadan tanah air. Hal ini terwujud menjadi keinginanmelawan “hawa nafsu” penjajah. Perlawanan ini juga sebagai dampak hegemoni kaum penjajah yang melakukan dominasi politik, eksploitasi ekonomi serta penetrasi budaya.

Kilas balik kembali ke masa silam, Bangsa Indonesia mulai berjaya sejak era Kerajaan Sriwijaya, Majapahit, Mataram serta kerajaan lainnya, abad ke-14 hingga ke-16 Masehi. Seiring keruntuhan kerajaan-kerajaan tersebut, pada abad ke-16 orang Eropa yang dipelopori Belanda datang ke Nusantara.⁶ Pada mulanya mereka disambut baik, akan tetapi ternyata kedatangan bangsa dari benua biru ini, perlahan tapi pasti, tergoda oleh kekayaan Nusantara, si kulit putih mulai menunjukkan sifat aslinya yaitu ingin menjajah.

Walaupun demikian,upaya bangsa Belanda menjajah Nusantara mendapat perlawanan dari pribumi. Terbukti dengan munculnya perang di Aceh yang dipimpin Panglima Polim, Cut Nyak Dhien, Cut Nyak Meutia, Teuku Umar dan lain-lain. Kemudian di Sumatera Barat dipimpin Tuanku Imam Bonjol, di tanah Batak oleh Sisingamangaraja XII. Sementara di Pulau Jawa dipimpin Pangeran Diponegoro, Sultan Ageng Tirtayasa, Untung Surapati dan lain-lain. Selanjutnya di Maluku oleh Kapitan Pattimura. Kemudian di wilayah Sulawesi Selatan, Perang Makassar dikobarkan Sultan Hasanuddin. Tidak ketinggalan pada wilayah Kalimantan Selatan, Perang Banjar dipimpin Pangeran Antasari dan Pangeran Hidayatullah, serta perang dan perjuangan rakyat lainnya mulai ujung barat hingga timur Nusantara.

Para pemuda tergabung dalam peperangan melawan pemerintah Kolonial Belanda di berbagai daerah di Nusantara sejak tahun 1700 hingga awal tahun 1900-an. Sayangnya, per-

⁶ Nusantara adalah nama lain yang dipakai sebelum Indonesia.

lawanannya itu dengan mudah dapat dipatahkan penguasa Belanda. Penyebabnya, perlawanan Bangsa Indonesia kala itu masih bersifat kedaerahan. Kemudian, perlawanan yang satu dengan lainnya masih belum terorganisir. Tujuan perjuangan-nya pun berbeda-beda. Belum lagi persenjataan yang dimiliki kalah modern. Belanda sudah menggunakan senjata api, sementara senjata orang Nusantara pada waktu itu masih tradisional. Mulai dari rencong, keris, tombak, panah, pedang, golok, badik, mandau serta jenis senjata lainnya dari berbagai daerah.

Dalam perkembangannya hingga dua dasawarsa pertama abad ke-20, terdapat perubahan pola perlawanan kepada pemerintah kolonial Belanda. Dari perlawanan senjata berganti menjadi pendidikan dan diplomasi. Seiring dengan itu, mulai tumbuh pergerakan nasional yang dipelopori kaum pemuda. Hal ini banyak dipengaruhi faktor-faktor internal maupun eksternal. Faktor internal antara lain karena dimotivasi kondisi derita dan sengsara rakyat Indonesia akibat penjajahan Belanda. Kemudian, mengenang memori kejayaan masa lampau pada masa Kerajaan Sriwijaya dan Majapahit. Pada era ini, kerajaan besar di Nusantara mampu mempersatukan pulau-pulau dan rakyatnya dalam bentuk persatuan kuat serta berpengaruh dalam dunia perdagangan regional. Selain itu, adanya pengaruh pendidikan (edukasi) dari kebijakan Belanda yang dikenal dengan Politik Etis atau Politik Balas Budi. Pendidikan inilah yang melahirkan kaum cendekiawan dari kalangan pribumi.

Sementara faktor eksternal yaitu nasionalisme Asia yang ditandai momentum kemenangan Jepang atas Rusia. Pada tahun 1904-1905, tentara Jepang berhasil mengalahkan Rusia. Modernisasi Jepang telah membawa kemajuan pesat dalam berbagai aspek kehidupan. Kemudian munculnya organisasi-organisasi nasionalisme di berbagai negara seperti di India, Cina, Filipina, Turki dan lain-lain.⁷ Hal tersebut mendorong lahirnya peran pemuda sebagai penggerak bangsa. Peranan pemuda

⁷ Hardi, *Menarik Pelajaran dari Sejarah* (Jakarta: Haji Masaagung, 1988), hlm. 97.

dalam pergerakan nasional pada periode awal, ditandai munculnya organisasi-organisasi pemuda bersifat kedaerahan dan keagamaan. Setelah periode tersebut pemuda mulai terlibat dalam politik nasional. Kesadaran nasional, mendorong berbagai usahakaum pemuda untuk terdidik atau mengenyam pendidikan. Kaum pemuda mendirikan berbagai pergerakan, baik berasaskan politik maupun sosial budaya.

Contohnya, Budi Utomo yang didirikan pemuda mahasiswa STOVIA tahun 1908. Budi Utomo bertujuan memperbaiki kehidupan masyarakat pada aspek budaya dan pendidikan. Setelah berdirinya Budi Utomo banyak organisasi lain menyusul, bergerak dalam berbagai aspek, diantaranya organisasi politik, keagamaan, wanita hingga organisasi pemuda. Organisasi pemuda yang pertama kali ikut berperan dalam perjuangan rakyat Indonesia adalah Tri Koro Dharmo. Organisasi ini kemudian berubah nama menjadi Jong Java. Mengikuti jejak pemuda-pemuda Jawa, bermunculan juga organisasi kedaerahan lain seperti Jong Sumateranen Bond, Jong Minahasa, Jong Celebes, Jong Ambon, Jong Batak, Pemuda Betawi, Sekar Rukun, dan Pemuda Timor yang tujuannya memperluas persaudaraan. Kemudian mengembangkan kebudayaan masing-masing daerah serta mendorong munculnya organisasi-organisasi lain berasaskan kebangsaan seperti PI, PPPI dan Pemuda Indonesia.⁸

Keberadaan organisasi ini bermuara pada hasil akhir yakni kesadaran nasional. Wujud peranan pemuda dalam organisasi pemudayaitu menyatukan organisasi menjadi perkumpulan berlevel nasional. Keinginan itu diwujudkan dalam Kongres Pemuda I yang diselenggarakan tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926. Selanjutnya pada tanggal 26-28 Oktober 1928, dilaksanakan Kongres Pemuda II yang diikuti semua organisasi pemuda sehingga menjadi satu kekuatan nasional. Terlaksananya Kongres Pemuda I dan Kongres Pemuda II yang melahirkan Sumpah Pemuda merupakan kerja keras kaum pemuda mening-

⁸ A.K. Pringgodigdo, *Sejarah Pergerakan Rakyat Indonesia* (Jakarta: Dian Rakyat, 1994), hlm. 24.

katkan nilai-nilai kebangsaan. Oleh karena itu, pemuda mampu menunjukkan eksistensi dalam pergerakan nasional atas dasar persatuan dan kesatuan.

Dalam dinamika gerakan kepemudaan, mahasiswa dan pemuda tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Bagaimana dua sisi dalam satu mata uang. Pada awalnya berjalan linier yang kadang pada waktu tertentu bersilang jalan. “Bangunan” gerakan pun kadang-kadang sama, tetapi juga bisa berbeda. Secara nasional perbedaan gerakan mahasiswa dan pemuda dapat dilihat dari latar belakang munculnya gerakan pemuda dalam masa-masa penjajahan. Pada masa pergerakan kebangsaan, gerakan pemuda lebih bersifat membangun nasionalisme sebagai sebuah antitesa terhadap kolonialisme. Pada masa revolusi fisik, gerakan bersifat frontal dan radikal serta melibatkan semua unsur potensi bangsa dalam rangka membela atau mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pada masa Orde Lama, terdapat Gerakan Angkatan 66 yang menuntut adanya pembersihan terhadap ideologi komunis dan “penurunan” pemerintahan Orde Lama di Indonesia. Poros gerakan berpusat pada mahasiswa di kampus (Dewan Mahasiswa UI/FE). Gerakan ini lebih bersifat ideologis anti komunisme. Ketika Orde Baru mulai mapan, di awal 1970-an, terjadi insiden gerakan mahasiswa anti bantuan asing tahun 1974, yang dikenal dengan Malari dan gerakan anti pembangunan TMII yang dananya dari bantuan asing. Gerakan ini bersifat ideologis anti kapitalisme.

Seiring peristiwa tersebut, di awal tahun 1980-an terjadi berbagai gerakan anti NKK/BKK (Normalisasi Kehidupan Kampus) yang diberlakukan pemerintahan Orde Baru. Gerakan ini bersifat pembebasan keterpasungan. Aturan tersebut menjadi embrio tumbuhnya gerakan-gerakan keagamaan (Islam). Pada saat itu terjadi penekanan dan pengekangan terhadap aktivis-aktivis mahasiswa dan pemuda Islam, serta pembebasan sekularisasi. Gerakan ini oleh Orde Baru diberi label “Gerakan Islam Fundamentalis”.

Muncullah gerakan Islam kontemporer di Kampus-kampus, seperti Darul Arqam, Ikhwanul Muslimin, Gerakan Mahasiswa Salman (Masjid Salman ITB), di Jogjakarta, gerakan kelompok Mardiyah, kelompok Masjid Syuhada, maupun kelompok Jamaah Salahuddin (Hall Gelanggang UGM), Hidayatullah (pusat di Samarinda, Kaltim), gerakan Remaja-remaja Masjid/Angkatan Muda Masjid, yang kemudian bersatu di bawah payung LDK (Lembaga Dakwah Kampus). Kemudian mulai masuk gerakan HTI (Hizbut Tahrir Indonesia) di kampus-kampus. Tidak terlupakan, keberadaan organisasi formal ekstrakurikuler, seperti PMII dan HMI.⁹

Apabila dikomparasikan, kondisi pasang surut gerakan kepemudaan dalam skala nasional berbanding lurus dengan dinamika sejarah kepemudaan di Kalimantan Selatan. Sejak masa penjajahan Hindia Belanda muncul tokoh Tumenggung Jalil dapat dijadikan teladan bagi generasi muda. Jalil yang saat itu berusia 19 tahun membuktikan bahwa dirinya mampu menjadi tokoh sentral dalam perlawanan terhadap kolonial Belanda pada perang Banjar tahun 1859-1861. A. Gazali Usman (1994:22) menyebutkan Jalil yang lahir di Kampung Palimbangan Amuntai, Hulu Sungai Utara sekitar tahun 1840 sejak kecil dikenal sebagai orang yang pemberani dan pendekar dalam ilmu silat. Pada usia yang masih muda Jalil di mendapat gelar Adipati Anom Dinding Raja kemudian mendapat juga gelar Tumenggung Macan Negara. Hal ini membuktikan, bahwa selain Jalil dikenal pemberani juga dapat dipercaya karena loyalitasnya dan sebagai pemuda panutan, pemuda yang mampu memberi nilai-nilai positif di masyarakat.

Pada era awal kebangkitan nasional, terbentuk gerakan nasionalis yang dilakukan golongan muda terpelajar (pelajar SR dan HIS). Golongan muda ini mendirikan organisasi Seri Budiman, Budi Sempurna dan Indra Buana antara tahun 1901 sampai tahun 1907. Kemudian pada tahun 1920 didirikan

⁹ Adam Parawansa Shahbubakar, "Gerakan Mahasiswa dan Pemuda Kontemporer di Kalimantan Selatan", *tulisan lepas* koleksi PSP sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat.

Perkumpulan Serikat Harta. Tujuannya, mengumpulkan modal untuk dasar modal bagi Bank Koperasi.

Berikutnya, pada tahun 1923 didirikan organisasi Srie yang berbentuk *study club*. Pendirinya dr. Rusma, Gusti Citra, Kumala Ajaib, Amir Hasan Bondan, Mas Abi dan Abdullah. Kegiatannya mendirikan Taman bacaan (*Het Leesgeselschap*) serta penerbitan majalah mingguan bernama *Malam Djum'at*. Majalah ini dipimpin Amir Hasan Bondan dan Saleh Balala. Sekolah MULO baru didirikan pada tahun 1927. Selanjutnya, terdapat organisasi yang lahir pasca tahun 1928, yaitu Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) pada tahun 1929 di Marabahan. PPM yang diketuai M. Ruslan membentuk *Borneo Padvindere Organisatie* dan *Particuliere Hollandsch Inlandsche School* atau HIS Partikulier (kemudian bermetamorfosa menjadi Perguruan Taman Siswa). Kemudian lahir Persatuan Putera Borneo Banjarmasin (PPB) cabang Surabaya tahun 1929. Sementara di Barabai terdapat Persatuan Putera Barabai. Munculnya pergerakan-pergerakan ini karena efek Kongres Pemuda Indonesia II tahun 1928.

Pada tahun 1930 Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) menjadi Sarekat Kalimantan, selanjutnya tahun 1931 berubah lagi menjadi Barisan Indonesia (Bindo). Muncul juga pada masa ini Borneo Pandu Bond, yang kemudian diganti menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia/ KBI (sekarang Pramuka). Selain itu, dalam gerakan Muhammadiyah terdapat juga kelompok kepanduan bernama *Hizbul-wathan* (Cinta Tanah Air).

Dalam perkembangannya pada zaman Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945, pemerintahan pendudukan Jepang membentuk bermacam-macam organisasi Pemuda dan Wanita, diantaranya Seinendan, Konan Hokoku Dan, dan Fujinkai. Memasuki masa dan pasca kemerdekaan tahun 1945 sampai 1960-an, gerakan kepemudaan mulai “menggeliat” menyikapi proklamasi kemerdekaan, usai Agresi Militer Belanda I dan II.

Demikian halnya pada masa Revolusi Fisik usai kemerdekaan tahun 1945, muncul gerakan-gerakan pemuda yang tergabung di dalam organisasi politik dan kelaskaran yang pelopor,

pengurus dan keanggotaannya rata-rata berusia muda. Organisasi-organisasi kepemudaan pun yang lahir dalam kurun waktu 1945-1949 di Kalimantan Selatan, umumnya berciri khas militer. Berdasarkan pengorganisasian perlawanan bersenjata di daerah ini sejak munculnya organisasi-organisasi pemberontak tahun 1945 sampai dengan pemerintah militer Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan tahun 1949 membawa misi membendung masuknya NICA atau *Nederlands Indies Civil Administration*.

NICA diboncengi pasukan Belanda yang ingin kembali bercokol di wilayah Indonesia. NICA membawa misi tugas yakni menerima penyerahan satuan-satuan Jepang dan pengembalian ke negerinya. Kemudian mengamankan dan membebaskan kaum interniran dan tawanan perang serta mempertahankan keamanan di daerah-daerah kekuasaan Sekutu untuk di serahkan kepada pemerintah sebelumnya. Pada kurun waktu ini pemuda pun angkat senjata. Satu diantara tokoh pemuda yang cukup menonjol adalah Brigjend (Purn.) Hassan Basry yang lahir di Kandangan, Hulu Sungai Selatan, 17 Juni 1923. Ia baru berusia 23 tahun ketika membentuk Lasykar Syaifullah, atau 26 tahun ketika mengikrarkan Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, 17 Mei 1949.

Setelah pengakuan kedaulatan tahun 1949-1950, sekian lama berkembang, baru pada tahun 1966 muncul gerakan terang terangan yakni penentangan PKI oleh gerakan pemuda yang dimotori Mahasiswa dengan meletusnya demonstrasi berdarah 9 September 1967 di Banjarmasin. Gerakan ini ditandai tewasnya mahasiswa Fakultas Ekonomi, Universitas Lambung Mangkurat (Unlam) Banjarmasin, Hasanuddin HM.

Gerakan mahasiswa dan pemuda di Kalimantan Selatan era tahun 1970-an mengikuti dinamika gerakan mahasiswa dan pemuda di Jawa. Demikian halnya gerakan mahasiswa dan pemuda di Kalimantan Selatan tahun 1980-an juga tetap berkiblat pada gerakan di tanah Jawa. Lahirlah berbagai organisasi remaja atau pemuda masjid, seperti Angkatan Muda Sabila Muhtadin, Ramaja Masjid Al-Jihad, Remaja Masjid Jami (Sei

Jingah), Angkatan Muda Baitul Hikmah Unlam (1987), hingga LPKDP (Lembaga Pendidikan Kader Dakwah Praktis) di Simpang Belitung. Identitas gerakan lebih menonjol pada upaya menangkal sekulerisme di kalangan remaja dan pemuda. Kemudian gerakan meluas pada isu-isu sekulerisme, seperti demo anti mejeng, demo SDSB, demo ketimpangan sosial dan sebagainya.

Selain itu, perkembangan kepemudaan di Kalimantan Selatan juga tidak terlepas dari perjalanan sejarah dan eksistensi Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). Diawali Deklarasi Pemuda Indonesia, 23 Juli 1973, yang merupakan landasan kelahiran Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI). KNPI yang kemudian berkembang di Kalimantan Selatan, muncul dari sebuah kesadaran akan tanggung jawab pemuda dalam mengerahkan segenap upaya dan kemampuan menumbuhkan, meningkatkan, dan mengembangkan kesadaran sebagai suatu bangsa merdeka dan berdaulat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945). Deklarasi Pemuda bertujuan menindaklanjuti isi “pesan suci” Sumpah Pemuda 1928. KNPI secara kelembagaan muncul sebagai forum komunikasi pemuda, wadah kaderisasi dan partisipasi pemuda Indonesia, dibakukan dalam Kongres I KNPI tahun 1974.

Pada tahun 1980-an sampai 1990-an awal, gerakan mahasiswa dan kepemudaan di Kalimantan Selatan lebih condong pada gerakan moral dan pemikiran. Sementara pada era 1990-an, mulai diwarnai munculnya Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) seperti LK3, Yayasan Pro Insan-Lewim, Yadah, LPMA, OTB. Kemudian perkumpulan Mahasiswa Pencinta Alam (Mapala) di fakultas-fakultas pada lingkungan Universitas Lambung Mangkurat. Pada masa ini, Kompas Borneo Unlam mulai terbentuk dan beraktivitas, yang selanjutnya menyatu ke dalam Wahana Lingkungan Hidup (Walhi). Gerakan Mahasiswa dan Pemuda pun mulai bergeser pada isu-isu lingkungan dan kebijakan pemerintah lokal. Pada era ini gerakan Bank Syari’ah juga mulai terbangun dengan berdirinya BMT-BMT yang

dikelola kelompok anak muda. Kajian-kajian melalui Masika ICMI juga “menggaung”.

Dalam konteks kehidupan organisasi di masyarakat mendorong ditetapkannya Undang-undang No.8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan. Hal ini berimplikasi pada eksistensi dan posisi KNPI termasuk organisasi kepemudaan dan kemahasiswaan. Karena itulah, pada tahun 1987 tercetus Permufakatan Pemuda Indonesia. Permufakatan Pemuda Indonesia semakin meneguhkan tekad para Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) berhimpun dalam wadah KNPI sebagai forum komunikasi, kaderisasi, partisipasi, dan dinamisasi Pemuda Indonesia dalam menjawab tantangan pembangunan masa depan bangsa.

Berbeda dengan era tahun 2000-an, dimana terdapat variasi dan pergeseran gerakan mahasiswa dan pemuda di Kalimantan Selatan. Kuantitasnya mulai membengkak di tengah paham mahasiswa yang apatis terhadap pergerakan. Mulai tumbuh LSM-LSM baru beriringan genderang reformasi seperti Kompak, Garu Sikat, CSPS, KAPPERA, dan sebagainya. Bahkan sampai di kabupaten-kabupaten di area Kalimantan Selatan juga berdiri LSM-LSM yang digerakkan mahasiswa dan pemuda. Memang cukup membanggakan fenomena berhimpunnya mahasiswa dan pemuda dalam organisasi pergerakan. Namun, pada sisi lain perlu introspeksi, kemana arah gerakan tersebut, nilai-nilai substansial atau ideologi apa yang dibawa, kemana daerah ini dibawa, dan sebagainya. Apalagi mulai muncul tudingan dari beberapa oknum pada gerakan pemuda dan mahasiswa yakni “mahasiswa dan pemuda sudah terperosok pada ideologi materialistik!”.

Berdasarkan latar belakang tersebut, tim peneliti termotivasi melakukan riset sejarah guna mencari jawaban mengenai bagaimana dinamika pergerakan pemuda di Kalimantan Selatan sejak masa Hindia Belanda tahun 1900, hingga munculnya era

reformasi tahun 1998.¹⁰ Kemudian bagaimana peranan pemuda di Kalimantan Selatan sejak masa penjajahan hingga masa kemerdekaan dalam menggapai visi integrasi bangsa.

Untuk mencari jawabannya, tentu tidak sekadar “bertanya pada rumput yang bergoyang”. Diperlukan riset ilmiah menggunakan metode penelitian sejarah dengan dasar teori nasionalisme. Teori nasionalisme digunakan mengkaji sebab akibat (kausalitas) adanya penjajahan Belanda yang mengeksploitasi dalam bidang sosial budaya, ekonomi, dan politik. Bagaimana hubungan sebab akibatnya sehingga berdampak pada timbulnya rasa membangkitkan persatuan nasional. Hal ini yang dilakukan pemuda di Kalimantan Selatan untuk berkontribusi membentuk suatu negara merdeka, lepas dari penjajahan kolonial Belanda.

Di samping itu, ciri khas pemuda itu sendiri yang memiliki karakter idealisme, anti kemapanan, kreatif-dinamis, terbuka terhadap nilai dan gagasan baru, spontanitas, keberanian, dan karakter lainnya, sehingga mereka senantiasa bergerak menghendaki perubahan guna meraih cita-cita yang mereka perjuangkan. Bagaimana paparan lengkap mengenai dinamika dan pasang surut gerakan kepemudaan di Kalimantan Selatan? Jawabannya tentu tidak mungkin hanya dengan satu kalimat. Lebih lengkapnya ada di dalam pembahasan buku ini.

¹⁰ Rentang waktu dari tahun 1900 s.d. 1998 terjadi perubahan politik pemerintahan, sehingga yang dimaksud Kalimantan Selatan di sini bisa berarti *Borneo Zuid-Oostkust*, *Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo*, *Keresidenan dalam Gewest Borneo* yakni *Residentie Zuider en Oosterafdeling van Borneo Gewest Borneo*, Minami Borneo, atau *Residentie van Zuid-Borneo*, dan terakhir *Kalimantan Selatan*. Untuk selanjutnya ditulis dengan nama Kalimantan Selatan.

Bab 1

Pemuda, Pendidikan, dan Kesadaran Nasional

A. Pemuda Intelektual dan Kesadaran Nasional

PANGGUNG sejarah Indonesia pada dekade pertama abad ke-20 diwarnai dengan pertumbuhan dan perkembangan nasionalisme Indonesia. Tidak terkecuali di Kalimantan Selatan yang kala itu merupakan bagian dari Hindia Belanda.

Nasionalisme pada dasarnya adalah upaya pencarian jati diri suatu bangsa. Ketika Belanda berhasil melakukan politik pembulatan wilayah (*afroondings-politiek*) yang menurut Benedict Anderson¹¹ memunculkan “komunitas politik yang dibayangkan” (*an imagined political community*) maka yang terjadi selanjutnya adalah proses pencarian identitas dan integrasi nasional.

Di Kalimantan Selatan, para nasionalis menunjukkan ikatan solidaritas ke-Indonesia-an mereka dengan berbagai cara. Mereka memandang pulau Jawa sebagai sentral pergerakan kebangsaan, tanpa mempersoalkan dialektika atau pergumulan antara Nasionalis Jawa dan Nasionalis Hindia.¹² Dari pulau Jawa berbagai paham dan organisasi pergerakan rakyat tersebar

¹¹ Lihat Benedict Anderson, *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*, (Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama INSIST Press dan Pustaka Pelajar, 2008), hlm. xxi, 66-67, 175-178.

¹² Pergumulan antara Nasionalis Jawa dan Nasionalis Hindia berkaitan dengan upaya melihat masa lampau (sejarah) sebagai perekat identitas ke-Indonesia-an, lihat Anthony Reid, “Jejak Nasionalis Indonesia Mencari Masa Lampainya”, dalam Anthony Reid dan David Marr (Editor), *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*, (Jakarta: Grafitipers, 1983), hlm. 53-74.

di Kalimantan Selatan, baik dengan cara dibawa langsung oleh kalangan pedagang, cendekiawan, maupun tokoh pergerakan dari Jawa.

Bab ini menarasikan perjuangan para nasionalis di Kalimantan Selatan menunjukkan ikatan solidaritas dengan cara mengajarkan sejarah Indonesia dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah kerajaan dan perlawanan terhadap kolonial di sekolah-sekolah kebangsaan baik yang bercorak sekuler (seperti Sekolah Parindra dan Taman Siswa) maupun keagamaan, mempertunjukkan potret-potret pemimpin pergerakan, atau menyelenggarakan peringatan Hari Kartini sebagaimana dipertunjukkan oleh Parindra.

Para aktivis pergerakan dengan sikap egaliternya, telah menerima tokoh-tokoh pergerakan yang mereka pandang sebagai tokoh nasionalis Indonesia, seperti dari Jawa, Sumatera, Maluku, Flores untuk melakukan pertemuan dan rapat-rapat umum, menjadi guru-guru sekolah kebangsaan dan perguruan Islam di Kalimantan Selatan. Sebaliknya, banyak orang-orang asal Kalimantan Selatan yang karena profesinya sebagai pedagang antar pulau (*interensuler*), mereka turut menyebarkan benih-benih kebangsaan.

Begitupula halnya, ketika aktivis pergerakan kebangsaan yang sebelumnya beraktivitas di Jawa, atau dibuang atau dipenjarakan di luar Kalimantan Selatan, merupakan suatu bentuk yang memperkuat ikatan solidaritas ke-Indonesiaan. Karena mereka dapat saling berinteraksi dengan masyarakat setempat sehingga menimbulkan perasaan senasib dan tujuan yang sama untuk meraih kemerdekaan.

Ikatan solidaritas juga dipertunjukkan melalui persebaran media massa lokal maupun dari Jawa dan Sumatera di Kalimantan Selatan. Keberadaannya sebagai medium perjuangan telah mendorong perkembangan kebudayaan dan kemajuan peradaban masyarakat, mendapatkan informasi dan ide-ide ten-

tang kemerdekaan, liberalisme, parlementarisme, perkembangan politik kebangsaan, menyuarakan pentingnya persatuan, memberitakan tentang diskriminasi, eksploitasi, dan ketimpangan antara kehidupan masyarakat di Jawa dengan Kalimantan, dan sebagainya yang merupakan bagian dari pergerakan nasional di daerah ini.

Pertumbuhan pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan tidak terlepas dari pengaruh berbagai faktor seperti faktor ekonomi, sosial, politik, budaya, dan bahkan agama. Faktor utama berasal dari situasi dan kondisi masyarakat Indonesia sendiri sebagai dampak dari penjajahan.¹³ Faktor dari dalam itu dipercepat dengan dengan berbagai faktor-faktor dari luar negeri, seperti paham liberalisme, pendidikan Barat, dan Pan Islamisme.

Pemuda dan mahasiswa merupakan aktor utama dalam pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Robert Van Niel¹⁴ menyatakan bahwa bangkitnya kesadaran kebangsaan itu dipelopori para elite atau cendekiawan. Sjarifuddin berpendapat bahwa pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan umumnya berasal dari golongan menengah masyarakat pribumi, seperti elite agama, cendekiawan, dan pedagang.¹⁵

Pada dekade pertama abad ke-20, hanya segelintir pemuda pribumi Kalimantan Selatan yang mengecap pendidikan tinggi, namun peran mereka sangat signifikan. Diantara yang sedikit itu dapat disebut nama-nama seperti Amir Hasan Bondan, Citra Kumala Ajaib, Merah Djohansjah, M. Joesran dan M. Djahri. Mereka adalah lapisan pertama mahasiswa yang dikirim untuk belajar ke Jawa atau Sulawesi.

¹³ Departemen Sosial, *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Ex Digul* (Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial, 1977), hlm. 22.

¹⁴ Lihat Robert Van Niel, *Munculnya Elite Modern Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Jaya, 1984), khususnya pada bab II Akselerasi Perubahan, 1900-1914.

¹⁵ Sjarifuddin, "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1974), hlm. 33.

Amir Hasan Bondan karena memiliki hak yang dipersamakan (*gelijkgesteld*) merupakan putera Banjar pertama yang memasuki sekolah *Europese Lagere School* (ELS)¹⁶ tahun 1893, kemudian melanjutkan ke STOVIA namun tidak tamat. Kelak Amir Hasan Bondan adalah salah seorang tokoh pendiri organisasi Seri Budiman (1901), Budi Sempurna, dan Srie, serta pengasuh Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) dan majalah majalah mingguan *Malam Djoe-ma'at*.

Selama belajar di OSVIA Makassar, Merah Djohansjah bersama M. Joesran dan M. Djahri juga mendirikan organisasi “Pemuda OSVIA Kalimantan” tahun 1925-1926.¹⁷ Pemakaian nama “Kalimantan” ketimbang Borneo, menandakan bahwa mereka telah menjadikan Kalimantan sebagai lambang kepribudhayan dan kebebasan dari penjajahan dibanding Borneo yang lebih berkonotasi kolonialis dan asing.¹⁸

Lulusan OSVIA Makassar lainnya diantaranya adalah Syarkawi bin Achmad Dahlan lahir di Amuntai 15 Desember 1907, Basuni bin H. Mohammad Arsyad lahir di Barabai 31 Agustus 1904, Achmad Ruslan lahir di Banjarmasin 31 Januari 1902. Ketiganya pernah menjabat sebagai Kiai Kepala. Lulusan OSVIA Makassar lainnya diantaranya adalah Syarkawi bin Achmad Dahlan lahir di Amuntai 15 Desember 1907, Basuni bin H. Mohammad Arsyad lahir di Barabai 31 Agustus 1904, Achmad Ruslan lahir di Banjarmasin 31 Januari 1902. Ketiganya pernah menjabat sebagai Kiai Kepala.¹⁹

¹⁶ Sekolah dasar 6 tahun berbahasa pengantar Belanda untuk orang Belanda, orang peranakan atau pribumi yang haknya dipersamakan (*gelijkgesteld*).

¹⁷ Anggraini Antemas, *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan Selatan*, (Amuntai: Mega Sapura, 1988), hlm. 26.

¹⁸ Wajidi, “Nasionalisme dan Revolusi Indonesia di Kalimantan Selatan 1900-1950”, Tesis Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2017, hlm. 22.

¹⁹ *Ibid*, hlm. 84.



Gambar 1.1. Merah Djohansjah.
(Sumber: dok. Joerliani Djohansjah).

Meski disadari bahwa ketika mereka kembali ke daerahnya masing-masing dan menjadi aparat birokrasi ada yang memang menjadi alat kekuasaan kolonial. Namun ada pula yang meski bersatus sebagai pamong praja bumiputera, pada dirinya tumbuh kesadaran dan menjadi pelopor pergerakan di daerah ini, misalnya Merah Djohansjah putra Kiai Merah Nadalsjah, Kiai Kepala²⁰ di Kandangan, yang kelak membawa PBI dan Parindra ke Kalimantan Selatan.

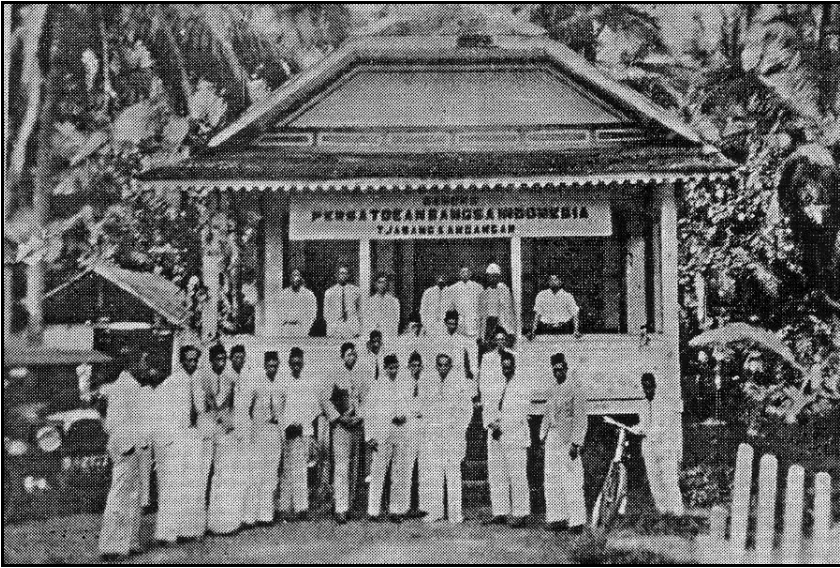
Sejak dari sekolah, Merah Djohansjah sudah mulai melibatkan diri ke dalam organisasi perjuangan dan menunjukkan jiwa kerakyatan serta keberpihakannya pada kepentingan rakyat banyak. Pada waktu masih belajar di OSVIA, karena aktivitasnya Merah Djohansjah pernah terpilih menjadi "penulis" dalam organisasi pemuda Jong Soematera yang diketuai

²⁰ Kiai Kepala (*hoofdkiai*) adalah jabatan tertinggi pada pemerintah Kolonial Belanda yang boleh dijabat oleh seorang pribumi. Disebut Kiai Kepala karena kiai ini membawahi sejumlah kiai. Diatasnya ada pejabat Belanda yaitu *Controleur*.

oleh Moh. Hatta, kelak wakil presiden RI yang pertama.

Sebelum belajar di OSVIA Makassar, Merah Djohansjah bersama 3 orang kawan lainnya, bersekolah di MOSVIA Serang, Banten. Terdorong gejolak hati muda yang dilandasi cinta tanah air, Djohansjah berhubungan secara diam-diam dengan *Gerakan Indonesia Muda* atau kelompok lainnya yang punya kegiatan sama menentang penjajahan seperti kelompok Bung Karno. Akhirnya hubungan itu tercium juga oleh pemerintah Hindia Belanda, dan dianggap sangat membahayakan kedudukan mereka. Karena hal itu, tiga sekawan yang bersekolah di Serang tersebut dipindahkan ke Makassar.

Seperti pada kasus Merah Djohansjah, kesadaran itu muncul sebagai dampak terbukanya akses pendidikan sehingga membuka peluang kepada pemuda, pelajar dan mahasiswa lebih mengenal dunia luar dan salah satunya adalah menyerap semangat kebangsaan. Adanya pendidikan, pengalaman, pengetahuan, dan hubungan dengan dunia luar, menjadikan mereka mempunyai kemampuan “menangkap” adanya kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap kalangan pribumi dan memformulasikan cara menghadapinya melalui organisasi pergerakan, pendidikan, atau melalui berbagai mosi, maklumat, tulisan dan menyampaikan segala keberatan-keberatan dan permohonan rakyat kepada pemerintah Hindia Belanda.



Gambar 1.2. Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) cabang Kandangan. (Sumber: repro. Wajidi, 2007).

Mereka itu dapat dikatakan sebagai elite baru atau elite modern yang lahir melalui jalur pendidikan formal maupun non formal yang diselenggarakan oleh pemerintah (sekolah negeri), swasta (sekolah partikelir), maupun sekolah yang berbasis keagamaan. Dunia pendidikan sebagai wahana pembebasan telah menjadikan para pemuda pelajar terbebas dari isolasi keterbelakangan pengetahuan. Para pemuda dari kalangan cendekiawan tumbuh sebagai akibat penerimaan penetrasi Barat secara terbuka dan aktif, baik dengan memasuki sekolah-sekolah pemerintah, atau yang dihasilkan oleh sekolah-sekolah kaum pergerakan, yang bersifat sekuler maupun keagamaan.

Perjuangan kalangan cendekiawan lokal diperkuat pula dengan kedatangan kaum muda terpelajar dari Jawa, Sumatera dan bahkan dari Maluku dan Nusa Tenggara yang membawa unsur pergerakan kebangsaan ke daerah ini, seperti seperti: Maraja Sayuthi Lubis, A.M. Sangaji, Maisyir Thaib, Bey Arifin, Khatib Syarbaini, dr. Sumarno, dr. Susilo (adik dr. Sutomo), dr. Suranto, dr. Sosodoro Jatikusomo, Mr. Rusbandi, Johanes Baker,

Aidan Sinaga, dr. D.S. Diapari, Marjono, Sunaryo, dan sebagainya.²¹

Keberpihakan para pemuda dari kalangan elite sekuler yang berada di luar birokrasi Pemerintah Hindia Belanda terhadap perjuangan mengangkat derajat kaum pribumi menjadikan mereka mempunyai dukungan massa yang besar dan kuat. Baik dari kalangan pedagang, petani, nelayan, tukang dan kerajinan, serta buruh kecil. Bahkan mereka adakalanya juga mendapat dukungan dari keluarga yang orang tuanya bekerja sebagai pegawai pemerintah.

Hal itu berbeda sekali dengan kelompok bumiputera yang berprofesi pegawai pemerintah Hindia Belanda. Mereka mempunyai latar belakang pendidikan, wawasan, atau mungkin juga pengalaman, akan tetapi peranan pegawai pemerintah tidak begitu besar dalam pergerakan kebangsaan, karena mereka mempunyai keterikatan terhadap “status pekerjaan” yang diikat melalui *Muilkorf-Circulaire* (Sirkuler-Pemberangusan) bertanggal 27 September 1919. Sirkuler berupa Surat Edaran Gubernur Jenderal Hindia Belanda berisi larangan bagi pegawai pemerintah untuk mengeluarkan pikiran secara lisan maupun tulisan yang dapat merongrong kekuasaan pemerintah. Hal ini dimaksudkan untuk mengurangi kegiatan para pegawai pemerintah dalam pergerakan nasional dengan pelbagai sanksi antara lain dipindah ke tempat lain, diturunkan pangkatnya atau bahkan dipecat.

Sirkuler tersebut menuntut loyalitas pada pimpinan, dan karena adanya pengaruh dari fasilitas yang telah mereka terima dari pemerintah kolonial, maka mereka juga turut berperan dalam menindas kaum pergerakan dan adakalanya lebih keras tindakannya dibanding Belanda *totok*. Akan tetapi, ada sege-lintir pemuda yang meski berstatus pegawai pemerintah, ia

²¹ *Ibid*, hlm. 88.

kerap kali menentang perintah atasan dan mendukung pergerakan sebagaimana diperlihatkan oleh Merah Djohansjah.

Para pemuda dari kalangan elite agama, dan para pemuda dari kalangan pedagang juga mempunyai peranan penting sebagai pelopor pergerakan di daerah ini. Para elite agama seperti para *tuan guru*, guru-guru agama, para haji, dan pemuda dari kalangan elite agama berpikiran progresif yang dihasilkan pengajian, pesantren atau madrasah. Pada umumnya elite agama dari kalangan para *tuan guru* di Kalimantan Selatan mempunyai lembaga pendidikan tradisional yang dikenal sebagai “pengajian” yakni sistem pengajaran untuk menyebarkan ajaran-ajaran Islam, pada mulanya dilangsungkan di tempat tinggal *tuan guru*, tetapi kemudian banyak yang berlangsung di langgar-langgar atau masjid. Lembaga pengajian dan pesantren, banyak menghasilkan elite agama berjiwa santri yang di kemudian hari banyak berkecimpung dalam organisasi pergerakan.

Selain cendekiawan dan elite agama, para pedagang sangat berperan dalam pergerakan. Mereka adalah pedagang yang sebagian berusia muda yang melakukan perdagangan ekspor dan impor, pedagang antar pulau (*interensuler*), dan pedagang antar kota di Kalimantan Selatan. Merekalah yang karena pekerjaannya memperoleh banyak pengalaman, pengetahuan dan hubungan dengan dunia luar dan melihat kemajuan pergerakan di daerah lain, sehingga ketika kembali ke kampung halaman turut menjadi pelopor atau penggerak organisasi pergerakan di daerah ini.²²

²² Sjarifuddin, *Loc.cit.*, hlm. 33-34 dan Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*, Banjarmasin, 1990, hlm. 36.



Gambar 1.3. Para Pengurus Sarekat Islam Cabang Banjarmasin pada tahun 1920. Duduk di kursi Maraja Sayuthi Lubis.
(Sumber: repro. Wajidi, 2007).

Di samping tokoh muda, dari kalangan pedagang sangat menonjol tokoh berusia tua. Diantara pelopor pergerakan yang berprofesi pedagang antar pulau, diantaranya adalah H.M. Arip atau H. Matarip (H. Muhammad Arip Bakumpai) yang berdagang pulang pergi Banjarmasin-Surabaya. Ia adalah pembawa organisasi Sarekat Islam ke Kalimantan Selatan. Ketika berada di Surabaya, H.M. Arip turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya. Ketika kembali ke Banjarmasin, H.M. Arip bersama rekan-rekannya seperti Sosrokardono, mereka mendirikan SI di Kota Banjarmasin serta beberapa kota lain di Kalimantan Selatan.

Berdirinya organisasi Muhammadiyah di Alabio juga dipelopori seorang pedagang bernama H. Usman Amin yang ketika berada di Surabaya dan Yogyakarta sangat terkesan dengan perkembangan Muhammadiyah. Ketika pulang ke Alabio, H. Usman Amin mengusulkan kepada H. Japeri, seorang

tokoh ulama yang berpandangan maju dan berpengaruh di Alabio untuk mendirikan Muhammadiyah, sehingga beberapa waktu kemudian Muhammadiyah berdiri di Alabio yang kemudian disusul oleh daerah-daerah lainnya di Kalimantan Selatan.²³

Berkat peran para pedagang, informasi kegiatan tokoh-tokoh organisasi pergerakan menjadi tersebar, dan juga organisasi yang sebelumnya hanya ada di Banjarmasin, berkembang dengan cepat ke daerah lainnya. Mereka adalah pedagang yang karena tuntutan profesinya, sudah tentu acapkali milir mudik pulang pergi Banjar-Hulu Sungai. Sekurang-kurangnya dilakukan sekali dalam sebulan.

Bagi para aktivis pergerakan, sudah barang tentu keterlibatan mereka mempunyai motivasi atau latar belakang yang beragam. Boleh jadi, keterlibatan mereka dalam pergerakan didorong oleh adanya kesadaran tentang beratnya kehidupan rakyat yang terjajah, adanya diskriminasi, dan rendahnya emansipasi masyarakat pribumi di bidang politik, ekonomi, sosial budaya maupun hukum. Kesadaran itu bisa pula muncul dari berbagai pengalaman, seperti pendidikan, pergaulan dengan kalangan terdidik, dan informasi tentang pergerakan kebangsaan yang timbul di berbagai pelosok tanah air yang menuntut emansipasi di berbagai hal melalui organisasi atau kepartaian.

B. Partisipasi Pemuda Dalam Sekolah Pergerakan

Pendidikan merupakan penggerak utama pergerakan kebangsaan. Di sini terlihat peran anak-anak muda sebagai pelajar, dan alumninya berpikiran maju yang kelak menjadi aktivis pergerakan. Pada dasarnya warga terpelajar itu dihasilkan oleh dua bentuk pendidikan yang masing-masing penyelenggaranya berbeda, yakni: (1) Sekolah Pemerintah, yakni sekolah yang

²³ Wajidi, *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1900-1942*, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007), hlm. 95.

diselenggarakan oleh Pemerintah Hindia Belanda; (2) Sekolah Kaum Pergerakan, yakni Sekolah Partikelir²⁴ maupun Sekolah Agama yang umumnya diselenggarakan oleh kaum pergerakan.²⁵

Sekolah Agama dapat dikatakan sebagai bagian Sekolah Kaum Pergerakan, karena selain mengajarkan agama Islam, juga menanamkan kesadaran berbangsa kepada anak didiknya, dan terbukti penyelenggara pendidikan ini yakni *tuan guru* maupun alumninya banyak menjadi pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

Selain itu ada pula sekolah yang didirikan oleh *missie-zending* Kristen, dengan daerah operasinya di pedalaman Kalimantan. Sekolah ini bukan sekolah negeri, tetapi digunakan sebagai alat oleh Pemerintah Hindia Belanda agar rakyat di daerah ini menjadi patuh dan penurut terhadap pemerintah, di samping misi sekolah itu sendiri sebagai alat kristenisasi. Oleh karena itu, sekolah ini diberi subsidi dan kebebasan bergerak oleh Pemerintah Hindia Belanda.²⁶

Pemberian pendidikan kepada kalangan bumiputera berkaitan erat dengan politik balas budi (Politik Etis) dengan slogan, “Irigasi, Edukasi dan Emigrasi.”²⁷ Pemerintah Hindia Belanda membuka sekolah untuk mencetak pegawai-pegawai rendahan untuk memenuhi keperluan pemerintahan maupun kaum pengusaha partikelir. Di samping untuk menangkalkan kekuatiran terhadap perkembangan Islam yang oleh van der Prijs – untuk membentengi Belanda dari “volcano Islam”.²⁸

Meski pemerintah menyelenggarakan pendidikan dari sekolah tingkat rendah sampai yang tinggi, akan tetapi bagi

²⁴ Sekolah partikelir adalah sekolah swasta yang sebagian besar materi pelajarannya adalah materi pelajaran umum.

²⁵ Sjarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 280-285.

²⁶ *Ibid.*, hlm. 282.

²⁷ Darsiti Soeratman, *Ki Hajar Dewantara* (Jakarta: Depdikbud, 1985), hlm. 21.

²⁸ Marwati Djoened Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V (Jakarta: Balai Pustaka, 1975), hlm 122.

rakyat biasa sangat dibatasi untuk memasuki sekolah itu. Yang diberi kesempatan menuntut pelajaran secara luas di sekolah-sekolah pemerintah, ialah: anak pegawai negeri, orang kaya, keluarga bangsawan, orang asing utamanya Cina, sedang rakyat biasa hanya diizinkan setelah melalui *School Commissie* yang keanggotaannya terdiri dari Kontrolir, Kiai, dan *School-Opziener*.²⁹ Memang ada di antara orang bumiputera yang karena status orang tuanya diberi kesempatan untuk memasuki sekolah yang khusus diperuntukkan bagi orang kulit putih seperti ELS, akan tetapi di sana pun mereka masih dibedakan dengan orang-orang peranakan (Indo) dan Eropa.³⁰

Pengaruh pendidikan pada sekolah pemerintah dapat dilihat dari dua hal, yakni: (1) Adanya diskriminasi dalam sekolah pemerintah, misalnya untuk orang Eropa disediakan ELS (*Europees Lagere School*), untuk orang Cina HCS (*Hollands Chinese School*), dan untuk bumiputera HIS (*Hollands Inlandse School*). Diskriminasi itu sudah barang tentu telah menimbulkan sikap kebencian terhadap Pemerintah Hindia Belanda; (2) Munculnya elite cendekiawan sebagai hasil dari pendidikan secara Barat di sekolah pemerintah. Banyak di antara elite cendekiawan itu yang menjadi pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan.

Adanya diskriminasi di bidang pendidikan merupakan salah satu pendorong munculnya sekolah swasta. Meski diakui bahwa sistem pendidikan berbasis tradisi yang bernafaskan keagamaan seperti pengajian dan pesantren sudah lama hadir di tengah masyarakat, jauh sebelum kehadiran sekolah yang dikelola pemerintah.

Sejak tahun-tahun pertama abad ke-20, di Kalimantan Selatan telah berdiri berbagai usaha pendidikan. Ada yang di-

²⁹ Sjarifuddin, *Loc.cit.*

³⁰ Savitri Prastiti Scherer, *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priyayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX* (Jakarta: Sinar Harapan, 1985), hlm.115-116.

dirikan oleh partai politik, organisasi masyarakat, dan juga oleh persatuan umat Islam. Usaha pendidikan ini lahir, karena sekolah-sekolah yang tersedia tidak dapat menampung hasrat masyarakat, terutama masyarakat kebangsaan (nasional) dan keagamaan (Islam) dan agama lainnya.

Sekolah kaum pergerakan adalah sekolah yang dilihat dari segi motivasinya didirikan dengan motivasi nasionalisme yakni selain bertujuan anak didik memiliki rasa kebebasan dan tanggung jawab, juga agar menjadi putera tanah air yang setia dan bersemangat, dan dengan patriotisme memiliki rasa pengabdian tinggi bagi nusa dan bangsa.³¹ Sekolah ini pada umumnya adalah sekolah swasta yang nasionalistis dan anti kolonial, didirikan oleh perkumpulan dan tokoh pergerakan yang mengutamakan jalan pendidikan dalam pergerakan mereka dan sebagian tidak bersubsidi. Sebab itu banyak pula didirikan kursus bebas seperti kursus memberantas buta huruf, mengetik sampai dengan kursus politik. Sekolah dimaksud, di Kalimantan Selatan antara lain sekolah-sekolah Perguruan Taman Siswa dan sekolah Perguruan Rakyat Parindra.



Gambar 1.4. “Sekolah Rajat Parindra Aloe an Soemoer”.
(Sumber: koleksi Wajidi)

³¹ Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto, *Op.cit.*, hlm. 251.

Melalui pendidikan dan perpustakaan mereka mengenal huruf latin, memiliki kebiasaan membaca seperti buku, koran atau majalah, dan mengenal dunia lain di luar tanah Hindia, dan mengenal paham-paham kebebasan (*liberti*), kesetaraan (*egalite*), dan persaudaraan (*fraternite*) sebagaimana terdapat dalam *kredo* Revolusi Perancis. Karena adanya pendidikan, mereka mempunyai wawasan dan pola pikir yang lebih maju dibanding dengan kebanyakan masyarakat awam, sehingga lebih memiliki kesadaran akan rasa kebangsaan yang mereka tuangkan dalam berbagai bentuk, baik melalui tulisan berisi kritik sosial, mengajar, maupun sebagai pengurus organisasi pergerakan.

Di samping itu, ada pula sekolah swasta yang bercorak Islam yang didirikan oleh elite agama seperti Sekolah Islam Darussalam Martapura tahun 1914, *Arabische School* yang kemudian menjadi Ma'ahad Rasyidiyah Amuntai tahun 1930, dan Diniyah Islamiyah di Barabai tahun 1932.³² Begitupula dengan sekolah-sekolah kaum pergerakan seperti Madrasah Persatuan Perguruan Islam, Madrasah Sarekat Islam, Madrasah Musyawatutthalibin, dan Sekolah Muhammadiyah, umumnya disokong oleh para tuan guru, minimal oleh para guru agama Islam.

Kelahiran sekolah-sekolah Islam tidak terlepas dari pengaruh pendidikan Barat yang telah melahirkan elite baru yang semakin memudahkan peranan elite tradisional. Tetapi elite baru yang sekuler ini tidak semuanya diterima oleh masyarakat yang mempunyai fanatisme agama. Demikian pula dengan masuknya agama Kristen yang penyebarannya mendapat dukungan dari Pemerintah Hindia Belanda, telah menimbulkan reaksi para ulama tentang adanya bahaya kristenisasi sehingga mereka berupaya menyempurnakan metode syiar agama dan pendidikan Islam di masyarakat melalui resistensi,

³² Ramli Nawawi (ed.), *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan, 1992), hlm. 25.

adaptasi, dan identifikasi terhadap sekolah pemerintah dan missi-zending. Akan tetapi, menurut Arief Subhan, pendidikan Islam modern adalah juga autokritik terhadap praktik pendidikan Islam tradisional, khususnya yang berlangsung di pesantren.³³

Melalui sekolah-sekolah agama, para alim ulama yakni “tuan guru” sangat berperan dalam mengembangkan anak didik atau santrinya, bukan hanya dalam bentuk pendidikan agama namun juga dalam bentuk penanaman kesadaran berbangsa. Pada umumnya, tuan guru juga mempunyai massa yang fanatik di pedesaan.

Berbagai pemikiran, fatwa, konsep, atau doktrin yang berkaitan dengan nasionalisme (agama) seperti jihad, perang fii sabilillah, amar makruf nahi munkar, serta cinta tanah air sebagian dari iman (*hubbul wathon minal iman*) yang disampaikan *tuan guru* sangat berpengaruh di masyarakat. Seringkali para *tuan guru* tidak sekadar mengajar, melainkan juga “membakar” santrinya agar lebih mencintai tanah airnya.³⁴

Dahulu ada juga dikenal semacam kursus keterampilan yang bertujuan mendidik masyarakat mempunyai keterampilan sebagai usaha penopang ekonomi keluarganya kelak. Kursus keterampilan itu umumnya bersifat kerajinan tangan seperti kursus pertanian, menyulam, pertukangan, dan anyaman rotan. Kursus seperti itu merupakan bagian dari perjuangan untuk meningkatkan keterampilan dan mengangkat ekonomi rakyat.

Kepanduan merupakan salah satu bentuk pendidikan luar sekolah yang mempunyai peranan penting dalam menumbuhkan semangat kebangsaan di kalangan anak-anak muda, misalnya

³³ Arief Subhan, *Lembaga Pendidikan Islam di Indonesia Abad ke-20 Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 105.

³⁴ Wajidi, *Peranan Pendidikan Islam Dalam Pergerakan Kebangsaan di Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Naskah Fasilitasi Penulisan Sejarah Direktorat Sejarah Kemdikbud, 2017), hlm. 131

Borneo Padvinder Organisatie (Organisasi Kepanduan Borneo), Kepanduan Bangsa Indonesia, Hizbul Wathon (Kepanduan Muhammadiyah), Ansor (Kepanduan Nahdlatul Ulama) Nasrul Umum (Kepanduan Musyawaratut-thalibin), dan Surya Wirawan (Pemuda/ Kepanduan Parindra). Organisasi kepanduan yang tertua di Kalimantan Selatan adalah *Borneo Padvinder Organisatie* (BPO) seperti yang diselenggarakan oleh *Particuliere Hollands Inlandse School* (PHIS) atau HIS Swastapada tahun 1929 di Marabahan di bawah pengelolaan Sarekat Islam.

C. Andil Kaum Muda Dalam Organisasi Pergerakan

Tanah Jawa merupakan kiblat pergerakan kebangsaan Indonesia. Di pulau ini berdiri partai-partai politik dan bawahannya (*onderbouw*). Sejak awal pergerakan muncul organisasi Boedi Oetomo (20 Mei 1908) yang dipelopori oleh pemuda pelajar STOVIA.

Meskipun organisasi Boedi Oetomo berlingkup Jawa dan Madura, organisasi ini dapat dipandang sebagai pelopor karena organisasi yang tumbuh berikutnya adalah bentuk dari penyempurnaan dari apa yang telah dirintis Boedi Oetomo. Sekolah dokter ini telah menghimpun pelajar dari berbagai etnis yang menghasilkan pembauran dan pertemuan ide-ide, sehingga tidak mengherankan jika dari sekolah inilah muncul pemikiran rasional tentang perlu adanya perubahan tatanan bagi kaumnya.

Masuknya pengaruh pergerakan rakyat yang tumbuh di Jawa ke Kalimantan, khususnya Kalimantan Selatan tidak hanya bersifat fisik berupa masuk dan tumbuhnya cabang organisasi pergerakan yang ada di Jawa ke daerah ini, melainkan juga dalam bentuk gagasan atau keinginan yang timbul untuk memajukan daerah karena mendengar kemajuan-kemajuan yang telah dicapai di tanah Jawa. Lancarnya hubungan kapal laut antara Banjarmasin dengan kota-kota di pantai utara Pulau Jawa, berdampak kepada lancarnya hubungan komunikasi dan informasi

antara penduduk Kalimantan Selatan dengan Jawa. Termasuk dalam hal ini adalah masuknya informasi tentang aktivitas pergerakan di Jawa, sehingga timbul keinginan yang sama agar pergerakan rakyat juga tumbuh di Kalimantan Selatan.

Sampai tahun 1942 di Kalimantan Selatan terdapat banyak organisasi pergerakan yang mempunyai karakteristik yang beragam; dalam bentuk perkumpulan, partai, maupun sekolah pergerakan. Jika dilihat dari ruang lingkup atau daerah perjuangannya, ada organisasi yang bergerak dalam lingkup lokal, regional maupun lingkup nasional. Sementara jika dilihat dari tujuan yang akan dicapai dan dasar-dasar dari organisasi pergerakannya, maka dapat dikelompokkan ke dalam kelompok besar, yakni organisasi yang bergerak di bidang sosial, dan organisasi pergerakan yang bergerak di bidang politik.³⁵

Berbagai karakter, lingkup perjuangan, maupun tujuan organisasi yang ada di Kalimantan Selatan berkaitan erat dengan peraturan-peraturan yang mengatur kehidupan politik di Hindia Belanda. Semula pemerintah melarang perkumpulan dan rapat-rapat politik, namun kemudian mengeluarkan peraturan yang membolehkannya yakni dengan *Staatsblad* 1915 No. 215 R.R.111 dan *Staatsblad* 1919 No. 27 jo 561.³⁶ Dalam pelaksanaannya, Pemerintah Hindia Belanda melanggar peraturan yang dibuatnya, sebagaimana terlihat dari sikapnya yang sangat menekan dan menindas pergerakan di Indonesia.

Demikianlah, pada awal-awal pergerakan di Kalimantan Selatan pada umumnya organisasi yang ada lebih banyak bergerak di bidang sosial, kultural, berskala kedaerahan dan tradisional. Baru kemudian, secara lambat laun mengarah kepada politik dan hal ini bukan sekedar adanya aturan yang membolehkannya, melainkan juga didukung kecenderungan nasionalisme Indonesia yang semakin kuat.

³⁵ Lebih jauh tentang pengelompokan ini, lihat Pemda Tk.I Kalsel, *Op.cit.*, hlm.38.

³⁶ Wajidi, *Nasionalisme...(2007)*, *Op.cit.* hlm. 100.

Dari berbagai organisasi pergerakan yang pernah ada di Kalimantan Selatan, terdapat organisasi yang berskala besar, tersebar luas dan mempunyai basis pendukung di berbagai pelosok daerah. Sebaliknya, terdapat pula organisasi yang berskala kecil atau bahkan baru berdiri kemudian bubar, sehingga tidak begitu diketahui siapa pengurus dan aktivitasnya, sehingga hanya dapat disinggung secara selintas. Organisasi-organisasi itu, baik yang berskala besar maupun kecil, bergerak di bidang politik atau sosial, berlingkup lokal atau nasional, dapat diklasifikasikan menjadi dua bagian.

Pertama, organisasi yang sejak awal tumbuh atau berasal dari daerah Kalimantan Selatan sendiri sebagai hasil inisiatif atau murni swadaya para tokoh pergerakan, meski boleh jadi inspirasi pembentukannya berasal dari daerah lain. Organisasi itu antara lain Seri Budiman, Persatuan Pemuda Marabahan, Sarekat Kalimantan, Barisan Indonesia (BINDO), Partai Ekonomi Kalimantan (PEK), dan bahkan diantaranya berkembang sampai ke luar daerah sebagai organisasi yang berlingkup nasional, yakni Musyawaratutthalibin.

Kedua, organisasi yang berasal dari Pulau Jawa, yakni sebagai cabang dari induknya yang berpusat di Pulau Jawa sehingga berlingkup nasional seperti Sarekat Islam, Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, PNI, dan Parindra.

Satu gejala seperti yang nampak di Pulau Jawa dengan *jong-jongnya* maka di Kalimantan Selatan timbul pula perhimpunan-perhimpunan pemuda yang bersifat lokal yang seolah mempertunjukkan “Nasionalisme Kalimantan”, diantaranya Jong Islamiten Bond (JIB)³⁷ di Banjarmasin yang disponsori oleh Anwary Dilmy³⁸ dan Burhanuddin, *Persatuan Pemuda Marabahan*, *Persatuan Putera Barabai* dengan pendirinya H. Hasan

³⁷ “Sejarah PII di Kalimantan Selatan” dikutip dari <http://dunia.pelajar-islam.or.id/?p=710>. Data itu didasarkan atas tulisan Ar-syad Manan “Buku Kenang-kenangan Harba PII ke 28 (4 Mei 1975) di Banjarmasin”.

³⁸ Pernah menjadi Rektor Universitas Lambung Mangkurat.

Basri, *Persatuan Sopir Barabai*, dan *Persatuan Putera Borneo*. Akan tetapi, sejalan dengan perkembangan pergerakan kebangsaan pasca Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maka beberapa organisasi kepemudaan lokal yang berwatak kedaerahan di Kalimantan Selatan mulai mengembangkan diri ke arah kebangsaan, sebagaimana diperlihatkan perubahan Sarekat Kalimantan menjadi Barisan Indonesia (Bindo). Adapun profil organisasi- organisasi pergerakan³⁹ yang dipelopori para pemuda tersebut sebagai berikut.

1. Organisasi Pra Sumpah Pemuda Tahun 1928

a. Seri Budiman

Didirikan tahun 1901 oleh Amir Hasan Bondan di Banjarmasin. Kurun waktu pendiriannya dianggap sebagai pelopor organisasi pergerakan. Penetapan tahun 1901 diambil sebagai awal pergerakan, karena pada tahun itulah berdiri organisasi pergerakan di Banjarmasin, yaitu Seri Budiman. Sebuah organisasi lokal beranggotakan para pangreh praja dan pedagang.

³⁹ Profil organisasi pergerakan seperti Seri Budiman, Budi Sempurna, Indra Buana, Persatuan Pemuda Marabahan, Sarekat Kalimantan, Barisan Indonesia, Bond Indonesische Chauffeur, Partai Ekonomi Kalimantan, Sarekat Islam, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Musyawaratutthalibin, PNI dan PNI Pendidikan, PBI dan Parindra, Gerindo dan GAPI, dapat dilihat dalam Wajidi, *Nasionalisme...(2007)*, *Op.cit.*



Gambar 1.5. Amir Hasan Kiai Bondan, Pendiri Seri Budiman.
(Sumber: repro. Wajidi, 2007).

Seri Budiman merupakan organisasi sosial yang banyak mendukung ke arah pendidikan barat, persatuan kaum dagang dan petani, serta hubungan antar anggota. Seri Budiman adalah perkumpulan sosial yang dianggap bercorak modern pada zamannya dibandingkan perkumpulan masyarakat tradisional suku Banjar yaitu *sinoman*. Tujuan perkumpulan ini sederhana sekali, pertama mengadakan pertalian antar sesama anggota, perkumpulan untuk mempropagandakan bentuk pendidikan Barat yang identik dengan kemajuan, persatuan kaum pedagang yang tak me-nyentuh inti perekonomian dan pertanian.

Dalam perkembangannya, perkumpulan Seri Budiman kemudian menjadi pelopor mempergunakan podium sebagai sarana para pembicara di sidang-sidang rapat, sehingga kebebasan berbicara di atas mimbar menjadi suatu kebiasaan baru dalam dunia perhimpunan di Kalimantan Selatan.

Meminjam istilah Benedict O'Gorman Anderson tentang Budi Utomo bahwa "kebaharuan strukturalnya agaknya

menandai suatu perbedaan yang jelas dengan masa lampau”.⁴⁰ Istilah itu tepat juga dikenakan kepada Seri Budiman karena organisasi ini memiliki kebaruan struktural seperti memiliki anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan tujuan tertentu yang hendak dicapai serta kelengkapan organisasi seperti sekretariat dan taman bacaan yang berbeda dengan organisasi sebelumnya yang bersifat *sinoman*.⁴¹

Inisiator Seri Budiman yakni Amir Hasan Bondan sebagai pemuda Banjar pertama lulusan *Europese Lagere School* (ELS) tahun 1893 dan kemudian melanjutkan ke STOVIA namun tidak tamat, dapat memperjelas bahwa organisasi Seri Budiman didirikan oleh kalangan terpelajar. Meski pada mulanya bersifat lokal dan menonjolkan watak sosial, para anggota Seri Budiman yang mendapat pengaruh dari kebudayaan atau pendidikan secara Barat telah mempelopori tumbuhnya organisasi dan kebiasaan yang bersifat modern yang diikuti organisasi-organisasi yang berkembang kemudian hari.

Karena pimpinannya dari kalangan elite kolonial, dan sebagian anggota bersama pimpinan pindah mutasi jabatan ke daerah lain, akhirnya perkumpulan Seri Budiman bubar tahun 1903. Aktivitas organisasi Seri Budiman memang gaungnya tidak sebesar dengan organisasi Budi Utomo yang kelahirannya tanggal 20 Mei 1908 dijadikan Hari Kebangkitan Nasional, namun ia merupakan sebuah fakta sejarah bahwa embrio organisasi pergerakan di Kalimantan Selatan pernah ada sebelum kelahiran Budi Utomo.

⁴⁰ Benedict O’Gorman Anderson, 1983. “Masa Kegelapan dan Masa Terang Benderang, Perubahan Pemikiran Kaum Nasionalis Indonesia di Masa Awal”, dalam Anthony Reid dan David Marr (editor). *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*. (Jakarta: Grafitipers, 1983), hlm. 5.

⁴¹ Organisasi kemasyarakatan yang bersifat tradisional dan lokal, misalnya sinoman kematian, sinoman perkawinan, sinoman kesenian, sinoman kesusastaan, dan sinoman perayaan.

b. Budi Sempurna

Organisasi ini merupakan organisasi sosial yang didirikan tahun 1904 oleh Muhammad Zamzam di Banjarmasin. Budi Sempurna adalah perkumpulan sosial yang bercorak modern pada zamannya di Banjarmasin, Kalimantan Selatan yang didirikan tahun 1904 dengan meniru perkumpulan orang Belanda dengan *Societet de Kapel*-nya.

c. Indra Buana

Merupakan peleburan dari Budi Sempurna yang didirikan pada 1906, dengan anggota dan tujuan organisasi yang sama. Dua tahun setelah didirikan, perkumpulan diganti namanya menjadi Indra Buana. Pada tahun 1907, perkumpulan ini bubar dan tidak pernah didirikan lagi. Bagi rakyat Kalimantan Selatan yang dapat diambil dari perkumpulan ini adalah perasaan dan pertimbangan zaman bahwa pendidikan itu penting sekali sebagai indikator perubahan zaman. Kedua, penting adanya bermacam-macam persatuan, walaupun politis dan sosiologi tak mungkin satu, bila itu untuk tujuan politik. Untuk selanjutnya rakyat meniru mode ini dengan mendirikan taman-taman bacaan dengan *sositet-acaitet*, beranggaran dasar dan anggaran rumah tangga seperti Indra Buana tersebut, baik di Banjar maupun di Hulu Sungai.

d. Sarekat Islam⁴²

Pada tahun 1914 cabang organisasi Sarekat Islam (SI) didirikan di Banjarmasin oleh H. M Arip atau H. Matarip (H. Muhammad Arip Bakumpai) dan Sosrokardono dan mendapat pengakuan badan hukum (*rechtspersoon*) dengan *besluit* Gubernur Jenderal Nomor 33 tanggal 30 September 1914.. Ketika berada di Surabaya, H.M. Arip turut aktif dalam pergerakan dengan menjabat sebagai Komisaris SI di Surabaya. Atas saran *Vorzitter* Central Sarekat Islam, HOS Cokroaminoto agar mendirikan cabang SI di Kalimantan, maka H.M. Arip bersama

⁴² Sesuai dengan arsip-arsip yang ada di dalam skripsi Sjamsuddin organisasi ini ditulis Sarekat Islam, bukan Syarikat Islam atau Sarikat Islam.

rekan-rekannya seperti Sosrokardono, mereka mendirikan SI di Banjarmasin dan beberapa kota di Kalimantan Selatan. Dari Banjarmasin, SI berkembang di beberapa kota di Kalimantan Selatan.

SI bergerak di bidang ekonomi, sosial, agama dan kebangsaan. Pada tahun 1919, HOS Tjokroaminoto datang ke Banjarmasin dalam rangka membenahi SI yang kegiatannya hampir beku. Maraja Sayuthi Lubis dari Centraal Sarekat Islam di Jawa diutus untuk memperkuat Sarekat Islam di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1923 dan 1924 diadakan Nationaal Borneo Konggres I dan II yang diikuti Afdeling Borneo Selatan dan Timur, serta perwakilan Dayak, kongres ini menghasilkan mosi-mosi keberatan terhadap kebijakan Belanda terutama beban pajak bagi rakyat.

e. Organisasi Lainnya

Terdapat beberapa organisasi lainnya. Cuma sayang sangat minim data sejarahnya. Diantaranya adalah Serikat Dagang Borneo, didirikan tahun 1912 oleh Sarekat Islam dengan tujuan untuk mengangkat ekonomi rakyat dan melawan monopoli dagang Cina dan Belanda. Kemudian Serikat Pelayaran, sebuah usaha pengangkutan sungai yang dibentuk oleh serikat Islam untuk melawan dominasi Cina dalam pengangkutan sungai. Selanjutnya, Serikat Dagang yang didirikan tahun 1912 oleh Sarekat Islam. Pembentukan Serikat Dagang bersamaan dengan Serikat Pelayaran, yang berupaya mengangkat tingkat ekonomi masyarakat dan melawan monopoli Cina.

Berikutnya adalah Serikat Tani Lokpaikat, didirikan tahun 1917 di Lokpaikat, Tapin. Usahanya adalah menanam kopi, kelapa, jeruk dan karet. Kemudian Persatuan Putera Barabai yang didirikan oleh H. Hasan Basri. Terdapat juga organisasi Handel, serikat dagang yang didirikan orang Alabio untuk melawan monopoli Cina dalam perdagangan karet. Selanjutnya, Dunia Isteri, organisasi wanita Sarekat Islam yang dibentuk tahun 1923 di Banjarmasin, dengan ketua Siti Masiah

(isteri Mohammad Horman, Presiden Perhimpunan Sarekat Islam di Banjarmasin). Menjelang Sumpah Pemuda tahun 1928 juga muncul organisasi Serikat Harta, didirikan oleh Muhammad Arif, dengan tokoh A.M. Sangaji, Kyai Kedah dan Amir Hasan Bondan. Bertujuan mengumpulkan modal dan mendirikan koperasi. Serikat Harta akhirnya berubah menjadi Koperasi Serikat Harta.

2. Organisasi Pasca Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928

Kalimantan Selatan (termasuk Kalimantan Tengah sekarang) merupakan bagian dari konstelasi pergerakan kebangsaan Indonesia itu. Di daerah ini berkembang berbagai organisasi yang berlingkup lokal, regional, maupun nasional. Atau dari yang semula bersifat kedaerahan dan bergerak di bidang sosial, ekonomi, dan keagamaan, terus berkembang ke arah kebangsaan melalui pergerakan politik praktis bertujuan meraih kemerdekaan.

Islam sebagai agama yang dianut sebagian besar masyarakat Kalimantan Selatan sangat berperan sebagai pendorong tumbuhnya pergerakan nasional di daerah ini, oleh karena itu berbagai aliran atau organisasi yang bernafaskan Islam dapat dengan mudah tumbuh dan berkembang karena banyaknya pengikut atau anggotanya.

Besarnya pengaruh agama Islam pada awal pergerakan membuktikan bahwa elite agama merupakan salah satu pelopor pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan. Pada mulanya corak keislaman terlihat pada kegiatan sinoman-sinoman yang bernafaskan Islam, namun pada perkembangan selanjutnya tercermin pada organisasi yang mengarah kepada kebangsaan seperti Sarekat Islam, Barisan Indonesia (Bindo), Nahdlatul Ulama, Muhammadiyah, dan Musyawaratutthalibin. Dapat dikatakan, karakteristik nasionalisme Indonesia pada dekade pertama abad ke-20 di Kalimantan Selatan dimulai dengan

nasionalisme Islam Hal ini menunjukkan besarnya pengaruh organisasi Islam dan elite agama Islam pada awal pergerakan.

Selain organisasi-organisasi yang merupakan cabang dari Jawa, peranan organisasi-organisasi lokal seperti Sarekat Kalimantan, Barisan Indonesia, Partai Ekonomi Kalimantan, dan Musyawaratutthalibin juga turut mewarnai pergerakan kebangsaan di daerah ini. Bahkan Barisan Indonesia (Bindo) dan Musyawaratutthalibin menempati keistimewaan tersendiri dalam panggung sejarah pergerakan di Kalimantan Selatan. Bindo merupakan organisasi lokal yang pertama berasaskan kebangsaan, non-kooperatif, dan berani mengangkat simbol Merah Putih sebagai bendera kebangsaan. Sedangkan Musyawaratutthalibin, merupakan organisasi Islam lokal terbesar di Kalimantan Selatan, karena selain mempunyai beberapa cabang di Kalimantan, juga melebar ke luar pulau Kalimantan, terutama di daerah komunitas Banjar perantauan seperti Sapat, Tembilahan dan daerah lain di pesisir timur Sumatera.

Hanya dalam hitungan dua dekade, semangat kebangsaan Indonesia mencapai kematangannya. Ketika Boedi Oetomo berdiri tanggal 20 Mei 2008, organisasi yang pada awalnya mengung- sung “nasionalisme Jawa” karena bertujuan untuk mengangkat tarap hidup orang Jawa dan Madura daripada menjadikan kesatuan Indonesia. Setelah itu muncul organisasi Perhimpunan Indonesia di Belanda 1925, dan kemudian mencapai puncaknya dengan Sumpah Pemuda yang diikrarkan 28 Oktober 1928.

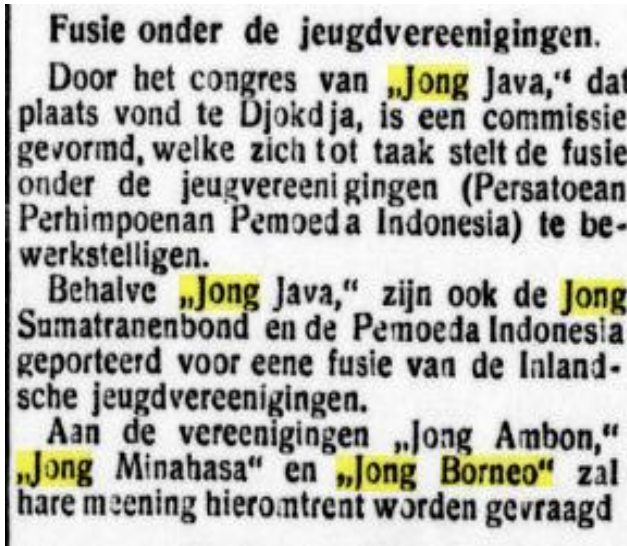
Ada empat poin penting yang dihasilkan Kongres Pemuda II yang berlangsung di Gedung Klub Indonesia, Jalan Kramat Raya No. 106 Jakarta Pusat. Pertama, mengucapkan ikrar Sumpah Pemuda. Kedua, penetapan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Ketiga, penetapan Sang Merah Putih sebagai bendera Indonesia. Keempat, semua organisasi pemuda dilebur menjadi satu bernama Indonesia Muda.

Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda itu, tidak hanya dihadiri para pemuda dari Sumatera, Jawa, Sulawesi, dan Maluku, karena ternyata pemuda Kalimantan (Jong Borneo)⁴³ juga turut hadir dalam peristiwa bersejarah itu yakni Masri⁴⁴ dan G.Obus.⁴⁵ Hanya saja tidak diketahui apakah kehadiran mereka dalam Kongres Pemuda II itu selaku pribadi atau mewakili orga-nisasi kepemudaan yang ada di Kalimantan. Kendati demikian, kehadiran mereka bukan saja menandakan bahwa pemuda Kalimantan ada pada waktu peristiwa Sumpah Pemuda itu, dan yang terutama sekali adalah bahwa setelah kongres selesai mereka membawa kabar baru perkembangan pergerakan pemuda di tanah Jawa yang kemudian memberikan pengaruh terhadap perkembangan pergerakan pemuda di Kalimantan Selatan.

⁴³ Indikasi kehadiran Jong Borneo tergambar dari pemberitaan Soerabaijasch handelsblad 02-01-1929, p. 10, yang berbunyi: Fusi di bawah kelompok pemuda. Dengan kongres dari "Jong Java", yang berlangsung di Djokdja, dibentuk komite, yang bertanggung jawab atas penggabungan klub-klub pemuda (Persatoean Perhimpoean Pemoeda Indonesia). "Jong Java," juga de Jong. Sumatranenbond dan Pemoeda Indonesia mem-port untuk merger klub-klub pemuda Indonesia. Asosiasi "Jong Ambon," "Jong Minahasa" dan "Jong Borneo" akan dimintai pendapatnya (terjemahan La Ode Rabani).

⁴⁴ Menurut Achmad Darmawie, pada Kongres Pemuda II tanggal 28 Oktober 1928, pemuda Borneo dari Kalimantan Selatan diwakili oleh Masri, lihat Achmad Darmawie, "Detik-Detik Perjuangan Kemerdekaan di Banjarmasin Kalimantan Selatan", naskah ketikan, Banjarmasin, 1981, hlm. 4.

⁴⁵ George Obus, putera Kalimantan Tengah. Kehadirannya dalam Kongres Pemuda II tahun 1928 dinyatakan oleh Anggraini Antemas, *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan Selatan* (Amuntai: Mega Sapura, 1988), hlm. 90.



Gambar 1.6. Pemberitaan Soerabaijasch handelsblad
02-01-1929, p. 10.

Sejalan dengan perkembangan pergerakan kebangsaan yang terjadi setelah berlangsungnya Kongres Pemuda II yang menghasilkan Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, maka beberapa organisasi kepemudaan lokal yang berwatak kedaerahan di Kalimantan Selatan mulai mengembangkan diri ke arah kebangsaan. Mereka mulai menyadari bahwa kemerdekaan hanya dapat diraih melalui persatuan dan kebangsaan. Sumpah Pemuda telah mendorong Sarekat Kalimantan menjadi Barisan Indonesia (Bindo), Persatuan Sopir menjadi *Bond Indonesische Chauffeur* (BIC), Sarekat Islam menjadi Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII). Akan tetapi, ada pula beberapa organisasi lainnya tetap dengan nama yang bercorak kedaerahan dan keagamaan, seperti Partai Ekonomi Kalimantan (PEK), Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan Musyawaratutthalibin, namun aktivitasnya tidak dapat dipandang remeh karena kerap kali berlawanan dengan kebijakan pemerintah kolonial.

Dalam dunia kepanduan terjadi pula pergeseran ke arah kebangsaan, di antaranya *Borneo Padvinder Organisatie* (BPO) meluaskan ruang geraknya menjadi Kepanduan Bangsa Indonesia, bersamaan dengan hadirnya Perguruan Taman Siswa bertempat di Rumah Bulat, Marabahan. Selain menjadi murid Taman Siswa mereka juga beraktivitas sebagai anggota Kepanduan Bangsa Indonesia. Di antara tokoh kepanduan di Marabahan adalah M. Ruslan yang sebelumnya pernah menjabat sebagai Ketua PPM dan Sarekat Kalimantan di Marabahan.

Para anggota KBI saat itu mulai menggunakan seragam, yakni baju warna coklat. Pada lehernya ada kain segitiga dan dasi berwarna merah-putih dan memakai peci coklat, atau memakai topi rotan. Tujuan KBI, melatih mental pemuda-pemudi serta untuk menanamkan rasa kebangsaan guna mencapai kemerdekaan. Kegiatan dengan mengadakan latihan-latihan dan menyanyikan lagu-lagu perjuangan, seperti lagu Indonesia Raya serta membentuk cabang dan ranting-ranting KBI di berbagai daerah.

a. Persatuan Pemuda Marabahan

Sebelum munculnya Persatuan Pemuda Marabahan, telah berdiri Persatuan Putera Borneo. Dibentuk pada 1929 di Banjarmasin oleh Abdul Kadir, dengan kegiatan di bidang ekonomi, sosial dan kebangsaan. Sayangnya sangat minim data tentang keberadaan beberapa organisasi ini.

Persatuan Pemuda Marabahan (PPM) dibentuk pada tanggal 1 Maret 1929 dengan ketuanya M. Ruslan, dibantu Suriadi sebagai sekretaris I dan Mawardi sebagai sekretaris II dengan pelindungnya H.M. Arip.⁴⁶ bermarkas di sebuah rumah yang disebut masyarakat Rumah Bulat, yakni sebuah rumah

⁴⁶ Wajidi, *Nasionalisme... (2007)*, *Op.cit.*, hlm.107; Soepardi, "*Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perjuangan Dari: Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia, di Kalimantan Selatan*", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, Banjarmasin, 1972), hlm. 5.

bertipe Joglo di jalan Panglima Wangkang, Marabahan sekarang.

Pada mulanya para pemuda menjadikan Rumah Bulat sebagai tempat perkumpulan musik untuk menampung bakat seni pemuda Marabahan, namun seringnya para pemuda berkumpul di Rumah Bulat ditambah dengan pengaruh berita-berita munculnya perkumpulan-perkumpulan kepemudaan di Banjarmasin dan aktivitas pergerakan di Jawa, mendorong mereka mendirikan sebuah wadah kegiatan berbentuk organisasi Persatuan Pemuda Marabahan.



Gambar 1.7. Persatuan Pemuda Marabahan (PPM).
(Sumber: repro. Wajidi, 2007).

Dalam organisasi PPM mereka mendirikan Taman Bacaan (*Het Lees-gezelschap*) dengan nama *Family Bond* bertempat di Rumah Bulat bergabung dengan perkumpulan musik yang telah ada. Diadakannya taman bacaan berkaitan erat dengan keinginan tokoh masyarakat setempat agar kegiatan dapat mengurangi jumlah penduduk yang buta huruf.

Sebagai bahan bacaan mereka berlangganan surat kabar dan majalah yang umumnya berbahasa Melayu diantaranya *Hindia Baroe*, *Bintang Baroe*, *Bintang Islam*, dan *Kemajoean Hindia*. Biaya berlangganan dipungut dari iuran para anggota, meskipun demikian anggota masyarakat yang bukan anggota taman bacaan juga diperkenankan membaca surat kabar atau majalah yang ada.⁴⁷



Gambar 1.8. Kepanduan Bangsa Indonesia di Marabahan.

Sumber: bubuhanbanjar.wordpress.com.

Dari surat kabar dan majalah tersebut, para pemuda Marabahan dapat mengikuti berita dan membaca tulisan yang mempropagandakan cita-cita kebangsaan yang saat itu telah tumbuh di Jawa maupun ditempat lainnya. Selain itu datangnya tokoh-tokoh pergerakan dari Jawa turut mewarnai tumbuhnya benih-benih kebangsaan dan semangat pergerakan di daerah ini.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 109.

b. Sarekat Kalimantan

Pada tahun 1930 Persatuan Pemuda Marabahan memperluas tujuan dan ruang geraknya dengan mensponsori berdirinya Sarekat Kalimantan dengan Pedoman Besarnya H.M. Arip.⁴⁸ Serikat Kalimantan merupakan peleburan dari Persatuan Pemuda Marabahan. Perubahan nama menjadi Sarekat Kalimantan antara lain dalam rangka memenuhi syarat untuk menjadi anggota Indonesia Muda yang dibentuk setelah Kongres Pemuda II, 28 Oktober 1928.

Susunan pengurus Sarekat Kalimantan terdiri dari M. Ruslan (Ketua), A. Gani (Wakil Ketua), A. Sunhaji (Penulis I), Sabran (Penulis II), Tambi (Bendahara I), Matran (Bendahara II), dan H. Basirun, Sabran B, Muhiddin serta Imbran (Pembantu-pembantu) dengan Ketua Pedoman Besarnya adalah H.M. Arip. Dalam anggaran dasarnya disebutkan, Sarekat Kalimantan bertujuan ke arah keekonomian dan kesosialan.⁴⁹

Setelah terbentuknya cabang-cabang Sarekat Kalimantan di daerah lainnya di Kalimantan, maka Sarekat Kalimantan melangsungkan kongresnya yang pertama pada tahun 1930 di Bakumpai (Marabahan). Kongres ini dilaksanakan di Rumah Bulat selama tiga hari diantaranya diikuti oleh perwakilan Sarekat Kalimantan cabang Barabai, Amuntai, Kandangan, dan Banjarmasin. Berita kegiatan kongres dikirim Mawardi, anggota Sarekat Kalimantan Marabahan ke surat kabar Bintang Borneo yang terbit di Banjarmasin. Kemudian Konggres II tahun 1931 di Barabai, yang menghasilkan peleburan Serikat Kalimantan menjadi Barisan Indonesia (Bindo) dengan ketua H. M Arip.

⁴⁸Amir Hasan Kiai Bondan, *Suluh Sedjarah Kalimantan*, (Banjarmasin: Fadjar, 1953), hlm. 85.

⁴⁹ Wajidi, *Loc.cit.*

b. Barisan Indonesia (BINDO)

Sarekat Kalimantan adalah salah satu organisasi yang menyikapi kecenderungan pergerakan ke arah kebangsaan. Pada kongresnya yang ke-2 pada tahun 1931 di Barabai, para peserta kongres menyatakan kebulatan tekad untuk menjadikan Sarekat Kalimantan berasaskan kebangsaan dan merubah organisasi menjadi sebuah partai politik dengan nama Barisan Indonesia (BINDO) dengan Pedoman Besarnya H.M. Arip.⁵⁰

Pusat Pedoman Besar yang semula berada di Marabahan dipindah ke Banjarmasin. Kata “Indonesia” di sini menunjukkan adanya sifat kenasionalan, dan hal ini sejalan dengan sikap politiknya yang non-kooperatif, sehingga menjadi incaran kecurigaan pemerintah. Organisasi ini mempunyai kartu Tanda Anggota Barisan Indonesia (BINDO) dengan warna kartu merah di bagian atas dan putih di bagian bawah, sebagai simbol bendera kebangsaan Indonesia dan di dalam kartu itu disebutkan bahwa Barisan Indonesia bermaksud hendak turut: (1) Mendukung dan menjunjung derajat Bangsa dan Tanah Air Indonesia; (2) Mempelajari tentang kepolitikan di antara anggota-anggota yang telah insyaf tentang asas dan tujuan BINDO.

Disebutkan pula, bahwa maksud itu dicapai dengan cara: (1) Membangkitkan keinsyafan dan memperkuat perasaan persatuan di antara segala putera dan puteri Indonesia; (2) Memberantas *analphabetisme* (picak⁵¹ mata hu-ruf), menyiarkan hal nasional Onderwijs dan memba-ngunkan fonds-fonds (*Studie-partij-congres-enz*); (3) Memajukan hal pertanian, koperasi, dan segala usaha yang sah.⁵²

⁵⁰ Barisan Indonesia (BINDO) merupakan organisasi lokal pertama yang berasaskan kebangsaan dan *non-cooperatif* yang dibentuk atas inisiatif para putera daerah Kalimantan Selatan.

⁵¹ *Picak* artinya buta atau tidak melihat. *Picak mata huruf* artinya buta huruf.

⁵² Dikutip dari Asas dan Tujuan BINDO yang terdapat dalam kartu Tanda Anggota Barisan Indonesiadengan penyesuaian ejaan lama ke ejaan baru.

Dalam tahun 1932 Kongres BINDO yang direncanakan berlangsung di Banjarmasin mengalami kegagalan, karena organisasi ini dituduh sebagai *onderbouw* Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Pendidikan) lantaran ada sebagian anggotanya juga anggota PNI Pendidikan.

Baru kemudian pada tanggal 27 s.d. 29 April 1934 dilaksanakanlah Kongres BINDO I di Banjarmasin diikuti oleh para utusan dari Hulu Sungai dan daerah Barito. Meski dilarang oleh polisi PID (polisi reserse) Belanda, mereka berani melanggar larangan itu dengan memasang atau mengibarkan bendera merah putih, di dalam maupun di luar gedung kongres. Keberanian peserta kongres mengibarkan bendera merah putih meski dilarang Pemerintah Hindia Belanda, menjadikan Bindo sebagai organisasi lokal yang pertama berasaskan ke-bangsaan, non-kooperatif, dan berani mengangkat simbol Merah Putih sebagai bendera kebangsaan.



Gambar 1.9. BINDO di Banjarmasin dengan bendera Merah Putih yang dikibarkan, 30 April 1934.
(Sumber: repro. Wajidi, 2007).

Sejak kongres Sarekat Kalimantan di Barabai yang menghasilkan BINDO, hampir semua pengurus pedoman besar dan cabang BINDO selalu berada di bawah pengawasan polisi PID Belanda. Sebagai dampak dari kuatnya tekanan Pemerintah Hindia Belanda, dan lemahnya pengkaderan maka lambat laun aktivitas BINDO mengalami kemunduran.⁵³

c. Musyawaratutthalibin

Musyawaratutthalibin merupakan organisasi Islam lokal terbesar di Kalsel pada masa pergerakan kebangsaan. Dikatakan lokal karena pertama kali didirikan oleh putera daerah di Kalsel. Dikatakan terbesar karena mempunyai anggota dan cabang yang sangat banyak di daerah lain terutama di daerah komunitas Banjar berada seperti Kaltim, Kalteng, pesisir Sumatera seperti Tembilahan, Enok, Sapat dan Kuala Tungkal. Oleh karena cabangnya sampai ke luar Kalsel, maka ada pula yang mengatakan Musyawaratutthalibin sebagai organisasi nasional seperti halnya Sarekat Islam, NU atau Muhammadiyah.



Gambar 1.10. Pengurus Musyawaratutthalibin di Kalimantan Selatan. (Sumber: bubuhanbanjar.wordpress.com)

⁵³Soepardi, *Op.cit.*, hlm.6.

Secara harfiah, “Musyawaratutthalibin” diartikan sebagai organisasi para pelajar atau kaum terpelajar yang menginginkan adanya permusyawaratan. Keinginan itu lahir karena meluasnya percekcoan dalam masyarakat, terutama menyangkut soal-soal agama antara “kaum tua” dan “kaum muda”. Musyawaratutthalibin berdiri di Banjarmasin pada tanggal 2 Januari 1931. Tokoh-tokoh pendirinya adalah Haji Ridwan Syahrani, Haji Majedi Effendi, Haji Amin dan mendapat dukungan dari para alim ulama, guru-guru agama.

d. Bond Indonesische Chauffeur (BIC)

Pada wilayah Hulu Sungai, sebagian masyarakat sudah menyadari pentingnya persatuan, seperti dengan mendirikan Persatuan Sopir Barabai yang mewadahi para sopir taksi. Persatuan Sopir Barabai ini merupakan cikal bakal bagi organisasi kaum sopir di Kalimantan Selatan, karena merekalah yang pada tahun 1934 mendirikan cabang *Bond Indonesische Chauffeur* (BIC) di Barabai dipimpin oleh Ali Baderun, M. Salman, dan Arafiah.⁵⁴ Para sopir itu mempunyai route perjalanan yang ada kalanya tidak menentu, terkadang Barabai-Banjarmasin pulang pergi, bisa pula Barabai-Alabio atau Barabai-Tanjung lewat Kelua, dan sebagainya.

Setelah berjalan beberapa saat lamanya, kedudukan Pengurus Besar BIC di Kalimantan Selatan dipusatkan di Banjarmasin dengan Ketua Umum dijabat oleh Ketua Umum Achmad Zakaria, Abdussamad Sekretaris Umum, Usuf Bendahara, M. Husin dan Abubakar sebagai Pembantu Umum. Dalam rangka untuk menyuarkan kepentingan para sopir atau kepentingan rakyat pada umumnya, maka organisasi BIC juga mempunyai media cetak dengan nama *Suara Bond Indonesische Chauffeur* yang dikendalikan Achmad Zakaria bersama dengan H. Husein Razak, seorang tokoh Parindra dan juga pembina

⁵⁴Lihat Mohammad Nawawie Arief, *Op.cit*, hlm.5. Pada foto Peringatan Congres BIC ke-3 di Barabai 1 Agustus 1936, terdapat papan nama bertulisan “Bond Indonesische Chaoppeur (*Chauffeur*, pen) Tjabang Barabai 1934” yang menunjukkan tahun dibentuknya BIC di Barabai.

ROEPELIN (Rukun Pelayaran Indonesia) yang memasok barang dagangan dari Jawa ke Banjarmasin.

Pada tanggal 1 Maret 1936 seluruh cabang organisasi BIC yang berada di daerah Selatan dan Timur pulau Kalimantan mengadakan Kongres BIC ke-3 di Barabai, selain memilih pengurus baru, kongres juga mengeluarkan beberapa keputusan diantaranya menggabungkan organisasi BIC dengan organisasi sopir lainnya yang pada saat itu berkembang luas di berbagai daerah lainnya, terutama di Jawa yang pengurus besarnya berkedudukan di Malang.⁵⁵



Gambar 1.11. *Bond Indonesische Chauffeur* (BIC) di Barabai.
(Sumber: koleksi Wajidi).

Pada akhir tahun 1939 BIC seluruh Indonesia mengadakan Kongres I di Malang, Jawa Timur yang diikuti pula oleh utusan BIC dari Kalimantan Selatan. Kongres itu dihadiri oleh Mr. Tajuddin Noor, penasihat BIC seorang putera Kalimantan yang bertempat tinggal di Lawang Jawa Timur. Kesempatan pertemuan dengan Mr. Tajuddin Noor digunakan untuk bertukar

⁵⁵Wajidi, *Nasionalisme...*(2007), *Op.cit.* hlm. 117.

pikiran tentang perkembangan pergerakan di Jawa dan di Pulau Kalimantan.

Kongres BIC dibuka dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya oleh pemuda pelajar. Setelah melakukan serangkaian rapat, akhirnya Kongres BIC I mengeluarkan beberapa keputusan, seperti bendera organisasi BIC berwarna Merah, Putih, dan Hijau dengan tanda bundaran di tengah sebagai simbol BIC; lagu Indonesia Raya sebagai lagu kebangsaan, dan menyatakan satu bangsa, satu bahasa, satu tanah air, dan satu negara Indonesia.⁵⁶

Persatuan Putera Borneo dibentuk pada tahun 1929 di Banjarmasin dengan promotornya Abdul Kadir. Lahirnya Persatuan Putera Borneo mendapat respons yang positif dari rakyat terutama golongan terpelajarnya karena tujuannya di bidang ekonomi dan sosial yang didasarkan kepada kebangsaan Indonesia. Persatuan Putera Borneo sebenarnya telah berdiri lama di Surabaya di bawah pimpinan Abdul Kadir. Maksud promotornya dengan membentuk Persatuan Putera Borneo di Banjarmasin agar dapat melakukan kontak langsung dengan Persatuan Putera Borneo di Surabaya.⁵⁷

e. Partai Ekonomi Kalimantan

Partai Ekonomi Kalimantan atau lebih populer dengan singkatannya PEK berdiri pada tahun 1932 di Banjarmasin, dipelopori oleh Anang Acil Wira Negara. Partai ini mempunyai cabang di Pleihari⁵⁸ dan di Hulu Sungai, dengan kedudukan Pengurus Cabang di Kandangan.⁵⁹ Meski organisasi ini masih berlingkup lokal Kalimantan, aktivitasnya yang berlawananan dengan kebijakan pemerintah kolonial tidak dapat dipandang ringan. Organisasi ini bertujuan membela rakyat kecil dari kesukaran-kesukaran ekonomi, yang dalam praktiknya hanya

⁵⁶*Ibid.*, hlm. 117-118.

⁵⁷Amir Hasan Kiai Bondan, *Op.cit.*, hlm.85.

⁵⁸Sjarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 61.

⁵⁹Wajidi, *Nasionalisme...(2007)*, *Op.cit.* hlm. 118.

dapat mengumumkan peraturan *erakan* dan memberikan pertolongan kepada mereka yang sudah semestinya dibebaskan. Mereka melakukan pembelaan berdasarkan Undang-Undang Hindia-Belanda sendiri.

Sudah barang tentu pihak kaki tangan Belanda “harus curiga”, sebab PEK dengan tujuannya itu dapat mengorganisir beberapa puluh bahkan ratusan penduduk di Hulu Sungai. PEK dapat mengusahakan pendaftaran orang bebas pajak baik terhadap penduduk yang usianya lebih 50 tahun maupun terhadap anak dewasa yang usianya kurang 18 tahun atau lebih, terutama karena belum kawin (tidak berkeluarga). Pajak-pajak yang patut dibebaskan seperti: pajak kepala, pajak sawah (tanah yang kurang subur), ladang gunung (tidak terpelihara baik).

Dalam tahun 1936-1937, PEK banyak melakukan pembelaan, antara lain dilaksanakan oleh Artum Artha dan kawan-kawan. Hasilnya puluhan petani terhindar dari penderitan pajaknya dan sejumlah persawahan-perladangan juga dapat dibebaskan pungutan wajib pajak yang telah lama menjadi beban bagi para petani itu pada zamannya. Nama PEK dan pemimpin-pemimpinnya populer di kalangan penduduk Hulu Sungai, karena pembelaannya secara jujur, tanpa dipungut bayaran. Namun kaum tani secara jujur pula berbuat atas nama hati nuraninya datang menemui pembelanya dan memberikan sekadar jasa, baik berupa duit maupun berupa benda, padi atau dengan berasnya.

Untuk menyuarakan perjuangan organisasinya, PEK lalu menerbitkan Soeara Rakyat Kalimantan (SORAK) langsung dipelopori Anang Acil Kusuma Wiranagara. Pada perkembangannya, SORAK dihentikan penerbitannya, dan sebagai gantinya terbit Soeara Kalimantan dipimpin oleh A.A. Hamidhan.

Pada tanggal 15 Oktober 1938, dr. A.K. Gani dari Gerindo Jakarta waktu kunjungannya ke Kalimantan Selatan, berkesempatan datang ke Paringin meresmikan berdirinya Gerindo Cabang Paringin. Akan tetapi, karena Pemerintah Hindia

Belanda melarang berdirinya Gerindo di Paringin, maka A.K. Gani diberikan kehormatan untuk meresmikan berdirinya PEK Cabang Paringin yang diketuai Ismail. Dalam kesempatan berpidato seusai peresmian PEK, dr. A.K. Gani menyampaikan kritik tajam terhadap Pemerintah Hindia Belanda.⁶⁰

f. Parindra

Asal mula Parindra di Kalimantan Selatan adalah organisasi Persatuan Bangsa Indonesia (PBI) yang cabangnya dibentuk oleh Merah Djohansjah dan Masri pada tahun 1930 dengan jumlah anggota tidak lebih dari lima belas orang.⁶¹ Kemudian dengan berfusnya PBI dengan Budi Utomo dan organisasi lainnya di pulau Jawa menjadi Partai Indonesia Raya (Parindra) di tahun 1935 maka dengan sendirinya PBI di Kalimantan Selatan menjadi Parindra. Dalam perjuangannya, organisasi Parindra melaksanakan prinsip kooperatif terhadap Pemerintah Hindia Belanda. Karena prinsip itulah, maka wakil-wakilnya dapat duduk dan berjuang dalam dewan legislatif (*Raad*) di tingkat Provinsi, kabupaten maupun pemerintahan kota, mendirikan Rukun Puteri, Rukun Tani, Koperasi, Rukun Pelayaran Indonesia (Roepelin), Lumbung Padi, Keputrian, Kepanduan Surya Wirawan, Sekolah Parindra, menulis artikel politik dan mengeluarkan mosi menentang peraturan kerja paksa (*erakan*, *rodi*).

⁶⁰ *Ibid.*, hlm. 120.

⁶¹ Achmad Darmawie, *Op.cit.*, hlm. 4.



Gambar 1.12. Sekolah Rukun Puteri yang dikelola Parindra.
(Sumber: dok. Joerliani Djohansjah).

Sekolah Parindra selalu mendapat tekanan dari Pemerintah Hindia Belanda ketika itu. Jika seorang anak pegawai negeri memasuki sekolah Parindra, maka orang tuanya yang pegawai negeri tersebut, kalau tidak dipindahkan bisa pula diberhentikan dari pekerjaannya.⁶² Besarnya tekanan pemerintah kolonial itu bukan tanpa alasan, karena para Parindrist tidak segan mempertunjukkan potret-potret pemimpin pergerakan sebagaimana yang dilakoni Artum Artha yang berjualan potret pemimpin pergerakan antara lain: dr. R. Sutomo, Ir. Soekarno, Drs. Mohammad Hatta, Ki Hajar Dewantara, dr. A. K. Gani, Haji Agus Salim dan Haji Oemar Said Cokroaminoto.⁶³

Melalui sekolah Parindra para kaum pergerakan berupaya menanamkan perasaan kebangsaan dan membentuk kader, antara lain dengan mengajarkan Sejarah Kebangsaan Indonesia,

⁶² Sjarifuddin, *Op.cit.*, hlm. 68.

⁶³ Lihat Wajidi, *Artum Artha Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan*, (Yogyakarta: Debut Press, 2008), hlm. 31.

dan tokoh-tokoh besar dalam sejarah kerajaan di Nusantara dan perlawanan terhadap kolonial di sekolah-sekolah kaum pergerakan yang isinya berlawanan dengan Sejarah Indonesia karangan Belanda. Di samping itu, di setiap akan memulai pelajaran para murid dan guru terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya, begitu pula ketika akan pulang, walau redaksinya agak berbeda dengan yang sekarang, diantaranya Indonesia Merdeka diganti dengan Indonesia Mulia, tetapi ini cukup menyadarkan kader-kader yang dididik di sekolah tersebut.⁶⁴

Meski Parindra menganut prinsip kooperatif, aparat pemerintah kemudian merasa cemas setelah melihat aktivitas Parindra yang cenderung melawan pemerintah kolonial. Oleh karena itu, pemerintah Hindia Belanda selalu menempatkan orang atau polisi PID untuk melakukan pengawasan di setiap rapat partai, baik rapat terbuka maupun rapat tertutup. Tidak jarang PID ini mencari-cari alasan atau perkara untuk membubarkan rapat Parindra, dan menawarkan bantuan berupa uang kepada pengurus Parindra agar mau memberikan laporan atau rahasia kepartaian.

Selain pengawasan yang ketat, tindakan keras Pemerintah Hindia Belanda dalam menghadapi perjuangan Parindra dilakukan dengan cara menerapkan peraturan pelarangan melakukan perkumpulan dan rapat-rapat umum, namun kemudian membolehkannya disertai dengan pengaturan yang ketat untuk membatasi dan bahkan membubarkan perkumpulan atau rapat yang dianggap membahayakan pemerintah.

Dengan penerapan “pasal karet” yaitu Pasal 153 bis; Pasal 153 ter; Pasal 161 bis; dan Pasal 171 bis dalam KUHP (*Wetboek van Strafrecht*), pemerintah Hindia Belanda bahkan melakukan penangkapan dan pemenjaraan aktivis Parindra baik pengurus organisasi, wartawan maupun guru-guru Parindra dengan penerapan aturan kerja paksa di penjara Kalimantan

64 Sjarifuddin, *Loc.cit.*

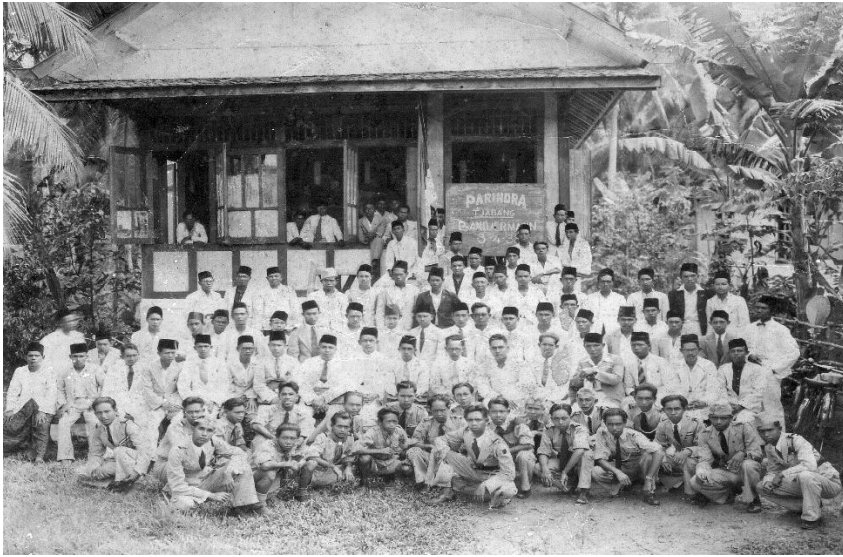
Selatan atau memenjarakannya di beberapa penjara di Pulau Jawa. Diantaranya adalah H. Amir, Edwar Sandan, H. Morhan, H. Seman, dan Abdulhamidhan diseret ke pengadilan dengan tangan dirantai. H. Morhan ditangkap di Surabaya kemudian dijatuhi hukuman penjara 2 tahun 6 bulan, dan bersama Abdulhamidhan yang divonis 1 tahun dikerjapaksakan di Penjara Ampah (Kalimantan Tengah), sedangkan H. Amir dan Edwar Sandan masing-masing dikenakan penjara 2 tahun dan dikirim ke penjara Sukamiskin, Jawa Barat.⁶⁵

g. Organisasi Lainnya

Selain beberapa organisasi yang ada terdapat organisasi lainnya yang bisa terdokumentasikan. Sayangnya, minim data pendukung. Diantaranya Gementeraad Bandjermasin (Dewan Kota Banjarmasin), anggotanya berasal dari penunjukan dan pemilihan. Pelantikan Anggota Dewan Kota Banjarmasin dilakukan pada 18 November 1930. Kemudian Gerakan Rakyat Indonesia (Gerindo). Gerindo Kalsel didirikan H. Busri dan M. Nawawi di Birayang tahun 1938, disahkan langsung Ketua Gerindo Pusat, dr. A.K. Gani.

Selanjutnya Gabungan Politik Indonesia (GAPI). GAPI Kalsel pada tahun 1939 merupakan gabungan dari Parindra, Gerindo, PSII, PII, Musyawaratuttalibin, NU dan Muhammadiyah.

⁶⁵ Lihat Wajidi, *Nasionalisme...(2007)*, *Op.cit.* hlm.192-193. Lihat pula Wajidi, "Eksistensi Partai Indonesia Raya (Parindra) di Kalimantan Selatan, 1935-1942", dalam *Patanjala*, Vol. 7 No. 1 Maret 2015, BPNB Bandung, 2015, hlm. 17-32.



Gambar 1.13. Pengurus dan Anggota Parindra Cabang Banjarmasin. (Sumber: bubuhanbanjar.wordpress.com)

D. Perjuangan Tokoh Muda Dalam Pers Kebangsaan

Peranan pers terutama pers berbahasa Melayu atau Indonesia di wilayah Indonesia sangat penting dalam pergerakan kebangsaan, karena pers itu dapat langsung mencapai penduduk bumiputera. Oleh karena itu, pers berbahasa Melayu seringkali dijadikan alat komunikasi politik oleh para elite Indonesia baru. Pers kebangsaan umumnya digerakkan oleh insan pers yang berusia muda. Nama pemilik surat kabar, pemimpin redaksi, wartawan, atau penulis yang kerap melontarkan kritik sosial kepada pemerintah kolonial seperti A.A. Hamidhan, Andin Bor'ie, Housman Baboe, Artum Artha, Zafry Zamzam, Ahmad Basuni, dan lainnya masih berusia muda.

Begitupula halnya dengan yang terjadi di Kalimantan Selatan, tumbuhnya organisasi-organisasi pergerakan kebangsaan di Kalimantan Selatan juga dipengaruhi oleh perkembangan media cetak, terutama surat kabar. Pada mulanya

Pemerintah Hindia Belanda sangat membatasi penyebaran surat kabar yang dikarang, dicetak dan diedarkan oleh bumiputera, sehingga banyak masyarakat yang sama sekali tidak mengetahui adanya berita-berita tentang pergerakan kebangsaan yang tumbuh di Jawa.

Pada sekolah pemerintah, tidak ada satupun surat kabar atau majalah terbitan pribumi yang diizinkan masuk menjadi bahan bacaan. Bacaan yang tersedia di sekolah, hanyalah majalah terbitan Departemen Pendidikan dan Pengajaran, yakni majalah bulanan Panji Pustaka, di samping menerbitkan buku-buku bacaan untuk sekolah berbagai tingkatan dan juga untuk masyarakat umum.

Beberapa surat kabar atau majalah yang terbit atau beredar di Kalimantan Selatan, diantaranya adalah *Soeara Kalimantan* (Banjarmasin), *Bintang Borneo* (Banjarmasin), *Majalah Malam Djoema'at* (Banjarmasin), *Soeara Hoeloe Soengai* (Kandangan), *Harian Oemoem* (Surabaya), *Tempo* (Surabaya), *PNI Soeloeh Indonesia* (Surabaya), *Bintang Timoer*, *Majalah Bulanan Taman Siswa* (Yogyakarta), dan *Soeara Persatoean Goeroe Indonesia* (Yogyakarta). Meski mendapat pengawasan ketat dari pemerintah kolonial, para pemuda dapat memperoleh informasi tentang politik melalui Taman Bacaan (*Het Leesgezelschap*) yang dikelola organisasi Srie di Banjarmasin, maupun organisasi Persatuan Pemuda Marabahan (PPM).

Pada umumnya isi surat kabar dan majalah yang terbit di Kalimantan Selatan tidak berbeda jauh dengan pemberitaan yang terdapat dalam surat kabar atau majalah di Jawa, sama-sama menyebarkan paham kerakyatan (Kebangsaan Indonesia). Banyaknya kasus *persdelict* di masa Hindia Belanda, larangan terbit bagi brosur dan pers antara lain karena disadari

bahayanya pengaruh tulisan dalam bahasa Melayu dalam pers itu segera dapat dipahami oleh penduduk bumiputera.⁶⁶

Seiring dengan perkembangan organisasi pergerakan kebangsaan, maka tokoh pers maupun tokoh pergerakan di Kalimantan Selatan menerbitkan pula surat kabar, harian, mingguan, bulanan baik yang berhaluan nasional, Islam, nasional sekaligus Islam, ataupun netral. Diantaranya ada yang berdiri sendiri, organ dari partai politik, atau berdiri sendiri namun redaksinya diisi oleh anggota organisasi pergerakan, seperti majalah Malam Djoema'at, surat kabar Soeara Rakyat Kalimantan (SORAK), Soeara Kalimantan, Tjanang, Oetoesan Kalimantan, Pembangoenan Semangat, Berita N.Oe, Soeara Pakat Dajak, Soeara M.Th, Soeara B.I.C, Bingkisan, Kesadaran Kalimantan, Pelita Masjarakat, dan Panggilan Waktue, dan lain-lain.

Dengan demikian, pers kebangsaan yang beredar adalah surat kabar dan majalah dari Jawa dan Sumatera, dan terbitan lokal. Pada umumnya isi surat kabar dan majalah yang terbit di Kalimantan Selatan tidak berbeda jauh dengan pemberitaan yang terdapat dalam surat kabar atau majalah di Jawa, yakni menginformasikan perkembangan politik kebangsaan, menyuarakan pentingnya persatuan, memberitakan dan mengkritik ketidakadilan yang dilakukan Pemerintah Hindia Belanda, dan sebagainya yang merupakan bagian dari pergerakan nasional di daerah ini.

Amir Hasan Bondan dalam tulisannya di surat kabar Indonesia Merdeka, berjudul "Pers di Kalimantan" menceritakan sekilas perkembangan pergerakan tahun 1920-an dengan mengangkat kembali tulisannya yang pernah terbit dalam majalah Malam Djoema'at terbitan tanggal 24 November 1927 dengan judul "Perasaan Bandjar Totok". Amir Hasan Bondan

⁶⁶ Abdurrahman Surjomihardjo, "Sumpah Pemuda di dalam Perkembangan Budaya Politik Indonesia 1900-1945", dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta, *Op.cit.*, hlm.293-294.

membandingkan pemberitaan Malam Djoe-ma'at dengan koran yang ia baca di Jawa, dan menurutnya terdapat persamaan antara isi surat kabar di Jawa dengan Borneo. Bahkan koran-koran di Borneo tidak kalah dengan koran-koran di Jawa karena sama-sama hangat bunyi beritanya.

Saja ini seringkali berlajar pulang balik ke tanah Djawa berdagang barang makanan dan dan barang palen. Di segenap pasar dan desa banyak kenalan orang2 Djawa dan Madura dan saja kerap kali nonton orang gaderingan, politik buat kemadjuan bangsa. Di Djawa petjah kabar, tuan besar Djenderal sudah mengeluarkan perintah sama amtenar2 supaya djangan membesarkan diri. Pendeknja supaya orang2 Kantoran mau berbitjara pandjang sama orang Kampung, suka mengenal rakjat.....

Tempo saja pulang di Bandjarmasin, kenapa saja kebetulan ada membatja Koran Malam Djum'at.⁶⁷ Di dlm koran saja ada batja matjam2 karangan buah pikiran anak Bandjar. Di antara karangan2 jg sudah saja batja, jang menarik hati benar2 jaitu: I. Tuan besar Djenderal bermaksud supaya orang2 jg makan gadjih sama Kompeni dan bangsa Belanda supaya suka mengenal rakjat dan suka berbitjara sama tetuha2 kampung.....

(Tjotjok sadja kabar Djawa sama Borneo. Lamun begitu koran2 di Borneo tidak kalah lawan koran2 di Djawa. Sama2 hangat bunji kabarannja)⁶⁸

Lebih lanjut, dalam majalah *Malam Djoema'at*, Amir Hasan Bondan juga menggelorakan semangat untuk maju seperti di Jawa dengan menganjurkan perlunya anak-anak Banjar

⁶⁷Majalah "Malam Djoema'at" ketika dimuat kembali ke dalam surat kabar Indonesia Merdeka ditulis "Malam Djum'at".

⁶⁸ Amir Hasan Bondan, "Perasaan Bandjar Totok", dalam majalah *Malam Djoema'at*, 24 November 1927, dimuat kembali dalam surat kabar Indonesia Merdeka, Nomor 99 Tahun ke VII, Sabtu 28 April 1951, dengan judul "Pers Kalimantan". Lihat pula Wajidi, *Nasionalisme....(2007)*, *Op.cit.*, hlm. 83-84. Disalin sesuai ejaan aslinya.

bersekolah dan bergotong royong mengadakan sekolah bagi kaum perempuan sebagai berikut:

Di Djawa di kampung banjak sekolah matjam², laki² perempuan kerotjosan bisa basa Belanda-Inggeris. Di rumah kuting-kutingan koran di tangan. Djadi dalam hati saja, kalu sama bersekolah, tida ada lainnja Djawa sama Bandjar.

Sekarang Borneo mau madju, tapi bagaimana kalau sekolah sedikit. Tiap tahun banjak anak Bandjar tidak bisa dapat tempat di sekolah². Pasal ini, anak Bandjar jang nekat² dan sekolah tinggi djangan berdiam diri sadja, sunji burinik. Saja liat di Djawa jg djadi pengurus, semua orang Djawa jang pintar²; rakjat berdiri di belakang si pintar. Mustahil di Bandjar tida ada org pintar jg suka beraksi buat memadjukan negeri.

Lamun anak Bandjar jang berdiploma kagum, siap lagi jg diharap² buat ke muka. Orang kampung kebanyakan ada sadja hati mau turut madju, tetapi kepala kawan tida bergerak.

Adapun pasal meadakan sekolah perempuan, lamun orang besar tida lekas memulainja, kita kerdjakan sendiri. Orang kampung harus rami² membantu uang derma dan jg pintar djadi pengurusnja. Dan lagi kalau les derma sudah didjalankan, diharap djuga saudagar² Bandjar buka tangan, djangan engken mengeluarkan uang derma, sebab itu amal memadjukan bangsa sendiri kaum perempuan....⁶⁹

Dari tulisannya yang termuat dalam Majalah *Malam Djoema'at*, terlihat dengan jelas bahwa pers berperan menginformasikan perkembangan politik, dan terutama perkembangan pergerakan kebangsaan di Jawa dan Sumatera, pers

⁶⁹ Amir Hasan Bondan, *Loc.cit.* Lihat pula Wajidi, *Loc.cit.* Disalin sesuai ejaan aslinya.

juga berperan penting mengukuhkan kesadaran, menyuarakan ketimpangan antara kehidupan masyarakat di Jawa dengan Kalimantan, dan menggelorakan semangat maju bergerak menuju kemajuan, media penyampaian sikap politik, kritik, dan agitasi dan sebagainya yang merupakan bagian dari pergerakan nasional di daerah ini.

Pada masa pergerakan kebangsaan, surat kabar tidak hanya memberitakan fakta-fakta tentang kehidupan masyarakat yang mengalami kesengsaraan, kemiskinan, ketertindasan akibat penjajahan, melainkan juga menjadi wadah para aktivis pergerakan dalam mengeluarkan sikap politik, kritik, dan ide-ide kebangsaan.

Sartono Kartodirdjo mengatakan bahwasanya pers merupakan ancaman bagi penguasa kolonial tidak dapat diragukan lagi. Kesempatan mengeluarkan pendapat menjadi fasilitas untuk mengancam sistem kolonial serta unsur-unsur praktiknya. Agitasi politik juga berbahaya sekali bagi "ketentraman dan ketertiban" masyarakat, lagi pula secara langsung membuat pemerintah kolonial sebagai target kritik. Tidak mengherankan apabila beberapa surat kabar berkali-kali kena "pemberangusan" (*persbreidel*). Hanya pers yang moderat saja dapat mengalami hidup cukup panjang.⁷⁰

Di zaman Hindia Belanda, seorang tokoh pergerakan, penyair, penulis cerita atau dia seorang koresponden, reporter, *verslag-gever* gampang saja ditangkap Belanda kalau isi sajak atau tulisannya dianggap menyindir, samar-samar apalagi jika terang-terangan menghina pemerintah atau orang Belanda. Oleh karena itu, nama samaran penting sekali pada zaman itu. Untungnya seorang penulis memakai nama samaran adalah ketika terjadi *persdelict* maka yang bertanggung jawab adalah pemimpin redaksi (*Hoofredacteur*).

⁷⁰ Sartono Kartodirdjo, *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*, (Jakarta: PT. Gramedia, 1982), hlm. 115.

Diantara aktivis pergerakan sekaligus wartawan yang terkena *Persdelict* adalah H. Ahmad Barmawi Taib, karena sering menulis artikel yang bersifat politik melalui Pembangunan Semangat. Majalah Pembangunan Semangat nomor 8,9,10,11,12 tahun 1939 disita polisi PID (*Politieke Inlichtingen Dienst*) Hindia Belanda dan ia dijatuhi hukuman penjara 3 tahun oleh *Landraad* Kandangan. Upaya Mr. Rusbandi selaku Komisaris Daerah Parindra Kalimantan Selatan yang sekaligus sebagai pembela tidak berhasil meyakinkan hakim kolonial, sehingga H. Ahmad Barmawi dikirim ke penjara Sukamiskin di Jawa Barat.

Kasus *persdelict* juga pernah dialami oleh Hadhariyah M seorang tokoh pejuang kemerdekaan di bidang politik sekaligus pemimpin redaksi mingguan Bendahara Borneo Samarindra, dan pemimpin redaksi harian Utusan Kalimantan Banjarmasin. Pemerintah Hindia Belanda di Banjarmasin menilai Hadhariyah M sebagai seorang *Hollander Hater* (Pembenci Belanda) dalam tulisan-tulisan politiknya.⁷¹

Hadhariyah M juga pernah menjadi korban delik bicara dalam suatu rapat umum Parindra di Barabai dengan tuntutan melanggar pasal 151 bis dari *Wetboek van Strafrecht* Pemerintah Hindia Belanda. Judul pembicaraan Hadhariyah adalah karena menghimbau “Burung Dalam Sangkar Mas” dan membahas bahwa belanja hidup seekor anjing yang ditangkap dan dikurung oleh polisi Belanda di Surabaya karena tanpa *penning* adalah sebesar f. 50 sehari yang kelak harus dibayar oleh sang punya anjing itu. Sedangkan belanja hidup seorang rakyat Indonesia, cukup sebenggol atau 2,5 sen sehari. Bayangkan kata Hadhariyah M, betapa ambruk martabat hidup dan betapa miskinnya rakyat Indonesia di Hindia Belanda. Di tanah airnya sendiri. Karena ucapannya itu, maka ditangkaplah Hadhariyah M dan

⁷¹ Hadhariyah M, “*Periode-periode Perjuangan di Indonesia yang Saya Alami*”, (Banjarmasin: naskah ketikan, 1981), hlm. 6 dan 10.

diganjar hukuman penjara selama 3 bulan dan membayar denda f. 100.⁷²

Lebih lanjut Hadhariyah M menceritakan bahwa pada saat Hadhariyah M ingin berangkat ke Surabaya untuk menghadiri Konferensi Besar Parindra di Surabaya, maka pada tanggal 17 Juni 1941 dalam kesibukan persiapan keberangkatan, ia ditangkap dan didakwa melanggar pasal-pasal 156, 157, dan 193 bis/ter *Wetboek van Strafrecht* (KUHP).

Pelanggaran itu terjadi, karena Hadhariyah M telah menulis sebuah roman politik yang berjudul “Suasana Kalimantan” dan diterbitkan di Medan dengan judul “*Tersungkur Di Bawah Kaki Ibu*”. Tulisan itu dianggap pemerintah bertendensi politik dan melakukan *persdelict* sehingga penulisnya bersama penanggungjawabnya, diajukan ke pengadilan Banjarmasin. Dalam sidang pengadilan (*landraad*) pada bulan November 1941, hakim kolonial menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada Hadhariyah M dan 1,5 tahun penjara kepada Matu Mona. Tepatnya pada tanggal 1 Februari 1942 Hadhariyah M menjalani kehidupan penjara, setelah upaya naik bandingnya ditolak oleh *Raad van Justitie*⁷³ di Surabaya.⁷⁴

⁷² *Ibid.*, hlm. 9.

⁷³ Pengadilan Tinggi (*Raad van Justitie*) di Jalan Alun-Alun (Aloen-Aloen Straat) kini Jalan Pahlawan, Surabaya.

⁷⁴ *Nasionalisme...*(2007), *Op.cit.* hlm. 195.

Bab 2

Pemuda Gemblengan Tentara Pendudukan Jepang

Terlepas dari kekejamannya, Jepang memberi banyak harapan kepada "bangsa" Indonesia untuk mengakhiri penjajahan Belanda dengan membentuk berbagai lembaga yang diperuntukkan bagi kaum muda. Beberapa diantara organisasi pemuda bentukan Jepang itu kelak menjadi angkatan perang nasional yang terorganisasi dengan baik. Bahkan, kemerdekaan Indonesia akhirnya diproklamasikan berkat kegigihan kelompok-kelompok pemuda. Namun mereka tidak luput dari pertikaian internal karena kuatnya tekanan psikologis saat itu; di usia muda mereka sudah harus memikul tanggung jawab yang sangat besar sebagai pemimpin negara-bangsa baru.⁷⁵

Walaupun demikian munculnya organisasi pemuda gemblengan Jepang tidak semudah membalik telapak tangan. Terdapat perbedaan nuansa antara organisasi pergerakan pada masa Hindia Belanda dengan era pendudukan Jepang. Pada masa kolonial Belanda organisasi pergerakan pada umumnya diprakarsai tokoh pejuang Indonesia dari kalangan terdidik. Sementara pada era pendudukan Jepang organisasi politik dilarang, dan sebagai gantinya para pemuda digembleng di dalam organisasi bentukan Jepang untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya.

⁷⁵ Anhar Gonggong, "Pemuda dan Gerakan Bersenjata: Indonesia Masa Pendudukan Jepang", *Prisma* edisi 2 tahun 2011.

Demikian halnya dengan pemuda gembelengan tentara Jepang di wilayah Kalimantan bagian selatan. Sejak Angkatan Laut (Kaigun) tiba di Banjarmasin sekitar 11-13 Februari 1942, Jepang sudah menancapkan kuku hegemoninya. Termasuk mempengaruhi kalangan pemuda. Tentara Jepang piawai memainkan propaganda dan memunculkan ketakutan. Jepang mempropagandakan dirinya dalam Gerakan Tiga “A” yakni Nippon Cahaya Asia, Nippon Pelindung Asia serta Nippon Pemimpin Asia.⁷⁶



Gambar 2.1. Tentara Jepang bersama pejabat sipil onderafdeling Barabai dan masyarakat setempat, tidak lama setelah menguasai kota Barabai. (Sumber: repro Wajidi, *Tesis* 2017).

Jepang mengklaim kedatangannya untuk membebaskan bangsa-bangsa Asia dari penjajahan bangsa Barat, termasuk bangsa Indonesia dari penjajahan Belanda.⁷⁷ Bagaimana politik

⁷⁶ M.C. Ricklef, *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 428.

⁷⁷ M. Idwar Saleh *et al.*, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah, Kanwil Depdikbud Prop. Kalimantan Selatan, 1978/1979), hlm. 142.

pemerintah Jepang dalam menjalin kerjasama dengan bangsa Indonesia, khususnya pemuda di Kalimantan Selatan? Kemudian bagaimana reaksi rakyat Indonesia terutama kalangan pemuda terhadap politik Jepang tersebut?

Bab ini memberikan perhatian secara khusus kepada gerakan pemuda di Kalimantan Selatan pada masa pendudukan Jepang di Indonesia awal 1942 hingga pertengahan 1945. Peristiwa ini menarik untuk disimak kembali, karena menggambarkan dinamika nasionalisme anak bangsa. Pertama karena secara politis gerakan pemuda pada waktu itu merupakan representasi campuran politik pemerintah Jepang bercorak eksploitatif, dengan politik nasionalisme modern yang sedang tumbuh di kalangan kaum pergerakan Indonesia.⁷⁸

Kedua, stigma pemuda dalam dinamika sejarah kolonial di Indonesia, selama munculnya gerakan pemuda dalam wadah organisasi, pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan kesempatan yang baik dan memberikan tempat yang wajar kepada kaum nasionalis. Oleh karena itu, tidak dapat disalahkan kalau pemuda pada umumnya dan kaum nasionalis khususnya mengubah arah politiknya lebih mendekat kepada penguasa Jepang. Ketiga, penguasa Jepang yang semula menyatakan sebagai "saudara tua" ternyata berubah menjadi saudara yang kejam dan ganas. Akibatnya kaum muda bergerak, bekerjasama melepaskan diri dari belenggu pemerintah Jepang.⁷⁹

A. Gerakan Pemuda di Bawah Pendudukan Jepang

1. Sekolah dan Nipponisasi Generasi Muda

Satu diantara upaya Jepang dalam *nipponisasi* kalangan pemuda di Kalimantan Selatan, adalah melalui pendirian *Kogyo Djitsumo Gakko*, yaitu Sekolah Dagang sebagai pengganti *Klein*

⁷⁸ Sugiyarto, "Gerakan Pemuda Pada Zaman Jepang", *Tulisan Lepas* koleksi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Undip, 2018, hlm.1.

⁷⁹ *Ibid.*

Handel School. Lama pendidikan di sekolah ini adalah 2 tahun sesudah SR. *Kogyo Djitsumo Gakko* hanya terdapat di Banjarmasin. Sementara jumlah murid yang terdaftar 42 orang dengan jumlah guru 3 orang. Kemudian *Kaiin Yosejo*, yaitu Sekolah Pelayaran, lama pendidikan 2 tahun sesudah SR, hanya terdapat di Banjarmasin, jumlah murid 35 orang dengan jumlah guru 3 orang. Diskriminasi pendidikan dihapuskan, semua rakyat berhak mendapat dasar pendidikan yang sama yaitu Sekolah Rakyat 6 tahun, sedangkan sekolah nomor satu atau/dan HIS dihapuskan.⁸⁰

Pelajaran menulis membaca dan berhitung tidak dipentingkan yang diutamakan hanya menyanyi, *taiso* atau olah raga, *kinrohosi*, atau gotong royong. Begitu pula mata pelajaran seperti sejarah, ilmu bumi waktu itu dilarang diajarkan, kurikulum tidak ada, tetapi tujuannya hendak *menipponisasi* atau menjepangkan bangsa Indonesia, dengan mempergiat pelajaran Bahasa Jepang. Menyanyi yang lebih diutamakan berirama mars dan lagu kemenangan perang. Begitu pula lagu-lagu yang mengutuk Inggris dan Amerika sangat populer bagi anak sekolah, seperti yang tercantum dalam kata-kata lagu atau syairnya “Inggris dilinggis Amerika disetrika”. Jadi pendidikan zaman Jepang itu diarahkan kepada kemenangan perang Jepang.⁸¹

Demikian juga dengan Pelajaran huruf Arab di semua sekolah juga dihapuskan. Diganti dengan Huruf Jepang yaitu huruf *Katakana*, *Hiragana*, dan *Kanji*. Guru-guru sekolah agama atau Sekolah Islam, dianjurkan membantu pembangunan Borneo Baru dan mengakibatkan sekolah-sekolah agama “lumpuh” dan tidak terbina lagi. Sekedar untuk gantinya di Banjarmasin didirikan Sekolah Menengah Islam yang pelajarannya mengutamakan *taiso* dan semangat dan Bahasa Jepang.⁸²

⁸⁰ M. Suriansyah Ideham (ed), *et.al.*, *Sejarah Banjar* (Banjarmasin: Badan Pengembangan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan, 2003), hlm. 83-83;

⁸¹ *Ibid.*

⁸² Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hlm. 26; lihat juga Muhammad Rifa'i, *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern* (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hlm.84.

Sementara itu, di Kandangan dibuka sebuah tempat latihan pemuda-pemuda Islam yang bernama Pondok Kebangunan Asia. Para guru dan ulama Islam dilatih dan dididik dengan bahasa dan semangat *Nippon*. Meskipun dengan menekan perasaan hati, mereka dipaksa harus ikut ber-*sai Keirei* ke Tokyo. Ratusan bahkan ribuan umat Islam di Kalimantan yang gugur dibunuh Jepang terutama dalam pembunuhan besar-besaran di Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Selatan. Jepang pernah menuduh bahwa Perkumpulan Muhammadiyah di Kalimantan Barat, sarang komplotan anti Nippon.⁸³

Sekolah-sekolah partikelir atau sekolah-sekolah swasta dengan sendirinya ikut bubar bersama Pergerakan Rakyat yang membinanya, karena pergerakan rakyat dilarang pemerintah pendudukan Jepang dan diganti dengan Pergerakan Rakyat Indonesia Jepang. Dengan tekanan senjata tiap-tiap pagi diadakan penghormatan-penghormatan besar kepada Istana Kaisar Jepang, dengan *Sai Keirei* ke arah Tokyo, oleh guru-guru dan murid-murid sekolah.⁸⁴

2. Penggemblengan Pemuda Untuk Dai Nippon

Menurut Wajidi, *nipponisasi* pada kalangan pemuda dan pelajar juga dilakukan lebih mendalam oleh pemerintah pendudukan Jepang melalui pembentukan gerakan pemuda. Di antaranya *Seinendan*, *Konan Hokoku Dan*, *Boei Teisin Tai*, *Heiho Angkatan Laut* atau *Kaigun Heiho*, *Fujin-Kai* dan sebagainya. Kemudian penyelenggaraan sistem persekolahan untuk kepentingan perang dan janji mewujudkan kemakmuran bersama Asia Timur Raya. Melalui organisasi bentukannya itulah, Jepang menanamkan semangat nasionalisme dan perasaan anti Inggris-Amerika. Salah satu organisasi terpenting dalam penggemblengan pemuda adalah *Kaigun Heiho*. Untuk menjadi

⁸³ Wajidi, "Nasionalisme dan Revolusi Indonesia di Kalimantan Selatan, 1900-1950", *Tesis* Pada Program Studi Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Universitas Lambung Mangkurat, Banjarmasin, 2017, hlm.278.

⁸⁴ *ibid.*

anggota *Kaigun Heiho* setidaknya berumur antara 17 sampai 26 tahun. Ujian penerimaan anggota *Kaigun Heiho* berupa pemeriksaan badan dan budi pekerti. Mereka dilatih selama 2 bulan.⁸⁵ Melalui *Kaigun Heiho* para pemuda dilatih maju ke medan perang bersama tentara Jepang. Kandangan menjadi pusat *Kaigun Heiho*, dan daerah antara Kandangan dan Barabai menjadi lokasi latihannya.

Wajidi juga menguraikan bahwa untuk menebalkan semangat dan kesiagaan, mereka menjalani latihan ketentaraan, dilatih menggunakan samurai, senjata, dan sangkur, memper-tunjukkan *kaigun taiso*, isyarat dengan bendera, perang-perangan dan pertunjukan berbaris. Mereka giat berlatih, dan memper-tunjukkan hasil latihan di lapangan di hadapan pembesar militer Jepang.⁸⁶

Sementara itu di Kandangan, organisasi sandiwara Pemoeda Pembela Tanah Air Kandangan (PPK) telah diganti namanya menjadi *Kandangan Boenken Seinendan Ongakoe-tai*.⁸⁷ Para *Seinden*an itu dikerahkan membantu pekerjaan pemerintahan di tingkat *Fuku Gun* atau Kecamatan dan *Gun* atau Kewedanaan, seperti bekerja membuat kebun ubi kayu, dan kegiatan melipatgandakan hasil bumi lainnya. Untuk menebalkan semangat para pemuda Kalimantan yang tergabung di dalam *Seinden*an, pemerintah pendudukan Jepang memerintahkan para pemuda untuk menyanyikan lagu berjudul *Lagoe Seinendan Borneo Selatan*. Meskipun di balik lagu *Seinden*an *Borneo* dimaksudkan untuk kepentingan Jepang, di dalam lagu tersebut terdapat lirik berbunyi “*Krahkan pikiran tenaga djiwa-Madjoe bersama toedjoean satoe-Mengabdi kepada Indonesia-Mendjoendjoeng tinggi Borneo Baroe*”. Melalui nyanyian, tentara pendudukan Jepang juga menggembleng semangat pemuda agar

⁸⁵ *Ibid*, hlm.279; lihat juga Suhartono, *Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945* (Yogya-karta: Pustaka Pelajar, 2001), hlm. 130-131.

⁸⁶ *Ibid*.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 280

mencintai negeri. Judul lagu lain dalam bentuk mars adalah “Kecintaan Negeri” atau *Aikoku-koshinyoko*.⁸⁸

Kemudian, Wajidi juga mengemukakan bahwa dari koran *Borneo Simboen* edisi 28 April 2604 memberitakan, untuk membakar semangat para pemuda, pemerintah pendudukan Jepang menyelenggarakan sayembara mengarang *Konan Hokoku Dan*. Sayembara itu diikuti 66 orang, dan terpilih sebagai pemenang diberikan hadiah uang, yakni Pemenang 1 dari Kotabaru dengan hadiah uang sebesar f. 50, Pemenang 2 dari Banjarmasin dengan hadiah uang f. 30, dan Pemenang 3, A.A. Rivai dari Banjarmasin diberikan uang f. 10. Karangan nyanyian karya peran berjudul *Konan Hokokoe Dan Danka*, artinya “Dengan Semangat Berkobar-kobar”.⁸⁹

LAGOE SEINENDAN BORNEO SELATAN. (19)

F = 1

4/4

5 . 5 | 1 - 5 . 5 | 3 - 5 | 5 . 3 1 6 . 6 | 5 - -
Ma ri lah ma ri lah Pe moe - da sti a wan

3 . 4 | 3 2 . 6 7 1 | 2 5 - 5 | 1 7 6 2 | 2 - -
Ang - go ta Sei - nen uan Borne o Sela tin

2/4

5 . 5 || 1 0 5 | 1 0 5 . 5 | 5 6 . 7 | 1 0 2 . 2 | 3 0
Lang kah kan ka ki ma o joe an ti ri Ber sa toe

4/4

2 | 3 0 2 . 2 | 2 3 . 4 | 5 0 6 6 || 5 . 3 1 6 6 |
ha ti ber : a masa - ma Dib : wah sinar Pan ji

5 . 3 1 5 . 5 | 1 - 3 . 4 | 5 - - 5 | 5 - 2 7 | 1 - - ||
Ma ta ri Ma ta ri Ni - ppon tja ja A si a

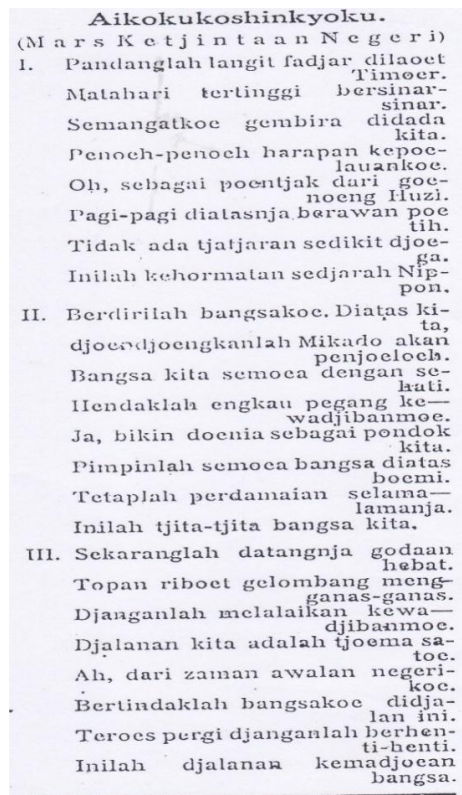
Madjoelah madjoelah Pemoe- da paal wan Anggota Seinendan Borneo Selatan Krahan piiran tenaga diwa Madjoe bersama toedjoen sutoe Mngubdi kep da Indonesia Mandjoendjoeng tinggi Borneo Baroe	Bang itlah bangkitlah Pe- moeda goenawan Anggota Seinendan Borneo Selatan Muri bekerdja giat gembira M latih badan boedi pakekti Poetra negara moeda pswira Setiap maza tela berbakti
--	--

Gambar 2.2. Lirik *Lagoe Seinendan Borneo Selatan*, dalam *Borneo Simboen* No. 788 Mokoejobi (Kamis) 14 Rokoe-Gatsoe 2605 Tahoen Keempat, hlm. 2, (Sumber: repro Wajidi, *Tesis* 2017).

⁸⁸ *Ibid.*

⁸⁹ *Ibid.*, hlm. 200.

Lagu dan musik sangat penting mengobarkan semangat perjuangan rakyat. Lagu-lagu bernuansa perjuangan yang disiarkan melalui radio, dinyanyikan di sekolah-sekolah, di setiap pelatihan anggota organisasi kepemudaan dan militer. Bahkan lagu Indonesia Raya boleh dinyanyikan, atau alunan musik dan lagu-lagu perjuangan di berbagai tempat pertemuan. Tidak hanya untuk menghibur, tetapi juga untuk mengobarkan semangat perjuangan dan pengorbanan membela tanah air, yang meskipun waktu itu untuk kepentingan Perang Asia Timur Raya.



Gambar 2.3. Lirik lagu Kecintaan Negeri atau *Aikokukoshinyoko*, Borneo Simboen No. 788 Mokoejobi (Kamis) 14 Ro koe-Gatsoe 2605 Tahoen Keempat, hlm. 2, (Sumber: repro Wajidi, *Tesis* 2017).

Selain itu, Wajidi juga memaparkan bahwa dalam Surat kabar Borneo Simboen No. 600 Soejobi (Raboe) 8 Djoe-Itji-Gatsoe 2604 memberitakan, sebagaimana dikatakan Hadhariyah M pada saat memberikan sambutan dalam pertunjukan musik di Osaka Gekijo bahwa maksud pertunjukan musik adalah sebagai suatu sumbangan dalam berbakti dari perkumpulan musik dalam memperteguh tenaga perang. Kemudian, Wajidi mengemukakan di dalam Borneo Simboen No. 652 Nitjijobi (Minggoe) 7 Itji-Gatsoe 2605 juga diberitakan bahwa para guru juga digembleng fisiknya dan jiwanya. Selanjutnya sebanyak 66 orang guru dilatih di *Rensei Dodjo* dengan tujuan memperluas bahasa Nippon, mengusahakan bekerja rajin secara *kinrohosi*, memajukan perguruan teknik, dan memperbaharui semangat dan cara hidup sesuai zaman. Dalam pemberitaan Borneo Simboen No. 435 Tanggal 28 April 2604 juga disebutkan bahwa setelah berlatih selama 20 hari maka tanggal 4 November 1942 dilaksanakan penutupan pelatihan. Pada saat acara penutupan selesainya pelatihan, paduka tuan *Nisi Siseikan* memberikan nasihat kepada para guru agar saat kembali ke masyarakat dan sekolah mereka selalu penuh semangat dalam perjuangan membentuk Borneo Baru.⁹⁰

Surat kabar Borneo Simboen No. 601 Moekoejobi edisi (Kamis) 9 Djoe-Itji-Gatsoe 2605 memberitakan bahwa pelatihan tidak hanya untuk guru laki-laki, namun juga untuk guru perempuan. Bahkan pemerintah pendudukan Jepang secara khusus memberikan pelatihan khusus guru-guru perempuan selama 25 hari untuk 60 orang guru perempuan bertempat di *Rensei Dodjo*.⁹¹

⁹⁰ *Ibid.*, hlm. 200.

⁹¹ *Ibid.*



Gambar 2.4. Beberapa *header* Borneo Simboen (Borneo Shimboen) edisi Banjarmasin terbitan 2602 [1942], 2603 [1943], 2604 [1944], (Sumber: repro Wajidi, *Tesis* 2017).

Pada masa pendudukan Jepang ini, rakyat diberikan kesempatan untuk sekolah dan diskriminasi pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda dahulu dihapuskan. Dengan demikian murid-murid sekolah bertambah banyak. Akan tetapi, penyelenggaraan sekolah ditangani langsung oleh Jepang dan lebih ditekankan pada hal-hal yang berhubungan dengan usaha *Nipponisasi* generasi muda seperti disiplin cara militer, lagu-lagu Jepang, gerak badan dan upacara bendera *Hinomaru*, *Sai Keirei* atau penghormatan kepada *Tenno Heika* serta penggunaan Bahasa Jepang.⁹²

Bahasa Jepang digalakkan di kalangan penduduk, Kantor Pegawai *Minseibu* dan maskapai, disamping penggunaan Bahasa Indonesia menggantikan Bahasa Belanda dan Arab (misalnya

⁹² *Ibid.*, hlm.201.

dalam khotbah Jumat). Jepang memprogandakan pentingnya Bahasa Jepang dalam penghidupan. Untuk menggalakkan pemakaian Bahasa Jepang, pemerintah pendudukan Jepang menetapkan “Hari Bahasa Nippon” di setiap tanggal 4 *Nigatsoe* (Februari). Dan untuk merayakan hari bahasa itu, pemerintah pendudukan Jepang menyelenggarakan kegiatan “Mingguan Bahasa Nippon”.⁹³

Dalam Borneo Simboen Nomor 363 tanggal 4 Februari 2604 diberitakan bahwa untuk menjalankan “Mingguan Bahasa Nippon” maka semua pegawai bangsa Jepang di semua kantor *Minseibu* (pemerintahan) dan maskapai wajib berbahasa Jepang (jangan menggunakan bahasa Indonesia) sehingga menjadi contoh bagi pegawai dan penduduk untuk bercakap-cakap dalam bahasa Jepang. Maksud penyelenggaraan “Hari Bahasa Nippon” untuk menyebarkan perkataan-perkataan bahasa Jepang yang dipergunakan dalam pergaulan hidup. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan di lingkungan kantor dan maskapai dapat digunakan percakapan terpenting seperti *Ohayo gozaimatsu*, *arigato gozaimatsu*, *irassyaimasyi*, *tabako*, *akeru*, *simeru*, nama-nama benda yang penting, perkataan yang penting untuk mengurus pekerjaan, menyingkat kata-kata sukar, dan sebagainya.⁹⁴

Upaya pemerintah pendudukan Jepang melakukan *nipponisasi* melalui penggalakan penggunaan Bahasa Jepang di kalangan pegawai kantor, maskapai dan penduduk cukup massif dan berhasil karena hanya dalam waktu tiga tahun mereka dapat memarjinalkan penggunaan Bahasa Belanda. Di kota-kota maupun di pelosok desa, para orang tua dan anak-anak mulai terbiasa mengucapkan perkataan Jepang untuk istilah penting seperti terima kasih, selamat pagi, selamat sore, dan selamat

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ *Ibid.*

malam dalam Bahasa Jepang. Anak-anak juga dengan riangnya menyanyikan lagu-lagu Jepang.⁹⁵

3. Perjuangan Pemuda Lewat Media massa

Persuratkabaran di Kalimantan Selatan yang dipelopori oleh para pemuda, sebelum kedatangan bala tentara Jepang memasuki dan menduduki ibu kota Banjarmasin, yang menjadi ibukota Provinsi Borneo. Menurut Ramli Nawawi, pada wilayah Banjarmasin terbit surat kabar atau harian seperti *Suara Kalimantan*, *Borneo Post*, yang terbit dua kali seminggu serta *Bintang Borneo*. Pada wilayah Barabai terbit mingguan *Suara Hulu Sungai* yang merupakan penerbitan *Suara Kalimantan* dan *Borneo Courant* terbit dua kali sebulan sebagai *advertentieblad* atau Lembaran Iklan disiarkan gratis yang dihentikan penerbitannya ketika Jerman dalam Perang Dunia ke-2 menduduki negeri Belanda, sebab percetakan *Banjarmasinse Drukkerij* yang mencetak dan menerbitkan *advertentieblad* adalah kepunyaan orang Jerman.⁹⁶

Dua hari sebelum tentara Jepang memasuki kota Banjarmasin oleh pihak AVC Belanda dilakukan pembumi-hangusan terhadap instalasi, bangunan pasar-pasar, jembatan dan lain-lain. Tindakan ini dilakukan dengan harapan agar alat-alat tersebut tidak dapat dipergunakan lagi oleh Jepang. Dalam hal ini termasuk juga percetakan, yang dipergunakan mencetak selebaran atau penerbitan koran atau surat kabar.⁹⁷

A.A. Hamidhan yang sebelum Jepang masuk menjadi penerbit dan pemimpin redaksi harian *Suara Kalimantan* di Banjarmasin, disertai tugas untuk menerbitkan surat kabar. Oleh karena percetakan yang tadinya mencetak *Suara Kalimantan* di Banjarmasin dan Mingguan *Suara di Hulu Sungai* kena bumi hangus Belanda, maka disediakan sebuah percetakan yang bernama *Bandjarmasinse Drukkerij*, semula kepunyaan

⁹⁵ *Ibid.*, hlm.203.

⁹⁶ Ramli Nawawi *et al.*, *loc.cit.*; H. Soebagijo IN, *Sejarah Pers Indonesia* (Jakarta: Dewan Pers, 1977, hlm.28.

⁹⁷ *Ibid.*

orang Jerman yang kemudian disita karena Jerman dalam keadaan perang dengan Belanda. Akhirnya jatuh ke tangan orang Cina, yang berhasil membelinya di waktu dilelang sebagai barang sitaan.

Setelah diadakan perbaikan pada mesin-mesin cetak dan penyusunan huruf lainnya, sehingga pada awal bulan Maret 1942 dapatlah diterbitkan nomor pertama harian bernama *Kalimantan Raya*. Nama ini adalah pilihan A.A. Hamidhan sendiri, karena tidak menginginkan nama *Suara Kalimantan* untuk nama harian yang baru terbit itu. Yang menjadi sebab utama A.A. Hamidhan tidak ingin *Suara Kalimantan* dijadikan nama yang baru diterbitkan itu, karena harian ini adalah kepunyaan pemerintah pendudukan Jepang dan segala sesuatunya dibawah kekuasaan pemerintah pendudukan Jepang, yang isinya dan tujuannya sudah tentu sangat bertentangan dengan harian *Suara Kalimantan*.⁹⁸

Tidak mengherankan ketika harian Kalimantan Raya itu mulai terbit A.A. Hamidhan sudah mendapat pertanyaan dari pihak penguasa Jepang mengenai nama harian ini. Untuk ini A.A. Hamidhan menerangkan, bahwa sekarang Pemerintah Jepang bukan hanya menduduki daerah Kalimantan yang tadinya dikuasai oleh Belanda, tetapi juga meliputi daerah Serawak, Brunai dan Sandakan yang dulunya dikuasai Inggris. Penjelasan atau keterangan di atas dapat diterima oleh pemerintah Jepang. Sebelumnya penerbitan itu, Jepang telah menyerahkan segala sesuatunya kepada A.A. Hamidhan yang penting surat kabar itu terbit.

Untuk memperlengkapi isi harian itu, agar sesuai dengan situasi perang, maka atas bantuan Syamsul Arifin, dengan mempergunakan radio accu atau radio aki diambil berita-berita dari siaran radio Tokyo, kemudian pekerjaan ini diteruskan oleh Thalib Abadi. Setelah dua minggu Kalimantan Raya terbit,

⁹⁸ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hlm. 31; Samsudin Probohaddon, *Sejarah Pers dan Wartawan Surakarta* (1985), hlm.

muncullah harian *Borneo Baru* yang dipimpin oleh Andin Boer'ie, yang sebelum Jepang masuk memimpin harian *Bintang Borneo*. Harian ini tidak berumur lama penerbitannya karena kekurangan persediaan kertas.

Suatu pengalaman pahit yang pernah dirasakan oleh Pimpinan harian Kalimantan Raya, adalah suatu panggilan mendadak dari Komandan Tentara Jepang di Banjarmasin, mengenai pemberitaan yang dimuat dalam harian Kalimantan Raya yaitu mengenai sebuah berita dari Kotabaru mengenai gerakan atau perpindahan militer Jepang dalam harian tersebut. Berita tersebut diberi tanda dengan pensil merah yang tebal, disodorkan kepada A.A. Hamidhan, dengan kata-kata keras dalam bahasa Jepang yang kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, yang maksudnya "kenapa dimuat berita gerakan atau perpindahan militer Jepang dalam koran! Ini tidak betul! Bisa dihukum potong leher!".

Sudah tentu ini mengejutkan A.A. Hamidhan sebagai penanggung jawab penuh atas segala isi *Kalimantan Raya*. Berita yang menjadi persoalan ini adalah berita perpisahan penduduk dengan sekelompok tentara Jepang yang terpaksa meninggalkan Kotabaru dan akan ditempatkan ke lain daerah yang tidak disebutkan. Bagi kita berita ini wajar, tetapi bagi Jepang ini merupakan strategi perang. Kali ini mendapat pengampunan, tetapi bila pada kemudian hari ada berita yang menjurus strategi militer dimuat, tidak ada ampun lagi.⁹⁹

Pada sekitar permulaan bulan April 1942, tentara pendudukan Angkatan Darat Jepang (Rikugun) meninggalkan Kalimantan untuk bergerak meneruskan penyerangannya ke daerah-daerah lain yang belum ditaklukkan seperti Birma. Sebagai penggantinya datang tentara Angkatan Laut (Kaigun), lengkap dengan pemerintahan sipilnya. Sejak saat itu penerbitan harian Kalimantan Raya tidak sebebas seperti permulaan diterbitkan.

⁹⁹ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 32.



Gambar 2.5. Para tahanan di penjara Banjarmasin, diantaranya wartawan A.A. Hamidhan duduk ditengah (angka 1) dan wartawan Andin Boer'i (angka 2). Andin Boerie di kemudian hari dibunuh tentara Jepang di Balikpapan. (Sumber: repro Wajidi, *Tesis* 2017).

Jika pada mula-mula terbit hampir setiap hari atau setiap terbit selalu ditanamkan kepada rakyat Indonesia, bahwa tanah air dan bangsa kita telah bebas dari penjajahan Belanda berkat bantuan tentara Jepang dan selalu menganjurkan supaya bangsa Indonesia memperteguh persatuan demi untuk nusa dan bangsa. Kemudian kata-kata yang sesungguhnya menjadi cita-cita kita itu berangsur-angsur dihapuskan atas perintah penguasa Jepang, hingga akhirnya dikehendaki Jepang hilang sama sekali dari alam pikiran rakyat Indonesia. Malah dikehendaki oleh Pemerintah Jepang agar nama-nama Bung Karno dan Bung Hatta tidak ada lagi menghiasi harian *Kalimantan Raya*.

Pimpinan harian Kalimantan Raya pernah menerima seorang utusan Pemerintah Pusat Angkatan Laut Jepang

(Minseifu) di Makassar, yang maksudnya menjajaki mengenai pemisahan pemerintahan Jepang di Indonesia. Angkatan Laut atau Kaigun yang menguasai Kalimantan, Sulawesi, Maluku dan New Guinea sedangkan Angkatan Darat (Rikugun) menguasai Jawa, Bali, Sumatera sampai ke Malaka.

Bagi bangsa Indonesia gagasan atau rencana ini merupakan suatu persoalan yang amat menyimpang dari cita-cita bangsa karena penduduk yang berada dalam wilayah Angkatan Laut (Kaigun) tidak diperbolehkan berhubungan dengan penduduk yang berada dalam wilayah Angkatan Darat Jepang. Lebih tegas lagi agar ikatan kebangsaan Indonesia yang sudah kuat itu, diputuskan begitu saja oleh Jepang. Berbarengan dengan itu berkumandanglah kata-kata yang hebat, yakni Asia Timur Raya. Negara-negara yang telah ditaklukkan Jepang dimasukkan ke dalam Asia Timur Raya.¹⁰⁰

Pada akhir April atau awal Mei 1942 dari Tokyo harian *Asahi Simboen* mengirim rombongan karyawan yang terdiri dari pimpinan umum, pimpinan redaksi dengan stafnya termasuk yang khusus mengambil berita langsung dari Domei Tokyo, serta penyusun letter dan pencetaknya. Dalam suatu pertemuan antara pemerintahan sipil Jepang, pihak *Asahi Simboen* dan Kalimantan Raya, diambil suatu keputusan untuk melebur harian Kalimantan Raya menjadi *Borneo Simboen*. Semula Borneo Simboen diterbitkan dengan bersama, yaitu dari 4 halaman, dijadikan 2 halaman huruf Latin bahasa Indonesia, sedang sisanya huruf kanji atau huruf Jepang berbahasa Jepang. Kantor dan percetakan Kalimantan Raya yang menjadi Borneo Simboen berada di sebelah kantor Borsumij dahulu kemudian menjadi Aduma Niaga kemudian pindah ke gedung bertingkat kepunyaan Geo Wehry di sebelah BIM.¹⁰¹

¹⁰⁰ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 33; lihat juga Nino Oktorini, *Dibawah Matahari Terbit Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia 1941-1945* (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2016), hlm. 13.

¹⁰¹ M. Idwar Saleh, *et.al.*, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, (Proyek Penelitian Dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Pusat Penelitian Sejarah Dan Budaya, Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan, 1977/ 1978), hlm. 95-96.

Kemudian mesin-mesin cetak ditambah, yang didatangkan dari Surabaya yang pada mulanya mesin kepunyaan Sin Po di Surabaya. Dengan demikian penerbitan Borneo Simboen berbahasa Indonesia dapat dipisahkan dari Borneo Simboen berbahasa Jepang. Meskipun kedua jenis Borneo Simboen itu diterbitkan dengan ukuran kecil, disesuaikan dengan persediaan kertas yang khusus didatangkan dari Tokyo, tetapi jumlah wartawannya, baik untuk edisi Indonesia, maupun edisi Jepang atau edisi berbahasa Jepang dengan huruf Jepang cukup besar. Jumlah wartawannya tidak sesuai dengan ukuran halaman koran yang akan diisi. Untuk Borneo Simboen edisi Indonesia, jumlah wartawannya 12 orang terdiri dari A.A. Hamidhan sebagai pengurus dan pimpinan redaksi, A.A. Rivai pengganti pimpinan redaksi, Gt. Sugian Noor, F. Mohani, Marwan Ali, Zaglulsyah, Ahmad Basuni, Syaharansyah, Abdul Wahab, Rosita Gani, Golek Kencana dan Yanti Tajana. Mereka umumnya berusia muda.

Sensor dari pihak pemerintah pendudukan Jepang, yang dilakukan oleh bagian Seimuka dari kantor Minseifu di Banjarmasin diperketat sedemikian rupa, sehingga kalau semua karangan atau pemberitaan belum mendapat izin, koran tidak boleh dicetak dan diedarkan.¹⁰² Untuk mempermudah teknik kerja dan kerjasama yang baik, urusan sensor tersebut diatur sebagai berikut: setiap karangan atau artikel atau pemberitaan, ditik atau dibuat dengan mesin tulis memakai karbon, dengan demikian selemba diturunkan ke bagian percetakan untuk disusun atau dizet dan yang selembarnya dikirim ke kantor sensor. Jika nanti ternyata ada perubahan pada artikel atau pemberitaan itu, maka segera diadakan koreksi, sedangkan jika dilarang untuk dimuat, maka *zetsel* itu, yang biasa sudah

¹⁰² Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 34; lihat juga Soetopo Soetanto, "Sistem Propaganda Jepang Melalui Penerbitan", *Makalah* disajikan dalam Simposium Sejarah Indonesia Modern di LIPI pada tanggal 9-11 Maret 1992, hlm.3.

diopmaak atau disusun untuk dicetak akan diangkat dan diganti dengan *zetsel* yang baru yang sudah lepas dari sensor.

Beberapa bulan kemudian *Borneo Simboen* juga diterbitkan di Balikpapan, edisi untuk Kalimantan Timur. Edisi Bahasa Indonesia dipimpin oleh Andin Boer'ie, edisi bahasa Jepang dipimpin oleh salah seorang wartawan Jepang, yang sebelumnya sebagai staf redaksi *Borneo Simboen* di pusat yaitu Banjarmasin. Kemudian menyusul pula edisi Pontianak, edisi bahasa Indonesia dipimpin Ahmad Kasim. Disamping edisi bahasa Indonesia juga diterbitkan *Borneo Simboen* edisi bahasa Tionghoa dengan huruf Tionghoa yang juga dapat dibaca oleh orang Jepang dipimpin oleh seorang Jepang yang pasih berbahasa Tionghoa.

Pada awal tahun 1943 baru ada hubungan kapal laut antara Banjarmasin-Surabaya pulang pergi dengan menggunakan bekas kapal Belanda yang diberi nama Nitei Maru. Selain itu menggunakan perahu layar atau penes-penes atau pinisi-pinisi Banjarmasin. Ini dipergunakan A.A. Hamidhan untuk berkunjung ke pulau Jawa. Dalam peninjauannya dia bertemu dengan wartawan yang tergabung dalam PERDI atau Persatuan Djurnalistik Indonesia seperti Mas Toekoel, Dermawan Lubis dan Imam Supardi yang bekerja sebagai Wartawan Suara Asia di Surabaya. Di Semarang bertemu Parada Harahap yang memimpin surat kabar Sinar Asia. Dari hasil pengamatan A.A. Hamidhan ternyata wartawan di Jawa diawasi lebih ketat Pemerintah Jepang daripada di Banjarmasin.

Pada awal Desember 1943 A.A. Hamidhan dipilih sebagai wartawan yang mewakili Kalimantan dalam Permusyawaratan Besar Persuratkabaran seluruh Asia Timur Raya di Tokyo. Untuk daerah pemerintahan Angkatan Laut atau Kaigun lainnya dikirim empat orang wartawan termasuk A.A. Hamidhan, Manai Sophian dan Pantouw untuk Sulawesi dan Pattinaipow dari Ambon mewakili Maluku.¹⁰³ Dari daerah Angkatan Darat Jepang (Rikugun) dikirim Mas Toekoel untuk Jawa, Adi Negoro untuk Sumatera dan wartawan dari utusan

¹⁰³ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 35.

Melayu – Singapura. Selain ini juga hadir dua orang wartawan dari Birma atau Myanmar sekarang, dua orang dari Thailand, dua orang dari Hongkong dan juga dari utusan wartawan dari Tiongkok dan Korea. Sedangkan yang menjadi tuan rumah adalah wartawan Jepang. Yang menjadi keputusan dari Permusyawaratan Besar itu, terutama mengenai seluruh persurat kabaran di Asia Timur Raya, bersatu padu untuk memenangkan peperangan menghadapi pihak Sekutu.¹⁰⁴

Pada saat serangan Sekutu terhadap Jepang semakin menghebat dan pertahanan Jepang sudah mulai runtuh, beberapa kota di Kalimantan mendapat serangan pesawat-pesawat pembom B-26, demikian juga kota Banjarmasin beberapa kali mendapat serangan udara. Pihak penerbitan surat kabar diperintahkan untuk mempersiapkan penerbitan darurat jika terpaksa. Karena itu sebagian percetakan dengan beberapa staf redaksi dipindahkan ke Kandangan dan kemudian diterbitkanlah Borneo Simboen edisi Hulu Sungai. Sebagian besar berita dikirim dari Banjarmasin atau pusat. Sebagian lagi dipindahkan ke Martapura untuk maksud yang sama. Setelah pasukan sekutu datang, penerbitan Borneo Simboen dihentikan.¹⁰⁵

B. Gemblengan Pemuda Dalam Organisasi Politik dan Sosial

Wilayah Borneo Selatan pada masa pendudukan Jepang merupakan bagian dari pemerintahan sipil *Borneo Minseibu*. Dalam hal ini, secara administratif termasuk daerah Indonesia Bagian Timur di bawah kekuasaan Angkatan Laut atau *Kaigun* yang disebut *Minseifu*. Pusatnya adalah di Makassar. Untuk membantu operasional *Borneo Minseibu Chokan*, maka dibentuk

¹⁰⁴ Aiko Kurasawa, "Propaganda Media On Java Under the Japanese 1942-1945" dalam *Indonesia* No. 44, Oktober 1997, hlm4.

¹⁰⁵ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 36.

Rensei Seimo Tyosa In. Badan yang bertugas sebagai penasihat rahasia di bidang pemerintahan.¹⁰⁶

Setahun setelah berkuasa, tepatnya tahun 1943, Pemerintahan Pendudukan Jepang mulai mengadakan konsolidasi dalam bidang pemerintahan dengan intensif. Semua jawatan dan organisasi pemerintahan *dinipponisasikan*. Sasaran utama adalah generasi muda yakni kalangan pemuda dan pelajar.¹⁰⁷ Setelah berunding dengan *Rensei Seimo Tyosa In* dan dengan mempertimbangkan gerakan-gerakan di Jawa seperti Gerakan Tiga A, Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, maka *Minseibu Chokan* di Kalimantan bagian Selatan memutuskan membentuk gerakan pemuda, secara bertingkat.¹⁰⁸

Gerakan-gerakan pemuda seperti Gerakan Tiga A, kemudian Putera atau Pusat Tenaga Rakyat, Jawa Hokokai serta Cuo Sangi In, tidak dibentuk di Kalimantan. Umumnya di wilayah ini dikoordinir oleh *Keimin Bunka Syidosya* atau Badan Pusat Kebudayaan termasuk Seksi dalam Kantor Penerangan Jepang atau *Keimin Syidobo*. Adapun profil gerakan-gerakan pemuda yang di masa pendudukan Jepang di daerah ini umumnya bersifat semi militer,¹⁰⁹ sebagai berikut:

a. Seinendan

Bagi pemuda yang berumur 15 sampai 29 tahun, dari tiap *son* (satu desa) atau *Buntai* (regu) dipusatkan pada *Fuku Gun* (Kecamatan) dan *Gun* (Kewedanaan). Tugasnya bersifat lokal. Menurut Wajidi, terdapat kegiatan dalam seinendan ini. Misalnya, dalam bidang pendidikan, Asano Sensei kepada para siswanya di Bandjermasin-Hutsu-Tyugakko (setingkat SMP) yang berlokasi di eks MULO (sekolah Belanda), diperkenalkan tepuk tangan "*mitsu-mitsu-nanatsu*" atau 3-3-7 untuk

¹⁰⁶ M. Suriansyah Ideham (ed), *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 83-84.

¹⁰⁷ *ibid.*

¹⁰⁸ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 36; M. Idwar Saleh, *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 103-104.

¹⁰⁹ Ramli Nawawi *et al.*, *ibid.*, hal. 36.

menggembirakan pertandingan antar kelas atau antar seko-lah; diduga kini menjadi “Tepuk Pramuka”.¹¹⁰

b. Konan Hokoku Dan

Organisasi kepemudaan ini ditujukan bagi mereka yang sudah berusia 20 tahun sampai 35 tahun. Anggotanya dikumpulkan dari tiap *Fuku Gun* atau *Sotai* (Seksi) dan dipusatkan pada wilayah *Gun* atau Bandjermasin *Syi*.

c. Boei Teisin Tai

Organisasi ini adalah pembaruan dan perluasan dari organisasi sebelumnya, *Konan Hokoku Dan* yang dibentuk sejak Mei 1945. Dalam perkembangannya, *Boei Teisin Tai* ini akhirnya dihapuskan. Walaupun demikian, Banyak pengetahuan baru tentang semi militer yang bisa dipelajari oleh pemuda lokal. Kesatuan *Boei Teisin Tai* ini selain bertugas lokal, juga sebagai tenaga cadangan untuk pembangunan, dipersiapkan untuk pasukan gerilya Jepang di daerah yang akan diduduki musuh. *Boei Teisin Tai* juga mendapat latihan militer dan pengetahuan senjata ringan. Mereka tidak dikumpulkan dalam asrama, tetapi mereka sewaktu-waktu berkumpul ketika ada latihan. Latihan ini biasanya diberikan anggota *Kaigun* dan diawasi *Bunken Kanrikan* atau wakilnya yang berkedudukan sebagai pengawas setempat. Kecuali untuk daerah Banjarmasin yang dipusatkan di *Rensei Doojo* atau Pusat latihan di Banjarmasin. Adapun acara latihan berlangsung kurang lebih dua bulan untuk tiap angkatan. Dalam hal ini berupa penggemblengan *seisin* atau semangat dan anti Amerika dan Inggris. Kemudian, kesetiaan kepada *Tenno Heika*, Bahasa Jepang dan *Kyoren* serta latihan kemiliteran termasuk *taiso* atau senam, pelatihnya semua orang Jepang.

¹¹⁰ Wajidi, 2017, *loc.cit.*

d. Heiho Angkatan Laut atau Kaigun Heiho

Heiho adalah pembantu prajurit yang dilatih secara militer dan mempunyai hirarki kemiliteran sendiri.¹¹¹ Organisasi ini dibentuk dengan misi bertempur menghadapi musuh dalam beberapa angkatan. Heiho di Kalimantan Selatan terdapat tiga angkatan, angkatan pertama merupakan Heiho kelas satu. Ternyata, Sebagian besar mereka tewas dalam pertempuran Balikpapan.

e. Tokubetsu Toku Tai

Selanjutnya, pemerintah pendudukan Jepang juga membentuk *Kaigun* untuk menghadapi pendaratan sekutu, yang terdiri dari *heiho-heiho* pilihan dan prajurit *kaigun*. Semangat anti Barat atau anti Belanda kemudian menjadi anti Amerika dan Inggris ditanamkan benar-benar ke dalam dada pemuda di Kalimantan Selatan. Seperti cerita “Amat Heiho” sangat digembar-gemborkan Jepang dan merupakan cita-cita yang sangat diharapkan Jepang sebagai simbol pejuang menentang Amerika dan Inggris. Markas *Tokubetsu Toku Tai* ini berada di Bati-bati (di Kabupaten Tanah Laut, sekarang). *Tokubetsu Toku Tai* ini dibentuk belakangan pada awal tahun 1945. Pada saat Jepang hampir jatuh atau kalah, kesatuan ini merupakan pasukan tempur khusus yang terdiri dari satu kompi Angkatan Laut Jepang ditambah satu kompi *heiho* kelas satu atau Heiho pilihan, jumlahnya kurang lebih 200 orang.

f. Peta atau Pembela Tanah Air

Selanjutnya, dibentuk Peta atau Pembela Tanah Air yang terdiri dari unsur-unsur *Boei Teisin Tai*, sebanyak satu kompi pada bulan Juni 1945. Seminggu sesudah dibentuk mereka dimasukkan ke dalam kapal yang dikirim ke tujuan yang tidak diketahui dan tidak ada satu pun yang kembali. Anggota pasukan yang hidup hanya satu orang yaitu Sachrul, karena kejatuhan peti di kapal, jari kaki pecah, hingga ia ditinggal.

¹¹¹ M. Suriansyah Ideham (ed), *et.al., op.cit.*, hlm. 85.

g. Fujin-Kai

Dalam usaha Nipponisasi, kaum wanita pun dihimpun dalam wadah yang namanya *Fujin-Kai*. Tujuannya sebagai bagian pengerahan tenaga wanita untuk ikut membantu memenangkan Perang Asia Timur Raya. *Fujin-Kai* ini didirikan pada bulan Agustus 1945. Dengan dibentuknya *Fujin-Kai* ini, sesuai dengan kebijakan pemerintah pendudukan Jepang yang dipegang *kaigun*, seluruh perkumpulan wanita yang telah berkembang sejak zaman Belanda, yang berdasarkan agama maupun sosial dibekukan.¹¹²

Struktur organisasi *Fujin-Kai* ini oleh pemerintah pendudukan Jepang telah digariskan dan pimpinannya sudah ditentukan, yaitu setiap isteri pimpinan pemerintahan daerah otomatis menjadi Ketua *Fujin-Kai* daerah. Tugas *Fujin-Kai* adalah ikut serta dalam usaha yang ditetapkan pemerintah pendudukan Jepang terutama diarahkan kepada mobilitas tenaga wanita dalam usaha mengumpulkan dana bagi keperluan Jepang.

Kegiatan-kegiatan dana *Fujin-Kai* adalah melakukan kegiatan mengikutsertakan wanita di dalam usaha perang, baris berbaris, bela diri, kegiatan palang merah, perlindungan terhadap serangan udara dan sebagainya. Kemudian membantu meningkatkan produksi pangan. Selanjutnya, menyelenggarakan dapur umum dan mobil untuk pasukan tentara dan pekerja paksa dan mengumpulkan intan cukilan. *Fujin-Kai* sengaja dilibatkan terhadap kegiatan peperangan, terutama untuk garis-garis pertahanan di belakang. Semua tugas ini bagi wanita di Jawa dapat dilaksanakan dan ternyata pengalaman *Fujin-Kai* ini sangat bermanfaat karena kecakapan ini banyak membantu wanita di Jawa dalam Perang Kemerdekaan tahun 1945-1949.

Tugas-tugas seperti yang tersebut di atas, ternyata tidak sama dengan *Fujin-Kai* di Kalimantan Selatan. Kegiatan *Fujin-Kai* yang telah dilaksanakan ialah usaha pencarian dana lewat

¹¹² *ibid.*, hlm. 86.

pengumpulan harta benda rakyat berupa permata intan berlian. Kemudian mengadakan pasar malam amal lewat pertunjukan kesenian. Selain itu, rakyat dikerahkan dalam pengerahan tenaga kerja bakti, menanam jarak, padi dan mengetam padi serta kerja bakti di rumah-rumah sakit.

Ramli Nawawi memaparkan bahwa tokoh-tokoh *Fujin-Kai* di Kalimantan Selatan, adalah sebagian besar wanita yang aktif dalam pergerakan sebelum perang pecah. *Fujin-Kai* ini bersifat pengerahan massa yang diorganisir, mengakibatkan banyak wanita dari kalangan masyarakat biasa ikut terlibat di dalamnya. *Fujin-Kai* tidak hanya terdapat di Banjarmasin, tetapi terdapat di seluruh Kalimantan Selatan seperti Kandangan, Rantau, Tanjung, Haruai, Barabai.¹¹³ Beberapa tokoh-tokoh dari *Fujin-Kai* ini antara lain Ny. Mastifah Hamdi, Ny. Norsehan Johansyah, Ny. Norjihan, Ny. Norhanafiah, Ny. Syarifah Muzenah Assegaf, Ny. Asnah Hasan Basri.

Organisasi *Fujin-Kai* tidak bersifat vertikal maupun horizontal dari pusat ke daerah. Strukturnya hanya bersifat lokal saja, setiap daerah *Fujin-Kai* berada langsung di bawah pengawasan dan perintah Jepang setempat. *Fujin-Kai* tidak mempunyai struktur yang jelas. Sebagai contoh *Fujin-Kai* daerah dipimpin oleh isteri kepala daerah setempat, tetapi tanpa ada formasi dan personalia kepengurusan lebih lanjut. Hal ini menurut dugaan atau perkiraan disebabkan karena *Fujin-Kai* sesungguhnya suatu gerakan pengerahan massa bukan suatu organisasi sosial. Para wanita Banjar yang aktif dalam *Fujin-Kai* umumnya selalu berusaha menjaga jarak yang cukup jauh dalam pergaulan dengan orang-orang Jepang, sehingga Jepang tidak dapat berbuat hal-hal diluar tugas *Fujin-Kai* yang telah digariskan.

h. Pengerahan Tenaga

Pengerahan massa untuk kerja bakti ini merupakan kewajiban bagi setiap pemuda di tiap desa di Kalimantan Selatan. Setiap desa diwajibkan pemerintah pendudukan Jepang untuk

¹¹³ *ibid.*, hlm. 87.

mengumpulkan pemuda guna dipekerjakan pada pekerjaan yang sudah ditentukan Jepang. Biasanya para pemuda ini dikerahkan untuk waktu satu bulan, sesuai dengan pekerjaan yang akan dikerjakan. Kadang-kadang bisa juga terjadi Kinrohosi ini perlakuannya seperti kerja paksa seperti pengerahan massa yang didatangkan dari Jawa, biasanya diperoleh dengan tipu muslihat Jepang dan bekerja pada tempat-tempat tertentu dengan tidak bisa kembali lagi.¹¹⁴

Meski disebut pekerja sukarela, perlakuan yang diterima *Kinrohosi* lebih sering tidak ada bedanya dengan kerja paksa (*Romusha*) yaitu dengan cara perintah yang tidak bisa dibantah, pukulan bagi yang malas atau sakit. Koran Borneo Sim-boen memberitakan bahwa tenaga *Romusha* pernah dipekerjakan membuat jalan di Pelabuhan Boenken.¹¹⁵ Pekerjaan *Romusha* di Pelabuhan yang terjadi pada tahun 2604 (1942) itu boleh jadi salah satunya adalah membangun lapangan terbang Maluka dan Kanres daerah Dayu Ampah, dan memperbaiki lapangan terbang Ulin,¹¹⁶ serta membuat lubang-lubang perlindungan di sekitar landasan udara tersebut.¹¹⁷

Makanan yang disuguhkan Jepang adalah nasi yang penuh dengan *antah* atau padi dan apabila ketahuan makan memilih-milih *antah* tersebut, akan dipukul oleh Jepang. Barak-barak tempat tinggal sangat darurat, lantainya dari batang galam yang disusun, tanpa tikar dan tanpa kelambu dan tanpa obat-obatan. Yang penting bagi Jepang harus bekerja dengan tidak mempedulikan kondisi kesehatan tenaga yang bekerja, demikian juga kemampuan mereka.

¹¹⁴ Wajidi, 2017, *op.cit.*, hlm.196.

¹¹⁵ Ibid, hlm.206; lihat juga F Husaini & Apid, *Romusha: Sejarah Yang Terlupakan* (Yogyakarta: Ombak, 2008), hlm. 29.

¹¹⁶ Menurut Wajidi, Lapangan terbang Ulin yang dibangun Belanda tahun 1936 berada di seberang Bandar Udara Syamsudin Noor, Jalan A. Yani sekarang. *Ibid*, hlm. 207.

¹¹⁷ Wajidi, 2017, *loc.cit.*



Gambar 2.6. Sketsa Romusha dan *Kinrohosi*,
(Sumber: repro Wajidi, *Tesis* 2017; Hassan Basry, 1961).

Kondisi Maluka pada masa pendudukan Jepang telah menyisakan kenangan pedih bagi pekerja paksa, *Kinrohosi* dan *Romusha*, karena banyak diantara mereka tidak bisa kembali ke kampung halaman. Kisah pilu itu seakan melengkapi kondisi perekonomian masyarakat Kurau, tempat daerah Maluka berada. Pada tahun 1940-an kondisi kesejahteraan masyarakat Kurau dalam keadaan terpuruk. Tanaman padi banyak diusahakan di persawahan di kampung Kurau, namun hasilnya tidak seberapa. Padahal kampung-kampung lain banyak yang tidak memiliki sawah, sehingga tidak mengherankan jika Pelaihari kekurangan beras dan harus mengharap bantuan dari daerah lain. Bahkan pada tahun-tahun sebelumnya, Pelaihari juga hampir ditimpa bahaya kelaparan.¹¹⁸

Pada bagian akhir pemerintah pendudukan Jepang di Kalimantan Selatan yaitu sekitar bulan Februari sampai dengan Agustus 1945 wilayah ini berada dalam garis perang aktif. Pemboman oleh Sekutu hampir setiap hari terjadi.

¹¹⁸ *Ibid.*

Kesengsaraan meningkat, kehidupan rakyat mengalami kegoncangan hebat. Rakyat bertambah gelisah, tidak ada ketenteraman.

C. Propaganda dan Mobilisasi Dalam Nipponisasi Pemuda

Usaha pemerintah pendudukan Jepang untuk *menipponisasi* atau *penjepangan* terhadap Bangsa Indonesia dilakukan sangat intensif, melalui segala bidang dan tingkatan dari anak-anak sampai kepada orang dewasa. Pergerakan rakyat pun mengalami proses *nipponisasi*. Menjadi Pergerakan Indonesia-Jepang dan meluas sampai ke desa-desa, dengan segala organisasi ala Jepang. Dengan demikian rakyat di desa sudah mengenal organisasi pergerakan ala Jepang tersebut, tidak seperti keadaan sebelum Perang Dunia ke-2 Pergerakan rakyat hanya terbatas pada golongan terpelajar di kota saja dan belum meluas sampai ke desa. Semua perkumpulan politik dan agama dilarang di Kalimantan Selatan. Sebagai gantinya terhadap umat Islam, Jepang membentuk perkumpulan diberi nama *Jami'iah Islamiyah Borneo* atau *Borneo Kaikyo Kyokai*, diketuai H. Abdurrahman Siddik di bawah pengawasan ulama-ulama Jepang.¹¹⁹

Nipponisasi terhadap pelajar dilakukan lebih mendalam oleh pemerintah pendudukan Jepang. Setiap pagi sebelum pelajaran dimulai, diadakan upacara penaikan bendera *Hinomaru* dan menghadap ke utara menuju Tokyo untuk ber-*sai keirei* yaitu hormat membungkuk sembilan puluh derajat kepada *Tenno Heika*. Setiap tanggal 8 pada upacara itu ditambah dengan pembacaan *shosho* ialah sabda *Tenno Heika* yang dibacakan oleh *Koco-Sensei* atau Kepala Sekolah. Upacara ini diakhiri dengan pekik *Tenno Heika, Banzai* atau *Hidup Tenno Heika* dan *Dai Nippon Teikoku, Banzai* atau artinya Hidup Kekaisaran Nippon Raya. Ketika masuk kelas pagi hari dengan pimpinan *Hancho* atau Ketua Kelas diucapkan bersama-sama

¹¹⁹ M. Suriansyah Ideham (ed), *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 89.

dengan bersemangat sambil berdiri sebelum duduk dikursi untuk belajar sebuah semboyan *Warera no kotoba, Nippon go* (Bahasa kami, bahasa Jepang), *Asia no kotoba, Nippon go* (Bahasa Asia, bahasa Jepang), *Nobioko Kotoba, Nippon go* (Bahasa pemersatu bahasa Jepang).¹²⁰

Para pelajar dikerahkan juga dalam kesatuan-kesatuan *Gakkoto-Tai*. Kepala Sekolah dan sebagian Guru sekolah Lanjutan di Banjarmasin adalah orang Jepang. Tujuan pendidikan diutamakan pada penanaman semangat Jepang, semangat Bushido yaitu sifat kesatria Kaum Samurai dan cita-cita *Hakko Iciu* yang maksudnya cita-cita kepemimpinan Jepang di seluruh dunia terjamin kemurniannya.¹²¹

Dalam rangka pelaksanaan politik *Nipponisasi*, pemerintah pendudukan Jepang tidak segan-segan melakukan penyiksaan, pembunuhan terhadap orang-orang Indonesia yang dicurigainya dan beratus rakyat Indonesia yang terbunuh tanpa bersalah. Berita yang paling mengejutkan ialah berita yang dimuat dalam Harian Borneo Simboen nomor 324, tanggal 21 Desember 1943 atau 21 Desember 1943 dimana diberitakan hukuman mati lebih dari 200 orang yang ditangkap. Antara lain orang Belanda, Indonesia dan Tionghoa, diantaranya mantan Gubernur B.J. Haga, C.M. Vischer seorang yang berkebangsaan Swiss, Raden Susilo yang telah berumur 50 tahun saudara kandung almarhum Dokter Soetomo; pendiri Budi Utomo. Kemudian Housman Babu; mantan *Gunco* Sampit seorang pelopor suku Dayak dan pendiri Pakat Dayak. Berita tentang hukuman mati ini dilanjutkan lagi dengan berita Borneo Simboen tanggal 2 Juli 1944 atau 2 Juli 1944, dimana diberitakan ditembak mati tokoh-tokoh masyarakat antara lain J.F.Fattiasina, Syarif Mohammad Alkadri; Sultan Pontianak dengan keluarganya, 12 orang Sultan di Kalimantan Barat, Dokter Roebini beserta istrinya serta beratus-ratus rakyat yang tidak berdosa dibunuh.¹²²

¹²⁰ *Ibid.*

¹²¹ *Ibid.*

¹²² Wajidi, *loc.cit.*, hlm.217, 230-235



Gambar 2.7. Dr. Vischer di Barimba Kapuas,
(Sumber: repro Wajidi, *Tesis* 2017).

Akibat politik Nipponisasi ini dalam masyarakat Kalimantan Selatan, khususnya pemuda terlihat atau tertanam hal-hal yang antara hilangnya permusuhan bagi sesama umat Islam, terutama antara golongan kaum tuha atau kaum tua dengan golongan kaum muda, sejak itu pula dimulai khotbah Jum'at dalam bahasa Indonesia, yang sebelumnya hanya dalam bahasa Arab seluruhnya. Kemudian Pergerakan Rakyat yang sebelumnya hanya bergerak atau dikenal di tingkat kota saja, sekarang dengan melalui Pergerakan Rakyat Indonesia-Jepang sudah dikenal sampai ke desa-desa.¹²³

Selain itu, latihan militer yang diadakan bagi pemuda dari berbagai kelompok umur, merupakan bekal yang berguna dalam Perang Kemerdekaan menghadapi NICA kemudian. Pimpinan pergerakan rakyat mendapat latihan dan pengalaman dalam mengatur pemerintahan, karena sebagian dari mereka diangkat Jepang sebagai penasihat Jepang. Politik *Nipponisasi* dalam

¹²³ *Ibid.*

segala bidang dan propaganda Jepang dengan dalih pembangunan Borneo Baru, menimbulkan semangat nasionalisme dan rasa sadar akan harga diri.¹²⁴

D. Peran Pemuda Sekitar Proklamasi

1. Kunjungan Hatta ke Banjarmasin

Dalam bulan Juli 1945, Muhammad Hatta datang di Banjarmasin untuk mengadakan pertemuan dengan rakyat Kalimantan Selatan, khususnya kaum muda. Pertemuan yang semula akan diadakan di gedung Osaka Gekijo eks bioskop Rex¹²⁵ ternyata gagal, dan baru dapat diadakan pada pukul 24.00 bertempat di halaman rumah besar.¹²⁶ Pidato Bung Hatta berintikan ajakan peningkatan perjuangan untuk menuju Indonesia Merdeka.

2. Janji Kemerdekaan untuk Indonesia

Dalam rangka memperbaiki politik pertahanannya, perdana Menteri Koisyō Kuniyuki, yang menggantikan Perdana Menteri Tojo yang tersingkir karena jatuhnya pulau Saipan ke tangan Sekutu pada 4 Juli 1944, dan sidang *Diet* (Parlemen) Jepang ke-85, tanggal 5 September 1944, menjelaskan pemberian kemerdekaan kepada Indonesia.

Majalah resmi pemerintah Jepang *Kan Bo* Nomor 51 tanggal 8 September 1944 mengumumkan izin pemasangan bendera Merah Putih di samping *Hino Maru*, dan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya sesudah *Kimigayo* di dalam upacara-upacara. Tanggal 9 Agustus 1945 di Dalat, 200 km dari Saigon Vietnam, Markas Besar Jenderal Terauchi, Panglima Perang Asia Timur Raya untuk daerah Selatan, menyampaikan kepada Soekarno-Hatta-Rajiman, bahwa Indonesia sudah boleh merdeka. Namun dengan kekalahan Jepang, penguasa Jepang di

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ Atau eks bioskop Ria, sekarang menjadi toserba Barata. M. Suriansyah Ideham (ed), *et.al.*, *op.cit.*, hlm. 95.

¹²⁶ Kini kantor Sekretariat Nahdlatul Ulama. *Ibid.*, hlm.96.

Jakarta melarang proklamasi karena perintah Sekutu untuk mempertahankan *status quo*. Dengan dorongan, dukungan, dan keberanian rakyat Indonesia, kemerdekaan Indonesia diumumkan kepada dunia internasional pada 17 Agustus 1945.¹²⁷

3. Sekitar Proklamasi di Kalimantan Selatan

Tokoh pemuda dan pejuang, H.A. Hamidhan yang pada awal Agustus 1945 diangkat sebagai anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 Agustus 1945 lewat Surabaya. Hampir tengah malam 16 Agustus 1945 Hamidhan bersama anggota-anggota PPKI dari daerah lainnya, dijemput dan dibawa kerumah kediaman Laksamana Maeda; Kepala Kantor Penghubung Angkatan Laut yang terletak pada *Oranje Boulevard*. Malam itu Hamidhan hadir pada pembacaan konsep proklamasi, esoknya hadir pada peristiwa penting pembacaan Proklamasi Kemerdekaan di halaman rumah kediaman Soekarno, Jalan Pegangsaan Timur.

128



Gambar 2.8. A.A. Hamidhan.
(Sumber: dok. Keluarga A.A. Hamidhan)

¹²⁷ *Ibid*, hlm.97.

¹²⁸ *Ibid*.

Setelah menghadiri sidang-sidang pleno PPKI pada tanggal 18 dan 19 Agustus 1945, Hamidhan kembali ke Banjarmasin pada tanggal 20 Agustus 1945. Keesokan harinya pagi-pagi sekali dijemput menghadap *Minseibu Chokan* untuk memberikan laporan. Laporan singkat tetapi padat dari Hamidhan, dijawab *Minseibu Chokan* dengan perintah melarang disiarkannya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia itu. Apabila tersiar, maka Hamidhan yang bertanggung jawab. *Minseibu Chokan* menawarkan untuk bersama keluarganya mengungsi ke Jakarta. Karena Hamidhan menolak meninggalkan Kalimantan Selatan, *Minseibu Chokan* menyarankan agar untuk sementara Hamidhan mengisolasi diri dan tidak berhubungan dengan siapa pun.¹²⁹

Oleh karena itu, Hamidhan memutuskan berkumpul keluarganya di Rantau. Sebelumnya iaizinkan menemui Pangeran Musa Ardi Kesuma, Mr. Roesbandi, dan Dokter Sosodoro Djatikusumo, untuk menyerahkan surat-surat pengangkatan Mr. Roesbandi sebagai Ketua Komite Nasional Indonesia (KNI) Daerah, dan Dokter Sosodoro sebagai Ketua Partai Nasional Indonesia (PNI) Daerah. Pada kesempatan itu pula Hamidhan menyerahkan lembaran-lembaran Harian *Asia Raya* yang dibawa dari Jakarta.¹³⁰ Setelah beberapa hari di Rantau ia dipanggil Tuan Watanabe Pemimpin Umum *Borneo Simboen*. Hal yang dibicarakan bukanlah masalah persuratkabaran, tetapi memperingatkan Hamidhan akan bahaya yang dihadapinya. Ancaman-ancaman halus dari *Minseibu Chokan* dan Watanabe ini memaksa Hamidhan dan keluarga, begitu pula Mr. Roesbandi dan Dokter Sosodoro untuk menyingkir ke Jawa dengan kapal laut.¹³¹

¹²⁹ *Ibid*, hlm.98.

¹³⁰ *Ibid*.

¹³¹ *Ibid*.



Gambar 2.9. Berita Borneo Simboen tentang Pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka dan Bentuk Indonesia Merdeka yang menandakan Indonesia sudah merdeka, (Sumber: repro Wajidi, Tesis 2017).

Namun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia cepat diketahui oleh rakyat Kalimantan Selatan melalui *Borneo Simboen* yang terbit di Kandangan, dan bocoran dari pegawai-pegawai orang Indonesia yang bekerja di Siaran Radio Banjarmasin *Hosokyoku*, khususnya kepada pelajar *Tyugakko*. Sementara itu, perkembangan di Eropa pada tanggal 7 Mei 1945 di Kota Reims, Perancis ditanda-tangani penyerahan tanpa syarat dari seluruh angkatan perang Jerman, yang menandakan berakhirnya Perang Dunia ke-2. Sementara di Asia Pasifik, setelah bom atom dijatuhkan pada 6 Agustus 1945 di Hiroshima dan 8 Agustus 1945 di Nagasaki, akhirnya Jepang menyatakan menyerah tanpa syarat kepada Sekutu pada tanggal 15 Agustus 1945. Upacara penyerahan secara resmi dilaksanakan di Kapal Perang Missouri di Teluk Tokyo pada 2 September 1945. Bagi Bangsa Indonesia berakhirlah pendudukan Jepang yang

“seumur jagung” tetapi terasa lama itu. Gerbang Kemerdekaan Indonesia pun telah terbuka.¹³²

¹³² *Ibid*, hlm.99.

Bab 3

Gelora Pemuda

Pada Masa Revolusi Kemerdekaan

A. Pemuda dan Revolusi Kemerdekaan

Dalam konteks sejarah Indonesia, revolusi kemerdekaan mempunyai makna bahwa ketika Proklamasi Kemerdekaan Indonesia dikumandangkan pada tanggal 17 Agustus 1945 maka lahirlah sebuah negara baru yang merdeka dan berdaulat. Manakala kemerdekaan itu ingin diambil alih lagi oleh Belanda, yang menurut mereka masih sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Kerajaan Belanda, maka tidak ada jalan lain bagi bangsa Indonesia, kecuali berjuang mempertahankan kemerdekaan.

Revolusi kemerdekaan di Kalimantan Selatan mempunyai karakteristik tersendiri, karena bukan semata bertujuan menegakkan kemerdekaan melainkan juga untuk menggagalkan usaha-usaha federalisme Belanda yang hendak menguasai dan memisahkan Kalimantan Selatan dari Negara Kesatuan Republik Indonesia melalui pembentukan Negara Borneo (Kalimantan) sebagaimana dikehendaki dalam Persetujuan Linggajati.

Revolusi kemerdekaan, Revolusi Fisik, atau Perang Kemerdekaan merupakan kulminasi dari nasionalisme Indonesia yang berkembang sejak dasawarsa pertama abad ke-20. Disebut revolusi fisik karena perjuangan pada kurun waktu 1945-1949 bersifat radikal, frontal, dan melibatkan hampir seluruh unsur potensi bangsa. Tidak hanya perjuangan dengan cara mengangkat senjata dan melalui jalur

diplomasi di meja perundingan, namun juga melalui jalur media massa atau pers.

Aktor utama dalam revolusi fisik adalah para pemuda terutama mereka yang mengangkat senjata bertempur dengan Belanda di garis depan. Para pemimpin dan anggota kelaskaran pada masa revolusi fisik di Kalimantan Selatan umumnya terdiri dari anak muda. Pemuda Hassan Basry (kelahiran 17 Juni 1923) baru berusia 23 tahun ketika memulai perjuangan dengan membentuk laskar Syaifullah di Haruyan tahun 1946. Begitupula dengan teman seperjuangannya antara lain Gusti Aman, Aberani Sulaiman, Budhigawis, A.R. Haka, dan Hasnan Basuki, Artum Artha, Yusni Antemas, berusia rata-rata kurang dari 30 tahun.

Besarnya jumlah tentara dari kalangan pemuda, dilaporkan wartawan surat kabar Kalimantan Berdjuang saat meninjau daerah gerilya di Kandangan. Menurut perkiraan Ketua Redaksi (Zafry Zamzam) yang melihat langsung keadaan di sekitar Kandangan pada bulan September 1949, jumlah tentara ALRI Divisi IV di daerah-daerah sekitar Kandangan mencapai 800 orang terdiri dari pemuda-pemuda yang rata-rata berumur 20-an, namun jarang yang berumur 25 tahun ke atas. Kebanyakan mereka berasal dari kampung di daerah sekitar Kandangan sendiri, kecuali beberapa pemimpinnya ada yang berasal dari daerah lain atau ada juga satu atau dua orang dari Jawa.¹³³ Keadaan serupa ini mungkin tidak seberapa berbeda dengan keadaan di daerah basis gerilya ALRI di sekitar Kandangan seperti Rantau, Barabai, Amuntai, dan lain-lain.

Perjuangan mempertahankan kemerdekaan dengan cara mengangkat senjata memang memerlukan fisik yang kuat dan semangat yang membaja. Syarat utama bukan karena kecerdasannya melainkan karena keberanian dan ketangguhan fisik di medan gerilya. Bukan hal yang mengada-ada sebagian

¹³³ Lihat "Surat2 dari Hulu-Sungai: Menindjau daerah gerilja dari dekat" (4) (Perjalanan ketua redaksi kita), dalam Kalimantan Berdjuang, Kamis 22 September 1949 No. 806 Tahun ke V, hlm.2.

dari pemuda itu sudah teruji keberaniannya dalam perkelahian karena diantaranya ada yang pernah jadi maling atau rampok, namun pada masa revolusi tersentuh hatinya untuk ikut membela kemerdekaan.

Foto-foto lama masa revolusi kemerdekaan memperlihatkan dominannya para pemuda saat itu. Dari tipikal wajah dan fisik tubuh terlihat mereka berusia muda. Mereka menyanggul senjata bahu membahu dengan anak-anak dan para orang tua yang punya peran tersendiri seperti kurir pos, mata-mata, atau juru masak di garis belakang.

Pada buku *Kisah Gerilya* susunan Hassan Basry terdapat sketsa karya Tjapa Noerbrand¹³⁴ yang mencerminkan semangat pemuda saat bertempur di garis depan, sebagaimana tergambar di bawah ini.



Gambar 3.1. Sketsa menggambarkan semangat para pejuang kemerdekaan di Kalimantan Selatan.

(Sumber: Hassan Basry, 1961).

¹³⁴ Lihat Hassan Basry, *Kisah Geril(y)a Kalimantan (Dalam Revolusi Indonesia) 1945-1949*, Djilid Pertama Kalimantan Diakhir Perang Dunia II — 1945 sehingga lahirnya ALRI Divisi IV — 1946 (Bandjarmasin: Jajasan Lektur Lambung Mangkurat, 1961), dan Hassan Hassan, *Kisah Gerilya Kalimantan Periode Tahun 1945-1949*, Jilid I dan II, (Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua, 2003).

Dari sketsa tersebut di atas terlihat gelora semangat perjuangan kemerdekaan dari kalangan pemuda yang tergabung di dalam organisasi ketentaraan dan kelaskaran. Dari uniform yang dipakai terlihat ada yang memakai seragam tentara seperti peci dan baju lengkap dengan atributnya, seperti pangkat di pundak, pistol dan pedang di pinggang. Sosok ini mencerminkan pemuda yang tergabung dalam ketentaraan seperti ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dan MN 1001/MTKI. Namun pada sketsa terlihat juga adanya sosok dengan ikat kepala, baju seperti pakaian rakyat kebanyakan dan memakai senjata bambu runcing yang menggambarkan bahwa ia adalah berasal dari anggota kelaskaran rakyat (di luar ALRI maupun MN 1001/MTKI) yang turut berjuang memanggul senjata. Sketsa di atas menunjukkan bahwa perjuangan bersenjata dimainkan oleh segala lapisan masyarakat baik tentara maupun rakyat, yang berada di garis depan maupun di garis belakang, dengan berbagai perannya masing-masing. Terlihat berbagai senjata yang digunakan seperti pistol, senapan, pedang, bambu runcing, memang begitulah kenyataan senjata yang dipergunakan pada masa perjuangan. Terlihat di depan, seorang dengan peci dan seragam militer lengkap dengan pistol dan pedang dipinggang, mengomando pasukan agar terus maju bergerak pantang mundur. Sosok itu menggambarkan adanya peran komandan dalam pertempuran yang bahu membahu dengan anak buahnya berada di garis depan ikut menyerang, mengatur strategi dan mengomando perjuangan. Dan ternyata memang, dengan semangat membara dan pantang mundur mereka perlihatkan di medan perjuangan. Suatu ketika di tengah asap mesiu, desingan peluru menembus dadanya, namun ia terus bergerak maju dan maju, sampai akhirnya ia terkapar roboh, darahnya tumpah membasahi tanah di haribaan ibu pertiwi, negeri yang mereka cintai.¹³⁵

¹³⁵ Wajidi, *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia di Kalimantan Selatan 1900-1950*, (Banjarmasin: Tesis Magister Pendidikan IPS Universitas Lambung Mangkurat), hlm. 201.

Pada masa revolusi fisik, sepertinya ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan tidak akan kekurangan tenaga. Selalu ada rakyat yang menggabungkan diri menjadi tentara ALRI karena tinggi semangat dalam perjuangan kemerdekaan. Termasuk yang bergabung itu sejumlah pelajar yang usianya masih sangat muda. Kalimantan Berdjuang memberitakan sebanyak 50 orang pelajar SMP dan Normal Barabai diantaranya 2 orang wanita berumur antara 14—16 tahun telah hilang dari asrama, dan kemudian diketahui mereka menggabungkan diri dengan ALRI dan bersedia dilatih dalam hal ketentaraan. Belakangan diperoleh kabar bahwa mereka ingin membentuk “Tentara Pelajar” bergabung dengan tentara pelajar di Kandangan dan Banjarmasin.¹³⁶

Informasi yang disampaikan surat kabar Kalimantan Berdjuang itu selaras dengan memoar Danussaputera yang menyatakan bahwa pada bulan Juni 1949 sekelompok pelajar Sekolah Normal di Barabai kurang lebih terdiri 5 wanita dan 60 pria, dan dalam perjalanan mereka ikut menggabungkan diri beberapa orang pemuda militan, sehingga berjumlah kira-kira menjadi 100 orang pelajar dan pemuda sukarelawan. Mereka digembleng layaknya kadet dalam wadah pelatihan yang diberi nama “Akademi Militer Kilat” yang dikelola langsung oleh Kapten (L) Danussaputera. Resminya dimulai pada tanggal 17 Juli 1949 s.d. 12 Oktober 1949, selama 3 bulan mereka dilatih dasar-dasar kemiliteran dan disiplin, sepaket dengan Ilmu lapangan taktis dan strategi, combat dan psywar, dan praktik perang medan, serta ilmu kemasyarakatan, Bahasa Inggris, pengetahuan umum, serta arti Proklamasi 1945.¹³⁷

¹³⁶ Lihat “Lebih dari 50 Peladjar S.M.P. dan Normal Barabai masuk ALRI, Antaranja 2 WANITA”, dalam Kalimantan Berdjuang, Kamis 22 September 1949 No. 806 Tahun ke V, hlm.1

¹³⁷ Danussaputera, “Kalimantan Terbakar oleh Semburan Bara Api Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan”, (Banjarbaru, 1985).



Gambar 3.2. Para Pemuda Saat Mengikuti Latihan Kemiliteran.
(Sumber: Wajidi, 2015).

Keputusan para pelajar itu merupakan suatu cerminan dari semangat anak-anak muda untuk ikut berjuang, meski di sisi lain tidak begitu dihajatkan oleh ALRI karena masih terlalu muda. Ini fakta sejarah betapa anak-anak muda yang masih berstatus pelajar tergerak hati dan langkahnya untuk turut memanggul senjata guna mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamasikan. Mereka adalah pelajar pejuang, yang kelak menggabungkan diri ke dalam kesatuan Tentara Pelajar.

Keterlibatan pemuda pada masa revolusi fisik tidak melulu di dalam perjuangan bersenjata, melainkan juga melalui perjuangan di jalur politik. Tokoh-tokoh politik yang tergabung di Partai SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia) dan Partai SERMI (Serikat Muslimin Indonesia) sebagiannya berusia muda. Termasuk juga dalam golongan ini adalah kelompok wanita bernama PERTIWI (Persatuan Tindakan Wanita Indonesia) umumnya berusia relatif muda.

Begitupula tokoh-tokoh wartawan Republikan seperti Zafry Zamzam (kelahiran 1918), Artum Artha (kelahiran 1920), Yusni

Antemas (kelahiran 1922), Zainal, A. Basuni, dan lainnya pada masa revolusi kemerdekaan rata-rata belum berumur 30 tahun, sehingga wajar pada diri mereka keluar tulisan-tulisan yang membakar semangat revolusi, dan bahkan terlibat langsung dalam kelaskaran.

Berdasarkan paparan singkat di atas, maka narasi sejarah gerakan kepemudaan pada masa revolusi kemerdekaan di Kalimantan Selatan 1949-1949 akan diarahkan kepada peran pemuda di dalam tiga jalur perjuangan, yaitu perjuangan bersenjata, perjuangan melalui organisasi politik, dan perjuangan melalui media massa.

B. Reaksi Pemuda Menyambut Proklamasi Kemerdekaan

Tidak lama setelah Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, para pemuda di Kalimantan Selatan menyikapi proklamasi kemerdekaan dengan penuh harap dan cemas, karena simpang siurnya berita yang sampai ke daerah ini. Dalam suasana cemas akan adanya kebocoran berita kemerdekaan dan ancaman militer Jepang, masyarakat akhirnya mengetahui adanya berita kemerdekaan yang disiarkan pertama kali oleh surat kabar Borneo Simboen edisi Kandangan pimpinan wartawan muda Ahmad Basuni. Mereka memperoleh informasinya dari kantor berita Jepang “Domei” Banjarmasin yang menerima berita dari kantor “Domei” Jakarta.¹³⁸

Meski tidak memuat teks proklamasi, Borneo Simboen edisi Banjarmasin Nomor 851 Minggu 26 Hatji-Gatsoe 2605 (26 Agustus 1945) menyiarkan atau memberitahukan tentang pengangkatan Kepala Negara Indonesia Merdeka dan Bentuk

¹³⁸ Ahmad Gafuri, *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949)*, (Kandangan: Departemen Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan, 1984), hlm. 36. Di Kandangan, ada juga yang sempat merekam suara Domei Jakarta tanggal 23 Agustus 1945, diantaranya adalah Ahmad Kusasi, mantan Klerek kantor Asisten Residen (Assistent Resident) *Afdeling* Hulu Sungai di Kandangan.

Indonesia Merdeka.¹³⁹ Dengan berita itu masyarakat menjadi paham bahwa Indonesia telah merdeka. Berita ini mendapat sambutan yang hangat dari seluruh rakyat tak terkecuali para pemuda yang cinta pada kemerdekaan dan kebebasan. Banyak rakyat yang memasang bendera Sang Merah Putih di halaman rumah masing-masing. Sedangkan yang tidak mempunyai bendera dari kain, buru-buru membuat bendera-bendera kertas.

Di Banjarmasin, berita kemerdekaan itu disikapi para pemuda dengan mendirikan organisasi PRI (Pemuda Republik Indonesia) sebagai pengganti *Kenkoku Dosikai* semasa Jepang. Kepengurusannya diresmikan dalam suatu rapat yang dihadiri beratus-ratus orang bertempat di gedung Bioskop Osaka Gekijo¹⁴⁰ di Banjarmasin. Mereka memperjuangkan lahirnya pemerintahan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan dengan membentuk KNI (Komite Nasional Indonesia) Daerah Kalimantan.

Di Kandangan, berita kemerdekaan disambut dengan sukacita dengan cara mengadakan Pasar Malam Kemerdekaan antara tanggal 20 – 30 Agustus 1945.¹⁴¹ Pada acara pasar malam tersebut oleh Ahmad Basuni (Wartawan *Borneo Simboen* Kandangan) dibacakan isi Pembukaan UUD 1945 didampingi oleh Artum Artha sebagai pengantar acara. Pada malam tanggal 12 September itu juga dibentuk organisasi GEPERINDO (Gerakan Pemuda Republik Indonesia) dengan tugas utama membuat dan memperbanyak selebaran yang berisi tentang pemberitahuan Indonesia merdeka dan mengutuk Belanda.

¹³⁹ Wajidi, *Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode 1900-1950*, (Yogyakarta: Debut Press, 2011), hlm. 1. *Borneo Simboen* Nomor 851 Minggu 26 Hatji-Gatsoe 2605 (26 Agustus 1945).

¹⁴⁰ Dinamakan Bioskop Rex pada masa Hindia Belanda, atau Bioskop Ria setelah kemerdekaan.

¹⁴¹ Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hlm. 36-37.



Gambar 3.3. Semangat rakyat dari segala usia menyambut kemerdekaan. (Sumber: Wajidi, 2007)

Sementara itu, pada tanggal 17 September 1945 mendarat tentara Australia di Banjarmasin sebagai bagian dari pasukan Sekutu di bawah komando Kolonel Rabson yang bertugas melepaskan para tawanan yang dipenjarakan oleh Jepang, dan melucuti, menawan serta mengembalikan tentara Jepang ke negaranya. Kedatangan tentara Australia ternyata diboncengi oleh tentara Belanda dengan anggota sebanyak 160 orang lengkap dengan pegawai sipilnya di bawah pimpinan Mayor A.L. van Assenderp,¹⁴² mereka langsung menduduki kantor-kantor/ instansi pemerintahan di Banjarmasin, Kandangan, Barabai, Amuntai, dan lain-lain dengan maksud untuk mengembalikan kekuasaannya.¹⁴³

C. Gerakan Pemuda Melawan NICA

Kondisi di Kalimantan Selatan pasca Proklamasi 17 Agustus 1945 begejolak karena adanya penolakan rakyat terhadap NICA. Berbagai organisasi politik dan kelaskaran yang keanggotaannya umumnya para pemuda bermunculan. Selain

¹⁴² Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid I, hlm. 13.

¹⁴³ Achmad Darmawie, "Detik-Detik Perjuangan Kemerdekaan di Banjarmasin Kalimantan Selatan", naskah ketikan, Banjarmasin, 1981, hlm. 13-14.

GEPERINDO (Gerakan Pemuda Republik Indonesia), berdiri organisasi kelaskaran yang keanggotaan umumnya para pemuda seperti BPRIK di Banjarmasin pada tanggal 16 Oktober 1945, GERAK (Gerakan Rahasia Kalimantan),¹⁴⁴ GERMERI (Gerakan Rakyat Mempertahankan Republik Indonesia), dan BPPKI (Barisan Pelopor Pemberontak Kalimantan Indonesia) di Kandangan, GERPINDOM (Gerakan Pemuda Indonesia Merdeka) di Birayang pada bulan Oktober 1945.¹⁴⁵

Di Alabio pada tanggal 23 September 1945 berdiri kelas-karan Pasukan Berani Mati. Kemudian di bulan November 1945, berdirinya organisasi kelaskaran Laskar Syaifullah dibentuk pemuda Hassan Basry di daerah Haruyan. Berdirinya laskar-laskar ini, embrionya adalah pertempuran 9 November 1945, yakni pertempuran antara para pejuang di Banjarmasin melawan Sekutu. Pertempuran ini juga menjadi latar belakang berdirinya organisasi kelaskaran dan GERPINDOM (Gerakan Rakyat Pengejar/Pembela Indonesia Merdeka) di Amuntai pada tanggal 20 November 1945.¹⁴⁶

Kongres Pemuda Indonesia Kalimantan di Kandangan dalam tanggal 17 Maret 1947 selama dua hari berturut-turut melahirkan dan mencetuskan keputusan utama, yakni membentuk organisasi gabungan pemuda se-Kalimantan dengan nama Gabungan Pemuda Indonesia Kalimantan disingkat GAPIKA. Kedudukan pengurus pusat di Kandangan. Sedangkan di

¹⁴⁴ Pelopor gerakan itu adalah Gusti M. Saleh, Gusti Ahmad Kadir, A. Kadir, dan Ma'zum. Organisasi ini berkembang di Rantau, Kandangan, Barabai, Amuntai, dan Negara, lihat Danussaputera, *op.cit.*, hlm. 19.

¹⁴⁵ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid 1, hlm. 28-35.

¹⁴⁶ Lihat Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, *Sejarah Revolusi Kemerdekaan 1945 – 1949 Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Banjarmasin 1979/1980), hlm.22; Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, *Sejarah Sosial Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1980 / 1981), hlm.45.

Banjarmasin lahir gabungan Putera-Puteri Indonesia, disingkat GAPPIKA. Kedudukan pimpinan pusat di Banjarmasin.¹⁴⁷

Di hampir seluruh kota di Kalimantan baik yang di kota dan yang bersembunyi di pedalaman berdiri organisasi perjuangan. Organisasi-organisasi itulah yang kemudian hari menyatukan badannya ke dalam gerakan kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang dipimpin oleh Hassan Basry.

Kebencian terhadap tentara Belanda dukungan Australia yang ingin mengembalikan kekuasaannya di Kalimantan Selatan seperti dengan melakukan larangan dan menangkapi pemuda-pemuda PRI telah menimbulkan beberapa insiden di berbagai daerah, diantaranya dalam bentuk perlawanan/ pemberontakan bersenjata seperti serangan PBM-BPRIK (Pasukan Berani Mati-Barisan Pemberontak Republik Indonesia Kalimantan) pada tanggal 1 November dan 9 November 1945 di Banjarmasin serta Pemberontakan 5 Desember 1945 di Marabahan yang mengakibatkan gugurnya sejumlah pejuang bangsa.

Pemberontakan 9 November 1945 dilakukan oleh para pemuda yang tergabung di dalam BPRIK (Barisan Pemberontakan Republik Indonesia Kalimantan) pimpinan M. Amin Effendy. Pemberontakan ini dimotori bekas pemuda gembelangan Jepang yang diantaranya adalah pemuda eks Kaigun Heiho

Pemberontakan juga meletus di Barabai tanggal 19 ke 20 Maret 1946 (malam Rabu pukul 22.00) dipimpin oleh tiga bersaudara M. Nawawie Arief,¹⁴⁸ Norman Arief dan Al Hamdie Arief dengan sasaran tangsi militer Belanda di kota Barabai. Aksi yang dikenang masyarakat Barabai dengan sebutan “Aksi Tiga Badangsanak” atau “Aksi Trikesuma” telah menimbulkan korban di kedua belah pihak.¹⁴⁹ Sebagaimana diketahui M. Nawawie Arief adalah seorang pemuda yang pernah mendapat

¹⁴⁷ Wajidi, *Artum Artha Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan*, (Yogyakarta: Debut Press, 2008).

¹⁴⁸ M. Nawawie Arief tiba di Barabai sebagai pimpinan dari salah satu dari tiga rombongan yang datang dari Samarinda yang dikoordinir oleh A.M. Sangaji, lihat M. Nawawie Arief, “Sepak Terjang Haji Mohammad Nawawie Arief Dalam Perjuangan”, naskah ketikan, Banjarmasin, 1981, hlm. 25.

¹⁴⁹ M. Nawawie Arief, *ibid.*, hlm. 2 dan 28.

gemblengan sebagai anggota Kaigun Heiho, dan pada masa pergerakan adalah seorang aktivis Parindra (*Parindrist*).

Aksi penyerangan rakyat di beberapa daerah telah menjadikan alasan bagi Belanda untuk melakukan serangkaian pengejaran dan penangkapan besar-besaran terhadap rakyat dan tokoh-tokoh perjuangan, yang setelah peristiwa pemberontakan terus berpindah-pindah sambil menyusun kekuatan.

Pada bulan Oktober 1945, Belanda melakukan penangkapan terhadap lima orang wartawan muda di Kandangan, yakni Zafry Zamzam, Ahmad Basuni, Haspan Hadna, Merah Daniel Bangsawan, Artum Artha. Dalam bulan November terjadi pula penangkapan besar-besaran di seluruh Hulu Sungai.

Penjara penuh sesak dengan tawanan Belanda. Mereka yang mengalami mengatakan hanya berdiri, dan sukar bebas bernapas. Di antara mereka ada yang terkurung hanya beberapa hari, tapi ada juga yang bulanan, barulah dibebaskan oleh Belanda. Ada juga diantaranya yang disiksa oleh Polisi Kilat Belanda. Sampai bulan Desember 1945, penangkapan serupa masih dilakukan oleh Belanda.

Dalam tahun 1946 pemuda Ahmad Basuni dan Asikin Zuhri melarikan diri ke Jawa memasuki Yogyakarta. Keduanya bergabung dengan Ikatan Pemuda Kalimantan (IPK) di Yogyakarta. Mereka kemudian ganti nama dengan Ikatan Perjuangan Kalimantan) singkatannya tetap IPK. Pimpinan umum Haji Gusti Abdul Muis.



Gambar 3.3. Tiga wartawan republiken, searah jarum jam:
Artum Artha, Hadhariyah M, Ahmad Basuni.
(Sumber: dok. Artum Artha).

Di Pulau Jawa, para pejuang yang tergabung di dalam IPK menentang federalisme, diantaranya melalui Putusan-Putusan Konferensi Darurat Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK) tanggal 15-17 Februari 1948. Melalui konferensi itu, IPK antara lain menyatakan: (1) merasa kecewa terhadap hasil perundingan di Renville; (2) Tetap bercita-cita mewujudkan Negara Kesatuan; (3) Tetap menuntut plebisit di seluruh Indonesia; (4) Berjuang memperkuat Republik Indonesia sebagai modal meneruskan perjuangan dan untuk itu mendesak supaya secepat mungkin terbentuk satu kabinet yang kuat yang memperjuangkan selanjutnya kemerdekaan yang bulat meliputi seluruh Indonesia.¹⁵⁰

¹⁵⁰“Putusan-Putusan Konferensi Darurat IPK Tanggal 15-17 Februari 1948 di Yogyakarta”, dalam Mandau, *Menuju Negara Kesatuan*, Majalah Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK) Pusat Penerangan Penyiaran, Yogyakarta, 1948, hlm. 83.



Gambar 3.4. Konferensi Darurat IPK di Yogyakarta
. (Sumber: repro. Menuju Negara Kesatuan, IPK Yogyakarta,
1948).

Selain peran berbagai organisasi politik dan kelaskaran yang bermunculan di bumi Kalimantan Selatan, bagian terpenting dalam perjuangan kemerdekaan di Kalimantan Selatan dimainkan oleh orang-orang Kalimantan yang tergabung dalam berbagai organisasi kelaskaran di Jawa yang kembali ke daerah asalnya melalui ekspedisi lintas laut setelah Agustus 1945.¹⁵¹ Pendapat Dijk tersebut sesuai dengan Tadjuk Rentjana *Kalimantan Berdjoang*, 22 Agustus 1949 berjudul “Cease Fire di Kalimantan. Gerilja Kalimantan di perhatikan!”. Dalam tajuk tersebut, Ka-be menulis...*Biar bagaimana djuga, achirnja gerilja Kalimantan tak dapat dipandang begitu-2 sadja. Ia timbul oleh karena dorongan politik jang dibawa oleh arus persengketaan politik Indonesia – Belanda selama ini. Seperti orang tahu gerilja di sini terkenal dengan organisasinja bernama Angkatan Laut Republik Indonesia Divisi IV. Konon adalah pemimpinnja Hasan Basry berasal dari anggota ALRI D.IV di Tuban (Djawa) jang*

¹⁵¹ C. van Dijk, , *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 206.

*kebanjakannya pemuda-2 Kalimantan, jang menyusup ke Kalimantan semendjak tahun 1947...*¹⁵²

Ekspedisi lintas laut ke Kalimantan adakalanya dilakukan secara perorangan atau beberapa orang atas prakarsa sendiri maupun di bawah koordinasi Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohamad Noor atau BPOG di Jawa serta ekspedisi yang dikoordinasikan oleh Markas Besar ALRI Divisi IV Kalimantan yang kemudian menjadi Mobiele Brigade ALRI.

Pelaku ekspedisi berasal dari organisasi kelaskaran atau ketentaraan seperti PMC (Penyelidik Militer Khusus), unsur-unsur Angkatan Laut (TKR Laut Tegal dan ALRI Divisi IV Kalimantan), BPRI, dan organisasi perjuangan rakyat Kalimantan di Jawa, seperti PRIK (Pemuda Republik Indonesia Kalimantan), BPOG (Badan Pembantu Oesaha Gubernur), dan IPK (Ikatan Perjuangan Kalimantan).

Ekspedisi lintas laut itu tentu saja membutuhkan stamina yang prima Tercatat beberapa ekspedisi lintas laut dari Jawa ke Kalimantan, antara lain ekspedisi rombongan TKR Laut Tegal,¹⁵³ ekspedisi rombongan Husin Hamzah dan Firmansyah, ekspedisi rombongan PMC, ekspedisi pimpinan Mayor Tjilik Riwut, ekspedisi rombongan “9 pelopor”, ekspedisi I dan II pimpinan Letnan Asli Zuchri, ekspedisi III pimpinan Mustafa Ideham, ekspedisi IV pimpinan Kapten Danussaputera.¹⁵⁴ Selain itu ekspedisi juga dilakukan oleh rombongan Haji Abdul Hamid, kelahiran Martapura, berangkat dari Pekalongan 2 Februari 1946 dan tiba di daerah Air Hitam Kecil, Kalimantan Selatan bagian Selatan pada tanggal 17 April 1946.¹⁵⁵

¹⁵² Lihat *Kalimantan Berdjoang*, 22 Agustus 1949 (salinan oleh Ahmad Gafuri).

¹⁵³ Ekspedisi gabungan antara BKR Laut Tegal dan Pasukan dari Kalimantan di bawah pimpinan Rahadi Usman, dan ekspedisi BKR Laut Tegal di bawah pimpinan Sapingi dan Jatijan, lihat Danussaputera, “Kalimantan Terbakar oleh Semburan Bara Api Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan”, Banjarbaru, 1985, hlm.21.

¹⁵⁴ Tentang ekspedisi-ekspedisi tersebut, lihat M. Suriansyah Ideham dkk. (ed.), *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003), hlm. 384-402.

¹⁵⁵ Danussaputera, *op.cit.*, hlm. 22-23.

Di antara ekspedisi adalah sekelompok kecil yang dipimpin oleh Hassan Basry, seorang guru agama Islam di Ponorogo asal Kandangan. Ia mula-mula dikirim oleh PRIK Surabaya sewaktu memuncaknya pertempuran dengan pasukan Inggris pada bulan November 1945.

Setibanya di Kalimantan Selatan, situasi yang ditemui Hassan Basry luar biasa sulit karena Belanda sedang melakukan penangkapan terhadap para pemuda Republik. Hassan Basry terpaksa menyingkir ke pegunungan sekitar Kandangan dan membentuk Laskar Saifullah atau “Pedang Allah” pada 5 Mei 1946 di Haruyan.¹⁵⁶

Pembentukan Laskar Saifullah tidak serta merta memperbaiki keadaan, sehingga pada situasi tertentu Hassan Basry merasa batinnya tertekan, merasa pesimis, dan berniat ingin kembali berlayar ke pulau Jawa untuk melaporkan keadaan, namun pertemuannya dengan pasukan GERPINDOM yang dipimpin H. Aberani Sulaiman di sekitar pantai Pagatan telah membangkitkan semangatnya kembali untuk berjuang.¹⁵⁷ Hassan Basry balik ke Kandangan dan kemudian membentuk organisasi kedua yakni Banteng Indonesia, pengganti Laskar Saifullah.¹⁵⁸ Kemudian, sesuai tugas yang diemban Hassan Basry, maka pada tanggal 18 November 1946 di desa Tabat Haruyan didirikanlah satu batalyon dengan nama Batalion Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan.¹⁵⁹ Banteng

¹⁵⁶ Ramli Nawawi dkk., *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan*, (Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Depdikbud, Jakarta, 1991), hlm. 89; lihat Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*, Banjarmasin, 1990, hlm. 117.

¹⁵⁷ Hassan Basry pernah berniat hendak menyeberang ke Jawa, lihat M. Suriansyah Ideham, *et al* (ed.), *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Propinsi Kalimantan Selatan, 2003), hlm. 380. Penulis pernah mendengar bahwa Hassan Basry pernah merasa pesimis dengan keadaan waktu itu dan berniat ingin kembali ke Jawa, namun dicegah oleh H. Aberani Sulaiman.

¹⁵⁸ C. van Dijk, *op.cit.*, hlm. 207.

¹⁵⁹ Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid 1, hlm. 114; Danussaputera, *op.cit.*, hlm.33-35.

Indonesia dilebur ke dalam batalyon tersebut dan Hassan Basry diangkat sebagai komandannya dengan kesediaannya menyatukan laskar-laskar perjuangan di Kalimantan Selatan.¹⁶⁰



Gambar 3.5. Tentara ALRI Divisi IV
Pertahanan Kalimantan. (Sumber: dok. Zainal).

Batalayon ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan yang dipimpin Hassan Basry merupakan alat resmi pemerintah Republik yang bertanggung jawab kepada pimpinan militer yakni Markas Besar ALRI Divisi IV di Mojokerto yang kemudian dipindahkan ke Tuban, dan berkoordinasi dengan pimpinan politik yakni Gubernur Kalimantan, Ir.Pangeran Mohamad Noor di Yogyakarta.

D. Partisipasi Pemuda di Kancan Politik

Menjelang awal tahun 1946 pemuka-pemuka masyarakat yang tampil pada waktu itu merasakan bahwa kekosongan perjuangan melalui bidang politik yang bersifat legal merupakan suatu kepincangan yang tidak menguntungkan. Tokoh-tokoh yang dikenal sebagai golongan Republikan itu berpendapat

¹⁶⁰ Selain Batalion Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan, terdapat batalyon lainnya yakni Batalion Rahasia ALRI Divisi IV “B” di Kalimantan Barat, Batalion Rahasia Divisi IV “C” di Kalimantan Timur dan Batalion Rahasia ALRI Divisi IV “D” di Riau.

bahwa ketidakikutsertaan orang Indonesia dalam merencanakan dan menentukan segala program mereka yang berkuasa, sama saja dengan membiarkan mereka bertindak sewenang-wenang. Karena itu di mana ada wadah hak untuk memberikan suara dan pendapat harus dimanfaatkan.

Sementara itu, pimpinan PRI yang diharapkan rakyat untuk berjuang menegakkan pemerintahan Republik justru mulai lemah semangatnya dan bahkan dimanfaatkan Belanda sebagai alat pemerintahannya. Beberapa pemimpin yang melihat bahaya itu segera mengadakan rapat tertutup. Rapat rahasia itu berhasil mengadakan perubahan besar bagi PRI dengan membentuk organisasi persatuan yang bergerak di bidang politik yakni SKI (Serikat Kerakyatan Indonesia) pada tanggal 19 Januari 1946 di bawah asuhan dr. D.S. Diapari,¹⁶¹ dr. Suranto, A.A. Rivai, A. Sinaga, R. Sa'ban, E.S. Handuran, Abdullah, dan lain-lain.¹⁶²

Pembentukan SKI dilatarbelakangi oleh pertimbangan bahwa berjuang dengan cara kekerasan dan dengan gerakan-gerakan gelap untuk pemberontakan, hanya akan mengakibatkan cengkeraman Belanda akan bertambah kokoh dan kuat. Oleh karena itu dibentuklah SKI sebagai siasat baru perjuangan parlementer atau perjuangan secara damai.

Pada mulanya SKI adalah organisasi politik lokal yang berkembang menjadi partai yang berlingkup nasional dengan Banjarmasin dengan daerah pusatnya.¹⁶³ Organisasi ini berkembang di Sumatera, Jawa Barat, Jawa Tengah, dan

¹⁶¹ Nama lengkapnya adalah dr. Dja'far Siregar Diapari. Akan tetapi, di beberapa buku adakalanya namanya ditulis dr. St. T. Diapari, dr. St. Diapari Siregar, atau dr. Diapari Siregar.

¹⁶² Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid I, hlm. 66; M. Suriansyah Ideham, dkk (ed.), *op.cit.*, hlm. 408-409; Kementerian Penerangan RI, *Republik Indonesia: Kalimantan*, (Banjarmasin: Djawatan Penerangan Provinsi Kalimantan, 1953), hlm. 36; Ahmad Gafuri, *op.cit.*, hlm. 47.

¹⁶³ Mugnie Junaidi, "Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) di Kalimantan Selatan", Skripsi Jurusan Sejarah FKG Unlam, Banjarmasin, 1972, hlm. 12.

Jakarta.¹⁶⁴ Partai ini dinyatakan sebagai suatu lanjutan dari PRI yang lalu. Tujuan Partai ini jelas mencantumkan hendak mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945 melalui perjuangan parlementer.¹⁶⁵



Gambar 3.6. Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI).
(Sumber: dok. Joerliani Djohansjah).

Dari tujuan tersebut jelas SKI merupakan wadah perjuangan orang-orang Republik di Kalimantan Selatan, yang pada masa-masa perjuangan selanjutnya berusaha menggagalkan pembentukan Negara Kalimantan sebagaimana dikehendaki Van Mook dalam rangka politik *divide et impera*-nya.

Dalam operasinya SKI tidak bermaksud berjuang seorang diri, karena risikonya terlalu berat. Oleh karena itu dirancanglah pembentukan beberapa organisasi di luar SKI dengan konsep perjuangan yang tidak berbeda. Maksudnya bilamana suatu saat SKI terpaksa harus menghentikan kegiatannya

¹⁶⁴ Dalam Pemilu 1955 SKI mendapat kursi perwakilan di parlemen dalam kabinet Ali Sastroamidjojo yang diwakili oleh Dr. F.L. Tobing sebagai Menteri Penerangan, lihat Mugnie Junaidi, *ibid.*, hlm. 13.

¹⁶⁵ M. Suriansyah Ideham dkk (ed.), *op.cit.*, hlm. 409.

karena adanya tekanan dari Belanda, maka cita-citanya dapat dilanjutkan oleh organisasi lainnya itu. Organisasi-organisasi tersebut adalah PERWANI (Persatuan Wanita Indonesia), PPI (Persatuan Pemuda Indonesia), PERPI (Persatuan Pemuda Indonesia), GAPPIKA (Gabungan Persatuan Pemuda Indonesia Kalimantan), KRI (Kepanduan Rakyat Indonesia), PKDI (Persatuan Kaum Dagang Indonesia), dan SERMI (Serikat Muslimin Indonesia).¹⁶⁶

Mengenai PERWANI, cabangnya di Kalimantan Selatan didirikan pada tanggal 17 Desember 1946 diketuai oleh Ny. Noorsehan Johansyah. Pembentukan itu mendapat sambutan di daerah-daerah terbukti dengan berdirinya organisasi ini di Banjarmasin dan Hulu Sungai.¹⁶⁷ Organisasi ini turut memperjuangkan kemerdekaan bangsa dan negara Indonesia melalui jalur politik, ekonomi, sosial, dan kebudayaan.

Dalam Kongres Wanita seluruh Kalimantan yang dilaksanakan di Kandangan pada tanggal 17 Februari 1948, PERWANI menyuarakan pentingnya persatuan kaum wanita untuk perjuangan kemerdekaan. Sebagai dampak dari kongres itu, maka Perkumpulan Kaum Ibu Pontianak (PKIP) yang semula hanya bersifat kesosialan dan untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan zaman, maka pada tanggal 22 Februari 1948 telah dilebur menjadi PERWANI.¹⁶⁸

SERMI merupakan organisasi yang bercirikan keagamaan yang didirikan oleh tokoh-tokoh Republikan yang berasal dari golongan ulama agama Islam. Gagasan pembentukan SERMI lahir dari SKI, akan tetapi organisasi politik tersebut bukanlah *onderbouw* SKI.¹⁶⁹ Dalam perjuangannya mempertahankan Proklamasi 17 Agustus 1945, SERMI berjuang bahu-membahu dengan SKI. Oleh karena itu, SERMI merupakan organisasi se-

¹⁶⁶ Depdikbud, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah, Banjarmasin, 1977/1978, hlm. 113-114.

¹⁶⁷ *Sejarah Setengah Abad Pergerakan wanita Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 1978, hlm. 74.

¹⁶⁸ Majalah Mimbar Indonesia, No. 11, 13 Maret 1948, hlm. 15.

¹⁶⁹ Mugnie Junaidi, *op.cit.*, hlm. 81.

perjuangan SKI yang terpenting. Untuk kepentingan itu dibentuklah suatu Badan Koordinasi SKI–SERMI, yang berperan mencetuskan kesepakatan dalam menjalankan taktik perjuangan menentang ide federalisme Van Mook.

Salah satu siasat yang dicetus Badan Koordinasi adalah bahwa kedua organisasi politik ini bersedia ikut dalam Dewan Banjar yang dibentuk Belanda untuk secara parlementer berusaha menggagalkan rencana pembentukan Negara Kalimantan, salah satu negara bagian bentukan Belanda dalam Negara Indonesia Serikat.

Adanya penolakan yang dilakukan rakyat terhadap rencana pembentukan Negara Kalimantan, diantaranya tercermin dari sepak terjang SKI dan SERMI. Keduanya adalah organisasi politik yang secara legal dan kooperatif berjuang di saluran politik atau parlementer sebagai anggota Dewan Banjar.

Untuk melunakkan para pemimpin SKI dan meyakinkan maksud baik Pemerintah Belanda terhadap rakyat Indonesia, maka oleh pemerintah ditawarkan kepada pengurus SKI (Handuran, A. Sinaga, dan A.A. Rivai) untuk menyaksikan sebuah model desa di bawah kekuasaan Belanda yakni desa Cibinong di Jawa Barat.

Ketiga pengurus SKI (Handuran, A. Sinaga, dan A.A. Rivai) kemudian berangkat ke pulau Jawa. Akan tetapi, saat berada di pulau Jawa mereka gunakan untuk menghubungi pemerintah Republik Indonesia di Yogyakarta. Mereka menemui Gubernur Kalimantan Ir. Pangeran Mohamad Noor untuk melaporkan keadaan perjuangan di Kalimantan Selatan, dan menemui Wakil Presiden RI Drs. Mohammad Hatta untuk melaporkan kesiapan para gerilyawan maupun golongan politik dalam menghadapi Belanda.

Menanggapi laporan tentang rencana Belanda membentuk Dewan Banjar, sebagai alat untuk memuluskan rencana pembentukan Negara Kalimantan, maka dengan dasar keyakinan bahwa SKI akan berhasil mengatasinya, maka Wakil Presiden menganjurkan kepada utusan SKI: *“Bentuklah dewan itu dan*

sedapat mungkin peraturan pemilihan harus diperjuangkan, agar partai turut menyusunnya".¹⁷⁰

Selanjutnya kepada Wakil Presiden, A.A. Rivai, A. Sinaga, dan E.S. Handuran atas nama SKI menyampaikan sebuah pernyataan berupa dukungan dan kesetiaan SKI terhadap Republik Indonesia bertanggal 20 November 1946, yang isinya antara lain berbunyi: "*SERIKAT KERAJATAN INDONESIA*" tetap berdiri di belakang Republik Indonesia. "*SERIKAT KERAJATAN INDONESIA*" berdjampi menjokong Republik Indonesia dengan sekuat tenaga mencapai Negara Indonesia jang bulat.¹⁷¹

Sikap SKI itu sejalan dengan organisasi republiken lainnya, yakni Sermi sebagaimana terlihat pada Keputusan Konferensi SERMI ke I di Banjarmasin tanggal 11 dan 12 April 1947, yakni pada Keputusan nomor 34 yang berbunyi: "*SERMI tetap berdiri di belakang Pemerintah Kesatoean Indonesia, karena mengingat boenji Anggaran Dasar Pasal 2 ayat 2 dan menghendaki Kalimantan setjepat moengkin dimasoekkan menjadi daerah Repoebluk Indonesia*".¹⁷²

Dari keputusan atau resolusi itu jelas sekali bahwa SKI maupun SERMI mempunyai sikap yang seirama dan sejalan, yaitu tetap tidak mau dipisahkan dari Republik Indonesia. Perjuangan SKI dan SERMI tidak hanya sampai di situ. Mereka juga berjuang di parlemen dengan cara mengendalikan Dewan Banjar.

Sebagaimana diketahui bahwa Belanda dengan gigihnya berupaya memaksakan berdirinya Negara Kalimantan dengan terlebih dahulu berencana membentuk daerah otonom Banjar dengan Dewan Banjar sehingga seolah-olah nantinya Negara

¹⁷⁰ (Ideham, dkk. ed., 2003:414).

¹⁷¹ Sjarifuddin, "*Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950*", (Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam, 1974), hlm. 51; Mugnie Junaidi, "Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) di Kalimantan Selatan", Skripsi Jurusan Sejarah FKG Unlam, Banjarmasin, 1972, hlm.73; Hassan Basry, *op.cit.*, hlm. 103.

¹⁷² Sjarifuddin, *op.cit.*, hlm. 149,157).

Kalimantan dibentuk secara demokratis. Akan tetapi, Belanda berupaya menjadikan Dewan Banjar sebagai alat kekuasaannya.

Dalam menghadapi pembentukan Dewan Banjar sebagai alat pemerintahan Belanda, maka SKI dan SERMI memutuskan melawan Belanda secara demokratis dengan ikut serta dalam pembentukan Dewan Banjar, dengan cara berusaha memonopoli kepengurusan Dewan Banjar sehingga nantinya mampu menjadikan dewan sebagai pemukul Belanda.

Dukungan dan kesediaan ikut serta dalam pembentukan Dewan ini bagi tokoh-tokoh SKI dan SERMI adalah atas dasar keyakinan bahwa melalui dewan itu akan dapat menggagalkan atau setidaknya membelokkan apa yang menjadi tujuan Belanda. Siasat dan syarat yang akan diperjuangkan mereka adalah dengan ikut serta menyusun peraturan pemilihan, agar dewan itu nantinya menguntungkan perjuangan Republikan di daerah ini. Sikap partai atau organisasi ini merupakan garis perjuangan yang harus ditempuh para anggota dewan yang mewakili partai atau organisasi tersebut.

Untuk memenangkan pemilihan, baik pihak golongan Republikan (SKI-SERMI) maupun orang-orang Belanda menjalankan siasatnya masing-masing. Pemimpin-pemimpin SKI di Banjarmasin mengadakan kunjungan-kunjungan ke daerah-daerah untuk mendapatkan dukungan bagi calon-calon dari anggota Republikan. Sebaliknya Belanda berjuang untuk menggagalkannya, seperti yang terjadi ketika Belanda berusaha membatalkan keputusan hasil pemilihan di Amandit Selatan dengan memeralat (memaksa) seorang pemilih untuk mengaku telah disogok oleh orang SKI. Tetapi dalam pemilihan ulang yang diadakan kemudian kemenangan tetap di pihak calon dari SKI.¹⁷³

Pada awalnya berbagai cara atau upaya SKI dan SERMI mengendalikan Dewan Banjar berjalan sesuai harapan. Namun ternyata, karena tidak adanya ketegasan dari anggota-anggota golongan Republikan, maka pada sidang tanggal 25 November

¹⁷³ M. Suriansyah Ideham, dkk. ed., *op.cit.* hlm. 415.

1948, Dewan Banjar berhasil membentuk Panitia Mempelajari Rancangan Susunan Tata Negara Kalimantan yang bertugas mempelajari dan membahas segala sesuatu tentang rencana Konstitusi Negara Federasi Kalimantan. Pada sidangnya tanggal 25 ke 26 November 1948, panitia tersebut telah berhasil menyusun dan mensahkan rencana Garis Besar Negara Kesatuan Kalimantan.¹⁷⁴ Keputusan Dewan Banjar menyetujui pembentukan suatu Negara Kalimantan mendapat reaksi keras dari para gerilyawan yang tergabung dalam ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan. Belanda tidak semudah itu mewujudkan Negara Kalimantan, karena besarnya perlawanan yang dilakukan para pejuang gerilya yang pimpinan Hassan Basry.

E. Laskar Muda dalam Perjuangan Bersenjata

Persetujuan Linggajati adalah satu tamparan yang terhebat terhadap perjuangan kemerdekaan di Kalimantan. Dengan resmi Pemerintah Republik melepaskan pulau yang besar yang rakyatnya tidak sudi dipisahkan dari Republik Indonesia dan berkorban demikian berat untuk tujuan itu. Dengan itu pula Belanda dapat memulai ofensif militer dan politiknya yang lebih hebat untuk menekan dan menghancurkan para gerilyawan.¹⁷⁵

Belanda mengumumkan bahwa Soekarno-Hatta tidak mengakui lagi perjuangan para gerilyawan Republik di Kalimantan. Bahkan dikatakannya pula bahwa para pejuang yang tetap bergerilya atau bernon-kooperasi melanggar perintah Soekarno-Hatta dan tidak taat kepada pemimpin-pemimpinnya. Belanda mengeluarkan ancaman dan meningkatkan gerakan militernya terhadap gerilyawan yang tidak mau menyerah.

Akibat politis dan yuridis dari Persetujuan Linggajati adalah Kalimantan Selatan berada di luar wilayah Republik Indonesia, dan dengan sendirinya kedudukan Gubernur Kalimantan tidak ada lagi, karena dihapuskan berdasarkan Penetapan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1947.

¹⁷⁴ *Ibid*, hlm. 416.

¹⁷⁵ A.H. Nasution, *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*, Jilid 4 Periode Linggajati, (Bandung: Disjarah-AD dan Angkasa, 1978), hlm. 111.

Konsekuensinya terhadap militer adalah semua satuan tentara Republik yang ada di luar Jawa dan Sumatera harus dibubarkan.

Lambat laun perubahan-perubahan yang terjadi di Pusat, termasuk keputusan MBT untuk melikuidasi Batalion Rahasia ALRI Divisi IV “A” Pertahanan Kalimantan diketahui juga oleh Hassan Basry. Akan tetapi, pemuda Hassan Basry dan para pejuang Kalimantan tidak menggubrisnya dan malahan mereka tetap mempunyai semangat yang tinggi dalam menghadapi serangan tentara dan polisi Belanda, meski mereka harus berjuang sendiri dalam pengadaan senjata, mengatur organisasi, bahkan membuat tanda pangkat sendiri.

Di Kalimantan Selatan, Hassan Basry yang menyingkir ke pedalaman akibat serangan gencar Belanda akhirnya mengkonsolidasikan kekuatannya dengan merubah nama Batalion Rahasia ALRI Divisi IV “A” menjadi Markas Besar RX-8 SOPIK/ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, seolah mengambil alih kedudukan Markas Besar ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang telah dilikuidasi di Jawa. Hassan Basry memutuskan bahwa ALRI Divisi IV “A” sudah tidak ada lagi dan SOPIK ALRI Divisi IV ditingkatkan statusnya menjadi sebuah divisi dengan nama MPK ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dengan “Pimpinan Umum” Hassan Basry.¹⁷⁶

Hassan Basry sesuai misi yang diembannya memerlukan waktu dua tahun (1947-1948) untuk tetap melaksanakan tugasnya menggabungkan dan mengkonsolidasikan satuan-satuan

¹⁷⁶ Hassan Basry, *loc.cit.* Pada surat kabar *Kalimantan Berdjung* dan *Suara Kalimantan* terbitan akhir 1948 dan tahun 1949, pada umumnya menyebut/menulis kelompok gerilya ini dengan nama “ALRI Divisi IV” atau “ALRI D.IV” atau “ALRI D. IV Kalimantan Selatan” tanpa ada kode “A”, akan tetapi bukan tidak ada atau jarang sekali menyebut “ALRI Divisi IV “A”, lihat misalnya *Kalimantan Berdjung*, 8, 9, dan 22 Agustus 1949. Penyebutan nama “ALRI Divisi IV” tanpa kode “A” itu, selaras dengan apa yang dikemukakan oleh Hassan Basry dalam bukunya “Kisah Gerilya Kalimantan Jilid II” tentang sudah tidak adanya Batalion ALRI Divisi IV “A” itu, karena telah menjadi sebuah divisi dengan nama “ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan”, lihat Wajidi, *Revolusi Kemerdekaan di Kalimantan Selatan 1945-1949*, (Yogyakarta: Ombak, 2015), hlm. 51.

gerilya yang terpisah-pisah. Sementara itu infiltrasi pejuang Kalimantan dari Jawa terus berdatangan meski Belanda melakukan blokade lewat laut dan udara.



Gambar 3.7. Tentara ALRI Divisi IV
Pertahanan Kalimantan dengan persenjataannya.
(Sumber: Wajidi, 2015; Gedung Juang, Kandangan)

Konsolidasi itu dilatarbelakangi oleh adanya Kenyataan gagalnya upaya membendung dan mengusir Belanda yang kembali ke Kalimantan Selatan lantaran kurangnya koordinasi antara organisasi kelaskaran yang ada.

Bertitik tolak dari pengalaman itulah, maka bagi ALRI dipandang perlu untuk menyatukan semua gerak langkah perjuangan guna menghadapi Belanda dengan mengkonsolidasikan semangat rakyat, organisasi perjuangan terutama kelaskaran dan memperbaharui susunan formasi yang ada. ALRI Divisi IV tidak membenarkan lahirnya organisasi perjuangan di luar ALRI.¹⁷⁷ Upaya konsolidasi lainnya adalah berupa pembersihan

¹⁷⁷ Ramli Nawawi dkk., *op.cit.*, , hlm. 122.

kaki tangan atau spion Belanda, dari seluruh daerah sampai ke kota-kota.¹⁷⁸

Usaha-usaha penggabungan organisasi perjuangan juga diikuti dengan konsolidasi ke dalam dengan jalan memperbaharui formasi organisasi ALRI dengan maksud antara lain untuk mengisi kekosongan pemerintahan di daerah jika kelak berhasil direbut atau ditinggalkan Belanda. Upaya memperbaharui struktur organisasi itu berhasil dilakukan berkat jasa besar Gusti Aman, Kepala Staf dari Letnan Kolonel Hassan Basry.

Dalam struktur baru, Markas Besar ALRI membawahi markas daerah, dan markas daerah dibentuk untuk membawahi markas pangkalan dan sebuah markas pangkalan untuk membawahi markas seksi. Markas daerah, pangkalan dan markas seksi ditujukan untuk melaksanakan kewajiban pemerintahan kewedanaan, kecamatan, dan kampung yang telah ditinggal pemerintahan Belanda. Selain itu dilakukan pula penyempurnaan pasukan teritorial yang sudah ada di bawah markas pangkalan dengan nama "Pasukan Riwas".¹⁷⁹ Hingga akhir 1948, usaha-usaha konsolidasi yang dilakukan ALRI menunjukkan hasilnya yang berdampak kepada peningkatan daya tempurnya.

Keberhasilan para gerilyawan dalam menyerang dan merebut kedudukan militer Belanda, mengakibatkan kekuasaan teritorial ALRI Divisi IV menjadi semakin meluas. Keberhasilan tersebut tidak terlepas dari keberhasilan usaha konsolidasi yang telah dilaksanakan oleh ALRI. Maka dengan terpusatnya semua kekuatan di tubuh ALRI Divisi IV menjadikan daya tempurnya semakin menghebat. Hal itulah mengakibatkan pihak gerilyawan memperoleh kemenangan di berbagai pertempuran.¹⁸⁰

Akibat adanya tekanan dan serangan gencar para gerilyawan, maka Belanda mulai menarik pos-pos militernya yang terpencil dan memusatkan kekuatannya di kota-kota dengan

¹⁷⁸ Hassan Basry, *op.cit.*, hlm. 38-39.

¹⁷⁹ Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan, *op.cit.*, hlm. 212-213.

¹⁸⁰ Wajidi, "Proklamasi 17 Mei: Sebuah Momentum Menuju Muara", dalam Banjarmasin Post, Selasa 17 Mei 1994, hlm. 11.

tujuan mempermudah komunikasi dan memperpendek jarak pengangkutan kebutuhan peralatan.

Bagi para gerilyawan tindakan Belanda itu justru menguntungkan perjuangan bersenjata, sebab selain memperoleh kekuasaan teritorial, maka dari sudut pandang psikologis menjadikan optimisme dan kebanggaan para gerilyawan semakin meningkat.¹⁸¹ Sejak itulah, secara *de facto* gerilyawan telah menguasai seluruh daerah Kalimantan Selatan minus kota-kota yang diduduki oleh Belanda.

Setelah memperoleh kemenangan di berbagai arena pertempuran, sangat terasa adanya kekosongan pemerintahan di daerah yang berhasil direbut atau ditinggalkan Belanda. Dalam situasi demikian, timbul keinginan dari ALRI Divisi IV untuk mengisi kekosongan atau vakumnya pemerintahan sipil itu dengan membentuk suatu pemerintahan sendiri dipimpin seorang gubernur militer atau gubernur tentara melalui sebuah proklamasi di samping mengatur ekonomi dengan mendirikan koperasi, serta menembus tirai besi NICA-Belanda supaya perjuangan Kalimantan diketahui Republik Indonesia dan Dunia.¹⁸²

Salah satu bentuk pengaturan ekonomi adalah memblokade ekonomi terhadap kota-kota yang dikuasai Belanda, sehingga bahan makanan dan bahan-bahan lainnya yang dihasilkan rakyat tidak bisa masuk kota, yang mengakibatkan pasar-pasar menjadi sepi.

Pembentukan pemerintah Gubernur Tentara yang direncanakan itu merupakan realisasi dari keinginan untuk memperluas perjuangan bersenjata ke bidang politik, sosial, dan ekonomi agar wilayah Kalimantan Selatan dapat dimasukkan ke dalam wilayah Republik Indonesia.

Sementara itu, berita adanya pemberian mandat oleh Presiden Soekarno kepada Mr. Syafrudin Prawiranegara untuk

¹⁸¹ Wajidi, *loc.cit.*

¹⁸² M. Idwar Saleh, "ALRI Divisi IV-A: Suatu Lukisan Tentang Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kemundurannya", Laporan Penelitian FKIP Unlam, Banjarmasin, 1988, hlm. 69 (footnote); Hassan Basry, *op.cit.*, hlm. 66; M. Suriansyah Ideham dkk (ed.), *op.cit.*, hlm. 455.

membentuk Pemerintahan Darurat di Sumatera dan rencana Pemerintahan Pelarian ke New Delhi India jika pemerintahan itu gagal pula, sudah juga diketahui pihak ALRI. Maka timbullah keinginan dan pendapat untuk membuat suatu pernyataan berupa “proklamasi” dengan dasar pikiran sebagai berikut:

1. Untuk menyatakan kepada masyarakat dan Pemerintah Republik Indonesia serta Dunia, bahwa gerilya kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan yang berada di belakang tirai besi Belanda benar-benar ada dan mempunyai kekuatan dan kemampuan yang cukup tangguh untuk mem-bela dan mempertahankan Pemerintahan Republik Indonesia;
2. Menyatukan semua organisasi dan pimpinannya ke dalam satu pimpinan yang berbentuk Pemerintahan Gubernur Tentara;
3. Mempersiapkan Daerah Kalimantan untuk dijadikan kedudukan Pemerintahan Pusat Republik Indonesia jika Pemerintahan Pelarian yang direncanakan di New Delhi India gagal, sebagai kelanjutan perjuangan mempertahankan kemerdekaan;
4. Mempersatukan seluruh tenaga pejuang dan rakyat Kalimantan ini untuk merubah struktur perekonomian kolonial dengan membangun perekonomian nasional;
5. Kenyataan vakumnya pemerintahan karena ditariknya aparatur Pemerintahan Belanda di tiap-tiap onderdistrik, sehingga rakyat benar-benar tidak mempunyai pemerintahan.¹⁸³

Selain itu, karena ALRI Divisi IV belum juga mendapatkan pengakuan dari Pemerintah Republik, dan sebagai protes keras terhadap pengakuan Republik di Yogyakarta yang justru diberikan kepada “Daerah-daerah Otonomi buatan Belanda” di Kalimantan, maka pada tanggal 17 Mei 1949 yakni seminggu

¹⁸³ A.H. Budhigawis, “Laporan Perjuangan dari Munggu Raya”, naskah ketikan, Martapura, 1968, hlm. 13; Abdurrahman Karim, “Riwayat Singkat Kesatuan/Kelasykaran Bersenjata GERPINDOM/ TRI Ps MN-1001 Bergabung dengan ALRI Div.IV Pertahanan Kalimantan Dalam Perjuangannya”, naskah ketikan, Martapura, 1989, hlm. 18-19.

sesudah penandatanganan Persetujuan Rum-Royen, Hassan Basry atas nama rakyat Indonesia di Kalimantan Selatan dan Gubernur Tentara memproklamasikan berdirinya Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI yang melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan menjadi bagian dari Republik Indonesia.

“ PROKLAMASI “

Merdeka !

Dengan ini kami rakjat Indonesia di Kalimantan Selatan, mempermaklumkan berdirinja Pemerintah Gubernur Tentara dari “A.L.R.I.” melingkungi seluruh daerah Kalimantan Selatan mendjadi bagian dari Republik Indonesia memenuhi Proklamasi 17 Agustus 1945, jang ditanda tangani oleh Pres. Soekarno dan Wakil Pres. M. Hatta.

Hal-hal jang bersangkutan dengan pemindahan kekuasaan akan dipertahankan dan kalau perlu diperdjuangkan sampai tetesan darah jang penghabisan.

Tetap Merdeka.

*Kandangan, 17 Mei IV Rep.
ATAS NAMA RAKJAT INDONESIA
di Kalimantan Selatan
Gubernur Tentara*

HASSAN BASRY¹⁸⁴

Dengan proklamasi tersebut, ALRI bermaksud untuk memperlihatkan keberadaan, kekuatan dan kemampuannya untuk menyusun suatu pemerintahan dalam lingkungan Republik Indonesia, meski menurut Persetujuan Linggajati dan Renville secara *de facto* dan *de jure* Kalimantan merupakan jajahan Belanda.

¹⁸⁴ M. Suriansyah Ideham, dkk. ed., *op.cit.* hlm. 455-456; Wajidi, *Revolusi...*(2015), hlm. 100, Wajidi, Proklamasi Kesetiaan kepada Republik, (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007), hlm. 120; Danussaputera, *op.cit.*, hlm. 66.



Gambar 3.8. Letnan Kolonel Hassan Basry, Gubernur Tentara/Panglima Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan mendapat sambutan dari rakyat. (Sumber: (repro koleksi A.H. Nasution “Sekitar Perang Kemerdekaan).

Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV yang diumumkan Hassan Basry, merupakan sebuah tekad untuk terus berjuang mempertahankan Kalimantan sebagai bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berpusat di Yogyakarta.¹⁸⁵

Selain bermakna sebagai pernyataan kesetiaan kepada Pemerintah Republik Indonesia yang sebelumnya secara resmi telah meninggalkan Kalimantan melalui Persetujuan Linggajati, maka proklamasi itu juga dimaksudkan untuk menunjukkan kepada Pemerintah Republik dan Belanda bahwa “Daerah Otonom Kalimantan Tenggara dan Banjar” yang telah diciptakan

¹⁸⁵ Lihat Buku Panduan Peringatan HUT ke-45 Proklamasi Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan, Banjarmasin, 1994, hlm. 10.

Belanda sebagai upaya awal untuk mendirikan “Negara Kalimantan”, tidak lebih hanyalah fiksi di atas kertas dan sama sekali tidak berwujud nyata.¹⁸⁶

Tidak lama setelah dikumandangkannya Proklamasi 17 Mei 1949, dimulailah pengisian dan penyusunan pemerintahan di daerah-daerah yang sebelumnya vakum karena ditinggalkan oleh Pemerintah Belanda. Pemerintahan itu dikenal dengan nama “Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan”.¹⁸⁷

Pembentukan Pemerintah Gubernur Tentara merupakan sebuah peristiwa yang sangat penting yang pernah dicapai oleh para gerilyawan dalam menekan kedudukan Belanda melalui pengembangan kekuatannya ke bidang politik, sosial, dan ekonomi, sehingga sejak 17 Mei 1949 telah terjadi dualisme pemerintahan dan kekuasaan teritorial antara ALRI Divisi IV dengan Belanda, di mana dalam dualisme itu Pemerintahan Gubernur Tentara ALRI Divisi IV lebih berkuasa.¹⁸⁸

Di bidang ekonomi, ALRI memerintahkan pengkogan umum yang dilaksanakan oleh sehingga melumpuhkan pemerintahan Belanda dan perekonomiannya. Untuk menunjukkan ALRI lebih berkuasa dan mencegah mengalirnya uang rakyat ke pemerintahan Belanda, Mayor P. Arya selaku Komandan Markas Besar Daerah Selatan ALRI Divisi IV melarang warga untuk pergi haji ke Mekkah. Menurut ALRI mereka yang naik haji hanya akan digunakan Belanda untuk tujuan propaganda.

Di segi militer, ALRI Divisi IV tidak hanya menguasai daerah pedalaman, tetapi pengaruhnya terasa pula di pusat pemerintahan Kalimantan Selatan, Banjarmasin. KNIL, KL dan Polisi NICA kehilangan inisiatif untuk menyerang posisi gerilyawan.

¹⁸⁶ Lihat C. van Dijk, *op.cit.*, hlm. 210.

¹⁸⁷ “Surat2 dari Hulu-Sungai: Menindjau daerah gerilja dari dekat”, dalam Kalimantan Berdjung, Kamis 22 September 1949 No. 806 Tahun ke V, hlm.2.

¹⁸⁸ Wajidi, *loc.cit.*

Belanda hanya mungkin melakukan perjalanan ke pedalaman dalam konvoi dan pengawalan yang ekstra. Di Banjarmasin sendiri mereka harus waspada terhadap serangan-serangan gerilyawan. Sesungguhnya dalam paruh kedua tahun 1949 ALRI Divisi yang telah bersimaharajalela di Kalimantan Selatan.¹⁸⁹

Klimaks dari segala peristiwa itu terjadi pada bulan Agustus 1949. Pada tanggal 15 Agustus terjadi serangan umum terhadap kota Banjarmasin, dan tiga hari kemudian serangan umum terhadap kota Kandangan. Akibat psikologis dari serangan umum itu besar sekali, karena rakyat bertambah semangat dan sudah berani terang-terangan menyatakan sikap dan pelarian pihak Belanda ke pedalaman semakin besar.¹⁹⁰



Gambar 3.9. Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan
(Sumber: dok. Zainal).

Sedemikian gawatnya situasi Banjarmasin pada waktu itu, menyebabkan Residen A.G. Deelman dan Komandan Territorial dan Troepen Letnan Kolonel H.J. Veenendal harus tidur di kapal perang yang berlabuh di Pelabuhan Banjarmasin. Bahkan untuk

¹⁸⁹ C. van Dijk, *op.cit.*, hlm. 213.

¹⁹⁰ M. Idwar Saleh, *op.cit.*, hlm. 50.

pelarian darurat orang-orang Belanda, telah dipersiapkan kapal-kapal kecil di pelabuhan tersebut.¹⁹¹

Seolah tidak mau kelihatan menanggung malu, pihak Belanda memang selalu berusaha menutup-nutupi pemberitaan tentang kemenangan gerilyawan Republik, agar terdapat kesan bahwa secara *de facto* Kalimantan Selatan benar-benar di bawah kekuasaan Belanda. Namun upaya itu tidak dapat mengatasi keadaan. Adanya serangan gencar para gerilyawan yang diekspose surat kabar republiken seperti surat kabar Kalimantan Berjuang, menyebabkan pihak Belanda tidak bisa menjalankan pemerintahannya dan terpaksa “meminta” *cease fire* di Kalimantan Selatan kepada Pemerintah Republik Indonesia. Padahal, pemerintah Republik Indonesia secara sadar dan resmi telah meninggalkan dan melupakan Kalimantan.¹⁹²

Untuk membicarakan pelaksanaan *cease fire*, Pemerintah Republik bersama-sama dengan UNCI (*United Nations Commission for Indonesia*) mengirim utusannya masing-masing sebagai penengah dan saksi dalam pertemuan antara pihak Gubernur Tentara ALRI dengan pihak Belanda. Sejak itu dimulailah strategi diplomasi ALRI melalui meja perundingan. Pertemuan pertama yang berlangsung di Munggu Raya, 2 September 1949, antara lain menghasilkan pengakuan resmi dari pemerintah Republik Indonesia bahwa ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan adalah bagian dari tentara Republik yang dikepalai oleh Letkol Hassan Basry.

Pertemuan puncak terjadi dalam perundingan 16-17 Oktober 1949 di Banjarmasin yang menghasilkan beberapa keputusan penting, diantaranya adalah diberlakukannya secara resmi perintah penghentian permusuhan (*cease fire order*) di Kalimantan Selatan mulai tengah malam tanggal 16-17 Oktober.

Rakyat Kalimantan Selatan berhasil memperoleh kemenangan, karena tidak lama setelah perundingan tersebut, Be-

¹⁹¹ M. Idwar Saleh, *ibid.*, hlm. 52.

¹⁹² Hassan Basry, *op.cit.*, Jilid II, hlm. 75.

landa meninggalkan Kalimantan Selatan. Dengan tidak mengabaikan peranan perjuangan di bidang politik dan organisasi kelaskaran lainnya, maka keberhasilan itu tidak terlepas dari strategi militer dan diplomasi yang diterapkan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan dalam perjuangannya menegakkan kemerdekaan Republik Indonesia di Kalimantan.

F. Pelajar Pejuang dan Tentara Pelajar

Proklamasi 17 Mei 1949 telah mendorong meningkatnya semangat perjuangan pada jiwa anak-anak muda dari kalangan pelajar madrasah, sekolah swasta dan sekolah negeri dari segala jurusan. Peran mereka sesuai dengan kemampuan dan kondisi lapangan, seperti: antar kirim surat-surat, melacak kesigapan pertahanan tentara NICA, melaksanakan administrasi di pangkalan-pangkalan, palang merah, bahkan tidak sedikit yang langsung mengangkat senjata dan tewas sebagai syuhada diantaranya Abdullatief di Tatah Pamangkih, dan Syahrani di Barabai.

Di Barabai, anak-anak Pelajar Sekolah Normal (*Normaalschool*) pada bulan Juni 1949 secara serentak mereka meninggalkan sekolahnya masuk ke pedalaman di Haruyan menggabungkan diri untuk ikut aktif bergerilya menumpas penjajah Belanda. Mereka digembleng di dalam wadah pembinaan yang dinamakan “Akademi Militer Kilat” ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan untuk selama 3 bulan.¹⁹³

Di Banjarmasin, aktivitas pelajar dalam revolusi kemerdekaan sangat aktif dan berkembang sampai menjadi enam Batalion dengan tokoh-tokohnya adalah Gusti Syamsir Alam, Maskur Rivai, Dislansyah dan Riduan Iman. Mereka dibawah pembinaan ALRI Divisi IV Markas Besar Selatan Alam Roh.

Sampai sekitar bulan Februari 1948 diketahui ada 3 kesatuan pelajar, yaitu; (1) Batalion Melati, di bawah pimpinan Gusti Tarmiji, (2) Tentara Pelajar Kalimantan yang bermarkas di Paku Alam II/Alam Roh desa Lok Baintan-Sungai Tabuk, di

¹⁹³ M. Suriansyah Ideham, dkk. ed., *op.cit.* hlm. 470-471.

bawah pimpinan Letnan Satu Bambang Sujito dan Letnan Dua Subarjo, sebelumnya dijabat oleh Rawansyah Baderun sebagai Komandan dan wakilnya Nurman Ibas, (3) AKSI (Angkatan Kesatuan Siswa Indonesia) dipimpin oleh Busra Nafarin.



Gambar 3.10. Penggemblengan Tentara Pelajar di Pusdiklat Markas Besar Daerah Selatan Alam Roh, Sungai Lulut Banjarmasin (Sumber: Wajidi, 2015).

Tentara Pelajar Kalimantan yang dikenal sebagai Kesatuan Tentara Pelajar ALRI Divisi IV bertugas antara lain ikut membantu melatih calon prajurit dari berbagai pangkalan yang dipusatkan di Paku Alam II/Alam Roh. Anggota-anggota tentara pelajar Kalimantan ini antara lain: Rawansyah Baderun, Nurman Ibas, Gusti Syamsir Alam, Riduan Iman, Yaffandi Seman dan lain-lain.

Pelajar-pelajar yang tergabung dalam tentara pelajar Kalimantan ini berasal dari beberapa sekolah seperti: MULO (*Meer Uitgebreid Lager Onderwijs*), Sekolah Menengah Tinggi (SMT), *Kweekschool*, OVVO (*Opleidingschool voor Volksonderwijzers*) dan VHO (*Voorbereidend Hoger Onderwijs*), SMIP, dan beberapa madrasah dari Banjarmasin, Martapura, Rantau, Kandangan, Barabai, Tanjung dan Amuntai

AKSI (Angkatan Kesatuan Siswa Indonesia) pada mulanya diprakarsai oleh Bahri Arpan seorang pelajar Sekolah Menengah Islam (SMIP) Banjarmasin bersama dengan kurang lebih 10 orang pemuda pelajar. Kepada Busri Nafarin diberi tugas untuk mengadakan hubungan dengan kaum gerilya yang secara kebetulan bertemu dengan Abdurrahman Lubis (nama sebelumnya Lukman) seorang pejuang yang membawa misi dari Hulu Sungai.

Pertemuan selanjutnya diadakan di toko jalan Sudimampir yaitu di tempat kursus mengetik "Semangat" di samping Masjid Noor Banjarmasin. Terkumpul sekitar 20 orang pelajar, di antaranya dari SMIP, Ambachtschool dan MULO Banjarmasin, dan sepakat untuk membentuk AKSI (Angkatan Kesatuan Siswa Indonesia), yang sejak bulan September 1948 menjadi bagian dari ALRI Divisi I BN-10 Cerbon dengan M. Yunus sebagai pemimpin dan Busri Nafarin sebagai wakilnya.

Pada 28 November 1949 diresmikan berdirinya Brigade Pelajar Kalimantan oleh Letnan Kolonel Sukanda Bratamanggala yang langsung sebagai Pj. Komandan dan Soetomo sebagai Kepala Stafnya. Anggota Brigade Pelajar Kalimantan itu berasal dari eks AKSI BN-10 Cerbon Marabahan pimpinan Busri Nafarin, eks Tentara Pelajar Banjarmasin pimpinan Rawansyah Baderun, eks Batalion Melati. Sejak tahun 1950 dengan keputusan KSAD, apa yang disebut tentara pelajar telah dibubarkan.¹⁹⁴

G. Perjuangan Wartawan Muda di Jalur Media Massa

Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, fungsi media sangat berkaitan dengan perkembangan nasionalisme dan revolusi yang terjadi sehingga mewarnai fungsi media itu sendiri. Dalam konteks perjuangan kemerdekaan, maka media massa adalah media informasi dan sekaligus sebagai alat perjuangan. Karena di balik media terdapat pesan, pikiran dari seorang wartawan.

¹⁹⁴ M. Suriansyah Ideham, dkk. ed., *op.cit.* hlm. 472-473.

Pada masa revolusi kemerdekaan (1945-1949), para jurnalis radio, surat kabar dan majalah republiken dengan caranya masing-masing ikut berjuang mempertahankan kemerdekaan, menolak ide federalisme, menumbuhkan kesadaran nasional dan membangkitkan semangat perjuangan guna mencapai cita-cita perjuangan kemerdekaan.

Terdapat perbedaan antara wartawan zaman pergerakan dengan revolusi fisik. Pada masa pergerakan kebangsaan, wartawan menggunakan pena sebagai senjata, tetapi di masa revolusi fisik, ada sebagian wartawan yang selain menggunakan pena senjata, ia juga mengangkat senjata, atau setidaknya anggota organisasi kelaskaran rakyat.¹⁹⁵

Di masa perjuangan periode 1945-1949 terbitlah beberapa surat kabar perjuangan atau pers Republiken seperti *Terompet Rakyat*, majalah *Republik*, dan harian *Kalimantan Berjuang*. *Di samping itu* terbit pula sebuah surat kabar yang pada awal-awal pembentukannya menjadi corong NICA/Belanda, yaitu harian *Suara Kalimantan*, dan *Borneo Post* sebagai surat kabar resmi Belanda.

Banyak media cetak lainnya yang lahir di masa Perang Kemerdekaan, antara lain *Mingguan Kedaulatan*, *Islam Berjuang*, *Berita Merdeka*, *Fadjar Timoer*, *Mingguan Waspada*, *Harian Indonesia Merdeka*, *Politik Njata*, *Menara Indonesia*, *Pedoman Perdjoeangan*, *Pedoman Poetri*, dan *Majalah Pawana*, *Remadja*, *Nyata*, *Majalah Piala*, *Majalah Samarata*, *Islam Berjuang*, *Terompet Masyarakat Baru*, majalah *Tekad dan Nyata*, serta majalah *Remaja*, dan *Majalah Kenangan*. Namun semuanya bernasib sama yakni berumur pendek karena kesulitan modal, atau bisa pula terkena *persbreidel* dan tokoh-tokohnya ditangkap dan dipenjarakan penguasa NICA.

¹⁹⁵ Pada saat Kongres Wartawan yang pertama di Solo, dari kalangan wartawan yang hadir selain membawa pena sebagian yang hadir membawa senjata seperti pistol, golok, bambu runcing, berpakaian seragam Gurkha, rambut gondrong, dan lain sebagainya, lihat Togi Simanjuntak, (ed.), *Wartawan Terpasung*, (Jakarta: Institut Studi Arus Informasi, 1998), hlm. 15.

Pemerintah NICA memiliki sebuah lembaga dengan nama Jawatan Penerangan NICA atau *Regerings Voorlichting Diens* (RVD). Jawatan inilah yang seringkali melakukan sensor terhadap isi berita surat kabar, melakukan peringatan dan pemanggilan terhadap wartawan (jurnalis) yang diindikasikan atau terang-terangan mendukung perjuangan kemerdekaan. Terhadap beberapa surat kabar, pemerintah melalui aparatnya melakukan *persbreidel*, menangkap dan memenjarakan wartawan, serta menghancurkan mesin-mesin cetaknya.



Gambar 3.11. Wartawan Semarak dan Kalimantan Berdjuang (1947-1952). berdiri: Siti Chasrimunah, Zafry Zamzam, Yusni Antemas, Zainal, Aliansyah Luji, A. Gafar (Tata Usaha). Berjongkok: Artum Artha, anak-anak, Abdul Gani (loper), Arifin (Pembantu Tata Usaha). (Sumber: dok. Artum Artha; bubuhanbanjar.wordpress.com)

Kenyataannya memang demikian, banyak wartawan seperti A.A. Hamidhan, Hadhariyah M, Zafry Zamzam, Yusni Antemas, Hamran Ambrie, Ahmad Basuni, Haspan Hadna, Merah Daniel Bangsawan, Artum Artha, Zainal, Aam Niu dan lain-

lainnya yang selama bergelut sebagai wartawan dikejar-kejar aparat kolonial, ditangkap, dijebloskan ke penjara.

Sesudah proklamasi kemerdekaan, banyak wartawan yang dijebloskan ke penjara. Sesudah meletusnya pemberontakan 9 November 1945 di Banjarmasin, 5 Desember 1945 di Marabahan, dan pemberontakan Trikesuma 19-20 Maret 1946, aparat militer dan polisi Belanda melakukan pengejaran dan penangkapan besar-besaran terhadap rakyat dan tokoh-tokoh perjuangan diantaranya yang ditangkap adalah pejuang yang bersenjatakan pena atau wartawan republiken.

Tokoh wartawan Zafry Zamzam ditangkap lagi tahun 1946. Majalahnya yang terbit tanggal 17 Agustus 1946 terpaksa terhenti sementara, kemudian dilanjutkan sesudah Zafry Zamzam bebas. Tahun 1948 dia ditangkap lagi. Di Kandangan, aparat militer Belanda menangkap yakni Zafry Zamzam, Ahmad Basuni, Haspan Hadna, Merah Daniel Bangsawan, Artum Artha. Di Amuntai, Belanda menangkap Hamran Ambrie pemimpin redaksi warta harian Terompet Rakyat dan Menara Indonesia. Sebagaimana diketahui, Hamran Ambrie selain dikenal sebagai pemimpin redaksi Terompet Rakyat ia dikenal juga sebagai “Abang Betel” yakni penjaga “Pojok” yang sering melontarkan protes, sindirian, kritik, dan lain-lain terhadap pemerintahan NICA.

Diantara wartawan yang ditangkap ada yang mengalami siksaan seperti yang dialami oleh Yusni Antemas wartawan Terompet Rakyat. Tajamnya pena wartawan yang disuarakan oleh Terompet Rakyat terasa memekakkan telinga pemerintah Belanda. Akibatnya Pemimpin Redaksi, Hamran Ambrie dan Wakil Pemimpin Redaksi Yusni Antemas dipanggil dan diminta untuk menghentikan kegiatannya sebagai wartawan Republiken. Kepada mereka berdua, Pemerintah Belanda melalui Kiai Besar Merah Nadalsyah di Kandangan menawarkan bantuan berupa dana dan sarana apabila bersedia menghentikan penerbitan harian Terompet Rakyat, mengubah motto koran menjadi

pro atau berpihak kepada Belanda, namun tawaran itu ditolak mereka.¹⁹⁶

Penolakan Yusni Antemas dan Hamran Ambrie berakibat kepada pemukulan yang dilakukan oleh militer Belanda terhadap Yusni Antemas yang lagi bepergian ke Tanjung pada tanggal 6 Mei 1947. Di saat penggeledahan ia dicap sebagai “Ektremis Berbulu Wartawan”, karena selain tulisan-tulisannya yang tajam dan tak mau kompromi, sejatinya ia juga anggota Gerpindom. Mengenai peristiwanya, Aam Niu, wartawan yang juga sejawat Yusni Antemas menuangkan kisahnya di dalam majalah Dwikala ARENA Medan edisi Februari 1948.

Artum Artha sebagai salah seorang wartawan merasakan betul sakitnya kehidupan di masa revolusi kemerdekaan. Artum Artha menceritakan, bahwa dalam bulan Oktober 1945 kami berlima ditangkap oleh Belanda. Kebetulan sekali kelimanya adalah yang dianggap Belanda sebagai wartawan: Zafry Zamzam, Ahmad Basuni, Haspan Hadna, Merah Daniel Bangsawan, Artum Artha. Empat dari lima wartawan yang ditangkap dibawa waktu malam ke Banjarmasin dan ditempatkan di kamp-kamp rahasia Belanda. Tidak boleh ditemui oleh siapa saja. Sedangkan Artum Artha, dimasukkan dalam kamar kamp militer tangsi militer Kandangan. Dijaga selama 2 x 24 jam. Namun tidak habis waktunya, dipulangkan dan bebas.

Pendek kata hampir semua wartawan pada masa revolusi kemerdekaan di Kalimantan Selatan pernah mengalami dipanggil, diinterogasi, ditangkap, dipukul atau masuk penjara dan sekurang-kurangnya masuk ruang tahanan Pemerintah Belanda di Banjarmasin. Mereka adalah wartawan dengan rata-rata

¹⁹⁶ Melisa Prawitasari, 2015. “Terompet Rakyat: Koran Perjuangan Di Afdeeling Hoeloe Soengai Onderafdeeling Amoentai tahun 1946-1947”, dalam Ersis Warmansyah Abbas (Penyunting), *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. (Banjarmasin: Program Studi Pendidikan IPS Jurusan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin bekerjasama dengan Penerbit Wahana Jaya, 2015), hlm. 327.

berusia muda, dengan semangat dan idealisme yang membara turut berjuang merebut dan mempertahankan kemerdekaan.

Bab 4

Gerakan Pemuda Pasca Pengakuan Kedaulatan Hingga Awal Orde Lama

A. Pemuda di Era Proklamasi Hingga Pengakuan Kedaulatan

Dengan dikumandangkannya Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dilihat dari segi hukum tata negara, berarti bangsa Indonesia telah memutuskan ikatan dengan tatanan hukum sebelumnya, baik tatanan Hindia Belanda maupun tatanan hukum pendudukan Jepang. Dengan perkataan lain, Bangsa Indonesia mulai saat itu telah mendirikan tatanan hukum yang baru, yaitu tatanan hukum Indonesia, yang berisikan hukum Indonesia, yang ditentukan dan dilaksanakan sendiri oleh Bangsa Indonesia.¹⁹⁷

Proklamasi Kemerdekaan 1945 tidak luput dari peran pemuda. Sehari setelah proklamasi dikumandangkan, para pemimpin bekerja keras membentuk lembaga pemerintahan sebagaimana layaknya suatu negara merdeka. Dalam kesempatan ini, PPKI menyelenggarakan rapat pada tanggal 17 Agustus 1945, sebagai rapat yang pertama setelah proklamasi kemerdekaan. Atas inisiatif Soekarno dan Hatta, mereka merencanakan menambah 9 orang sebagai anggota baru yang terdiri dari para pemuda seperti Chairul Saleh dan Sukarni. Namun, karena para pemuda menganggap bahwa PPKI bentukan Jepang, akhirnya para pemuda meninggalkan tempat.

Selain itu, proklamasi kemerdekaan tidak terlepas dari peran pemuda yang mendesak agar Soekarno dan Hatta segera membacakannya pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan menunggu kompromi dengan pemerintah Jepang. Selayaknyalah peristiwa bersejarah yang demikian penting itu diperingati

¹⁹⁷ Joeniarto, *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001 hal. 20; George Mc. T. Kahin, *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi di Indonesia* (Solo: UNS Press & Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 116.

dengan mendalami semangat yang terkandung dalam peristiwa itu. Pemuda-pemuda Indonesia, khususnya di Kalimantan Selatan, banyak melakukan perlawanan fisik menghadapi pasukan Belanda yang datang kembali dengan membonceng Sekutu. Agresi Belanda I maupun II (tahun 1947 dan 1948). Perlawanan ini banyak berlangsung di berbagai kota di Indonesia, seperti Jakarta, Bandung, Semarang dan Surabaya.¹⁹⁸

Banyak pula dibentuk organisasi pemuda Islam, seperti Gerakan Pemuda Islam (Oktober 1945), Pemuda Islam (April 1947), Angkatan Puteri Al-Washliyah (Juni 1947), Ikatan Putra Putri Indonesia (1945), Gamki (1948), Pemuda Demokrat (1947), Pemuda Katolik (1947), PMKRI (Mei 1947), Pelajar Islam Indonesia (Mei 1947) dan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang didirikan oleh Lafran Pane dan kawan-kawan pada Februari 1947 di Sekolah Tinggi Islam (STI) di Yogyakarta. Dan organisasi lainnya.¹⁹⁹

Pada Dekade 1948-1958, Perlawanan pemuda Indonesia masih dalam bentuk perlawanan fisik hingga berlangsungnya Konferensi Meja Bundar tahun 1949 di Den Haag, Belanda. Pada saat-saat inilah para pemuda yang tergabung dalam berbagai organisasi pemuda, baik yang nasionalis maupun keagamaan bermunculan. Hal ini adalah sesuai dengan atmosfer perjuangan pasca perang kemerdekaan, yaitu perjuangan ideologi dan mencari identitas bangsa Indonesia. Banyak lahir partai-partai politik pada dekade ini, sehingga banyak pula organisasi pemuda yang lahir sebagai *underbouw* dari partai-partai induk yang sudah mapan. Misalnya CGMI (Pemuda PKI), GMNI (1954/ pemuda PNI). Ataupun bentuk afiliasi politik organisasi pemuda terhadap partai tertentu, misalnya HMI terhadap Masyumi. Organisasi-organisasi pemuda yang lahir pada dekade ini adalah IPNU (1954) dan lain-lain sampai pada dekade berikutnya.²⁰⁰

Peran pemuda diwarnai dengan kondisi dimana terjadi pembagian wilayah peninggalan Hindia Belanda. Pada tanggal 19 Agustus meskipun ada bantahan pro forma dari Yamamoto, PPKI bersidang lagi, yang kemudian berubah nama menjadi Komite Nasional Indonesia (KNI), sesuai dengan syarat-syarat

¹⁹⁸ MD, Sagimun, *Peranan Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi* (Jakarta: Bina Aksara, 1989), hlm.32.

¹⁹⁹ Gunawan, *Di Arus Pergerakan Rakyat*, (Jakarta: Pelopor, edisi keempat, 1999), hlm. 10.

²⁰⁰ *Ibid.*

undang-undang dasar baru itu, persetujuan umum dicapai mengenai pembagian dari Hindia Belanda menjadi delapan provinsi, masing-masing dikepalai oleh gubernur. Setiap gubernur harus dibantu oleh Komite Nasional (KN) setempat. Di bawah tingkat provinsi, dua tingkat utama dari pemerintahan setempat adalah karesidenan dan desa. Alasan utama untuk melembagakan sistem pemerintahan ini adalah untuk memberikan wibawa dan keluwesan yang paling besar kepada anggota-anggota terkemuka dari PPKI yang mewakili pulau-pulau luar Jawa itu (yang akan menuju wilayah-wilayah asal mereka) untuk membentuk pemerintahan Republik di sana.²⁰¹

Pejabat-pejabat Indonesia tertinggi di daerah biasanya disebut asisten residen (*fuko-shuchokan*), dan terasa bahwa pemindahan kekuasaan dari Jepang kepada Indonesia dapat dilakukan dengan lancar dengan meneruskan pembagian pemerintahan yang lama, dan pada waktu yang sama mendorong para asisten residen untuk mencoba menjalankan kekuasaan-kekuasaan residen-residen Jepang. Teuku Moh. Hassan, Sam Ratulangi, Latuharhary dan Pudja (semua anggota PPKI) kemudian diangkat menjadi gubernur-gubernur untuk daerah-daerah yang mereka wakili dalam PPKI (Sumatera, Sulawesi, Maluku, dan Sunda Kecil), sementara Ir. Pangeran Mohamad Noor, juga anggota golongan nasionalis tua, diangkat menjadi gubernur Borneo.²⁰²

Khusus wilayah Borneo (Kalimantan), selaku gubernur, P.M. Noor segera membentuk stafnya antara lain Gusti Ibrahim (Kepala Bagian Umum), Masri (Sekretaris), Nachli (Kepala Bagian Keuangan), Imansyah dan M. Saleh (Staf Khusus/ Pribadi), Abdurachman (Bagian Keamanan), Gusti Malioner, Gusti Charidji Kesuma, Gusti Mayur.²⁰³

²⁰¹ Ben Anderson, *Revolusi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1988), hlm. 110-112.

²⁰² M. Suriansyah Ideham (ed), *et.al., Sejarah Banjar* (Banjarasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kalimantan Selatan, 2003), hlm. 83-83.

²⁰³ *Ibid.*



Gambar 4.1. Pangeran Mohamad Noor Bersama Mohammad Hatta. (Sumber: koleksi Arsip Nasional RI).

Meskipun pada tanggal 17 Agustus 1945 merupakan hari bersejarah bagi bangsa Indonesia namun Belanda tidak mengakui kemerdekaan Indonesia pada saat itu karena Belanda telah menjajah Indonesia sejak abad ke-16 sehingga mereka tidak ingin kehilangan pundi kekayaan di Indonesia berupa teh, kopi, rempah-rempah, tekstil, minyak, mineral dan lainnya. Berbagai serangan seperti agresi militer Belanda I hingga agresi militer Belanda II dimaksudkan agar Indonesia bisa kembali dijajah. Serta dari berbagai perjanjian seperti Perjanjian Linggajati, Renville, hingga Roem-van Roijen, perundingan berujung pada “Pengakuan Kedaulatan” (*transfer of sovereignty*)²⁰⁴ dari Negeri Belanda ke Republik Indonesia pada 27 Desember 1949.

B. Pemuda Dalam Nuansa Konstitusi RIS 1949 -1950

Melalui perjuangan bersenjata dan diplomasi akhirnya bangsa Indonesia memperoleh pengakuan kedaulatan dari Belanda. Penandatanganan pengakuan kedaulatan tersebut

²⁰⁴ Indonesia menafsirkan peristiwa *transfer of sovereignty* tanggal 27 Desember 1949 sebagai “Pengakuan Kedaulatan” bukan “Penyerahan Kedaulatan”. Tafsiran itu bertolak dari anggapan bahwa Indonesia berdaulat sejak Proklamasi 17 Agustus 1945 dan setelah melalui perang mempertahankan kemerdekaan 1945-1949, maka akhirnya Belanda mengakui kedaulatan Indonesia.

dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 1949. Dengan diakuinya kedaulatan Indonesia ini maka bentuk negara Indonesia adalah menjadi negara serikat dengan nama Republik Indonesia Serikat (RIS). Sedangkan Undang-Undang Dasar atau Konstitusi yang digunakan adalah Undang-Undang Dasar RIS. Berdasarkan salah satu hasil Konferensi Meja Bundar adalah bahwa Indonesia menjadi Negara Republik Indonesia Serikat (RIS). Berdasarkan UUD RIS bentuk negara adalah federal, yang terdiri dari tujuh negara bagian dan sembilan daerah otonom.²⁰⁵

Adapun tujuh negara bagian RIS tersebut adalah Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan, Jawa Timur, Madura, Negara Indonesia Timur, dan Republik Indonesia (RI). Sedangkan sembilan daerah otonom adalah Riau, Bangka, Belitung, Kalimantan Barat, Dayak Besar, Banjar, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, dan Jawa Tengah. Negara-negara bagian di atas serta daerah-daerah otonom merupakan negara “boneka” (tidak dapat bergerak sendiri) yang dibentuk oleh Belanda. Tujuan dibentuknya negara boneka ini adalah agar Indonesia tetap berada di bawah kendali Belanda dan agar tercapai tujuan mereka untuk kembali menguasai dan mengalahkan Indonesia.²⁰⁶

Bentuk negara federalis bukanlah bentuk negara yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia sebab tidak sesuai dengan cita-cita Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. Oleh karena itu setelah RIS berlangsung selama enam bulan, banyak suara yang menghendaki agar kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia semakin menguat. Sebab jiwa Proklamasi 17 Agustus 1945 menghendaki adanya persatuan seluruh bangsa Indonesia. Hal inilah yang menjadi alasan bangsa Indonesia untuk kembali ke bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Republik Indonesia Serikat (RIS) yang menerima “penyerahan kedaulatan” dari Belanda pada Desember 1949, bukan merupakan bentuk negara sebagaimana termaktub dalam UUD 1945, yakni negara kesatuan. Tidak itu saja tetapi juga karena ada anggapan kuat bahwa bentuk negara federal yang sebagian besar terbentuk oleh karena disponsori H.J. van Mook maka hal

²⁰⁵ M. Suriansyah Ideham (ed), *loc.cit.*, hlm. 449-450.

²⁰⁶ *Ibid.*

itu tidak ada alasan lain kecuali untuk menghancurkan Republik Indonesia.²⁰⁷

Bagaimana pengaruh berdirinya RIS terhadap pergerakan pemuda di luar Jawa? Memang agak sulit memisahkan peran pemuda maupun golongan tua pada umumnya karena melebur menjadi satu. Berdirinya Republik Indonesia Serikat juga berpengaruh di Kalimantan sehingga menimbulkan reaksi berupa gerakan-gerakan rakyat di Kalimantan yang menuntut untuk kembali ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hal tersebut terjadi dikarenakan Kalimantan hanya dianggap wilayah otonom dan bukan bagian dari Negara Republik Indonesia.²⁰⁸

Pada wilayah Kalimantan Selatan, benturan-benturan terjadi ketika diadakannya usaha-usaha pembentukan TNI dan peleburan bekas KNIL ke dalam APRIS. Banyak tokoh-tokoh perjuangan yang tidak dapat menerimanya, disebabkan mereka masih beranggapan bahwa bekerjasama dengan KNIL sama dengan bekerjasama dengan musuh yang membunuh rakyat. Selain di lingkungan TNI, muncul pula benturan-benturan dan kemarahan tokoh-tokoh sipil ketika Gubernur Kalimantan dr. Moerdjani memindahkan kedudukan pejabat-pejabat yang ada dan menggantikannya dengan orang yang didatangkan dari Jawa, atau orang lain yang dianggap pemerintah bisa dipercaya, seolah-olah dilakukan demi perbaikan mutu aparat pemerintah.

Sementara itu, dengan alasan untuk memperkuat daya tahan tempur yang lebih sempurna, maka oleh Panglima Teritorium Kalimantan telah pula didatangkan mantan kesatuan-kesatuan NICA dari Jawa. Salah satunya adalah Batalyon II RI-IX Divisi Siliwangi dari Jawa Barat yang tiba di Banjarmasin pada 22 Maret 1950 dibawah pimpinan Kapten Bidjuri. Mantan kesatuan NICA itulah yang sebagai konsekuensi dari Penetapan Kepala Staf Angkatan Darat Nomor 83/KSAD/PNTP/1950 tanggal 20 Juli 1950 berubah namanya menjadi Batalyon 605.²⁰⁹

Sebagai akibat ketidakpuasan bekas pejuang gerilya di Kalimantan Selatan terhadap proses demobilisasi, Ibnu Hadjar yang merasa tertekan lahir batin, mempelopori beberapa perwira meninggalkan asrama mereka dan kembali masuk hutan dan

²⁰⁷ *Ibid.*

²⁰⁸ Ben Anderson, *op.cit.*, hlm. 23.

²⁰⁹ Kodam X/Lambung Mangkurat, *Kodam X/Lambung Mangkurat Membangun* (Banjarmasin, 1970), hlm. 32-33; lihat juga Wajidi, *Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik* (Banjarmasin: Pustaka Banua, 2007).

mendirikan organisasi gerilya bernama *Kesatuan Rakyat yang Tertindas (KRyT)*²¹⁰



Gambar 4.2. Hassan Basry selaku penguasa militer di depan rumah Bupati Djahri di Kandangan dalam rangka kunjungan ke Hulu Sungai Selatan dan Utara (30-12-1955 s.d. 3-01-1956. (Sumber: koleksi Wajidi).

Dalam menghadapi pergerakan yang dilakukan oleh Ibnu Hadjar, pemerintah pusat menggunakan tokoh-tokoh kharismatik lokal seperti Hassan Basry (mantan komandan Ibnu Hadjar). Pada tanggal 20 September 1950 dia diserahi tugas sebagai pimpinan Komando Penyelesaian Hulu Sungai dan dan diberi bantuan militer berupa satuan Tentara Republik untuk membantu memulihkan keamanan. Hassan Basry mencari penyelesaian damai dan kemudian ia mengeluarkan perintah kepada gerilyawan untuk menyerah sebelum 10 Oktober 1950,

²¹⁰ Muhammad Iqbal, "Pemberontakan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (KRjT) Di Kalimantan Selatan (1950-1963): Sebuah Kajian Awal", *Jurnal Khazanah* vol.16 (1) 2018. Hassan Basry, *Kisah Gerilya Kalimantan (Dalam Revolusi Indonesia) 1945-1949*. Djilid Pertama: Kalimantan Diachir Perang Dunia II -1945 sehingga lahirnja ALRI Divisi IV-1946 (Bandjarmasin: Jajasan Lektur Lambung Mangkurat, 1961) & *Kisah Gerilya Kalimantan Periode Tahun 1945-1949*. Jilid I dan II (Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua, 2003).

sambil berusaha berhubungan dengan pimpinan gerilya untuk berusaha mengetahui kehendak mereka.²¹¹

Pimpinan gerilyawan menuntut supaya agar pejabat-pejabat tertentu dipindahkan dalam pemerintahan sipil, tentara dan angkatan kepolisian. Pihak gerilyawan merasa, terlalu banyak jabatan yang penting diduduki oleh orang-orang dari luar Kalimantan, khususnya dari Jawa, dan orang-orang yang telah bekerjasama dengan Belanda. Tuntutan tersebut tidak dipenuhi oleh Pemerintah dan Tentara, sehingga berakhir dengan jalan buntu. Walaupun Hassan Basry menaruh simpati akan tuntutan mereka, namun diputuskan untuk melakukan tindakan militer terhadap mereka. Ibnu Hadjar membalas pembersihan yang dilakukan oleh Pemerintah dengan meningkatkan kegiatannya yakni dengan menyerang kota Kandangan. Namun bantuan militer untuk Hulu Sungai yang baru saja berlangsung sebulan akhirnya ditarik pada bulan November 1950. Demikianlah pada 11 November 1950 Komando tersebut dibubarkan.²¹²

Tanggung jawab untuk ketenteraman dan ketertiban kemudian dipercayakan kepada Komando Petak Pertahanan Utara yang terdiri dari Hulu Sungai dan Barito. Hassan Basry akhirnya menyerahkan pimpinan pasukan Republik di Kalimantan Selatan yang disebut Brigade F yang dipegang oleh Mayor H.T. Sitompul.²¹³ Kemudian para gerilyawan diberi tawaran oleh Pemerintah Pusat untuk diberikan amnesti. Gerilyawan yang menyerahkan diri pertama-tama diperiksa daftar kejahatannya. Bila daftar itu bersih mereka diberi pilihan masuk angkatan bersenjata atau menjadi pegawai negeri atau kembali ke kehidupan sipil, diberi jangka waktu 5 Desember sampai 25 Januari 1951.²¹⁴

²¹¹ *Ibid*, hlm.108.

²¹² *Ibid*, hlm.109.

²¹³ *Ibid*.

²¹⁴ *Ibid*, hlm.110.



Gambar 4.3. Ibnu Hadjar ketika berpidato sesudah penandatanganan berita acara penyerahan diri untuk pertama kali di hadapan Hassan Basry di Ambutun, Rabu 10 Oktober 1956.

(Sumber: bubuhanbanjar.wordpress.com).

Zafry Zamzam yang ketika itu menjadi ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Hulu Sungai diutus untuk berunding dengan Ibnu Hadjar dan dijelaskan syarat-syarat Pemerintah yang ditawarkan kepadanya. Akan tetapi Ibnu Hadjar menanggapi tuntutananya bahwa dia bersedia menghentikan perlawanan dan menyerah apabila pejabat-pejabat sipil dan militer tertentu diganti. Dan dia meminta waktu untuk menghimpun pengikut-pengikutnya dan membicarakan tawaran Pemerintah dengan mereka.²¹⁵

Pemerintah menolak tuntutan Ibnu Hadjar dan setelah batas penyerahan berakhir 25 Januari 1951 dimulai lagi operasi militer. Kandungan dinyatakan sebagai daerah militer dan pos-pos tentara didirikan di seluruh daerah. Pada 26 Februari 1951 terjadi pertempuran pertama secara besar-besaran dengan suatu

²¹⁵ *Ibid.*

kelompok yang kira-kira berjumlah seratus gerilyawan yang berlangsung kira-kira tiga jam.²¹⁶

Dalam suasana tegang di Kalimantan Selatan kehadiran Hassan Basry, yang masih tinggi pengaruhnya dalam pandangan kaum gerilyawan dianggap terlalu berbahaya. Karena itu Kementerian Pertahanan memberikan beasiswa untuk belajar ke luar negeri. Pada Februari 1951 Hassan Basry meninggalkan Kalimantan, pertama-tama menuju Jakarta dan kemudian menuju Mesir. Keberangkatannya didorong oleh pihak penguasa, karena mereka khawatir akan pengaruhnya di kalangan prajurit yang kecewa dan pejuang gerilya yang didemobilisasikan dan menganggap sebagai bahaya keamanan. Walaupun Hassan Basry harus tinggal lebih dari empat tahun, perjalanannya tidak berhasil baik. Dia tidak diterima sebagai mahasiswa di Mesir dan harus melanjutkan pelajarannya pada tingkat yang lebih rendah, mengikuti kursus agama dan ilmu kemiliteran.²¹⁷

Keberangkatan Hassan Basry ke Mesir sampai Desember 1955 memperkuat kecurigaan, di mana kalangan penguasa militer berusaha menggerogoti bekas ALRI Divisi IV dengan menceraiberaikan anggotanya, selanjutnya hal ini mengukuhkan Ibnu Hadjar dan pengikutnya untuk terus melakukan perlawanan. Sejak awal tahun 1951 operasi militer dilaksanakan, keamanan umum sudah mulai terlihat, seperti berkurangnya jumlah perampokan dan pembunuhan atas orang-orang sipil. Akan tetapi di pihak lain operasi militer tersebut menimbulkan perasaan tidak senang. Tentara Republik tidak luwes sikapnya dalam memperlakukan orang-orang sipil dan tidak segan-segan membunuh dengan alasan mengejar musuh.²¹⁸

Akibat gerakan pengamanan tentara Republik di Kalimantan, kalangan daerah menyatakan, gerakan ini memberikan kesempatan bagi bekas serdadu KNIL dan kaum Federalis untuk membalas dendam terhadap ALRI Divisi IV. Pada akhir 1951 gerombolan-gerombolan KRyT terisolasi di Hulu Sungai, sementara Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat dianggap

²¹⁶ *Ibid*, hlm.111; lihat juga Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, *30 tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia* (Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI, 1990), hlm. 52.

²¹⁷ M. Z. Arifin Anis, "Ibnu Hajar; Patriot Tertindas", dalam Jurnal Kebudayaan *Kandil* edisi 20, Tahun VIII, Januari-Maret 2011, hlm. 62-69.

²¹⁸ *ibid*.

aman dan bebas dari gerilyawan atau penjahat. Namun KRyT selamat dari operasi pengamanan dan sesudah *Staat van Oorlog en Beleg* (S.O.B) atau Negara Dalam Keadaan Bahaya dicabut Juli 1952 berangsur-angsur mereka pulih dari pukulan-pukulan pertama.²¹⁹

Tanggung jawab mempertahankan ketertiban dan hukum diserahkan kepada Polisi dan Pemerintah Sipil. Gubernur Kalimantan dr. Moerdjani segera memulai serangkaian pembicaraan dengan anggota-anggota yang terpenting dari kalangan pamong praja dan angkatan kepolisian, alim ulama, wakil-wakil partai politik dan pemimpin masyarakat lainnya di Kalimantan Selatan. Gubernur mengajak kepada para alim ulama agar mengeluarkan fatwa kepada pengikut KRyT agar mau dan bersedia untuk berdamai dan mengemukakan “pintu untuk menyerah masih terbuka”. Tetapi ketika berakhir sebulan, dr. Moerdjani yakin metode bujuk telah gagal dan satu-satunya cara yang ditempuh adalah melakukan aksi militer.²²⁰

Pada awal 1953 pemberontak KRyT meningkatkan kegiatannya. Ibnu Hadjar sendiri beroperasi antara Kandangan dan Barabai. Markas besarnya di Gunung Hantu daerah sekitar desa Datar Laga dekat Barabai dan tidak jauh dari Kandangan. Tempat ini cukup ideal karena hanya dapat dimasuki dari satu jurusan dan dikelilingi padang rumput jadi musuh dengan mudah dapat dilihat. Dari markas besar ini Ibnu Hadjar dapat menjelajahi seluruh Hulu Sungai untuk bermusyawarah dengan para komandannya atau memimpin sendiri dan dia sering menyerbu ke daerah Kabupaten Kotabaru.²²¹

²¹⁹ Muhammad Iqbal, “Posisi Ibnu Hadjar dalam Sejarah Lokal Kita (1)”, dalam *Radar Banjarmasin*, edisi Kamis, 23 Juni 2011.

²²⁰ *Ibid.*

²²¹ Muhammad Iqbal, “Posisi Ibnu Hadjar dalam Sejarah Lokal Kita (2)”, dalam *Radar Banjarmasin*, edisi Jum’at, 24 Juni 2011



Gambar 4.4. Kedatangan Presiden Soekarno di Lapangan Terbang Ulin. (Sumber: koleksi Wajidi).

Pada akhir Januari 1953 Presiden Soekarno berkunjung ke Kalimantan dalam rangka pemeriksaan daerah-daerah pusat kekacauan di Indonesia. Di Kalimantan, tempat-tempat yang dikunjungi antara lain Banjarmasin, Martapura, Kandangan, Negara, Barabai dan Amuntai. Yang merupakan masalah pokok selama kunjungan ke Kalimantan Selatan adalah kedudukan Islam dalam masyarakat dan masalah hangat apakah Indonesia akan menjadi negara Islam atau tidak, beserta masalah keamanan yang merupakan tema utama pidato-pidato Soekarno.²²²

²²² Muhammad Iqbal, "Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT): Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 1950-1963", *tesis* pada Program Pascasarjana Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Sejarah.



Gambar 4.5. Presiden Soekarno untuk pertama kali ke Kalsel didampingi Gubernur dr. Murdjani saat berada di lapangan Merdeka Banjarmasin tanggal 13 September 1950. (Sumber: koleksi Wajidi)

Presiden Soekarno dapat melihat dengan matanya sendiri akibat-akibat pemberontakan KRyT saat melakukan perjalanan dari Martapura ke Kandangan. Di daerah Kandangan beberapa pemberontak menghentikan sebuah truk tentara dan membakarnya tak lama sebelum kedatangan Soekarno dan kerangka yang hangus itu belum dapat dipindahkan ketika Soekarno lewat. Berulang-ulang Soekarno menekankan perlunya pemulihan keamanan dan persatuan. Di Kandangan dikemukakannya, “membunuh dan membakari rumah maupun mengacau ketertiban jelas bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam”, dan ditambahkannya, “kecuali kita dihancurkan oleh rakyat kita sendiri, Indonesia akan hidup terus”.²²³

September 1953 Karang Intan, Rantau dan Pengaron diserang, kemudian November 1953 Negara dan Kotabaru. Pada tanggal 12 Desember 1953, Kandangan diserang dari empat jurusan dan serangan tersebut langsung dipimpin oleh Ibnu Hadjar. Banjarmasin terancam dari serangan gerilyawan KRyT, dan Gubernur Moerdjani memulai serangkaian pembicaraan dengan wakil-wakil partai politik untuk membicarakan penyusupan. Partai-partai politik menggunakan kesempatan ini

²²³ *Ibid.*

untuk mengeluarkan pernyataan, supaya pemerintah melakukan tindakan keras terhadap pemberontak.

Pemerintah terus melakukan operasi militer dan pada tahun 1954 berhasil ditangkap komandan gerilyawan di Amandit Selatan bernama Djohansyah, nama sebenarnya adalah Djahri Bin Bako. Para pemberontak juga mengganggu jalur transportasi angkutan, menghentikan mobil, bus dan bahkan ambulans yang mengacaukan lalu lintas di Kalimantan Selatan. Pada tahun 1955 aksi-aksi tersebut sering terjadi sehingga persatuan pengusaha bus Kalimantan mengancam untuk menanggukuhkan pelayanan bila pemerintah tidak mengambil langkah-langkah keamanan.²²⁴

C. Pemuda Pejuang Dalam Kodam X Lambung Mangkurat

Sebanyak 7 negara bagian dan 9 daerah otonomi yang dibentuk menjadi negara federal Republik Indonesia Serikat pada 1949 kemudian dibubarkan pada 17 Agustus 1950 dan terbentuklah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), kemudian pemerintah mengadopsi sistem parlementer. Demonstrasi besar-besaran hampir di seluruh daerah untuk pembentukan NKRI ini menjadi pendorong utama.²²⁵

Selepas perang kemerdekaan (1945-1949) muncul harapan yang tinggi dari masyarakat Indonesia agar segera terwujud hidup yang aman dan sejahtera. Tentu saja aspirasi tersebut sangat wajar mengingat perang telah mengakibatkan banyak penderitaan dan keadaan tidak menentu. Banyaknya prasarana yang hancur sehingga tidak mudah bagi pemerintah dan masyarakat untuk segera memperbaiki keadaan perekonomian yang memenuhi harapan. Namun keinginan yang wajar itu tidak terpenuhi bahkan memunculkan rasa frustrasi yang berkepanjangan. Kehidupan bangsa dalam periode sesudah masa perang itu diwarnai dengan ketidakstabilan pemerintahan karena sering berganti kabinet. Banyak program yang seharusnya

²²⁴ *Ibid.*

²²⁵ Mestika Zed, "Dekade Pergolakan Daerah, Mendekati Isu-lsu Konflik Pusat-Daerah dalam perspektif Pembangunan Nasional Tahun 1950-an, *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Bertajuk "Pembangunan Nasional Sebagai Totalitas Pembangunan Daerah", Diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerja sama dengan Panitia Satu abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara" Jakarta, 17 Maret 2010, hlm.1-8.

untuk mengatasi masalah ekonomi dan kesejahteraan rakyat menjadi terbelengkalai.²²⁶

Tuntutan pembentukan konstituante dituangkan dalam Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950. Pada masa sistem pemerintahan parlemen ini terjadi banyak pergantian kabinet diakibatkan situasi politik yang tidak stabil. Tercatat ada tujuh kabinet pada masa ini yakni kabinet Natsir (Masyumi, 6 September 1950-21 Maret 1951), Kabinet Sukiman (PNI-Masyumi, April 1951-3 April 1952), Kabinet Wilopo (Kabinet Ahli, 3 April 1952-3 Juni 1953), Kabinet Ali Sastroamijoyo I (PNI-NU, 31 Juli 1953-12 Agustus 1955), Kabinet Burhanuddin Harahap (12 Agustus 1955-3 Maret 1956), Kabinet Ali Sastroamijoyo II (PNI-Masyumi-NU, 20 Maret 1956-4 Maret 1957), Kabinet Djuanda (Kabinet Ahli, 9 April 1957-5 Juli 1959). Pemerintah berkali-kali gagal bekerja, karena selalu dijegal di parlemen. Pergantian kabinet terjadi hampir setiap tahun. Berbagai kebijakan silih berganti tiap periode menimbulkan keadaan yang tidak kondusif.

Hubungan antara pusat dan daerah menjadi kurang harmonis. Daerah luar Jawa merasa tidak puas dengan keadaan yang ada, karena mereka menganggap bahwa dana alokasi untuk daerah dirasakan sangat kurang dan tidak mencukupi untuk melaksanakan pembangunan. Pada akhirnya muncul upaya dari pihak militer yang mendapat dukungan dari beberapa tokoh sipil untuk melakukan koreksi terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah. Ketimpangan ekonomi dan kekecewaan kepada pemerintah pusat yang diperkeruh dengan kemelut politik terkait sepak terjang PKI sehingga menimbulkan pergolakan daerah.

Kondisi di Kalimantan Selatan pun keadaannya tidak banyak berbeda, ada beberapa tokoh pemuda di daerah-daerah berusaha membangkitkan semacam Dewan Banjar atau Dewan Lambung Mangkurat, namun unsur separatisme daerah ini tidak sempat muncul, karena adanya penyaluran dan pengaruh tokoh-tokoh pejuang Kalimantan seperti Hassan Basry, Tjilik Riwut, dan Muljono. Pada tanggal 23 Desember 1957 mereka mengeluarkan ikrar bersama bahwa demi menjaga nama baik

²²⁶ *Ibid*; lihat juga Audrey Kahin, *Dari Pemberontakan ke Integrasi. Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, terjemahan (Jakarta: Yayasan Obor, 2005), hlm. 38.

Corps Lambung Mangkurat tetap mempunyai tekad, sikap dan pendirian perjuangan demi keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Proklamasi 17 Agustus 1945.⁷⁷

Di lain pihak, perasaan kedaerahan dan keagamaan yang tebal menimbulkan sikap anti komunis. Kemudian ditambah pula adanya pertentangan antara dua golongan keagamaan, yakni Muhammadiyah dan Nahdlatul Ulama yang mempengaruhi banyak sektor kehidupan dan sudah tentu hal ini ikut mempengaruhi situasi yang ada. Untuk membina kekompakan dan menempa kebulatan tekad kesetiaan rakyat kepada Pemerintah Pusat, maka oleh tokoh-tokoh daerah yang pernah tergabung dalam ALRI Divisi IV dan bekas Divisi Lambung Mangkurat, diadakan reuni di kota Kandangan tahun 1957 dan dicetuskan Kebulatan Tekad dalam bentuk Program yang antara lain isinya: Rencana pembentukan Corps Lambung Mangkurat, Pendirian Universitas Lambung Mangkurat, pendirian Bank, mengirim delegasi ke Jakarta untuk memelihara dan memulihkan kembali keutuhan Dwitunggal Kepemimpinan Negara Soekarno-Hatta, yang keadaannya sudah retak sejak tahun 1956. Dan segera setelah keputusan reuni tersebut, pendirian Corps Lambung Mangkurat dan Universitas Lambung Mangkurat mulai direalisasikan pada tahun 1958.⁷⁸



Gambar 4.6. Bung Karno di Lapangan Dwi Warna Barabai. (Sumber: koleksi Wajidi)

⁷⁷ M. Jusi, *KODAM X/LM Membangun*, (Bandjarmasin, Angkatan Darat, Komando Daerah Militer X Lambung Mangkurat, 1962), hlm.31.

⁷⁸ *Ibid*, hal. 43.

Sementara itu, keadaan pemerintahan di Kalimantan mengalami perubahan yakni dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-daerah Otonom Propinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara RI Nomor 65 Tahun 1956) yang diundangkan pada tanggal 7 Desember 1956. Sebagai tindak lanjut dari Undang-undang tersebut maka berdasarkan surat Menteri Dalam Negeri Nomor 52/10/50 tanggal 12 Desember 1956, maka pada tanggal 9 Januari 1957 dilakukanlah serah terima kekuasaan pemerintahan antara Gubernur Kalimantan dengan *acting* Gubernur Kalimantan Selatan, Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur.⁷⁹

Dengan demikian maka daerah Kalimantan Selatan terhindar dari separatisme kedaerahan yang sedang hangat bergolak pada waktu itu. Pada tanggal 16 Januari 1957 diadakan pelantikan DPRD Peralihan Propinsi Kalimantan Selatan dimana tercermin semua perwakilan golongan politik yang terdiri atas Nahdlatul Ulama, Masyumi, PNI, PKI, IPKI, PPTI, dan Persatuan Daya. Demikian juga dengan keadaan kabupaten-kabupaten, keadaan administratif sudah sempurna dan memudahkan pembentukan- pembentukan KODAM beserta aparat-aparatnya. Kemudian turunlah Penetapan KSAD Nomor PNTP. 01/1957, yang memutuskan bahwa untuk melaksanakan doktrin Perang Wilayah, maka organisasi yang dipandang baik untuk melaksanakannya adalah dalam bentuk organisasi KODAM-KODAM. Penetapan KSAD Nomor PNTP.01/1957 tanggal 26 November 1957 ini beserta perubahannya merupakan dasar dari pada pembentukan KODAM-KODAM yang disusulkan dengan Surat Keputusan KSAD Nomor KPTP. 185/111/ 1958 tanggal 29 Maret 1958 tentang Pembentukan KODAM-KODAM dan Pelaksanaannya di Daerah-daerah sesuai dengan Kepentingan Strategi Angkatan Perang.⁸⁰

Khusus di Kalimantan Selatan baru direalisasikan pembentukannya, yang kemudian diberi nama Komando Daerah Militer X Lambung Mangkurat. Untuk keperluan itu Mayor Jenderal Gatot Soebroto pada tanggal 17 Juli 1958 atas nama KSAD telah melantik dan meresmikan KODAM X Lambung

⁷⁹ *Ibid.*

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 44

Mangkurat dan sekaligus melantik Hassan Basry sebagai Panglima.⁸¹

Untuk mengatasi kekurangan personel karena makin besarnya organisasi, dan luasnya bidang pekerjaan, dan untuk menyesuaikan organisasi dengan isi PNTP 0-5 tanggal 5 Agustus 1958, dan TAP 10-55 tanggal 14 April 1960 dari Kepala Staf Angkatan Darat, maka Panglima Daerah X/LAM mengeluarkan keputusan Nomor KPTS. 117/11 tanggal 7 September 1960, yang mengubah organ-organ teritorial yang ada menjadi Komando Distrik Militer (KODIM) sebagai teritorial tingkat kabupaten masing-masing, yaitu Kodim 1001 dengan daerah hukum Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kodim 1002 dengan daerah hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kodim 1003 dengan daerah hukum Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kodim 1004 dengan daerah hukum Kabupaten Kotabaru, Kodim 1005 dengan daerah hukum Kabupaten Barito Kuala, Kodim 1006 dengan daerah hukum Kabupaten Banjar, Kodim 1007 dengan daerah hukum Kotamadya Banjarmasin, Kodim 1008 dengan daerah hukum Kabupaten Pasir yang kemudian karena perubahan administratif dimasukkan ke dalam Propinsi Kalimantan Timur, maka Kodim 1008 dihapuskan.⁸²

Untuk mengkoordinir Distrik-Distrik Militer maka dibentuklah Komando-Komando Resort Militer (KOREM), yakni Korem 101 Banua Lima dengan kedudukan di Kandangan dan mengkoordinir Kodim 1001, Kodim 1002, Kodim 1003, dan Korem Banjar yang mengkoordinir Kodim 1004, Kodim 1005, Kodim 1006 dan Kodim 1007.⁸³

D. Kekecewaan Pemuda & Kesatuan Rakyat Yang Tertindas

Nama Ibnu Hadjar tak bisa dilepaskan dari organisasi bernama Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRyT) yang eksis sejak awal 1950. Organisasi ini menghimpun bekas gerilyawan alias pejuang kemerdekaan Republik yang melawan tentara Belanda di sekitar kabupaten Hulu Sungai. Setelah pengem-

⁸¹ *Ibid.*

⁸² SEMDAM 10/LAM, *Wadja Sampai Ka Puting: Sedjarah Singkat KODAM 10/Lambung Mangkurat*, (Bandjarmasin: SEMDAM 10/LAM, 1970), hlm. 5.

⁸³ *Ibid.*

balian kedaulatan karena Konferensi Meja Bundar di Den Haag (1949) membuat mereka kecewa terhadap pemerintah.²²⁷

Pada awalnya gerakan bersenjata ini mengakui bahwa gerakannya sebagai bagian dari gerakan DI/TII Kartosuwiryo yang dimulai pada bulan Oktober 1950. Namun, dibandingkan dengan gerakan DI/TII yang lebih bertujuan politis, maka KRyT lebih mengarah kepada kegiatan pengacauan, perampasan dan pembakaran. Walaupun kekuatan mereka relatif kecil, tetapi karena mereka adalah mantan gerilyawan yang sudah sangat mengenal daerah Kalimantan Selatan dan saling terikat hubungan keluarga. Gerakan KRyT ini terbagi atas beberapa kesatuan seperti kesatuan yang langsung dipimpin oleh Ibnu Hadjar sendiri tetapi tidak terlalu kuat dalam persenjataan, dibanding dengan satuan yang dipimpin oleh Kastanjaya. Dengan Operasi Segitiga yang dilakukan/dilancarkan maka gerakan mereka semakin dipersempit, sehingga mereka menyerahkan diri. Tetapi setelah mereka memperoleh perbekalan dan lain-lain, mereka kembali ke hutan-hutan, dan kejadian ini dilakukan berkali-kali.

228



Gambar 4.7. Hassan Basry selaku Penguasa Militer didampingi Ibnu Hajar (Baju Putih) saat menginspeksi pasukan di Ambutun, 10 Oktober 1956. (Sumber: bubuhanbanjar.wordpress.com).

²²⁷ M. Said, *Intisari Kisah Gerilya Kalimantan: Karya H. Hassan Basry Pahlawan Nasional/Bapak Gerilya Kalimantan* (Banjarmasin: Ikatan Kerakatan Keluarga Hulu Sungai Selatan, 2009), hlm. 12.

²²⁸ M. Suriansyah Ideham (ed), *et.al., op.cit*, hlm. 450-451.

Amnesti yang diberikan oleh Presiden/Panglima Tertinggi dengan batas tanggal 5 Oktober 1961, digunakan oleh satuan-satuan lain untuk kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi, tetapi Ibnu Hadjar dan sebagian dari satuannya tetap bertahan walaupun kedudukan mereka semakin terjepit di daerah Kotabaru.

Pada bulan Mei 1963, keadaan kembali kepada Tertib Sipil dan penanganan dilakukan oleh pihak Kepolisian yang pada waktu itu dipimpin Kepala Polisi Komisariat (Kapekom) Kalimantan Selatan Komisaris Besar Tengku Abdul Aziz. Kapekom Kalimantan Selatan mengadakan pendekatan dengan Ibnu Hadjar dan pasukannya agar menyerahkan diri dengan janji akan mendapat amnesti dari Pemerintah, dan Ibnu Hadjar menyetujui hal ini. Penyerahan Ibnu Hadjar dilaporkan kepada Pemerintah Pusat, dan dengan dukungan sepenuhnya dari Panca Tunggal agar diberikan amnesti. Tetapi Pemerintah Pusat memerintahkan agar Ibnu Hadjar dibawa ke Jakarta, amnestinya ditolak, sehingga Kapekom Kombes Tengku Abdul Aziz merasa terpukul dan mengajukan permintaan berhenti.²²⁹

Pihak Kejaksaan Agung melimpahkan pengusutan ke Pengadilan Militer dan mengirim Tim penyidik ke Kalimantan Selatan antara lain Letkol CKH Durmawel Achmad. Akhirnya, Ibnu Hadjar alias Haderi bin Umar alias Angli, seorang Letnan Dua TNI, salah seorang Komandan Tempur Kesatuan ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan, karena dianggap telah berulang kali melakukan desersi kemudian dijatuhi hukuman dengan pidana mati. Eksekusi dilakukan di Kepulauan Seribu. Para pengikutnya dibebaskan dan kembali ke masyarakat tanpa dilakukan penuntutan hukum, termasuk para tokoh KRyT lainnya seperti Cinabe (Jaksa Agung KRyT), Kastanjaya dan lain-lain.²³⁰

Pada tahun 1958 berdiri sebuah organisasi yang bermaksud membantu dan meniru gerakan pemberontakan seperti di Sumatera dan Sulawesi dengan nama “Komando Divisi VI Kompak PRRI CVP Kalimantan” yang merencanakan merebut kekuasaan pada tanggal 25 Juni 1958 pukul 02.00. tanggal 17 Agustus 1961, dengan dipimpin oleh pimpinan pejoang yang kecewa di daerah Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdiri

²²⁹ *Ibid.*

²³⁰ *Ibid.*, hlm. 451-452.

“Komando Daerah Aksi Derita Rakyat” dipimpin oleh mantan pejoang bernama Al Hamdi, yang diperalat oleh seorang aktor intelektual bernama Jarkasi Attahairi. Seorang pegawai Jawatan Penerangan dan seorang tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI). Akhirnya mantan pejoang yang tertipu sadar dan kembali ke pangkuan Ibu Pertiwi.²³¹

Al Hamdi merupakan saudara bungsu dari 3 bersaudara (Nawawi, Norman dan Al-Hamdi) dan mereka bertiga lebih dikenal sebagai kelompok TRIKESUMA. Pada peristiwa berdarah pada Rabu malam tanggal 19 Maret 1946, para pemuda dengan dipimpin oleh Trikesuma menyerang alat keamanan pemerintah kolonial di Barabai hingga dua orang resersi terbunuh, sedangkan di pihak pemuda gugur M. Ramli Attahiri. Pada pertempuran di Bukit Hinas telah gugur pemuda Norman, sedang pada bulan Juli 1947, Al Hamdi dari M. Nawawi tertangkap dan oleh Pengadilan NICA dijatuhi hukuman, M. Nawawi 18 tahun, Al Hamdi 15 tahun. Keduanya semula ditahan di penjara Cipinang dan kemudian dipindahkan ke Nusakambangan sampai penyerahan kedaulatan 27 Desember 1949. Terakhir Al Hamdi bekerja sebagai pegawai Kantor Perwakilan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan di Jakarta sampai meninggal pada tanggal 17 Mei 1969.²³²

Dengan Keputusan Presiden tanggal 14 Maret 1957 Kepres No. 40 Tahun 1957 bahwa Keadaan Darurat Perang berlaku di seluruh Indonesia (atas dasar Reg. SOB), kesatuan militer yang ada di Kalimantan Selatan hanyalah resimen Infanteri 21/Lambung Mangkurat (disingkat RI 21/LM), dan keduanya hanya sebagai Pelaksana Kuasa Militer (PEKUMIL) sedang Penguasa Militer adalah Panglima Tentara dan Territorium setelah diganti dengan Undang-undang No. 74 Tahun 1957, kedudukan RI 21/LM tidak berubah, hanya namanya menjadi Pemegang Kuasa Perang (PEKUPER). Dengan terbentuknya KODAM-KODAM, maka RI 21/LM menjadi KODAM X/LM dan Pangdam X/LM menjadi Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan.²³³

²³¹ *Ibid.*

²³² *Ibid*, hlm.453.

²³³ *Ibid.*

E. Politik Pemuda Era Peralihan Hingga Orde Lama

Karakteristik dari politik pemuda Indonesia masa Pemerintahan Soekarno (Orde Lama) adalah menginduk kepada partai-partai politik yang tumbuh subur ketika itu. Banyak dari pemuda ketika itu percaya bahwa dengan menginduk ke partai politik tertentu maka upaya untuk membangun basis kepemimpinan pemuda saat itu akan dengan sendirinya berjalan. Hampir semua partai besar seperti Partai Nasional Indonesia (PNI), Masyumi, Partai Komunis Indonesia (PKI), hingga partai-partai kecil memiliki organ kepemudaan yang berafiliasi ke partai bersangkutan.²³⁴

Namun langkah tersebut dirasakan oleh para pemuda kurang strategis, ketika Soekarno menerapkan demokrasi terpimpin, dimana figur Soekarno menjadi simbol tunggal negara. Langkah-langkah yang dilakukan oleh pemuda ketika itu adalah melakukan pengkritisan terhadap setiap kebijakan yang dibuat oleh Soekarno maupun anggota kabinetnya.

Akan tetapi, sebagaimana diketahui bersama bahwa langkah melakukan pengkritisan terhadap kebijakan yang dibuat oleh Soekarno maupun anggota kabinetnya berujung pada konflik pemuda ketika itu, sebagian memilih berada di samping Soekarno, sebagian lain memilih berhadapan dengan Soekarno. Konflik antar organisasi pemudapun pecah, bahkan telah mengarah kepada kriminalisme. Upaya untuk saling menjelek-jelekkan antar organisasi terjadi secara sistematis. Pemuda Rakyat, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI), Barisan Pendukung Soekarno (BPS), berlawanan dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), serta organisasi pemuda partai yang tidak mendukung kepemimpinan Soekarno seperti Pemuda Perti, Pemuda Persis, Pemuda Katolik, Pemuda Kristen, dan sebagainya.²³⁵

Situasi ini berakhir dengan tumbanganya Pemerintahan Soekarno oleh kekuatan unjuk rasa pemuda dan mahasiswa, serta tekanan militer. Perlu diketahui juga bahwa kelompok pemuda yang anti-Soekarno mendapat dukungan dari militer yang memang sejak lama tidak menyukai kebijakan Soekarno yang condong dekat dengan Partai Komunis Indonesia (PKI),

²³⁴ Muhammad Umar Syadat Hasibuan, *Revolusi Politik Kaum Muda* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 322.

²³⁵ *Ibid.*

dimana Soekarno juga menolak pembubaran PKI pasca pemberontakan 30 September 1965 yang memakan korban sejumlah Jenderal dari kalangan militer.²³⁶

Berbeda halnya pada periode 1945-1965 pergerakan mahasiswa dan tatanan politik di Indonesia pada masa Orde Lama, dapat dilihat dari 3 fase besar. Kemerdekaan Indonesia yang dideklarasikan 17 Agustus 1945 menjadi momentum dimana seluruh Ormas, partai politik, kaum pemuda, dan masyarakat mencapai kesepakatan bulat dalam menyatakan Indonesia sebagai negara merdeka. Ini merupakan fase pertama, fase seluruh *stakeholder* Indonesia memiliki tujuan yang sama. Kemudian fase kedua ditandai dengan munculnya konsep berbangsa, adanya Piagam Jakarta. Dinamika memanas ketika terjadi peperangan ideologi antar kaum-kaum yang berkepentingan, tiap partai mengusung konsep berbangsa yang ideal menurut cara pandang dan ideologi mereka. Ketiga, fase kelanjutan peperangan ideologi dalam pemilu 1955 yang memunculkan 3 kekuatan besar PNI (Nasionalis-sekuler), MASYUMI (Nasionalis-Islam), dan PKI (Komunis).²³⁷

Gerakan-Gerakan mahasiswa memiliki corak masing-masing yang merepresentasikan ideologi yang mereka bawa. Untuk mengetahui ekspresi atau sikap gerakan mahasiswa terhadap kondisi sosial politik yang berlangsung memang tidak bisa dilepaskan dari tesis Clifford Geertz tentang politik aliran. Tipologi Geertz ini kemudian dikembangkan oleh Herbeth Feith dan Lance Castle yang membagi pemikiran politik Indonesia waktu itu ke dalam lima golongan: marxisme, Sosialisme Demokrat, Nasionalisme Radikal, Islam (terdiri dari modernisme Islam dan tradisionalisme Islam) dan tradisionalisme Jawa. Tipologi ini kemudian berkembang tidak hanya pada wilayah kultural tetapi juga wilayah politik yaitu mempengaruhi afiliasi pemilih waktu itu (1955). Kondisi Pergerakan mahasiswa terjebak dalam polarisasi dan fragmentasi yang tidak jauh berbeda dengan politik aliran Geertz. Organisasi massa mahasiswa Islam

²³⁶ *Ibid.*

²³⁷ Sulastomo, *Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2008), hlm. 323-324.

lahir dengan dipayungi kelompok politik yang dominan waktu itu, atau sebagai underbow partai.²³⁸

F. Pelarangan Kegiatan PKI & Ormasnya

Kepres RI No. 128 dan 440/1961 menetapkan 10 (sepuluh) partai terlarang (yaitu yang dimaksud dalam Peraturan Presiden No. 13 Tahun 1960) termasuk Partai Komunis Indonesia, tetapi anehnya kegiatan PKI tetap berjalan dengan legal. Tetapi jiwa masyarakat Kalimantan Selatan yang agamis, Islam maupun Kristen, tidak dapat menerima faham komunisme pada umumnya dan partai komunis pada khususnya. Kemudian terjadi ketegangan (antara lain terjadi pelemparan granat ke rumah kediaman Bupati HSU, Bihman Villa), dan untuk memelihara ketentraman dan ketertiban umum selagi menghadapi pemulihan keamanan, maka Penguasa Perang Daerah Kalimantan Selatan mengeluarkan keputusan untuk sementara melarang kegiatan Partai Komunis Indonesia dalam Daerah Kalimantan Selatan dengan Surat Keputusan No. 140/S/K.P/ tahun 1960 yang berlaku sejak tanggal 22 Agustus 1956.²³⁹

Kolonel Hassan Basry, Letnan Kolonel M. Yusi dan Gubernur H. Maksid merupakan tokoh-tokoh putra daerah Kalimantan Selatan yang tampil menentang Komunisme. H. Maksid sebagai Gubernur Kalimantan Selatan dibantu oleh Staf Senior Pemerintah Daerah yaitu Johan Ariffin, H. Hasbullah dan A. Gaffar Hanafiah. Kemudian Penguasa Perang Tertinggi dan Penguasa Keadaan Bahaya memanggil Ketua Peperda se-Indonesia untuk mendengarkan penjelasan dari Peperda Kalimantan Selatan. Sebelum rapat dimulai, seorang ajudan Presiden menemui Kolonel Hassan Basry ditempat penginapan beliau di Hotel Duta Indonesia (sekarang Duta Merlin), dengan pesan agar laporan secara singkat saja, namun Kolonel Hassan Basry tetap menyampaikan laporan secara lengkap seperti yang disiapkan dan disusun di Banjarmasin.²⁴⁰

Jiwa tak dapat menerima komunisme itu, tetap bersemi dalam masyarakat terbanyak, sehingga sebagian kesan dari anggota DPR-GR Daerah Tk. I dan Daerah-daerah Tk. II di

²³⁸ C.S.T. Kansil, *Aku Pemuda Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka 1986), hlm.85-86; lihat juga Indra Kusumah, *Risalah Pergerakan Mahasiswa* (Jakarta: Indydec Press, 2007), hlm.12.

²³⁹ M. Suriansyah Ideham (ed), *et.al., op.cit*, hlm. 564-565.

²⁴⁰ *Ibid.*

Kalimantan Selatan menyatakan akan mengundurkan diri, jika unsur komunis akan disertakan dalam Badan Legislatif untuk memenuhi NASAKOM. Berbagai reaksi dari peserta rapat, ada yang senang dan mendukung, tapi ada pula yang sangat marah karena penilaian seperti itu adalah wewenang Presiden/ Panglima Tertinggi. Dalam rapat diputuskan bahwa tindakan yang diambil oleh Peperda Tiga Selatan akan diambil alih oleh Peperti untuk penyelesaiannya.²⁴¹

Satu minggu kemudian keluar pengumuman Peperti bahwa PKI dapat melakukan kegiatannya kembali di tiga daerah tersebut. Walaupun telah ada pengumuman Peperti, tetapi Kolonel Hassan Basry selaku Peperda Kalimantan Selatan tetap bertekad menghentikan kegiatan PKI dan ormas-ormasnya di Kalimantan Selatan. Akibatnya tokoh-tokoh PKI yang mencoba mengadakan kegiatan, mereka tetap ditahan oleh Peperda Kalimantan Selatan sehingga PKI tetap dalam keadaan beku. Terlebih-lebih dari laporan Rapat Peperti/ PKB tersebut tidak secara tegas menyalahkan Peperda Kalimantan Selatan.²⁴²

Pada awal September 1960, Kolonel Hassan Basry dipanggil menghadap Presiden dan meminta agar PKI diperbolehkan bergerak kembali, tetapi Kolonel Hassan Basry tetap pada pendiriannya menolak kegiatan PKI. Presiden Soekarno sampai dua kali mengajukan permintaan ini, tetapi Kolonel Hassan Basry tetap pada pendiriannya sehingga Presiden Soekarno sangat marah. Dan setahun kemudian barulah PKI dapat aktif kembali.

Dalam suatu pertemuan pada malam hari sekitar bulan Maret atau April 1960 di Kediaman Pangdam X/Lambung Mangkurat, Kolonel Achmad Yani (waktu itu sebagai Deputy II KASAD) dengan dihadiri oleh Pangdam X/LM (Letkol Hassan Basry sebagai Penguasa Perang Daerah, Kepala Staf Penguasa Perang Daerah Mayor H. Aberanie Sulaiman, Kepala Staf KODAM X/LM Letkol M. Yusi, Kolonel Achmad Yani menggambarkan situasi politik Nasional secara panjang lebar, bahwa PKI sedang berusaha merongrong Angkatan Darat dalam rangka untuk mendominasi politik di Tanah Air dan disampaikan juga bahwa Presiden Soekarno telah mulai terpengaruh oleh fitnahan

²⁴¹ *Ibid*; Julius Pour, *Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan & Petualang* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2010), hlm. 222.

²⁴² *Ibid*.

PKI karena disekeliling Presiden telah berkeliaran orang-orang PKI. Presiden juga akan membubarkan Masyumi dan PSI, sedangkan PKI tidak akan dibubarkan walaupun terkena Pempres No. 7 Tahun 1959.²⁴³



Gambar 4.8. Kolonel Achmad Yani, Deputy II KASAD, ketika tiba di Lapangan Terbang Ulin. (Sumber: koleksi Wajidi).

Dengan tegas pula Kolonel Hassan Basry mengatakan bahwa : “Tidak ada jalan mundur, karena sudah saya janjikan pada Pak Nasution”. Rupanya telah ada kontak sebelumnya dengan Jenderal Nasution. Pada tanggal 16 Agustus 1960, Kolonel Hassan Basry selaku Peperda Daerah Kalimantan Selatan mengadakan pertemuan dengan Brigjen Kusno Utomo selaku Deyah Komando Kalimantan, dan Brigjen Kusno Utomo memberikan dukungan sepenuhnya.²⁴⁴

²⁴³ *Ibid*; lihat juga Rosihan Anwar, *Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik, 1961-1965* (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2006), hlm.52.

²⁴⁴ *Ibid*.



Gambar 4.9. Tokoh-tokoh putra daerah Kalimantan Selatan yang tampil menentang Komunisme. Kolonel Hassan Basry, Gubernur H. Maksid, Letnan Kolonel M. Yusi. (Sumber: koleksi Wajidi).

Jaringan kekuatan Partai Komunis Indonesia di Kalimantan Selatan bertambah meluas kesegnap pelosok Daerah Tk. II, dimana pergerakannya di Propinsi adalah CDB (Comite Daerah Besar) dan di Daerah Tk. II adalah Comite Daerah (CD). Pimpinan CDB Kalimantan Selatan adalah Amar Hanafiah, yang pada mulanya adalah seorang santri, kemudian berubah menekuni ajaran radikal. Dengan dicabutnya larangan kegiatan PKI dan mantel organisasinya oleh Penguasa Perang Tertinggi (Peperdi) menyebabkan PKI secara lebih berani dan terbuka memasuki kehidupan masyarakat. Kedudukan mereka yang secara resmi diakui dalam Front Nasional membuat mereka lebih aktif dalam menggerakkan rapat-rapat dengan pengerahan massa yang tidak kenal lelah. Akhirnya, diputuskan bahwa tindakan yang dilakukan oleh Peperda Tiga Selatan, termasuk Hasan Basry di Kalimantan Selatan, terkait pembekuan PKI akan diambil-alih sendiri oleh Soekarno selaku Penguasa Perang Tertinggi (Peperdi) untuk penyelesaiannya.²⁴⁵

²⁴⁵ *Ibid*; lihat juga John Roosa, *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto* (Jakarta: Nobodycorp., 2008), hlm.218; Hasbullah, *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah dan pertumbuhan Islam* (Jakarta: Grasindo Persada, 1999), hlm.75.

G. Pendidikan Pemuda Masa Orde Lama

Kebijaksanaan politik pendidikan para menteri yang bertugas antara tahun 1945-1950 dapat dikatakan belum bisa dirasakan atau belum terlihat jelas hasilnya. Hal ini berkaitan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi, pada saat itu karena pergantian kementerian pendidikan yang terjadi secara cepat dan berulang-ulang. Sehingga bisa disimpulkan bahwa usaha-usaha nyata yang pernah dilakukan pemerintah berkaitan dengan pendidikan antara tahun 1945-1950 adalah seputar bangunan sekolah, guru, kurikulum, sistem kerja, serta biaya. Berkaitan dengan keperluan bangunan sekolah, tindakan utama adalah mengatasi bangunan rusak atau hancur lebur akibat revolusi fisik atau bangunan tersebut dipakai oleh pemerintah. Di samping dilakukannya usaha pemerintah dalam mengatasi usaha kekurangan bangunan sekolah tersebut, partisipasi masyarakat juga ikut aktif berpartisipasi gotong royong membangun bangunan sekolah dengan peralatannya dan yang kemudian disumbangkan kepada pemerintah.²⁴⁶

Tata susunan persekolahan sesudah Indonesia merdeka yang berdasarkan satu jenis sekolah untuk tiga tingkat pendidikan seperti pada zaman Jepang tetap diteruskan. Adapun susunan persekolahan dan kurikulum yang berlaku sejak tahun 1945-1950 yakni ; Pendidikan Rendah atau Sekolah Rakyat (SR), Pendidikan Umum SMP dan SMT, Pendidikan Kejuruan dan Pendidikan Teknik.



Gambar 4.10. Para pemuda di Lapangan Merdeka, Banjarmasin.
(Sumber: koleksi Wajidi)

²⁴⁶ M. Suriansyah Ideham (ed), *et.al., op.cit*, hlm. 639-565.

Pada tahun 1950-an di kota Banjarmasin terdapat beberapa sekolah lanjutan menengah, seperti SMP di jalan Loji, sekarang ditempati kediaman dinas Gubernur. Sekolah Guru B (SGB) Putera di jalan Pacinan. SGB ini setara dengan *Normaal School*. Sekolah Guru B Puteri di jalan Kalimantan. Sekolah Teknik Pertama Negeri (STPN) di *Kroesenlaan*. STPN ini setara *Ambachtschool*. Selanjutnya, Sekolah Menengah Islam Pertama (SMIP) di jalan Kalimantan. Kemudian Sekolah Menengah Tinggi (SMT) persiapan pendidikan di perguruan tinggi, dikelola oleh Yayasan Balai Pendidikan yang dibentuk kaum *Republikein* di jalan Kalimantan. Berikutnya, *Kweekschool Nieuwe Stijl* pemerintah pendudukan Belanda (waktu NICA), kemudian dilanjutkan menjadi SGA di Jalan Kalimantan.²⁴⁷

Di daerah Hulu Sungai di Kandangan terdapat satu SMP dan satu SGB (pindahan dari Barabai), satu SMP di Barabai dan satu SMP di Amuntai dan beberapa sekolah swasta. Dalam masa ini, organisasi IPI (Ikatan Pelajar Indonesia) didirikan sebagai alat perjuangan sejak tahun 1949 oleh pelajar-pelajar *Kweekschool* Banjarmasin dengan para pelopornya yakni Abdurachman Abbas, Hasani dan M. Suriansyah Ideham. Organisasi IPI ini sering ikut berpolitik praktis sehingga tidak jarang mereka terpaksa berurusan dengan pihak kepolisian Belanda.²⁴⁸

Pada tahun 1949 sewaktu masih hangatnya perjuangan bersenjata, banyak pelajar yang meninggalkan sekolah dan lari ke pedalaman untuk ikut bergerilya melawan Belanda. Dari *Normaal School* Barabai ada 60 orang pelajar meninggalkan sekolah diantaranya ada 5 orang perempuan yang ikut masuk ke pedalaman. Kemudian untuk menampung mereka, didirikanlah Akademi Militer di Haruyan Barabai oleh pimpinan ALRI Divisi IV Hassan Basry.²⁴⁹

Setelah pembentukan APRIS (Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat) tanggal 27 Januari 1950 yang kemudian diatur dengan Undang-undang Darurat Nomor 4 Tahun 1950. Pasal Undang-undang tersebut memuat, “bahwa yang diterima

²⁴⁷ M. Idwar Saleh *et al.*, *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*, (Banjarmasin: Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah, Kanwil Depdikbud Prop. Kalimantan Selatan, 1978/1979), hlm. 128;

²⁴⁸ *Ibid.*

²⁴⁹ *Ibid.*

sebagai anggota APRIS terdiri dari bekas anggota TNI dan bekas anggota KNIL serta perseorangan warga negara RIS".²⁵⁰

Kota Banjarmasin yang awalnya terdapat tentara Belanda dan anggota KNIL kemudian dimasuki oleh mantan anggota ALRI Divisi IV yang diterima di APRIS dengan jumlah ribuan orang dan berangsur-angsur didatangkan pula anggota-anggota APRIS yang berasal dari TNI di Jawa. Sehingga kota Banjarmasin menjadi penuh sesak dengan anggota tentara. Asrama-asrama tentara penuh sehingga tidak dapat menampung lagi, kemudian disewalah penginapan-penginapan, losmen dan hotel. Namun tetap tidak mencukupi, sehingga dipakailah gedung-gedung sekolah di kota Banjarmasin. Gedung yang dipakai diantaranya adalah beberapa buah gedung SR (Sekolah Rakyat setingkat Sekolah Dasar), STPN (Sekolah Teknik Pertama Negeri) dan *Normaal School* Putera (SGB). Yang paling parah dan paling memprihatinkan adalah *Normaal School* Putera di jalan Pacinan Banjarmasin. *Normaal School* Putera di jalan Pacinan mempunyai 3 gedung, satu gedung bekas HCS (*Hollands Chinese School*), satu bangunan darurat berupa barak terbuat dari tiang/tongkat kayu galam, dinding papan tipis dan atap dari daun rumbia, dan satu gedung yang terdiri tiga kelas dan yang diambil oleh TNI dari Jawa adalah gedung permanen bekas HCS yang terdiri dari 9 kelas dan 1 kantor.²⁵¹



Gambar 4.11. Marching Band Pramuka di Banjarmasin.
(Sumber: koleksi Wajidi)

²⁵⁰ M. Suriansyah Ideham (ed), *et.al.*, *loc.cit.*

²⁵¹ *Ibid.*

Pada bulan Mei 1951 asrama pelajar *Normaal School* dikepung oleh TNI lengkap dengan senjata, namun tidak terjadi perkelahian yang memakan korban karena pelajar kelas 4 yang sebagian besar mantan pejuang ALRI Divisi IV, telah memberi kabar kepada kawan-kawannya yang masih jadi tentara di luar, sehingga hampir terjadi perang saudara. Dan kemudian didamaikan oleh pihak yang berwajib. Namun pihak pelajar sendiri tidak tinggal diam, mereka mengalang solidaritas seluruh pelajar di kota Banjarmasin. Mereka turun ke jalan mengadakan demo menuntut dikembalikannya gedung-gedung sekolah yang diambil oleh tentara. Demonstrasi ini terjadi selama berminggu-minggu, mereka mogok sekolah. Peristiwa ini merupakan “demo pelajar” yang pertama kali dalam sejarah Tanah Banjar.²⁵²

Gubernur dr. Murdjani, Panglima Letkol Sukanda Bratamenggala, Kepala Jawatan Pendidikan Dasar dan Kebudayaan R.A Djarkasi, Direktur *Normaal School*, dan pemimpin pelajar Hamlan Marga dari SGB, Rahmatiah Sedar dari SMP, Bahri Aspan dari SMIP, diadakan perundingan yang menghasilkan sebuah keputusan bersama yakni Panglima tentara berjanji akan memindahkan semua anggota tentara yang terlibat perkelahian/ pengepungan asrama pelajar *Normaal School* ke tempat atau ke kota lain. Kalau ada anggota tentara yang mengganggu pelajar supaya dilaporkan dan akan ditindak oleh Panglima.²⁵³

Kemudian Gubernur meminta kepada Pimpinan Pelajar untuk segera menghentikan pemogokan dan demo serta kembali belajar seperti biasa. Gubernur berjanji akan membangun sekolah-sekolah karena memang pendidikan penting dalam mengisi kemerdekaan.²⁵⁴

Setelah Gubernur dr. Murdjani berhenti dan diganti oleh RTA Milono, cita-cita pembangunan gedung-gedung sekolah

²⁵² *Ibid*; Ramli Nawawi, *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Proyek Penelitian, Pengkajian, dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya, 1992), hlm 27.

²⁵³ *Ibid*; Tim Penulis, *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Pusat Penelitian Sejarah dan Budaya, Proyek Inventarisasi dan Dokumentasi Kebudayaan Daerah, 1981), hlm. 48.

²⁵⁴ *Ibid*.

tetap menjadi prioritas pertama pembangunan di Kalimantan Selatan. Tahun 1953/1954 dimulai secara bertahap pembangunan gedung sekolah yang sekarang kita kenal dengan Kampung Pelajar “Mulawarman”. Nama “Mulawarman” diberikan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mr. Muhammad Yamin diambil dari nama Raja Kutai Lama yaitu Raja Mulawarman seorang raja kerajaan tertua di Indonesia (Nusantara) ini. Karena telah mendirikan kampung pelajar Mulawarman tersebut Gubernur Milono diberi gelar oleh masyarakat Banjar sebagai “Bapak Pendidikan Kalimantan Selatan”.²⁵⁵

Eksistensi pendidikan di Kalimantan Selatan yang ada sekitar tahun 1950 dan tahun-tahun berikutnya masih sangat terbatas, dan tingkatan paling tinggi sekolah lanjutan tingkat atas milik negeri atau pemerintah. Pada tahun 1955 Sekolah terdapat 10 Sekolah Guru (SGB) sampai pada tahun 1961 dengan jumlah murid sebanyak 2.733 dan guru sebanyak 155 orang (1955), murid sebanyak 2.9861 dan guru sebanyak 121 orang (1956), murid sebanyak 2.861 dan guru sebanyak 142 (1957), murid sebanyak 2.593 dan guru 137 (1958), murid sebanyak 2.090 dan guru 132 (1959), murid sebanyak 2.349 dan guru 128 (1960), murid sebanyak 2.105 dan guru 118 (1961) dan pada tahun 1962 seluruh pendidikan SGB di Kalimantan Selatan ditutup yang kemudian diintegrasikan menjadi SMP (Sekolah Menengah Pertama).²⁵⁶

²⁵⁵ *Ibid.*

²⁵⁶ *Ibid.*

Bab 5

Gerakan Pemuda Pada Masa Orde Baru Tahun 1966-1998

A. Pemuda di Tengah Gejolak Politik dan Pemerintahan

DINAMIKA kekuasaan dalam pemerintahan Indonesia telah dikejutkan oleh peristiwa gerakan 30 September yang melakukan pembunuhan kepada para perwira tinggi angkatan darat dan dibuang ke lubang buaya. Peristiwa tersebut diduga telah diprakarsai oleh Partai Komunis sehingga sejak tahun 1966 peristiwa 30 September disebut sebagai peristiwa G 30 S/PKI²⁵⁷. Sejak saat itu, Indonesia mengalami krisis ekonomi, sosial, dan politik yang cukup parah. Rakyat diliputi rasa cemas, para mahasiswa melakukan unjuk rasa dimana-mana, inflasi meningkat hingga mencapai 650%, dan harga-harga pun membung tinggi.

Berbagai gerakan yang diusung dari berbagai golongan dalam masyarakat secara serempak menyatakan tuntutan supaya PKI dibubarkan. Tuntutan-tuntutan yang semula ditujukan kepada PKI sebagai dalang dari pemberontakan meluas hingga ke ranah fundamental, yakni keinginan dari rakyat untuk menghapuskan segala bentuk kekuatan yang bertentangan bahkan mengkhianati Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Selain itu pula dengan dibubarkannya PKI merupakan wujud dari keinginan dasar rakyat untuk melaksanakan Pancasila dan UUD 45 secara murni dan konsekuen.

²⁵⁷ Warman, A. A. (2018). Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965. *Archipel* 95.

Pada bulan Oktober di tahun 1965 merupakan bulan yang begitu mencekam, pasalnya penculikan dan pembantaian para petinggi angkatan darat dalam operasi berdarah membuat gejolak di masyarakat Indonesia. Pasca peristiwa G 30 S/PKI, kampanye anti komunis terus meningkat dan menyebar di seluruh lapisan masyarakat termasuk para pemuda masa itu. Tuntutan-tuntutan oleh berbagai golongan di masyarakat semakin meningkat intensitasnya, diawal Oktober 1965 pasca pemberontakan G 30 S/PKI para pihak ABRI melalui Menko Hankam/ Kasad menuntut *retooling* pimpinan angkatan yang terlibat, namun tuntutan-tuntutan tersebut semakin lama semakin masif dan keras nadanya.

Peristiwa G 30 S/PKI serta penanganan yang tidak tegas oleh Presiden Soekarno akhirnya melahirkan tuntutan-tuntutan dari masyarakat dan terus meluas hingga melahirkan Desu-karnois di masyarakat. Kepercayaan dan keberpihakan masyarakat kepada Presiden Soekarno semakin tergerus dan berujung pada ketidakpuasan masyarakat terhadap rezim pemerintahan pada masa itu. Rezim pemerintahan dinilai telah mencoreng nilai-nilai Pancasila hingga berdampak pada tidak dilaksanakannya Pancasila secara murni dan konsekuen, dan merusak kehidupan berbangsa dan bernegara. Aib-aib pada masa pemerintahan Soekarno dinyatakan secara terbuka dan dikoarkan oleh kelompok-kelompok masyarakat melalui demonstrasi di mana-mana hingga merambah ke berbagai daerah di luar ibukota Jakarta.



Gambar 5.1. Para seniman Kalsel pada saat persiapan Musyawarah Daerah Seniman Kalsel tahun 1963 di Banjarmasin. Digagalkan oleh Lekra karena tidak diikutsertakan dalam Musda.
(Sumber: Koleksi Wajidi).

Di Kalimantan Selatan gejolak politik juga terasa begitu besar pengaruhnya terhadap dinamika di masyarakat khususnya bagi para pemuda masa itu. Sebagaimana yang telah terjadi pada tingkat nasional, masyarakat dan pemuda di Kalimantan Selatan bergejolak atas meletusnya G 30 S/PKI. Situasi yang terjadi dalam bidang politik telah menyadarkan masyarakat dan pemuda Kalimantan Selatan untuk melakukan reaksi agar keadaan tidak bertambah buruk.

Politik Nasakom di Indonesia memiliki pengaruh besar dalam persebaran PKI di berbagai daerah terutama di Kalimantan Selatan. Tidak bisa dipungkiri bahwa PKI telah tersebar sampai ke pelosok-pelosok wilayah Kalimantan Selatan namun perkembangan PKI di Kalimantan Selatan setelah peristiwa G 30 S/PKI begitu cepat dihambat oleh penguasa militer melalui pembekukan kegiatan PKI di Kalimantan Selatan.

Situasi daerah pasca penghianatan G 30 S/PKI belumlah benar-benar dapat dinyatakan telah selesai secara tuntas karena kasus serta para pelaku dan pengikut PKI masih belum ditangani secara tegas dan menyeluruh. Sehingga ketika

Mimbar Mahasiswa menurunkan berita yang berkaitan dengan operasi pembersihan terhadap PKI dianggap oleh Laksusda Kalimantan Selatan telah membuyarkan strategi Laksus dalam operasi yang akan dilaksanakan. Untuk itu tokoh-tokohnya seperti H.J. Djok Mentaya, Anang Adenansi, Mas Abi Karsa, A Syarie Musaffa dan Zainuddin Rais ditahan oleh Laksusda selama 21 hari. Namun hal tersebut tidak menyurutkan para pemuda Kalimantan Selatan untuk terus berjuang demi keadilan dan martabat bangsa pada masa itu hingga akhirnya melecutkan aksi dari para pejuang AMPERA di tingkat nasional hingga Kalimantan Selatan.

B. Eksponen'66: Gejolak Politik di Jakarta dan Embrio Gerakan pemuda di Kalimantan Selatan

Gerakan PKI yang cepat dapat ditumpas baik di pusat maupun di daerah dan secara serentak pula melahirkan angkatan 66 yang gigih memperjuangkan tuntutan rakyat. Karena itu pada awal tahun 1966 rakyat semakin tidak sabar menunggu penyelesaian masalah penurunan harga dan pembubaran PKI. Sebelumnya pada tanggal 25 oktober tahun 1965, para mahasiswa dan pemuda di Jakarta membentuk KAMI (Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia) sebagai organisasi federasi dari berbagai organisasi keagamaan meliputi HMI, Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Perhimpunan Mahasiswa Kristen Indonesia (PMKRI), dan Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) serta organisasi non keagamaan meliputi Sekretariat Bersama Mahasiswa Lokal (SOMAL), Pelopor Mahasiswa Sosialis Indonesia (PELMASI), Gerakan Mahasiswa Sosialis (Gem-sos) dan Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI).²⁵⁸

²⁵⁸ Francoil Raillon, *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*, (Jakarta: LP3ES,1985) hal. 15.



Gambar 5.2. Demontrasi Kesatuan Pelajar dan Mahasiswa.
(Sumber: Koleksi Wajidi).

Pembentukan KAMI sebagai bagian dari respon sosial politik terhadap peristiwa penumpasan G 30 S/PKI yang diyakini sebagai dosa besar dari para anggota Partai Komunis Indonesia dan dinilai penanganan terhadap penyelesaian politik belum selesai dan belum sepenuhnya berhasil dilakukan oleh Presiden Soekarno. Meskipun sebelum pendirian KAMI telah terbentuk PPMI (Perserikatan Perhimpunan Mahasiswa Indonesia) pada 10-23 Oktober 1965. Namun KAMI mendapatkan dukungan dari Menteri Sjarif Thajeb selaku Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) bahkan dirinya tercatat sebagai salah satu pendiri KAMI sehingga semakin memperkuat legitimasi dan justifikasi KAMI sebagai wadah persatuan para pemuda dan mahasiswa.²⁵⁹

Pembentukan KAMI juga merupakan reaksi dari kebijakan Presiden Soekarno yang menjawab tuntutan rakyat untuk membubarkan PKI dijawab dengan perubahan kabinet Dwikora menjadi kabinet 100 menteri yang didalamnya terdapat para

²⁵⁹ Farid Fathoni, *Kelahiran Yang Dipersoalkan: Dua Puluh Enam Tahun IMM 1964-1990*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), hlm. 126-127.

tokoh yang terlibat dalam G 30 S/PKI sehingga memicu kemarahan para pemuda di seluruh Indonesia. Sehingga Tritura yang dicanangkan oleh Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) pada 10 Januari 1966, merupakan wujud dari perjuangan para pemuda bangsa untuk mengangkat harkat dan martabat bangsa dan negara yang tertuang dalam Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat).²⁶⁰ Gema aksi perjuangan dari para pelajar dan mahasiswa dalam mengemban Amanat Penderitaan Rakyat untuk memperjuangkan Tritura sebagai cetusan konkrit telah turut merasuk dan membakar semangat pemuda di daerah dan tidak terkecuali Kalimantan Selatan.

Tuntutan KAMI yang terkenal dengan Tritura, yaitu bubarkan PKI, bubarkan 100 menteri, dan turunkan harga barang merupakan daya picu yang sangat ampuh untuk menggerakkan masyarakat dalam melakukan aksi unjuk rasa. Jika di Jakarta muncul gerakan mahasiswa yang dipelopori *Pasukan jaket kuning* dari Universitas Indonesia yang tergabung dalam Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) yang diikuti Kesatuan Aksi Pelajar Indonesia (KAPPI) dan KAPI maka di Kalimantan Selatan juga lahir organisasi dan perjuangan yang sama.

C. Pahlawan Ampera dan Pemuda Pejuang Martabat Bangsa Indonesia di Kalimantan Selatan

Di Kalimantan Selatan, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia Komisariat Daerah Kalimantan Selatan (KAMI Komda Kalsel) dibentuk pada 13 Januari 1966. Pemuda Bumi Lambung Mangkurat bertekad untuk memperjuangkan Tritura, meruntuhkan kekuasaan Orde Lama, serta dimusnahkannya para sisa-sisa tokoh komunis dan disingkirkannya golongan parasit di pemerintahan Orde Lama. Awal Bulan Februari 1966, Presidium KAMI Konsulat Kalsel mengadakan rapat yang dipimpin oleh Ketua Presidium Mas Abi Karsa. Rapat memutuskan bahwa tanggal 10 Februari 1966 akan diadakan apel

²⁶⁰ St. Purnomo Sidi, *Gerakan Mahasiswa 1966 dan Perubahan Politik Di Indonesia*, skripsi. (Yogyakarta: UGM, 1996), hlm. 60

besar-besaran yang diikuti KASI, KAMI, KAPPI/KAPI/KAWI, bertempat di halaman Kantor Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan di Banjarmasin.²⁶¹

Aksi tersebut bertujuan untuk menyampaikan bahwa semua kesatuan aksi yang tergabung di Kalsel mengutuk Pemerintah RRT yang ikut mendalangi peristiwa G 30 S/PKI dan menuntut ditutupnya Konsulat RRT di Banjarmasin. Selain itu juga akan disampaikan Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) kepada Muspida Kalsel, yaitu bubarkan Partai Komunis Indonesia (PKI) bersama pengikutnya, bubarkan Kabinet 100 Menteri, dan turunkan harga sandang pangan.²⁶²

Di Kalimantan Selatan khususnya Banjarmasin aktivitas KAMI/KAPPI selain melakukan unjuk rasa turun ke jalan, juga mengeluarkan pernyataan dan pendapat melalui siaran RRI Banjarmasin. Siaran pada RRI Banjarmasin terutama pada rubrik Varia Universitas yang dilakukan oleh Biro Penerangan KAMI yang secara organisatoris masuk dalam Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia (IPMI) dimanfaatkan sebagai media perjuangan. Beragam aspirasi hingga kritik dari mahasiswa dan masyarakat pada umumnya disiarkan terus menerus untuk menyerang pemerintahan Orde Lama serta yang tidak kalah pentingnya mengemban misi agar Tritura benar-benar dapat diwujudkan.

Acara Varia Universitas dari RRI Banjarmasin telah menjadi corong bagi para pemuda dan mahasiswa juga menjadi media andalan di berbagai daerah lainnya di Indonesia. Beragam wacana kritik secara masif di produksi dari berbagai daerah di Indonesia telah membuat khawatir dan dianggap membahaya-

²⁶¹ “Mengenang Peristiwa 51 tahun gugurnya Pahlawan Ampera Pertama Hasanuddin HM”, diakses dari Kalimantan Post: Asli Koran Banua: <http://www.kalimantanpost.com/mengenang-peristiwa-51-tahun-gugurnya-pahlawan-ampera-pertama-hasanuddin-hm>, pada tanggal 06 Oktober 2018 pukul 13.00.

²⁶² Wibisono, K. (2019, Februari 11). “Eksponen 66: Tritura Belum Terwujud”, diakses dari AntaraNews.com: <https://www.antara.com/berita/132545/eksponen-66-tritura-belum-terwujud>, pada tanggal 05 Oktober 2018 pukul 08.00.

kan kehidupan berbangsa oleh pemerintahan Soekarno, sehingga keluarlah surat keputusan Panglima Tertinggi /Soekarno No. 041/Kogam yang isinya menghentikan acara tetap Varia Universitas di berbagai RRI daerah di Indonesia, termasuk RRI di Banjarmasin.

Penutupan akses dan media perjuangan bagi pemuda tidak menyurutkan para pemuda Kalimantan Selatan untuk tetap memproduksi wacana perjuangan. Dengan semangat idealisme yang tinggi para aktivis mahasiswa meskipun kehilangan akses mengemukakan pendapat melalui RRI Banjarmasin dan adanya larangan berdemonstrasi oleh penguasa mereka pun membuat gagasan untuk mengeluarkan aspirasi mahasiswa melalui penerbitan buletin. Para pemuda yang tergabung di dalam KAMI terutama pada Biro Penerangan KAMI yang di dalamnya ada organisasi IPMI akhirnya berhasil mewujudkan penerbitan buletin dalam bentuk cetak stensilan.

Aksi Puncak perjuangan KAMI di Kalimantan Selatan terjadi pada 10 Februari 1966 pukul 07.00 WITA. Berawal dari Fakultas Ekonomi di Universitas Lambung Mangkurat, pada masa itu para mahasiswa sedang libur kuliah. Namun tidak menyurutkan semangat para pemuda perjuangan untuk berkumpul dan melakukan aksi demonstrasi. Dari Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat, dua orang anggota KAMI yaitu Syahril Ibat dan Abdussamad berkolaborasi untuk mengkoordinir barisan mahasiswa UNLAM yang terbagi menjadi dua. Sebagian barisan akan diarahkan menuju ke kantor Gubernur dan sebagian lagi ke Polresta untuk membebaskan Anang Adenansi dan HM. Taufik Effendi yang telah ditangkap Polresta Banjarmasin pada tanggal 9 Februari 1966.

Anang Adenansi dan M. Taufik Effendi merupakan Kedua tokoh pemuda yang sebelumnya telah melakukan pemukulan terhadap Drs. Iskandari seorang dosen IKIP Negeri Banjarmasin, dikarenakan Drs. Iskandari telah menuduh KAMI Konsulat Kalsel dalam aksinya ditunggangi oleh CIA (Amerika) sehingga menyulut kemarahan para pemuda terutama kedua pemuda tersebut. Selain itu, menurut beberapa sumber bahwa

ada permintaan dari salah seorang anggota Presidium KAMI Konsulat Kalsel agar Anang Adenansi dan M. Taufik Effendi supaya ditahan menjelang apel besar tanggal 10 Februari 1966, karena dikhawatirkan dalam apel 10 Februari 1966 tersebut akan melakukan hal-hal yang ekstrim di luar rencana-rencana yang sudah diatur.²⁶³

Mahasiswa dan pemuda Kalsel berkumpul melakukan demonstrasi pada apel di Kantor Gubernur Kalimantan Selatan, para demonstiran membacakan pernyataan sikap dan menyerahkannya kepada Muspida Kalsel yang diterima langsung oleh Pejabat Pangdam Kodam X Lambung Mangkurat Kolonel Soetopoyono. Meskipun dalam cuaca hujan deras, tidak menyurutkan semangat para demonstiran untuk melanjutkan aksinya menuju ke Konsulat RRT di Jalan Pecinan Laut setelah meninggalkan halaman Kantor Gubernur. Sesampainya di Gedung Konsulat RRT para demonstiran tidak bisa masuk ke Gedung Konsulat, karena di samping pagar dikunci dan dijaga ketat oleh barisan keamanan juga ditambah beberapa buah pemadam kebakaran. Kemudian secara heroik, Ketua Presidium KAMI Konsulat Kalsel Mas Abi Karsa melakukan aksi naik pagar Konsulat RRT dan membacakan tuntutan agar Konsulat RRT di Banjarmasin supaya ditutup meskipun diterjang tembakan dan semprotan air dari pemadam kebakaran.

Selesai dibacakan tuntutan, para demonstiran kembali ke kampus UNLAM di Jalan Lambung Mangkurat. Pada perjalanan pulang, para demonstiran secara tiba-tiba dikejutkan dengan hujan tembakan dari pasukan keamanan Jon K. Seketika para demonstiran pun panik dan takut, mereka pun berpecah menjadi dua, sebagian melewati Jalan Hasanudin dan sebagian pergi ke arah jalan Sudimampir. Beberapa demonstiran terkena

²⁶³ "Mengenang Peristiwa 51 tahun gugurnya Pahlawan Ampera Pertama Hasanuddin HM", diakses dari Kalimantan Post: Asli Koran Banua: <http://www.kalimantanpost.com/mengenang-peristiwa-51-tahun-gugurnya-pahlawan-ampera-pertama-hasanuddin-hm>, pada tanggal 06 Oktober 2018 pukul 13.00.

peluru tembakan dari senjata bayonet, diantaranya bernama Imbran dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Ulin untuk pertolongan. Namun yang lebih memprihatinkan persis di Simpang Tiga Jalan Sudimampir tepatnya di muka Toko Minseng, terkapar seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi UNLAM Hasanuddin HM karena terkena tembakan peluru salah seorang barisan keamanan pasukan Jon K. Peluru tersebut tepat menembus dada Hasanuddin HM yang sedang memegang spanduk yang bertuliskan *"Hanya ada satu pilihan, jadi Bangsa Indonesia atau Bangsa Asing"*.

Teman-teman Hasanuddin HM langsung membawa tubuhnya ke Rumah Sakit Ulin Banjarmasin, namun dalam perjalanan menuju Rumah Sakit Ulin Hasanuddin HM telah menghembuskan nafasnya yang terakhir. 11 Februari 1966 jenazah Hasanuddin HM disemayamkan di kampus Universitas Lambung Mangkurat oleh Bapak Milono Rektor UNLAM dan mahasiswa UNLAM. Jenazah dibawa dengan berjalan kaki menuju peristirahatan terakhir di kuburan muslimin jalan Masjid Jami untuk dimakamkan.



Gambar 5.3. Pemakaman Hasanuddin HM.
(Sumber: koleksi Wajidi).

Gugurnya Hasanuddin HM menjadi sebuah momentum serta penanda dari perjuangan pemuda Kalimantan Selatan pada tahun 1966 yang sering disebut sebagai Eksponen'66. Pengorbanan para pejuang angkatan 1966 berhasil menutup konsulat RRT di Banjarmasin dan semua aset milik Konsulat RRT yang kemudian diambil alih oleh Peperada Kalsel. DPRD Kalsel beserta Muspida dalam rapat memutuskan bahwa Hasanuddin HM ditetapkan sebagai Pahlawan Ampera Pertama di Indonesia.²⁶⁴

D. Gerakan Pemuda Kalsel, Kontrol Sosial dan Modal Politik Penguasa Orde Baru

Pasca perubahan dan pergolakan politik nasional dan internasional hingga berbuah pergantian rezim dan munculnya rezim Presiden Soeharto di Indonesia. Pemerintahan Presiden Soeharto dikenal dengan rezim Orde Baru dan menamakan rezim Pemerintahan Soekarno dengan sebutan Orde Lama. Presiden Soeharto dikenal dengan pemerintahan yang berideologi pembangunan. Presiden Soeharto memberlakukan stabilisasi politik melalui perencanaan administrasi dan prosedur pemerintah yang sangat ketat dari tingkat nasional hingga daerah. Secara ideologis, Presiden Soeharto melakukan kontrol menggunakan “Pancasila” versi rezim orde baru. Selain itu juga pengorganisasian pemerintah dilakukan secara sentralistik serta terpusat pada komando Soeharto. Pembangunan ekonomi yang sangat pesat akibat dari undang-undang penanaman modal asing telah ditandatangani pemerintah dan berdampak masuknya perusahaan dan modal asing ke Indonesia. Pemerintah serta militer juga memiliki kedekatan dengan para investor Asing, khususnya kepada Jepang dan AS. Hingga pada 1967, perusahaan penambang emas milik AS yang bernama *Freeport* di Papua didirikan.

Pada masa orde baru para tokoh oposisi Soekarno diangkat menjadi menteri-menteri oleh Presiden Soeharto,

²⁶⁴ *Ibid.*

beberapa diantaranya seperti Emil Salim, Ali Wardana, dan Soemitro Djojohadikoesomo yang merupakan lulusan dari Universitas Barkeley di Amerika Serikat. Selain itu juga sebagian besar aktivis mahasiswa yang mayoritas berasal dari gerbong KAMI menjadi anggota DPR dan membagi banyak keuntungan dengan pemerintah.



Gambar 5.5. Eksponen '66. Searah jarum jam, duduk: Husni Thamrin, Mas Abi Karsa, Djohar Hamid. Berdiri: berdiri: Zainuddin Rais, Anang Adenansi, A Syarie Musaffa, Djok Mentaya. (Sumber: koleksi M. Suriansyah Ideham).

Formulasi ideologi, konstruksi hegemoni negara melalui asas ketertiban, stabilitas, dan keamanan nasional. Negara berlaku sebagai ide dan instrumen berinteraksi dengan struktur dan proses dari kekuasaan, legitimasi, dan akumulasi hingga pada akhirnya orde baru dipahami sebagai bentuk nyata dari sistem oligarki. Kontrol negara berwujud menjadi stabilisasi politik, ekonomi hingga kontrol ideologi juga turut mempengaruhi kehidupan masyarakat di daerah terutama di Kalimantan Selatan. Pasca jatuhnya Soekarno dan jatuhnya Pahlawan AMPERA pertama yaitu Hasanuddin HM, kehidupan

pergerakan pemuda dan masyarakat mengalami perubahan yang signifikan baik dalam perkembangan pers, transformasi pemuda dan pemilu, hingga pergerakan politik dan perubahan kehidupan sosial pada pemuda di Kalimantan Selatan.

1. Transformasi Pemuda dan Perkembangan Pers Orde Baru di Kalimantan Selatan

Dari masa ke masa telah diakui fungsi dan peranan pers dapat mempengaruhi perjalanan kehidupan berbangsa dan bernegara. Setelah G 30 S/PKI dapat digagalkan, keberadaan Presiden Soekarno yang masih memegang kekuasaan banyak mendapat sorotan pers yang tidak lagi memihak pada kekuatan Orde Lama. Di Jakarta telah terbit harian API, KAMI dan TRISAKTI yang dikelola oleh para wartawan muda penuh idealisme. Mereka para wartawan muda ini pada masa Orde Lama tidak pernah terlibat kerja sama dengan kepentingan penguasa, sehingga isi pemberitaan surat kabar yang mereka kelola dapat memuat segala yang terjadi dengan gambling. Berbagai kebobrokan yang pernah dilakukan Orde Lama dengan bermacam aspek dan permasalahannya dikupas habis untuk menggiring opini masyarakat agar berpihak pada Orde Baru yang sedang digulirkan angkatan 1966.



Gambar 5.6. Kedatangan Presiden Soeharto di Kalimantan Selatan (Sumber: Koleksi Wajidi).

Seiring lahirnya Orde Baru, penerbitan surat kabar yang kelahirannya dipaksakan untuk mendukung bermacam kepentingan, secara sadar kembali menemukan jati dirinya. Misalnya Kedaulatan Rakyat yang terbit di Yogyakarta pada jaman Orde Lama harus berganti nama dengan Dwikora, namun koran yang berafiliasi kepada pasar tunggal, setelah Orde Baru kembali menggunakan nama asalnya. Begitu juga dengan harian Pikiran Rakyat Bandung dan koran-koran lainnya yang sempat berganti nama, kemudian kembali menggunakan namanya semula.

Di Kalimantan Selatan terdapat buletin mahasiswa yang kemudian bertransformasi menjadi “Mimbar Mahasiswa” yang dicetak dua kali seminggu dan pertama kali terbit pada tanggal 8 Agustus 1968. Penerbitan Mimbar Mahasiswa ini dipelopori oleh H.J. Djok Mentaya, H. Anang Adenansi, Yustan Azidin, Muhammad Hadariyah Rokh, Gusti Rusdi Effendi, Rustam Effendi Karel, dan Amaril HS. Surat kabar Mimbar Mahasiswa

ini dicetak pada *Almamater Pers* dengan penerbitnya adalah Ikatan Pers Mahasiswa Indonesia. Misi perjuangan yang diemban adalah sebagai alat sosial kontrol dan setiap terbit oplahnya sebanyak 3.500 eksemplar.

Mimbar Mahasiswa terbentuk bersamaan dengan orde Baru melahirkan sosial kontrol melalui pemberitaan yang serupa dengan pemberitaan nasional namun disesuaikan dengan kondisi yang ada di daerah. Keberadaan Mimbar Mahasiswa yang selalu memuat berita-berita yang berpihak pada kepentingan rakyat membuat surat kabar ini cepat mendapat simpati masyarakat dan mengalami kemajuan yang pesat. Namun perjuangan mahasiswa dan eksponen muda lainnya yang disalurkan melalui pers dalam melakukan kritik dan koreksi bersifat terbuka membuat pemerintahan Orde Baru menjadi defensif terhadap pers dan media. Kondisi seperti ini telah pula membuat pemerintah ekstra hati-hati dalam memberikan kebebasan pers. Sehingga pada tahun 1970 pemerintah melaksanakan kebijaksanaan yang membatasi gerakan mahasiswa dan meminta agar IPMI kembali ke kampus. Adanya kebijakan pemerintah yang mengharuskan IPMI kembali ke kampus maka muncul lagi pemikiran untuk melepaskan afiliasi dari keterikatan dengan IPMI. Surat Kabar Mimbar Mahasiswa kemudian dikembangkan menjadi surat kabar yang bersifat umum dan lahir 3 media dengan para pelopor dan pengelolanya terdiri atas orang-orang Mimbar Mahasiswanya, yaitu :

1. Surat Kabar Media Masyarakat dipimpin dan dikelola oleh H. Anang Adenansi, Rustam Effendi Karel, Mas Abi Karsa dan Hadariah Rokh.
2. Surat Kabar Mimbar Masyarakat dipimpin oleh Alwi AS, dan berkedudukan di Samarinda.
3. Majalah "Intan Sari" dipimpin oleh Djok Mentaya, Yustan Azidin, Gusti Effendi AR, Djohar Hamid.

Pada tanggal 2 Agustus 1971 Majalah Intan Sari oleh para pengelolanya diubah namanya menjadi harian Banjarmasin Post. Meskipun berpredikat sebagai surat kabar harian, namun pada tahun pertamanya hanya terbit seminggu sekali. Diantara-

nya tiga terbitan surat kabar tersebut yang mampu terbit dan berkembang dengan baik hingga sekarang ini adalah Banjarmasin Post. Sosial kontrol yang dilakukan oleh penerbitan pers selain dapat digunakan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat, juga sangat bermanfaat dalam menunjang dan mensosialisasikan hasil-hasil pembangunan. Media pers pada masa-masa Orde Baru banyak dimanfaatkan untuk mempublikasikan hasil pembangunan yang dilakukan. Dalam masa pergantian pemerintahan peranan pers selalu menonjol, sehingga pada awal perubahan banyak penerbitan pers bermunculan.

Penerbitan Surat Kabar di Kalimantan Selatan yang resmi beredar sejak tahun 1966 atau merupakan kelanjutan dari koran sebelumnya sampai 1998 (Pers Orde Baru) dan hingga sekarang era Reformasi, sebagaimana dikutip dari buku *Sejarah Banjar*²⁶⁵ adalah sebagai berikut:

a. Banjarmasin Post

Pada tanggal 2 Agustus 1971 harian Banjarmasin menganggap sebagai hari lahirnya dan merupakan penerbitan pertamanya. Harian ini pada penerbitan pertamanya tampil dengan ukuran dan oplah hanya 1000 eksemplar. Semangat dan kerja yang ditunjukkan pengelolanya, Banjarmasin Post kemudian dapat terbit dengan ukuran pleno atau ukuran standard disamping ukuran surat kabar, penerbitannya ditingkatkan menjadi 3 kali seminggu dan akhirnya dapat terbit setiap hari.

Setelah melewati masa-masa kritis dalam penerbitannya, pada tahun 1978 Banjarmasin Post mampu mengadakan sebuah percetakan offset yang bisa mencetak surat kabar berkualitas seperti penerbitan yang ada di Jakarta. Kemudian seiring dengan meningkatnya oplah, maka Banjarmasin Post dapat pula menyediakan mesin web offset untuk penerbitan surat kabar mereka.

²⁶⁵ M. Suriansyah Ideham dkk. (ed.), *Sejarah Banjar*, (Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, 2003), hlm.657-660.

Perkembangan dunia pers yang cepat dan semakin maju telah pula dapat diantisipasi dengan baik oleh manajemen Banjarmasin Post, sehingga tahun 1979 berhasil membangun gedung untuk percetakan dan kantor redaksi yang cukup representatif dalam mengemban tugas jurnalistik modern. Dengan manajemen baru yang dijalankan, Banjarmasin Post mengembangkan sayap penerbitan persnya yaitu berhasil mengelola Tabloid Serambi Ummah dan Bebas serta menambah sebuah harian Metro Banjar. Penerbitan tabloid dan harian baru ini menjadi identitas tersendiri dan merupakan Banjarmasin Post Grup. Peredaran surat kabar ini meliputi wilayah Kalimantan, Jakarta dan Surabaya.

b. Indonesia Merdeka

Surat kabar Indonesia Merdeka sebenarnya telah lama terbit, yaitu sejak tahun 1945 dan sampai sekarang. Surat kabar ini bersifat mingguan dan pada tahun 1980 hingga sekarang pemimpin umumnya adalah Gusti Samsu Hidayat sebagai penerus kepemilikannya. Pada tahun 1965 mencapai puncaknya yang paling tinggi sebanyak 15.000 eksemplar sekali terbit. Sampai sekarang Indonesia Merdeka tetap terbit mingguan dan wilayah edarnya Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur.

Meskipun surat kabar ini tetap terbit, namun tidak dapat bersaing dan berkembang dengan penerbitan surat kabar yang baru. Dengan kegigihan dan keuletan mempertahankan penerbitannya tersebut, surat kabar ini tahun 1980 mendapat penghargaan dari menteri Penerangan karena mampu bertahan dan lamanya terbit berdasarkan modal sendiri.

c. Media Masyarakat

Surat kabar Media masyarakat yang dipimpinnya oleh Anang Adenansi ini senantiasa mengalami pasang surut dalam penerbitannya. Sejak tahun 1975 selama beberapa tahun terbit harian dan cukup dikenal luas untuk wilayah Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Tengah. Tetapi ka-

rena kemerosotan modal harian ini hanya mampu terbit seminggu sekali hingga sekarang ini. Media Masyarakat memang salah satu surat kabar yang tidak bernasib baik, karena beberapa kali memperbaharui teknis penerbitan dan menerapkan manajemen barunya, namun tidak dapat bertahan lama. Tidak dapat berkembangnya surat kabar ini antara lain karena kekurangan modal.

d. Generasi Muda

Surat kabar Generasi Muda adalah mingguan yang terbit tahun 1969, di Banjarmasin. Dipimpin oleh S.A. Abdis, dibantu Usman Rifani. Pada awalnya mingguan ini mengemban misi untuk menyuarakan aspirasi pemuda dan pelajar. Disebabkan antara pimpinan dan redaksi tidak dapat sepaham dalam mengemban misinya, yaitu antara S.A. Abdis selaku pendiri menghendaki lebih banyak politik yang diliput dalam pemberitaanya, sementara Usman Rifani sebagai redaktur menghendaki agar lebih banyak menyuarakan aspirasi pemuda dan pelajar. Karena perbedaan paham antara pimpinan dan modal penerbitan surat kabar yang kurang akhirnya tidak terbit lagi.

e. Publika

Surat kabar ini adalah mingguan pendiri dan pemimpin umumnya Goembran Sakti. Mingguan ini diterbitkan tahun 1970 dicetak oleh percetakan offset Surabaya dengan harapan mutu cetakan yang baik dapat menarik penambahan modal penerbitan dari luar. Namun karena hanya mengandalkan modal sendiri, mingguan ini hanya mampu bertahan 4 kali terbit dan setelah itu dihentikan penerbitannya.

f. Utama

Penerbitan surat kabar ini bersifat harian diterbitkan tahun 1972 dengan pimpinannya Kaspul Yamin. Harian ini sebenarnya cukup mendapat tempat pada masyarakat, pembacanya dan oplahnya pun mencapai 5000 eksemplar setiap kali terbit. Namun setelah mampu bertahan selama 8 tahun,

tepatnya 1978 harian utama tidak dapat terbit lagi karena kekurangan modal.

g. Manikam

Surat kabar Manikam merupakan harian yang diterbitkan tahun 1970 dengan pimpinan umumnya Aliansyah Ludji. Seperti halnya Koran terbitan daerah lainnya harian Manikam ini hanya mampu bertahan 2 tahun. Setelah tidak mampu lagi mengembangkan modal penerbitannya, harian yang terbit 4 halaman ini pun terpaksa ditutup.

h. Palapa

Penerbitan surat kabar Palapa merupakan edisi Kalimantan Selatan dan bersifat harian pimpinan umumnya adalah A.S. Musyaffa. Surat kabar ini diterbitkan oleh CV Canang Press dan terbit tahun 1966. Namun setelah berjalan selama 7 tahun harian ini juga tidak dapat meneruskan penerbitannya karena kalah bersaing dan kekurangan modal untuk bisa melanjutkannya.

i. Pembaharu

Surat kabar Pembaharu adalah harian dengan penerbit New Adil Offset terbit tahun 1966. dengan segala pasang surutnya surat kabar yang dipimpin Yusril Eanany ini memiliki oplah 2500 eksemplar sekali terbit. Harian Pembaharu merupakan kelanjutan dari harian Mercu Suar yang terbit tahun 1965 karena perubahan politik diganti namanya dengan Pembaharu. Surat kabar Pembaharu cukup lama bertahan sekitar 19 tahun, namun sejak tahun 1985 tidak terbit lagi dengan berbagai kendala dihadapi terutama permodalan.

j. Dinamika Berita

Dinamika berita adalah harian yang diterbitkan oleh PT. Karya Banjar Sejahtera Banjarmasin dan dicetak pada Mini Press Offset. Pemimpin Umum harian Dinamika Berita adalah Djohar Hamid yang penerbitan pertamanya 2 Mei 1986 terbit 8

halaman. Peredaran surat kabar ini meliputi Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur dan Kalimantan Tengah dengan oplah 5000 eksemplar sekali terbit.

Harian *Dinamika Berita* tetap dapat bertahan dan terus membenahi kekurangan yang memungkinkan untuk terus bertahan di tengah persaingan media informasi lainnya. Untuk terus dapat melangsungkan kehidupan surat kabar itu pulalah maka surat kabar ini memperbaharui manajemenya dan mengganti namanya dengan *Kalimantan Post*.

k. KalimantanPost

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, harian *Kalimantan Post* merupakan kelanjutan dari *Dinamika Berita*. Pemimpin umum *Kalimantan Post* adalah H. Taufik Effendi, S.E.,MBA dan penerbitnya PT Karya Banjar Sejahtera. *Kalimantan Post* terbit 12 halaman beredar di Kalimantan Selatan dan Tengah, Kalimantan Timur dan Kalimantan Barat serta mempunyai perwakilan Surabaya dan Jakarta dengan oplah 6000 eksemplar.

l. Gawi Manuntung

Harian *Gawi Manuntung* diterbitkan oleh PT. New Lambang dan sebagai pemimpinnya adalah M. Ali Sri Indrajaya. Surat kabar ini terbit sejak tahun 1972, karena tidak ditunjang modal yang besar, maka terbit 2 kali seminggu hari Selasa dan Jumat. Sejak dihentikannya Koran *Masuk Desa*, surat kabar *Gawi Manuntung* tidak bisa tepat lagi penerbitannya.

m. Dinamika

Surat kabar *Dinamika* diterbitkan oleh Yayasan Sapta Karya dan sebagai pemimpin umumnya adalah A. Shafrawi Hakim. *Dinamika* terbit mingguan dimulai sejak 24 Juni 1970, namun setelah beberapa tahun bertahan akhirnya terhenti juga. Penyebab utamanya selain permodalan juga tidak didukung manajemen yang kuat.

n. Serambi Ummah

Surat kabar ini berbentuk tabloid terbit 16 halaman diterbitkan oleh PT Cahaya Media Aditama sejak tahun 1999. Tabloid ini bernaung di bawah bendera Banjarmasin Post Grup yang pada awalnya merupakan penerbitan suplemen dari Banjarmasin Post yang akhirnya mampu menjadi penerbitan tersendiri dengan pemimpin umumnya adalah Drs. H. M. Hoesni Thamrin.

o. Bebas

Surat kabar yang merupakan anak perusahaan dari Banjarmasin Post Grup ini berbentuk tabloid terbit 16 halaman. Tabloid ini pertama terbit tanggal 19 Mei 1999 dengan Pemimpin Umumnya H. Gt. Rusdi Effendi AR.

p. Metro Banjar

Penerbitan Metro Banjar oleh Banjarmasin Post Grup dengan PT. Media Cahya Media Aditama terbit sejak tahun 1999. Metro Banjar adalah harian yang berita-beritanya banyak mengungkap kriminalitas pada halaman pertamanya. Terbit 12 halaman dengan gaya berita dan penampilan banyak memuat foto-foto sebagai penunjang berita yang diturunkannya.

q. Barito Post

Surat kabar ini diterbitkan oleh PT Bahtera Grafika Pers dengan Pemimpin Umumnya H. Guntur Prawira, SE. Barito Post adalah surat kabar harian terbit 12 halaman sejak tahun 1988.

r. Radar Banjar

Radar Banjar adalah surat kabar harian yang sebelumnya merupakan bagian dari Jawa Pos sebuah surat kabar yang terbit di Surabaya. Sejak tahun 2001 terbit berdiri sendiri sebagai surat kabar harian yang beredar di Kalimantan Selatan dan dicetak pada PT. Duta Banjar. Sebagai Direktur utamanya adalah H. Zainal Muttaqien dan pemimpin Redaksi Erwin Dede

serta Kepala Biro Banjarmasin H. Asmuni. Harian Radar Banjar ini setiap hari terbit 16 halaman dan merupakan grup penerbitan surat kabar Jawa Pos.

2. Pemilihan Umum sebagai Simbol Dominasi Orde Baru terhadap politik hingga Pemuda Pejuang Kalimantan Selatan

Ketika Jenderal Soeharto diangkat oleh MPRS menjadi pejabat Presiden menggantikan Soekarno dalam Sidang Istimewa MPRS 1967, pemilu tidak diselenggarakan sebagai legitimasi kekuasaan transisi. Ketetapan MPRS XI Tahun 1966 yang mengamanatkan agar Pemilu bisa diselenggarakan dalam tahun 1968, kemudian diubah lagi pada SI MPR 1967, kemudian Jenderal Soeharto mengubahnya lagi dengan menetapkan bahwa Pemilu akan diselenggarakan dalam tahun 1971. Sebagai pejabat presiden, Soeharto tetap menggunakan MPRS dan DPR-GR yang dibentuk pada masa Presiden Soekarno, namun telah dilakukan pembersihan lembaga tertinggi dan tinggi negara tersebut dari sejumlah anggota yang dianggap berbau Orde Lama.

Pemilu kedua di Indonesia akhirnya diselenggarakan tanggal 5 Juli 1971, yang berarti setelah 4 tahun Soeharto berada di kursi kepresidenan. Pada waktu itu ketentuan tentang kepartaian (tanpa UU) kurang lebih sama dengan yang diterapkan Presiden Soekarno. UU yang diadakan adalah UU tentang Pemilu dan susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD. Menjelang Pemilu 1971, pemerintah bersama DPR GR menyelesaikan UU No. 15 Tahun 1969 tentang Pemilu dan UU No. 16 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, DPR dan DPRD. Penyelesaian UU itu sendiri memakan waktu hampir tiga tahun. Pembentukan Undang-undang ini dimaksudkan untuk melaksanakan kedaulatan rakyat yang terbentuk berdasarkan pemilihan umum.

Hal yang sangat signifikan yang berbeda dengan Pemilu 1955 adalah bahwa para pejabat negara pada Pemilu 1971 diharuskan bersikap netral. Sedangkan pada Pemilu 1955 pejabat

negara, termasuk perdana menteri yang berasal dari partai bisa ikut menjadi calon partai secara formal. Tetapi pada prakteknya pada Pemilu 1971 para pejabat pemerintah berpihak kepada salah satu peserta Pemilu, yaitu Golongan Karya (Golkar). Jadi sesungguhnya pemerintah pun merekayasa ketentuan-ketentuan yang menguntungkan Golkar seperti menetapkan seluruh pegawai negeri sipil harus menyalurkan aspirasinya kepada salah satu peserta pemilu itu.

Dalam hubungannya dengan pembagian kursi, cara pembagian yang digunakan dalam Pemilu 1971 berbeda dengan Pemilu 1955. Dalam Pemilu 1971, yang menggunakan UU No. 15 Tahun 1969 sebagai dasar, semua kursi terbagi habis di setiap daerah pemilihan. Cara ini ternyata mampu menjadi mekanisme tidak langsung untuk mengurangi jumlah partai yang meraih kursi dibandingkan penggunaan sistem kombinasi. Tetapi, kelemahannya sistem demikian lebih banyak menyebabkan suara partai terbangung percuma.²⁶⁶

Memasuki tahun 1971 bertepatan dengan mulai retaknya hubungan antara mahasiswa dan pemerintah, sehingga momentum pemilihan umum beberapa aktivis mahasiswa seperti Arief Budiman dan kawan-kawan menginisiasi gerakan “golongan putih” atau biasa disingkat Golput.²⁶⁷ Inisiasi gerakan golput akibat kekecewaan mahasiswa terhadap harapan-harapan yang tidak terpenuhi oleh kinerja pemerintahan Soeharto. Kondisi politik yang terjadi selama hampir 4 tahun Soeharto menjabat sebelum penyelenggaraan pemilu, kondisi politik Indonesia ditandai dengan semakin bercokolnya modal asing serta dimotori oleh sistem pemerintahan militerisme, hingga manipulasi terhadap sistem dan aturan pemilu agar Golkar mampu meraup suara terbesar di Pemilu 1971.

Di Kalimantan Selatan, pergerakan pemuda masih terkesan sunyi senyap bahkan para pemuda pejuang angkatan '66 turut menjadi bagian penikmat keuntungan dari rezim Orde

²⁶⁶ *Sejarah KPU*. (n.d.). Retrieved from Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan: <http://kalsel.kpu.go.id/sejarah-kpu.html>

²⁶⁷ Husin, L. H. *Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan*. (Yogyakarta: Polgov, 2014).

Baru. Para mahasiswa pun turut kembali ke ranah akademik dan terbuai dengan hegemoni stabilisasi politik oleh Orde Baru pada masa itu.

Secara politik, sejarah mencatat bahwa Kalimantan Selatan merupakan basis utama Nahdlatul Ulama (NU) dan Masyumi. Penilaian tersebut dapat dilihat dari perolehan suara yang diperoleh pada pemilu 1955, dimana NU mendapatkan 380.874 suara atau 48,6 persen, dan Masyumi memperoleh 252.296 suara atau 31,9 persen dari total 10 partai terbesar di Indonesia yang pada waktu itu berlaga.²⁶⁸ Pada Pemilu tahun 1971 Golkar di Kalimantan Selatan meraih suara mayoritas dan untuk wakil di DPR/MPR, Golkar memperoleh 7 kursi, Partai NU 2 kursi dan Parmusi 1 kursi dari 10 kursi DPR/MPR yang dijatahkan untuk daerah Kalimantan Selatan. Untuk Pemilu tahun 1977 Golkar di Kalimantan Selatan mengalami penurunan suara, sehingga kedudukan anggota DPR/MPR hanya 5 kursi, sedangkan 5 kursi lainnya diwakili oleh Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Demokrasi Indonesia (PDI) tidak terwakili. Sepanjang sejarah Orde Baru Pemilu tahun 1977 bagi Golkar merupakan yang terendah perolehan kursi di DPR.

Afiliasi politik masyarakat Kalimantan Selatan dengan ideologi Islam yang cukup kental secara langsung memilih PPP sebagai pemenang pemilu. Sedangkan pada pemilu 1982 Golkar berhasil merebut suara PPP untuk wilayah Kalimantan Selatan secara keseluruhan, meskipun khusus Kota Banjarmasin PPP masih tetap unggul.²⁶⁹

Pemilu 1982 Golkar mendapatkan 6 kursi dan PPP 4 kursi, PDI tidak terwakili, selanjutnya Pemilu 1987 Golkar kembali menang mutlak dengan mendapatkan 7 kursi, PPP 2 kursi dan PDI berhasil memperoleh 1 kursi. Pemilu 1992 Golkar masih bisa mempertahankan hasil perolehan kursi yaitu sama dengan

²⁶⁸ Feith, H. (2006). *The Decline of Constitutional Democracy in Indonesia*. Equinox publishing

²⁶⁹ Dr. R. Siti Zuhro, M. *Studi Relasi Birokrasi, Politik Birokrasi*, Politik dan Masyarakat di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan. (Jakarta, 2001).

hasil Pemilu 1987 sebanyak 7 kursi, PPP 2 kursi, dan PDI 1 kursi.

Namun pada pemilu selanjutnya sebelum kekuasaan Orde Baru berakhir, yaitu pada tahun 1987, 1992, dan 1997, Golkar masih memegang suara tertinggi di Kalimantan Selatan. Pemilu tahun 1997 adalah Pemilu terakhir pada pemerintahan Orde Baru dan pada kenyataannya Golkar masih bisa memperoleh suara terbanyak. Namun hasil Pemilu 1997 yang menempatkan para wakil partai politik PPP, PDI dan Golkar tidak sampai 5 tahun masa tugasnya karena jatuhnya Pemerintahan Orde Baru yang ditandai dengan mundurnya Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998. Sesuai dengan gerakan reformasi yang terjadi.

Pemilu diadakan kembali pada tahun 1999 yang diikuti oleh banyak partai yang terdaftar di Kalimantan Selatan. Partai Politik yang memperoleh kursi di DPR Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota hasil Pemilu 1999 tidak ada yang mendominasi atau kurang dari 50%. Namun untuk tingkat Kalimantan Selatan ada 5 partai besar yaitu Golkar, PDIP, PPP, PKB dan PAN.

3. Pembinaan dan Kontrol Sosial Politik Kaum Muda di Kalimantan Selatan

Pada awal menuju pelaksanaan Orde Baru ini pernah dilakukan berbagai diskusi, seminar dan pembahasan mengenai cara-cara memperbaiki kehidupan kenegaraan. Diantara berbagai diskusi dan seminar tersebut yang cukup tajam dan mengenai permasalahan yang diangkat oleh Universitas Indonesia bekerjasama dengan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) dan Kesatuan Aksi Sarjana Indonesia (KASI) dalam simposium yang bertajuk “Simposium Kebangkitan Semangat 66 Menjelajah Trace Baru”. Permasalahan yang dibahas dalam simposium meliputi bidang politik dalam negeri, bidang politik luar negeri, bidang ekonomi dan bidang sosial budaya.

Berkaitan dengan bidang politik luar negeri yang menyangkut tema Indonesia Negara Hukum disimpulkan bahwa pada

masa pemerintahan Orde Lama banyak terjadi penyimpangan terhadap asas-asas serta norma-norma yang berlaku dalam negara hukum. Peraturan hukum dan pelaksanaannya tidak mencerminkan jiwa Pancasila serta tidak sesuai dengan UUD 1945. Misalnya menurut UUD 1945, Mahkamah Agung melakukan kekuasaan kehakiman yang merdeka, artinya terlepas dari kekuasaan dan pengaruh pemerintah, tetapi dalam masa Orde Lama, Ketua Mahkamah Agung diangkat sebagai Menteri Negara yang berarti bukan lagi Mahkamah Agung sebagai lembaga yudikatif diintegrasikan dalam lembaga eksekutif, tetapi bahkan Ketua Mahkamah Agung dalam kedudukannya sebagai menteri tunduk kepada Presiden.

Berdasarkan realitas politik yang terjadi, maka persoalan kembali kepada pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen tidaklah menjadi perdebatan politik, dengan perkataan lain semua kekuatan politik Orde Baru menerimanya. Salah satu indikator keberhasilan pelaksanaan Pancasila dan UUD 1945 secara murni dan konsekuen itu adalah sampai sejauh mana kedaulatan rakyat dapat terwujud dalam kehidupan kebangsaan dan kenegaraan di Republik Indonesia. Penjabaran atas cita-cita kedaulatan rakyat diukur dengan sejauh mana partisipasi rakyat terhadap kehidupan kebangsaan dan kenegaraan.



Gambar 5.7. Birokrat muda Pemerintah Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan lulusan universitas ternama di Pulau Jawa. (Sumber: koleksi M. Suriansyah Ideham).

Menyiasati situasi dan kondisi yang masih dalam tahap pemulihan berbagai sektor kehidupan masyarakat, perlu disiapkan langkah antisipatif. Apalagi ketika menjelang Pemilu tahun 1971 yang merupakan perjuangan menegakkan dan meneruskan cita-cita Orde Baru harus ditumbuhkan persatuan dan kesatuan bangsa, kesadaran nasional serta menghilangkan sifat fanatik yang dapat merugikan tujuan yang ingin dicapai.

Dari segi pembinaan politik dan keamanan untuk dapat menunjang pemerintahan Orde Baru dilakukan melalui penerbitan di segala bidang kehidupan, memelihara stabilitas keamanan, politik dan stabilitas nasional. Mengusahakan untuk menggalang kehidupan Parpol dalam rangka utuhnya persatuan bangsa dan kesadaran nasional. Memelihara kerja sama dengan kekuatan-kekuatan pendukung Orde Baru dalam menyukseskan Pemilu 1971, meningkatkan kewaspadaan terhadap sisa-sisa G 30 S/PKI. Usaha-usaha lainnya tertuju pada bidang pembangunan, terutama peningkatan produksi, pangan agar lebih berhasil dan pembinaan masyarakat untuk berpartisipasi kepada pembangunan serta menyukseskan Pemilu 1971.

Begitu pula usaha pembinaan ideologi dan kesatuan bangsa dengan menanamkan jiwa Pancasila, menumbuhkan kesadaran berkonstitusi sesuai UUD 1945 melalui kegiatan penerangan, baik secara umum maupun khusus, dengan sarana media massa serta sarana komunikasi lainnya sesuai situasi, kondisi, kemampuan dan kesempatan yang ada dengan sasaran masyarakat luas. Cara lainnya adalah melalui ceramah, santi aji di lingkungan pegawai, keluarga pegawai, mahasiswa, pelajar, organisasi fungsional yang materinya antara lain bagaimana menumbuhkan kesadaran nasional atas dasar Pancasila dan UUD 1945 dan kesatuan bangsa, toleransi sesama umat beragama, menindak aliran-aliran kepercayaan yang menyesatkan pengikut-pengikutnya. Disamping itu dilakukan pula

penggalangan kesadaran berbangsa bagi WNI keturunan Cina dalam program pembaruan seperti pergantian nama dan lain sebagainya.

Pada dasarnya kegiatan pembinaan sosial politik yang dilakukan pada awal Orde Baru dan Pemilu 1971 dapat terlaksana dengan baik. Kemudian berdasarkan hasil Pemilu 1971 ternyata tidak semua partai peserta Pemilu memperoleh suara yang memadai sehingga tidak terwakli di lembaga legislatif. Kenyataan ini tidak hanya terjadi di Kalimantan Selatan tetapi hampir merata pada semua daerah di Indonesia. Kenyataan ini telah pula menyulitkan Pemerintahan Daerah dalam melakukan pembinaan, sehingga langkah Pemerintah Pusat untuk memfusikan partai politik menjadi hanya 2 partai politik dan 1 Golongan Karya cukup meringankan beban pembinaan di daerah.

Usaha memfusikan partai-partai politik yang berlatar belakang Islam menjadi PPP dan partai bercorak nasional melebur dalam PDI pada tahun 1974 dapat dikatakan telah terlaksana. Peleburan dan penggabungan partai ini dikuatkan dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 1975 tentang Kepartaian dan Golongan Karya. Meskipun demikian PDI mengalami perpecahan dan terjadi dualisme kepemimpinan Isnaeni dan Gusti Sugian Noor sebagai pimpinan PDI yang mengakui kepemimpinan Sanusi Hardjadinata.

Dalam pembinaan politik kepada 2 partai politik dan 1 Golongan Karya menekankan pada terlaksananya Undang-undang No. 3 Tahun 1975 bahwa azas Pancasila dan UUD 1945 harus menjadi pegangan, bukan lagi pada identitas partai yang lama, baik yang bercirikan Islam maupun yang berazaskan Demokrasi Indonesia.

4. Degradasi Semangat KAMI dan Eksponen'66

Pasca perjuangan eksponen'66, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia baik di Pusat maupun di Kalimantan Selatan hanya berorientasi pada pembubaran PKI dan tidak berlanjut pada tujuan jangka panjang. Para tokoh-tokoh dari pejuang ang-

katan'66 tidak lagi bersatu dan para tokoh-tokoh pemuda seperti Djok Mentaya, Anang Adenansi, H. Alwi, Djohar Hamid, H.M. Taufik Effendi, Yustan Azidin, Gt. Rusdi Effendi dan lain-lainnya telah terpecah dan berafiliasi pada berbagai kelompok kepentingan pemerintah²⁷⁰. Mereka angkatan'66 sadar bahwa dirinya sudah tidak muda lagi sehingga terjadi perubahan orientasi dimana sebagian dari mereka menjadi jurnalis sekaligus pendiri dari berbagai media cetak seperti Banjarmasin Post, Kalimantan Post, dan Dinamika Berita serta sebagian lagi aktif di partai politik baik PDIP, PPP, bahkan Golkar,²⁷¹ dan berbagai lembaga swadaya masyarakat dalam menjamin terwujudnya pemerintahan Orde Baru yang efektif dan kuat.

Degradasi pergerakan pemuda di Kalimantan Selatan merupakan hasil dari kombinasi beberapa faktor yaitu kegagalan Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia (KAMI) sebagai wadah generasi muda dan mahasiswa pasca Orde Lama, keretakan antar tokoh pemuda di dalam Tubuh KAMI Kalsel antara Anang Adenansi, Djok Mentaya, dan H. Alwi, serta perubahan orientasi pada para tokoh pemuda Kalimantan Selatan yang semakin pragmatis dan rasional dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara. Kesatuan dan persatuan pemuda di Kalimantan Selatan dalam memperjuangkan kepentingan Rakyat juga terus memudar dan semakin melemah akibat kehilangan semangat dan sosok tokoh pemersatu dalam gerakan kepemudaan serta ditambah dengan tekanan-tekanan politik dari rezim Orde Baru membuat pergerakan semakin surut dan para mahasiswa kembali ke akar primordialnya di ranah universitas dan akademik.

Pada masa itu dikenal slogan "ABG": ABRI, Birokrasi, dan Golkar yang bertujuan sebagai kekuatan pendukung rezim Orde Baru. Pemerintah Orde Baru melakukan berbagai rekayasa politik, untuk mempertahankan dan memapankan kekuasaannya melalui bentuk perundang-undangan, seperti undang-

²⁷⁰ Nining Nadya Rukmana Sari, *Ekonomi Politik Media Cetak Di Kalimantan Selatan* (Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan Vol. 20 No.2 Oktober 2016), hlm. 121-142.

²⁷¹ Wawancara dengan Setia Budi, tanggal 29 September 2018 di Fisip ULM.

undang yang mengatur tentang pemilu, partai politik, dan MPR/DPR/DPRD, kemudian dihapuskannya Dewan Mahasiswa dan diterapkannya kebijakan NKK/BKK di seluruh Indonesia.

Konsep Normalisasi Kehidupan Kampus dan Badan Koordinasi Kemahasiswaan (NKK/BKK) oleh pemerintah dilaksanakan berdasarkan SK No.0156/U/1978 bertujuan untuk membatasi ruang gerak mahasiswa dalam politik. Konsep ini mencoba mengarahkan mahasiswa hanya menuju pada jalur kegiatan akademik saja. Tidak hanya itu rezim Orde Baru juga melakukan pembekuan atas lembaga Dewan Mahasiswa melalui pembentukan struktur keorganisasian baru yang disebut BKK dan dilaksanakan berdasarkan SK menteri P&K No.037/ U/1979. Aturan tersebut secara implisif melarang dihidupkannya kembali Dewan Mahasiswa, dan hanya mengizinkan pembentukan organisasi mahasiswa tingkat fakultas (Senat Mahasiswa Fakultas-SMF) dan Badan Perwakilan Mahasiswa Fakultas (BPMF). SK menteri ini telah melemahkan peran organisasi kemahasiswaan dan memperkuat peran Rektor dan Pembantu Rektor sebagai kontrol untuk menentukan kegiatan mahasiswa, yang dijustifikasi sebagai wujud tanggung jawab pembentukan, pengarahannya, dan pengembangan lembaga kemahasiswaan.²⁷²

Konsep NKK/BKK melahirkan “stempel” organisasi intra (internal) dan ekstra (eksternal) kampus. Pembagian organisasi Intra dan Ekstra gunanya untuk memecah konsentrasi gerakan mahasiswa dengan cara menyibukkan mahasiswa dengan aktivitas yang tidak bersentuhan dengan rakyat. Sehingga peran pemuda dan mahasiswa telah dilumpuhkan secara struktural oleh rezim Orde Baru agar tidak membahayakan kepemimpinan Soeharto pada masa itu.

2. Komite Nasional Pemuda Indonesia: Tentakel Orde Baru

²⁷² Rifa Nadia Nurfuadah, “Ketika Mahasiswa Dibungkam Normalisasi Kampus”, diakses dari: <https://news.okezone.com/read/2010/08/17/373/363782/ketika-mahasiswa-dibungkam-normalisasi-kampus>, pada tanggal 06 Oktober 2018 pukul 15.00.

Pada 23 Juli 1973, Komite Nasional Pemuda Indonesia dibentuk dan dideklarasikan oleh David Napitulu sebagai ketua umum pertama di KNPI Pusat. KNPI merupakan wadah kepemudaan tingkat nasional yang digagas oleh para tokoh yang berada di Golkar seperti Median Sirait, Abdul Gafur, serta David Napitulu dan dirundingkan bersama para ketua organisasi seperti Ketua GMNI, HMI, PMII, PMKRI, GMKI, GPM, GP Anshor dan lain-lain.²⁷³ KNPI merupakan instrumen dari strategi Orde Baru dalam rangka memperkokoh dan memperkuat pemerintahan Soeharto. Secara tidak langsung bahwa KNPI dibentuk untuk menjadi pengawal kebijakan pemerintah Orde Baru di bidang kepemudaan dan kemahasiswaan.



Gambar 5.8. Sebagian Panitia dan Peserta Musda Pertama KNPI di Banjarmasin (Sumber: koleksi Redy Montana).

KNPI di Kalimantan Selatan dibentuk sejak tahun 1974 dan melaksanakan musyawarah Daerah (Musda) pertamanya di Balai pertemuan Lambung Mangkurat di Kota Banjarmasin (sekarang menjadi Masjid Raya Sabilal Muhtadin). Sebelumnya

²⁷³ Masad Masrur, "Sejarah Singkat Komite Nasional Pemuda Indonesia", diakses dari TribunManado.id: <http://manado.tribunnews.com/2013/07/23/sejarah-singkat-komite-nasional-pemuda-indonesia>, pada tanggal 20 September 2018 pukul 23.00.

para pemuda dari beragam organisasi ekstra kampus sering berkumpul dan berdiskusi di Jalan Lambung Mangkurat dan terus dirawat hingga menjadi tradisi dari para mahasiswa dan pemuda dari Kalimantan selatan. Bahkan setelah KNPI berdiri dan memiliki sekretariat bersama di Jalan Nagasari (dekat dengan pasar Kujajing) para pemuda masih sering berkumpul dan melakukan aktivitas di daerah Jalan Lambung Mangkurat.

274



Gambar 5.9. Peserta Musda Pertama KNPI di Banjarmasin menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya. (Sumber: koleksi Redy Montana).

Pada 1975 tepatnya tanggal 6 hingga 10 Mei, Musyawarah daerah pertama oleh KNPI Kalsel di selenggarakan. Musda tersebut dihadiri oleh berbagai pemuda dari beragam latar belakang seperti Syamsul Mu'arif, Gusti Machfudz, H. Ahmad Makkie, Panglima Supardjo, serta beberapa perwakilan dari instansi pemerintahan. Hasil Musda tersebut menghasilkan

²⁷⁴ Wawancara dengan Redy Montana, 07 September 2018 pukul 08.00 di Banjarmasin.

nama Anang Adenansi sebagai Ketua Umum pertama dari KNPI Kalimantan selatan. Anang Adenansi merupakan aktivis eksponen'66 dan wartawan di Kalimantan selatan.



Gambar 5.10. Anang Adenansi Terpilih sebagai Ketua Umum dalam Musda Pertama KNPI 6-10 Mei 1975. (Sumber: koleksi Redy Montana).

Pada masa Orde Baru, Anang Adenansi kembali hadir sebagai sosok pemuda Kalimantan Selatan yang kritis terhadap pemerintahan Soeharto. Berbeda saat menjadi eksponen'66 yang bergerak bersatu dengan seluruh pemuda namun masa Orde Baru, Anang Adenansi berjuang sebagai individu dalam melawan kebijakan-kebijakan pada masa pemerintahan Soeharto. Soeharto menciptakan rasa takut dan pengekanan di masyarakat, namun tidak menyurutkan nyali Anang Adenansi dalam melakukan kritik serta perlawanan terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah Orde Baru yang dinilainya tidak pro terhadap kepentingan rakyat. Demonstrasi tunggal dilakukan oleh Anang Adenansi ke Kotamadya Banjarmasin terkait kebijakan KTP pada tahun 1975. Dengan lantanganya dia bersuara serta mengenakan baju khas angkatan 66 mencoba untuk menentang kebijakan Balai Kota. Tidak hanya itu Anang Adenansi juga turut memperjuangkan nasib para mantan pedagang Pasar Gelora yang hendak dipindah ke Pusat Perbelanjaan Pangeran

Antasari (pasar Sentra Antasari) di Jalan Jati (kini Jalan Pangeran Antasari). Bahkan tanpa gentar berhadapan dengan Soeharto akibat komentar pedasnya pada gaya otoriter Soeharto, kekejaman aksi penembakan misterius (petrus), alih fungsi hutan Kalimantan Selatan hingga pungutan 10% proyek pemerintah oleh Bu Tien dan kepemimpinan militer di jabatan sipil.²⁷⁵ Namun, keberanian Anang Adenansi dalam mengkritik pemerintah tidak mampu membangkitkan semangat perjuangan dan keberanian bagi para pemuda bahkan pada organisasi-organisasi yang dipimpinnya terutama KNPI Kalsel. Strategi pembekuan gerakan serta pembentukan KNPI sebagai senjata politik Orde Baru telah berhasil melakukan kontrol terhadap organisasi-organisasi pemuda dan mahasiswa di Kalimantan Selatan. Eksistensi KNPI sebagai wadah pemersatu pemuda berlangsung cukup lama sejak Orde Baru. KNPI bukanlah representasi organisasi kepemudaan yang kritis yang hadir untuk memberikan tanggapan atas disparitas ekonomi, budaya, sosial dan politik, melainkan menjadi garda depan yang ikut serta melanggengkan rezim terutama kekuasaan Soeharto.

E. Reformasi Sunyi: Pemuda Kalimantan Selatan Berduka

1. Demonstrasi Pemuda dan Mahasiswa

Pasca krisis moneter pada awal Juli 1997 yang mengguncang nilai tukar Rupiah hingga Rp. 17.000/US\$ pada Januari 1998. Krisis yang semakin dalam mengakibatkan ketegangan-ketegangan sosial di masyarakat seperti kerusuhan anti cina di beberapa kota. Selain itu, di kalangan kampus-kampus besar seperti ITB, UI, dan berbagai kampus lainnya lahir gerakan mahasiswa yang mengecam sosok Presiden Soeharto. Demonstrasi-demonstrasi mahasiswa terus menyebar di seluruh Indonesia dan garis besar tuntutan mahasiswa yaitu tuntutan penurunan harga sembako (Sembilan bahan pokok), peng-

²⁷⁵ Didi G. Sanusi, "Jejak Rekam Anang Adenansi di Mata Putra Sulungnya, Anang Rosadi", diakses dari JejakRekam.com: <http://jejakrekam.com/2018/04/25/jejak-rekam-anang-adenansi-di-mata-putra-sulungnya-anang-rosadi/>, pada tanggal 04 Oktober 2018 pukul 22.00.

hapusan monopoli, kolusi, korupsi, dan nepotisme (KKN) serta suksesi kepemimpinan nasional yaitu Presiden.²⁷⁶

Ditengah maraknya aksi protes mahasiswa dan komponen masyarakat di berbagai daerah, namun tidak seperti di Kalimantan Selatan terutama di Kota Banjarmasin. Tiada pergerakan pemuda maupun mahasiswa yang melakukan protes keras terhadap rezim Soeharto dan krisis moneter pada masa itu. Hal ini diduga akibat dari rasa trauma yang belum sembuh pasca peristiwa “Jumat Kelabu” setahun yang lalu tepat 23 Mei 1997. Pada hari itu Banjarmasin dilanda kerusuhan massal, menyusul kampanye partai golkar pada hari terakhir putaran kampanye menjelang pemilu tahun 1997. Peristiwa tersebut merupakan salah satu kerusuhan dengan korban jiwa yang terbesar sepanjang sejarah rezim Orde Baru dan terbesar di Indonesia pada waktu itu.

Kerusuhan tersebut memakan korban meninggal mencapai 320 orang, 199 korban yang dinyatakan hilang, serta masih banyak yang menderita luka parah.²⁷⁷ Selain itu kerugian materi juga tidak kalah besar, gedung-gedung pemerintahan seperti gedung PLN, Kantor Kanwil Depsos Kalimantan Selatan, Kantor PDAM, Kantor Pegadaian, Bank BRI, Bank Lippo, Bank Danamon, Panti, Gereja Protestan HKBP, Sekolah, Gereja Katolik, Hotel, Swalayan, Apotek, Rumah Panti Jompo, pusat perbelanjaan dan hiburan, serta mobil dan motor yang dibakar dan hancur dirusak massa.

Ada memori yang sangat pahit dan trauma mendalam bagi sebagian besar masyarakat Banjarmasin khususnya terhadap kerusuhan tersebut. Para pemuda memiliki tanggung jawab dalam melakukan resolusi konflik serta menyembuhkan trauma di masyarakat sehingga aksi protes keras dan demonstrasi ke jalan secara drastis menurun bahkan hampir senyap dari ruang publik di Kalimantan Selatan.

²⁷⁶ Lilik Eka Aprilia dkk., “Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998”, Artikel Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember 2014.

²⁷⁷ Husnul Khotimah, Collective Memory “Jum’at Kelabu” di Banjarmasin (Perspektif Resolusi Konflik Atas Peristiwa 23 May 1997), (Jurnal Al-Banjari, Vol. 16, No.2, Juli-Desember 2017), hlm. 75-116.

Hingga pada titik puncak perjuangan para mahasiswa dan masyarakat di berbagai belahan negeri Indonesia tanggal 21 Mei 1998 Presiden Soeharto menyatakan pengunduran diri. Menurut beberapa narasumber bahwa pada hari dimana Soeharto membacakan pernyataan pengunduran diri, aksi turun ke jalan di Kalimantan Selatan dimulai dari Universitas Lambung Mangkurat kemudian menyebar untuk merayakan lengsernya rezim Orde Baru dan lahirnya Reformasi.²⁷⁸

Aksi turun ke jalan di Kalimantan Selatan bermula dari mahasiswa dan bersama beberapa staf akademis di Universitas Lambung Mangkurat yang kemudian menyebar ke berbagai kampus lainnya di Kalimantan Selatan. Aksi ini tentu tidak seheroik pada masa perjuangan mahasiswa di tahun 1966 yang berani melawan para militer dan penguasa masa itu, aksi ini hanyalah bagian dari euphoria dalam merayakan turunnya Presiden Soeharto yang berartinya berakhirnya rezim Orde Baru pada masa itu. Menurut Gusti Farid Perdana (Ketua Umum DPD KNPI Kalimantan Selatan periode 1998-2001) “pada tahun 1998, hampir seluruh Organisasi Kepemudaan (OKP) di Kalimantan Selatan yang berada di bawah naungan KNPI mengeluarkan pernyataan mendukung pergantian Orde Baru dan menuntut Reformasi di Indonesia”.

Para mahasiswa berdemo di depan gedung DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Selaku anggota KNPI pada masa itu, melihat reaksi masyarakat yang begitu bergembira dan merayakan melalui demonstrasi di jalan maka mau tidak mau KNPI turut serta dalam mendukung masyarakat untuk turun ke jalan dan melakukan demonstrasi yang ditujukan pada Presiden Soeharto.²⁷⁹ Namun disayangkan hingga sekarang Pergerakan pemuda di Kalimantan Selatan pada masa Reformasi dikritik sejumlah pihak belum jelas ruh perjuangannya pada masa itu.

²⁷⁸ Wawancara dengan Setia Budi, tanggal 01 Oktober 2018 di Fisip ULM.

²⁷⁹ Wawancara dengan Gusti Perdana Kusuma, tanggal 16 Agustus 2018 di Banjarmasin.

2. Jatuhnya Pemerintahan Orde Baru

Pada dasarnya dalam sebuah negara kemungkinan untuk mencapai kemajuan atau sebaliknya suatu ketika mengalami kemunduran dan bahkan kehancuran bisa saja terjadi. Begitu juga yang dialami pemerintahan negara Indonesia ketika masa Orde Lama beralih ke Orde Baru dan kemudian masuk jaman reformasi telah banyak pengalaman yang dialami dan dirasakan. Muara dari mengapa terjadi peralihan tersebut hampir sama, yaitu munculnya ketidakpuasan rakyat terhadap pemerintah yang berkuasa.

Kehadiran Orde Baru pada awalnya mendapat perhatian yang positif dari masyarakat. Setelah Tritura secara relatif dapat dipenuhi dan pembangunan bisa dilaksanakan tahap demi tahap, rakyat merasakan ada ketenangan dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Namun bersamaan dengan pesatnya pembangunan telah menimbulkan penyimpangan-penyimpangan dalam pelaksanaannya.

Dalam bidang pemerintahan yang sebelumnya diyakini berjalan dengan baik lama kelamaan mulai terungkap adanya kebobrokan para pelaksananya yang lazim disebut KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) yang dituduhkan melekat hampir pada setiap komponen pemerintah. Hanya saja karena kuatnya pemerintahan Orde Baru dan untuk mengikis habis kasus KKN tidaklah mudah karena harus disertai bukti yang kuat. Penghancuran Orde Baru lebih banyak dilakukan dengan opini yang dilansir media massa.

Menandai jatuhnya pemerintahan Orde Baru diawali oleh adanya krisis moneter yang berakibat pada merosotnya nilai rupiah terhadap mata uang dolar. Keadaan ini diperburuk pula ketika menjelang Pemilu 1997 dimana-mana terjadi kekacauan. Di Jakarta banyak kerusuhan yang bernuansa politik hingga suasana di daerah-daerah terbawa arus yang mencekam. Kerusuhan terjadi Ciputat, Kebayoran Lama, Tangerang, Bekasi, Bangil dan Banjarmasin.²⁸⁰

²⁸⁰ Kompas, 24 Mei 1997.

Kerusuhan di Banjarmasin terjadi pada tanggal 23 Mei 1997 yang dikenal sebagai Tragedi Jumat Kelabu, karena menimbulkan ratusan jiwa manusia, harta benda serta bangunan gedung dan perumahan telah dibakar habis oleh amukan massa yang sedang kalap.

Kejadian yang sama sekali tidak pernah ada yang menduga tersebut bermula dengan kampanye putaran terakhir bagi partai Golkar yang jatuh pada hari Jum'at. Menurut rencana kegiatan kampanye Partai Golkar di Banjarmasin dilaksanakan besar-besaran dan dihadiri Menteri Sekretaris Kabinet Drs. H. Saadillah Mursyid, MPA dan K.H. Hasan Basri, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat.

Kerusuhan berawal ketika massa Golkar berpawai menuju tempat kampanye di lapangan di Jalan Kamboja melewati jalan di depan Masjid Noor yang biasa ditutup karena digunakan oleh sebagian jemaah shalat Jumat yang berada di luar Masjid. Raungan suara sepeda motor yang melintasi jalan di saat jemaah belum selesai melaksanakan shalat Jumat memicu kemarahan warga. Warga yang merasa dilecehkan serta merta menyerbu dan mengejar yang berpawai, membubarkan mereka yang berkumpul di lapangan Kamboja dan membakar atribut Golkar. Peserta kampanye ---tidak peduli laki-laki atau perempuan--- yang mengenakan baju atau kaos kuning, dipaksa melepaskan pakaiannya dibawah ancaman senjata tajam, seperti clurit, golok dan sebagainya.

Setelah memporak-porandakan peserta kampanye, massa yang brutal dan tak terkendalai mengalihkan sasarannya kepada bangunan kantor, rumah ibadah, toko, tempat hiburan, hotel dan sebagainya. Mereka melempari kaca-kaca, membakar mobil dan bangunan serta menjarah isi toko dan supermarket. Kejadian berlangsung dari pukul 13.00 sampai dengan pukul 20.00 wita, dan selama itu pihak keamanan seakan tak berdaya.

Kerusuhan Jumat Kelabu itu menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Kerugian dari segi harta benda tercatat : mobil (21 terbakar, 12 rusak), sepeda motor (60 terbakar, 4 rusak), kantor, instansi pemerintah, bank 12 terbakar/rusak, pertokoan dan

tempat hiburan 10 terbakar/rusak, tempat ibadah 5 terbakar/ rusak, dan beberapa sekolah, panti jombo serta rumah penduduk terbakar, sehingga sekitar 400 kepala keluarga kehilangan tempat berteduh dan sekitar 4.000 karyawan kehilangan pekerjaan. Disamping itu, korban jiwa juga tidak sedikit. Tercatat yang meninggal (135 orang), hilang (164 orang), luka-luka (lebih 100 orang). Belum termasuk mereka yang ditahan sebanyak 304 orang untuk menunggu proses selanjutnya.²⁸¹ Banyaknya selisih antara jumlah korban yang meninggal atau korban yang dilaporkan hilang itu terjadi karena korban yang meninggal sebagian besar tidak dapat lagi dikenali karena hangus terbakar.²⁸²

Peristiwa 23 Mei 1997 ini sangat menggores perasaan masyarakat Kalimantan Selatan, karena sepanjang pemerintahan Orde Baru tidak pernah terjadi unjuk rasa yang anarkis apalagi sampai meminta korban jiwa manusia. Kejadian ini semakin melemahkan posisi pemerintahan Orde Baru, karena di beberapa daerah yang selama ini dinilai aman ternyata mengalami kejadian yang luar biasa. Musuh-musuh Orde Baru menjadikan peristiwa semacam kerusakan 23 Mei ini sebagai reaksi ketidakadilan yang dirasakan masyarakat selama ini. Kasus ini sampai sekarang tidak terungkap dengan jelas siapa pelaku yang bertanggung jawab.

Gejolak-gejolak yang terjadi di Ibu kota Jakarta menjelang kejatuhan pemerintahan Orde Baru diikuti dengan seksama oleh daerah-daerah termasuk Kalimantan Selatan. Spanduk-spanduk yang terbentang di jalanan dan depan Kampus Unlam mendukung gerakan yang dilancarkan komponen mahasiswa Jakarta agar Presiden RI Jenderal Besar Soeharto mengundurkan diri, karena dinilai sudah tidak layak lagi memimpin bangsa Indonesia yang sedang dilanda berbagai krisis.

Besarnya tekanan para demonstran, merebaknya kerusuhan, dan terbentuknya opini yang diciptakan pers yang sangat menyudutkan pemerintah Orde Baru, mengakibatkan Presiden Soeharto mengundurkan diri sebagai presiden pada tanggal 21

²⁸¹ Mutiara, No. 867, 3 –6 Juni 1997; Banjarmasin Post, 26 Mei 1997.

²⁸² Jawa Pos 28 Mei 1997; Kompas 31 Mei 1997.

Mei 1998, dan sejak itu tumbanglah Pemerintahan Orde Baru. Soeharto pun *“lengser ke prabon, mandeg pandito”*, dan bermulalah era Reformasi.

Setelah Presiden Soeharto pada tanggal 21 Mei 1998 menyatakan secara resmi mengundurkan diri sebagai Presiden RI maka di daerah-daerah mulai bergolak melancarkan tuntutan reformasi. Tuduhan-tuduhan KKN mulai dilancarkan kepada para pejabat di daerah seperti juga yang dilakukan di tingkat Nasional. Sasaran utama yang digugat adalah dugaan-dugaan KKN yang dilakukan pejabat-pejabat antara lain Gubernur dan Sekretaris Daerah.

Tuntutan reformasi terus bergulir beberapa dugaan KKN diungkap dengan gamblang dan terbuka sebagai ciri dari perjuangan gerakan reformasi. Keinginan untuk menjatuhkan pejabat publik yang sedang menjabat senantiasa dilancarkan melalui unjuk rasa dan pengungkapan data yang diduga dilakukan dengan KKN.

Tuduhan KKN yang ditujukan kepada para pejabat publik tersebut tidak dapat dibuktikan, sehingga di Kalimantan Selatan saat reformasi digulirkan belum ada yang sampai ke pengadilan. Hanya saja dari berbagai desakan yang terjadi nampaknya harus ada korban sebagai obat penenang masyarakat pengunjuk rasa. Dalam suasana hiruk pikuk dengan unjuk rasa dan tuduhan-tuduhan tersebut Sekretaris Daerah yang dijabat Drs. H. Ardansyah Fama mutasi ke Departemen Dalam Negeri Jakarta. Sekarang kasus KKN yang dituduhkan kepada Drs. H. Ardansyah Fama oleh Kejaksaan Tinggi Kalsel dinyatakan tidak terbukti dan selanjutnya kasusnya ditutup.

Gerakan reformasi yang terjadi di Kalimantan Selatan tidak sampai mengalami pergantian kepemimpinan di daerah. Hanya saja untuk menjadi Gubernur atau Bupati kedua kalinya atau dua periode sangat sulit karena perubahan politik. Demikian pula halnya dengan anggota ABRI yang menempati jabatan Bupati atau Walikota semakin berkurang dan sulit bisa diangkat kembali, berbeda dengan zaman Orde Baru berkuasa.

Dengan adanya fusi dari beberapa partai yang memiliki kesamaan perjuangan, kehidupan politik dirasakan sangat berbobot bahkan suasana panas terasa sekali menjelang Pemilu 1997. Bersatunya partai-partai yang bercirikan Islam ke dalam Partai Persatuan Pembangunan (PPP) sangat menunjang keberadaannya karena daerah Kalimantan Selatan merupakan mayoritas Islam. Sedangkan PDI karena adanya keretakan-keretakan yang tidak terselesaikan dengan baik, maka dalam perkembangan tidak begitu berpengaruh pada peta perpolitikan. Sementara Golkar dengan kemenangan mutlak pada tingkat provinsi pada Pemilu 1971 merasa sudah besar dan terlambat merangkul unsur-unsur ulama dalam usaha memenangkan Golkar pada Pemilu 1977. Pada beberapa daerah hasil Pemilu 1977 menunjukkan PPP unggul, sehingga untuk kursi DPR/MPR wakil Golkar dan PPP sama, yaitu masing-masing 5 kursi dan PDI tidak terwakili.

Sejak digulirkannya reformasi dan adanya perubahan dalam UU Partai Politik, maka di Kalimantan Selatan ada 35 partai politik yang terdaftar pada Badan Kesbanglinmas Provinsi Kalimantan Selatan. Partai-partai tersebut adalah :

1. Partai Golkar
2. PDI Perjuangan (PDIP)
3. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
4. Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)
5. Partai Amanat Nasional (PAN)
6. Partai Nahdlatul Umat
7. Partai Bulan Bintang (PBB)
8. Partai Keadilan
9. Partai Kesatuan
10. Partai Keadilan dan Persatuan
11. Partai Demokrasi Indonesia
12. Partai Umat Islam (PUI)
13. Partai Kebangkitan Umat
14. Partai Indonesia Baru
15. Partai SUNI
16. Partai Ikatan Pendukung Kemerdekaan Indonesia

17. Partai MKGR
18. Partai Nasional Indonesia (PNI)
19. PNI Massa Marhaen
20. Partai Masyumi Baru
21. Partai Republik
22. Partai Umat Muslimin Indonesia
23. Partai Nasional Demokrat
24. Partai Daulat Rakyat
25. Partai Bhinneka Tunggal Ika
26. Partai Kristen Nasional
27. PSII 1905
28. Partai Cinta Damai
29. Partai PILAR
30. Partai Murba
31. Partai PUDI
32. Partai Islam Demokrat
33. Partai Solidaritas Pekerja Seluruh Indonesia (PSPSI)
34. Partai Solidaritas Pekerja
35. Partai Rakyat Demokrat (PRD)

Selain partai-partai politik juga di kalangan pemuda dan mahasiswa meskipun memiliki KNPI sebagai Induk Organisasi namun tetap tumbuh organisasi kepemudaan yang memilih nama dan misinya sendiri sesuai tujuan pendiriannya. Demikian pula halnya organisasi kemahasiswaan walaupun ada induk organisasinya seperti Badan Eksekutif Mahasiswa, tetapi tumbuh pula organisasi yang mandiri dari kalangan mereka. Situasi dan kondisi yang demikian ini mengharuskan pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan agak lebih hati-hati.

Pembinaan yang dilakukan pemerintah daerah melekat pada tugas pemerintahan bidang sosial dan politik yang senantiasa berusaha mengajak partisipasi masyarakat dalam setiap program pemerintah misalnya Keluarga Berencana (KB) dan melakukan penyuluhan serta pembinaan pada masyarakat mengambang (*Floating Mass*) secara instansional agar menjadi pendukung dan pelaksana pembangunan yang baik.

Pada dasarnya pembinaan sosial politik yang dilakukan pemerintah daerah Kalimantan Selatan selama pelaksanaan pembangunan yang merupakan ciri tersendiri dalam masa pemerintahan Orde Baru mantapnya stabilitas politik, tumbuhnya saling pengertian diantara sesama Parpol/Golkar dan komponen-komponen lainnya, tumbuhnya pengertian Demokrasi Pancasila yang ditetapkan pada kebiasaan musyawarah mufakat dalam kegiatan-kegiatan yang bersifat kemasyarakatan, terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa, terlaksananya kegiatan Penataran P4 dan lancarnya program pembangunan.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah Kalimantan Selatan yang penting untuk dicatat adalah hubungan eksekutif dan legislatif dapat terjalin dengan baik dan harmonis. Salah satu faktor pendukungnya adalah sesuai dengan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, bidang eksekutif adalah wewenang Kepala Daerah dan bidang legislatif menjadi wewenang DPRD untuk mengurus/mengaturnya. Sebagai aparat Pemerintahan Daerah keduanya merupakan partner yang sederajat kedudukannya, dalam arti DPRD tidak bisa menjatuhkan Kepala Daerah dan sebaliknya Kepala Daerah tidak bisa membubarkan DPRD.

Begitu pula hubungan kerja antara daerah tingkat I dan II se Kalimantan Selatan dapat terbina dan berjalan lancar. Dalam hubungan formal diselenggarakan melalui rapat-rapat resmi, pengajuan Rancangan-rancangan Peraturan Daerah oleh Kepala Daerah kepada DPRD, penyampaian pertanggungjawaban dan hal-hal lainnya sesuai mekanisme kerja kedua belah pihak serta mengacu pada batas fungsi dan wewenang masing-masing.

EPILOG

Tantangan Pemuda di Masa Depan

GERAKAN pemuda Kalimantan Selatan sejak masa pendudukan Jepang Hingga Reformasi memiliki peran penting dalam dinamika sosial dan politik di masyarakat baik secara nasional maupun di daerah Kalimantan Selatan itu sendiri. Pergerakan pemuda merupakan unsur dan senyawa penting dalam sejarah Republik Indonesia. Pemuda Kalimantan Selatan seringkali menjadi aktor dalam perubahan sosial hingga politik. Di Kalimantan Selatan peran pemuda tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan peran mahasiswa dan pelajar. Setiap sejarah pergerakan pemuda di Kalimantan Selatan merupakan kolaborasi dari pelajar, mahasiswa dan para tokoh pemuda itu sendiri.

Pergerakan pemuda di Kalimantan Selatan mengalami pergeseran dan perubahan orientasi dan ideologi. Pada masa pergerakan kebangsaan pergerakan pemuda Kalimantan Selatan diwarnai dengan aksi heroik dalam melawan kolonialisme. Hingga pada masa kependudukan Jepang pergerakan pemuda memiliki arah dan tujuan yang yaitu menghapuskan penjajahan dari bumi Lambung Mangkurat. Namun pasca kemerdekaan pergerakan serta peran pemuda mengalami perubahan yaitu sebagai kelompok pendukung pemerintahan Orde Lama bahkan cenderung memiliki fanatisme terhadap sosok Presiden Soekarno. Hingga pada tahun 1966, terjadi peristiwa berdarah 30 September atau disebut sebagai peristiwa G 30 S/PKI yang melahirkan berbagai reaksi dari kalangan pemuda di seluruh Indonesia dan tidak terkecuali di Kalimantan Selatan.

Aksi KAMI serta ekponen'66 di Kalimantan Selatan telah berhasil menutup konsulat RRT dan sebagai poros baru dalam persatuan pemuda pada tahun 1966. Peran pemuda Kalimantan Selatan pada masa itu sangat penting dalam mengawal

kepentingan dan tuntutan yang termuat dalam Tritura (Tiga Tuntutan Rakyat) yang salah satunya untuk menumpas PKI di seluruh lini kehidupan sosial dan politik pemerintah. Namun di sisi lain perjuangan pemuda pada masa itu telah mengakibatkan gugurnya Hasanuddin HM seorang mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Lambung Mangkurat yang saat itu tertembak oleh salah satu anggota Militer. Hasanuddin HM kemudian dinobatkan sebagai pahlawan Ampera pertama di Indonesia dan para pejuangan eksponen'66 menjadi bukti dari pergerakan pemuda Kalimantan Selatan sebagai aktor perubahan politik yang berhasil menumbang kekuasaan dan menegakkan rezim Orde Baru.

Rezim Orde Baru merupakan sebuah otoritas baru yang lahir dari perjuangan para pemuda, namun pada praktiknya Rezim ini memandang pemuda sebagai modal sosial yang potensial untuk melegitimasi serta membela rezim tersebut. Salah satu upaya untuk menyetir pemuda maka di bentuklah model organisasi pemuda yang bertugas sebagai tentakel pada gurita kekuasaan Soeharto di Kalimantan Selatan seperti Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) yang dibentuk pada tahun 1974 dan diresmikan pada 1975 di Kalimantan Selatan. KNPI menjadi entitas politik penting di seluruh Kalimantan Selatan dalam upaya mengontrol, mengatur stabilitas pergerakan pemuda serta mendorong kebijakan pemerintah Soeharto agar dapat berjalan secara efektif di Kalimantan Selatan.

23 Mei 1997, Kalimantan Selatan mengalami peristiwa berdarah yaitu “Jumat Kelabu” yang memakan korban jiwa hingga ratusan. Peristiwa tersebut nampaknya tidak mudah terhapus begitu saja dari ingatan seluruh masyarakat Kalimantan Selatan. Rasa trauma dan berduka masih menyelimuti para pemuda hingga pada berdampak pada melemahnya semangat perjuangan para mahasiswa dan pemuda di Kalimantan Selatan pada tahun 1998 yang menuntut agar Soeharto turun dari Jabatannya. Reformasi hanya menjadi ajang seremoni bagi pemuda Kalimantan Selatan yang pada akhirnya melakukan aksi turun ke jalan pada hari dimana Soeharto

membacakan pernyataannya untuk mundur sebagai Presiden Republik Indonesia. Bahkan KNPI Kalimantan Selatan selaku organisasi yang dibentuk Soeharto untuk mendukung Rezim Orde Baru akhirnya tunduk dan mendukung pada keinginan rakyat dan pemuda yang pada saat itu melakukan demonstrasi di depan gedung DPR DATI I.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa perubahan pergerakan pemuda Kalimantan Selatan memiliki faktor yang beragam dan berubah-ubah. Pergerakan Pemuda Kalimantan Selatan secara dominan dipengaruhi oleh dinamika dan isu permasalahan nasional. Besarnya pengaruh pusat terhadap reaksi pemuda di Kalimantan Selatan menunjukkan bahwa pemuda Kalimantan Selatan selalu responsif terhadap perjuangan bangsa dan Negara. Sehingga sejak masa pergerakan kebangsaan, pendudukan Jepang, revolusi kemerdekaan, Orde Lama, hingga Orde Baru pemuda selalu dihadapkan pada berbagai permasalahan besar dari penguasa. Hakikat dan tujuan pergerakan pada masa itu terasa begitu konkret yaitu menghapuskan segala bentuk penyelewengan kekuasaan oleh penguasa. Namun masa Reformasi memberikan nuansa yang berbeda, reformasi melahirkan berbagai kebebasan di segala bidang terutama sosial dan politik kepada seluruh masyarakat. Pemuda tidak lagi dihadapkan hanya pada satu oposisi yaitu penguasa yang korup namun berbagai masalah hadir akibat kebebasan yang kebablasan dan tidak selaras dengan pemahaman tanggung jawab.

Soekarno pernah berkata, “Jangan mewarisi abu Sumpah Pemuda, tapi warisilah apinya sumpah pemuda. Kalau sekedar mewarisi abu, saudara-saudara akan puas dengan Indonesia yang sekarang sudah satu bahasa, bangsa, dan tanah air. Tapi, ini bukan tujuan akhir”.

Sejarah pemuda adalah sejarah perjuangan, hampir tidak ada perubahan dalam bangsa ini tanpa peran pemuda. Perjalanan panjang pra kemerdekaan mampu melahirkan kekuatan kepemudaan, lahirnya Budi Oetomo pada 1908 adalah awal tonggak kebangkitan dan tumbuhnya rasa nasionalisme, Sumpah Pemuda 1928 adalah kehendak bersama untuk bersatu

nusa, bersatu bangsa dan bahasa. Proklamasi 17 Agustus 1945, runtuhnya rezim Orde Lama 1966, peristiwa Malari 1974, sampai reformasi 1998 adalah bukti sejarah bahwa generasi muda adalah motor perubahan yang hakiki.

Masa depan Kalimantan Selatan sejatinya bisa dilihat dari kualitas generasi muda hari ini. Berdasarkan data dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP), Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2016 berada pada peringkat 34, Kalimantan Selatan berada dalam kelompok terbawah dibandingkan provinsi-provinsi lain. Bahkan terjadi penurunan dari tahun 2015 yang berada di ranking 31 kemudian ditahun 2016 turun di ranking 34. Ada beberapa indikator kenapa terjadi penurunan diantaranya APK (Angka Partisipasi Kasar) perguruan tinggi yang menurun, kemudian minimnya partisipasi generasi muda dalam organisasi, pemuda memberikan pendapat dalam rapat kemasyarakatan, pemuda perempuan bersekolah menengah dan perguruan tinggi, serta minimnya pemuda yang berwirausaha.

Dengan mengikuti alur tridimensi sejarah yaitu waktu, kesinambungan dan perubahan (*time, continuity and change*) maka peran kesejarahan generasi muda sekarang harus melintasi sekaligus tiga zaman, masalalu, masakini dan masadepan, yakni perpaduan kesadaran historis, kesadaran realistik, dan kesadaran futuristik, seakan membentuk segitiga utuh. Sebab, kesadaran historis semata akan melahirkan romantisme. Hanya ada kesadaran realistik akan melahirkan pragmatisme. Sementara, dengan kesadaran futuristik, yang lahir adalah generasi muda pemimpi.

Dalam menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, ada beberapa tantangan dan harapan yang harus dipersiapkan generasi muda dalam mengawal dan memberikan peran kebangsaan serta tanggung jawab sosial ditengah-tengah masyarakat sebagai agen perubahan. Indonesia akan memasuki suatu era yang langka yang disebut dengan Bonus Demografi pada tahun 2020 - 2035. Dimana jumlah usia produktif Indonesia diproyeksikan berada pada grafik tertinggi dalam sejarah bangsa ini, yaitu mencapai 64 % dari total jumlah penduduk Indonesia

sebesar 297 juta jiwa. Bonus demografi menjadi peluang emas yang sangat strategis bagi sebuah Negara untuk dapat melakukan percepatan pembangunan ekonomi dengan dukungan ketersediaan sumber daya manusia usia produktif dalam jumlah yang cukup signifikan. Rasio sederhananya dapat digambarkan bahwa di setiap 100 penduduk Indonesia, ada 64 orang yang berusia produktif, sisanya 46 orang adalah usia anak-anak dan lansia. Rasio usia produktif di atas 64 % sudah lebih dari cukup bagi Indonesia untuk melesat menjadi negara maju. Ini adalah rasio usia produktif terbaik Indonesia yang mulai kita nikmati nanti tahun 2020 dan akan berakhir pada tahun 2035. Tantangan-tantangan pemuda Kalimantan Selatan di masa kini dan akan datang adalah:

1. Tantangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Sebagai generasi terdidik dan agen perubahan, pemuda harus terus mempersiapkan diri menjadi tenaga yang profesional, unggul dan kompetitif. Pemuda hari ini dihadapkan pada era revolusi industri 4.0. Era ini tidak hanya menyediakan peluang namun juga menjadi tantangan generasi muda. Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di era industri 4.0 akan memberikan dampak antara lain, meningkatkan angka pengangguran, persaingan antara manusia versus mesin, dan persaingan yang semakin kompetitif di era globalisasi. Peran serta perguruan tinggi dan lembaga pendidikan lainnya sangatlah vital dalam rangka mempersiapkan generasi muda yang terdidik, terampil dan berkarakter untuk menjawab tantangan era industri 4.0.
2. Tantangan dalam bidang politik dan kepemimpinan. Musuh abadi kita semua adalah melawan apatisisme di kalangan generasi muda. Hasil data dari Bappenas dalam Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia Kalimantan Selatan mengalami problem serius, melihat angka keterlibatan generasi muda dalam organisasi sangatlah rendah, dari rendahnya partisipasi tersebut berdampak terhadap kontribusi generasi muda terhadap pembangunan di tengah masyarakat.

3. Regenerasi kepemimpinan dari kalangan kaum muda perlu dipersiapkan dalam rangka menciptakan pemimpin muda yang berintegritas, memiliki semangat nasionalisme dan patriotisme, memiliki kemampuan leadership yang kuat, tampil menginspirasi dan memberikan kekuatan untuk meretas zaman, memiliki wawasan yang luas untuk keperluan dan kebutuhan masyarakat di masa yang akan datang. Spirit perjuangan, pemikiran, dan karya besar para tokoh Kalimantan Selatan yang kini menjadi pahlawan nasional: Pangeran Antasari, Brigjend. H. Hassan Basry, Dr. KH. Idham Chalid, dan Ir. Haji Pangeran Mohamad Noor, dan tokoh pejuang lainnya yang relatif berusia muda pada zamannya sejatinya mampu menjadi inspirasi untuk berjuang dalam konteks sekarang ini. Pahlawan Ampera Hasanuddin HM adalah pemuda yang berjuang melawan segala bentuk penindasan terhadap rakyat dalam Tri Tuntutan Rakyat (Tritura). Sejarah mencatat banyak nama-nama besar, pahlawan kemerdekaan lahir dari Kalimantan Selatan. Pemuda haruslah mampu mengangkat *batang tarandam*, untuk menjawab tantangan kepemudaan di masa depan.
4. Tantangan dalam bidang ekonomi.
Ketika dibukanya pasar bebas Asean atau *Asean Free Trade Area* (AFTA) mengenai persetujuan dagang di seluruh negara Asean. Menghadapi pasar bebas Asean penting untuk ditanamkan dan dikembangkan jiwa kewirausahaan bagi generasi muda di Kalimantan Selatan sejak dini, pemuda Indonesia harus mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi lokal maupun nasional. Sehingga kebangkitan ekonomi lahir dan dipelopori oleh pemuda. Peran pemuda dalam menciptakan lapangan pekerjaan menjadikan pemuda menjadi aktif dan tidak lagi pasif menunggu pekerjaan, sehingga terbukanya lapangan pekerjaan dan berkurangnya angka pengangguran di usia produktif. Sehingga mampu melahirkan pemuda yang mandiri dan sejahtera.

Dari semua tantangan di atas maka perlu sebuah kebijakan yang pro terhadap pembangunan generasi muda dan pembinaan generasi muda. Pemerintah harus memberikan perhatian khusus terhadap pembangunan generasi muda dalam bidang pendidikan, politik, ekonomi dan kebudayaan.

Selain itu, reformasi tidak hanya memberikan berbagai kebebasan namun juga perubahan pada struktur politik. Reformasi telah membagi kewenangan seluas-luasnya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Praktik desentralisasi diharapkan mampu menguatkan kedaulatan rakyat daerah serta memperkuat nilai-nilai dan kearifan lokal di daerah. Sehingga berdampak pada pergerakan pemuda terutama di Kalimantan Selatan yang seringkali mengadopsi serta dipengaruhi oleh pergolakan dan dinamika perjuangan dari Pusat atau Jakarta. Sejarah Pergerakan Pemuda Kalimantan Selatan merupakan bagian dari sejarah pergerakan nasional yang mengedepankan isu-isu nasional ketimbang isu-isu lokal di Kalimantan Selatan itu sendiri. Dinamika nasional memiliki pengaruh yang begitu besar pada pergerakan pemuda di Kalimantan Selatan, sehingga reformasi yang diiringi desentralisasi memberikan tantangan tersendiri bagi pemuda untuk lebih responsif serta reaktif terhadap permasalahan dan isu-isu yang ada di daerah yaitu Kalimantan Selatan itu sendiri.

Keran-keran kekuasaan dan kebebasan semakin terbuka di era globalisasi. Para pemuda dihadapkan dengan perkembangan dan kemajuan teknologi dan informasi yang sangat pesat. Meskipun telah terjadi revolusi digital dan berbagai kemudahan ditawarkan oleh globalisasi namun peran pemuda tetap memiliki satu tujuan yaitu berjuang untuk kepentingan rakyat. Para pemuda harus dapat tetap fokus pada tujuan dan sejarah perjuangan para pendahulunya dalam melindungi bangsa dan negara ini.

Tantangan kedepan lainnya bagi para pemuda Kalimantan Selatan yaitu memperkuat ideologi dan semangat perjuangan dalam menghadapi berbagai permasalahan publik baik di ranah pemerintah pusat maupun daerah. Kemudian memper-

kuat persatuan dan kesatuan antar pemuda agar tercipta kerukunan bersama dalam memperjuangkan kepentingan-kepentingan publik.

Selanjutnya, memperkuat gerakan intelektual yang bertumpu pada penalaran serta analisis mendalam untuk mengetahui akar permasalahan bangsa maupun daerah dan tidak sekedar menjadi bagian dari pergerakan yang bersifat reaksioner dan temporer terutama pada isu publik yang populer. Berikutnya, memanfaatkan teknologi dan perkembangan arus informasi sebagai pendukung perjuangan pemuda di era reformasi dan globalisasi. Tidak hanya menjadi harapan penerus bangsa namun juga berkontribusi nyata bagi masyarakat sebagai pihak perantara (*intermediary*) yang efektif untuk membela kepentingan rakyat dan mengawal kebijakan pemerintah untuk kesejahteraan publik.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdullah, Taufik (ed.). 2013. *Sejarah Pemikiran Indonesia Modern*. Jakarta: Direktorat Sejarah dan Nilai Budaya Ditjen Kebudayaan Kemdikbud.
- Anderson, Ben. 1988. *Revoloesi Pemoeda Pendudukan Jepang dan Perlawanan di Jawa 1944-1946*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Anderson, Benedict. 2008. *Imagined Communities Komunitas-Komunitas Terbayang*. Yogyakarta: Diterbitkan atas kerjasama INSIST Press dan Pustaka Pelajar.
- Antemas, Anggraini. 1988. *Mutiara Nusantara Seri Kalimantan Selatan*. Amuntai: Mega Sapura.
- Anwar, Rosihan. 2006. *Sukarno, Tentara, PKI: Segitiga Kekuasaan Sebelum Prahara Politik, 1961-1965*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Basry, Hassan. 1961. *Kisah Geril(y)a Kalimantan (Dalam Revolusi Indonesia) 1945-1949*, Djilid Pertama Kalimantan Diachir Perang Dunia II — 1945 sehingga lahirnja ALRI Divisi IV — 1946. Banjarmasin: Jajasan Lektur Lambung Mangkurat.
- Basry, Hassan. 2003. *Kisah Gerilya Kalimantan Periode Tahun 1945-1949*, Jilid I dan II. Banjarmasin: Yayasan Bhakti Banua.
- Bondan, Amir Hasan Kiai. 1953. *Suluh Sedjarah Kalimantan*. Fadjar: Banjarmasin, 1953.
- Cribb, Robert Brison. 1990. *Gejolak Revolusi di Jakarta* (Penerjemah Hasan Basri). Jakarta: Grafiti Pers.
- Departemen Sosial Republik Indonesia. 1977. *Citra dan Perjuangan Perintis Kemerdekaan Seri Perjuangan Ex Digul*. Jakarta: Direktorat Jenderal Bantuan Sosial.
- Depdikbud. 1977/1978. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian dan Pencatatan Kebudayaan Daerah Depdikbud.
- Dijk, C. Van. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta : Grafiti Pers.

- Fathoni, F. 1990. *Kelahiran Yang Dipersoalkan: Dua Puluh Enam Tahun IMM 1964-1990*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Gafuri, Ahmad. 1984. *Sejarah Perjuangan Gerilya Menegakkan Republik Indonesia di Kalimantan Selatan (1945-1949)*. Kandangan: Departemen Penerangan Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- Gonggong, Anhar. 2011. "Pemuda dan Gerakan Bersenjata: Indonesia Masa Pendudukan Jepang", *Prisma* edisi 2 tahun 2011.
- Gunawan. 1999 *Di Arus Pergerakan Rakyat*. Jakarta: Pelopor, edisi keempat.
- Hasbullah. 1999. *Sejarah Pendidikan Islam di Indonesia, Lintasan Sejarah dan pertumbuhan Islam* (Jakarta: Grasindo Persada.
- Hasibuan, Muhammad Umar Syadat. 2008. *Revolusi Politik Kaum Muda*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Husaini, F & Apid. 2008. *Romusa: Sejarah Yang Terlupakan*. Yogyakarta: Ombak.
- Husin, L. H. 2014. *Gerakan Mahasiswa sebagai Kelompok Penekan*. Yogyakarta: Polgov.
- Ideham, M. Suriansyah *et al.*, (ed.). 2003. *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan.
- Joeniarto. 2001. *Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Jusi, M. 1962. *KODAM X/LM Membangun*. Bandjarmasin: Angkatan Darat, Komando Daerah Militer X Lambung Mangkurat.
- Kahin, Audrey. 2005. *Dari Pemberontakan ke Integrasi. Sumatera Barat dan Politik Indonesia 1926-1998*, terjemahan. Jakarta: Yayasan Obor.
- Kahin, George Mac Turnan. *Nationalism and Revolution in Indonesia*. a.b.Nin Bakdi Soemanto. 1995. *Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik, Nasionalisme dan Revolusi Di Indonesia*. Solo: Sebelas Maret University Press bekerjasama dengan Pustaka Sinar Harapan.
- Kansil, C.S.T. 1986. *Aku Pemuda Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

- Kartodirdjo, Sartono. 1982. *Pemikiran dan Perkembangan Historiografi Indonesia Suatu Alternatif*. Jakarta: Gramedia.
- Kodam X/Lambung Mangkurat. 1970. *Kodam X/Lambung Mangkurat Membangun*. Banjarmasin: Kodam X/Lambung Mangkurat.
- Kusumah, Indra. 2007. *Risalah Pergerakan Mahasiswa*. Jakarta: Indydec Press.
- Latif, Yudi I. S. 1996. *Bahasa dan Kekuasaan*. Bandung: Mizan.
- Lay, C. 2006. *Involusi Politik*. Yogyakarta: PLOD UGM.
- Mallarangeng, R. 2008. *Dari Langit: Kumpulan Esai tentang Manusia, Masyarakat, dan Kekuasaan*. Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Markas Besar Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. 1990. *30 tahun Angkatan Bersenjata Republik Indonesia*. Jakarta: Pusat Sejarah dan Tradisi ABRI.
- MD, Sagimun. 1989. *Peranan Pemuda Dari Sumpah Pemuda Sampai Proklamasi*. Jakarta: Bina Aksara.
- Nasution, A.H. 1978. *Sekitar Perang Kemerdekaan Indonesia*. Jilid 4 Periode Linggajati. Bandung: Disjarah-AD dan Angkasa.
- Nawawi, Ramli dkk. 1991. *Sejarah Revolusi Kemerdekaan (1945-1949) Daerah Kalimantan Selatan*. Jakarta: Proyek Inventarisasi dan Pembinaan Nilai-Nilai Budaya Depdikbud.
- Nawawi, Ramli, ed. 1992. *Sejarah Pendidikan Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Bagian Proyek Penelitian Pengkajian dan Pembinaan Nilai Budaya Kalimantan Selatan.
- Nawawi, Ramli. 1981, *Sejarah Perlawanan Terhadap Kolonialisme di Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Depdikbud.
- Oktorini, Nino. 2016. *Dibawah Matahari Terbit Sejarah Pendudukan Jepang di Indonesia 1941-1945*. Jakarta: Elex Media Komputindo.
- Pemda Tingkat I Kalimantan Selatan. 1990. *Sejarah Perjuangan Rakyat Menegakkan Kemerdekaan Indonesia di Kalimantan Selatan (Periode 1945-1949)*. Banjarmasin.
- Pemerintah Provinsi Daerah Tingkat I Kalimantan Selatan. 1994. *Panduan Peringatan HUT ke-45 Proklamasi*

- Gubernur Tentara ALRI Divisi IV Pertahanan Kalimantan.* Banjarmasin.
- Poesponegoro, Marwati Djoened dan Nugroho Notosusanto. 1975. *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid V. Jakarta: Balai Pustaka.
- Pour, Julius Pour. 2010. *Gerakan 30 September: Pelaku, Pahlawan & Petualang*. Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Probohardono, Samsudin. 1985. *Sejarah Pers dan Wartawan di Surakarta*. Surakarta.
- Raillon, F. 1985. *Politik dan Ideologi Mahasiswa Indonesia*. Jakarta : LP3ES.
- Reid, Anthony J. S. 1996. *Revolusi Nasional Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Ricklef, M.C. 2008. *Sejarah Indonesia Modern 1200-2008*. Jakarta: Serambi.
- Rifa'i, Muhammad. 2011. *Sejarah Pendidikan Nasional Dari Masa Klasik Hingga Modern*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media.
- Roosa, John. 2008. *Dalih Pembunuhan Massal: Gerakan 30 September dan Kudeta Suharto*. Jakarta: Nobodycorp.
- Said, M. 2009. *Intisari Kisah Gerilya Kalimantan: Karya H. Hassan Basry Pahlawan Nasional/Bapak Gerilya Kalimantan*. Banjarmasin: Ikatan Kerakatan Keluarga Hulu Sungai Selatan.
- Saleh, M. Idwar, dkk. 1978/1979. *Sejarah Daerah Kalimantan Selatan*. Banjarmasin: Proyek Penelitian Pencatatan Kebudayaan Daerah, Kanwil Depdikbud Prop. Kalimantan Selatan.
- Scherer, Savitri Prastiti. 1985. *Keselarasan dan Kejanggalan: Pemikiran-pemikiran Priayi Nasionalis Jawa Awal Abad XX*. Jakarta: Sinar Harapan.
- SEMDAM 10/LAM. 1970. *Wadja Sampai Ka Puting: Sedjarah Singkat KODAM 10/Lambung Mangkurat*. Bandjarmasin: SEMDAM 10/LAM.
- Setyohadi, Tuk. 2002. *Sejarah Perjalanan Bangsa Indonesia dari Masa ke Masa*. Jakarta: Alumni.
- Simanjuntak, Togi (ed.). 1998. *Wartawan Terpasung*. Jakarta: Institut Studi Arus Informasi.
- Soebagijo IN, H. 1977. *Sejarah Pers Indonesia*. Jakarta: Dewan Pers..
- Soeratman, Darsiti. 1985. *Ki Hajar Dewantara*. Jakarta: Depdikbud.

- Sugiyarto. 2018. "Gerakan Pemuda Pada Zaman Jepang". *Tulisan Lepas* koleksi Jurusan Sejarah Fakultas Ilmu Budaya Undip.
- Suhartono. 2001. *Sejarah Pergerakan Nasional, Dari Budi Utomo Sampai Proklamasi 1908-1945*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sulastomo. 2008. *Hari-Hari yang Panjang Transisi Orde Lama ke Orde Baru: Sebuah Memoar* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
- Van Dijk, C. 1983. *Darul Islam Sebuah Pemberontakan*. Jakarta: Grafitipers.
- Wajidi. 2011. *Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode 1900-1950*. Yogyakarta: Debut Press.
- Wajidi. 2007. *Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Wajidi. 2007. *Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik*. Banjarmasin: Pustaka Banua.
- Wajidi. 2008. *Artum Artha Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan*. Yogyakarta: Debut Press.
- Wajidi. 2015. *Revolusi Kemerdekaan di Kalimantan Selatan 1945-1949*. Yogyakarta: Ombak.
- Wajidi. 2017. *Peranan Pendidikan Islam Dalam Pergerakan Kebangsaan di Kalimantan Selatan*. Jakarta: Naskah Fasilitasi Penulisan Sejarah Direktorat Sejarah Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemdikbud.

Jurnal, Prosiding, Bunga Rampai, Makalah

- Abbas, Ersis Warmansyah (Penyunting). 2015. *Pendidikan IPS Berbasis Kearifan Lokal*. Banjarmasin: Program Studi Pendidikan IPS FKIP Universitas Lambung Mangkurat bekerjasama dengan Penerbit Wahana Jaya Bandung.
- Adam, Asvi Warman. 2018. Beberapa Catatan Tentang Historiografi Gerakan 30 September 1965. *Archipel* 95.
- Anderson, Benedict O'Gorman. 1983. "Masa Kegelapan dan Masa Terang Benderang, Perubahan Pemikiran Kaum Nasionalis Indonesia di Masa Awal", dalam Anthony Reid dan David Marr (editor). 1983. *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*. Jakarta: Grafitipers.
- Anis, M. Z. Arifin. 2011. "Ibnu Hajar; Patriot Tertindas", dalam *Jurnal Kebudayaan Kandil* edisi 20, Tahun VIII, Januari-Maret.

- Iqbal, Muhammad. 2018, "Pemberontakan Kesatuan Rakjat Jang Tertindas (Krijt) Di Kalimantan Selatan (1950-1963): Sebuah Kajian Awal", *Jurnal Khazanah* vol.16 (1).
- Khotimah, H. "Collective Memory "Jum'at Kelabu" di Banjarmasin Perspektif Resolusi Konflik Atas Peristiwa 23 Mei 1997", *Jurnal Al-Banjari*, Vol. 16, No.2, edisi Juli-Desember 2017.
- Kurasawa, Aiko. 1997. "Propaganda Media On Java Under the Japanese 1942-1945" dalam *Indonesia* No. 44, Oktober 1997.
- Mestika Zed, 2010, "Dekade Pergolakan Daerah, Mendekati Isu-lsu Konflik Pusat-Daerah dalam perspektif Pembangunan Nasional Tahun 1950-an, *Makalah* disampaikan pada Seminar Nasional Bertajuk "Pembangunan Nasional Sebagai Totalitas Pembangunan Daerah", Diselenggarakan oleh Dewan Perwakilan Daerah (DPD) bekerja sama dengan Panitia Satu abad Mr. Sjafruddin Prawiranegara" Jakarta, 17 Maret.
- Reid, Anthony, 1983. "Jejak Nasionalis Indonesia Mencari Masa Lampauya", dalam Anthony Reid dan David Marr (editor). 1983. *Dari Raja Ali Haji Hingga Hamka, Indonesia dan Masa Lalunya*. Jakarta: Grafitipers.
- Sari, N. N. 2016. Ekonomi Politik Media Cetak Di Kalimantan Selatan. *Jurnal Penelitian Pers dan Komunikasi Pembangunan* Vol. 20 No.2, 121-142.
- Surjomihardjo, Abdurrahman. "Sumpah Pemuda Di dalam Perkembangan Budaya Politik Indonesia 1900-1945", dalam Yayasan Gedung-Gedung Bersejarah Jakarta. 1974. *45 Tahun Sumpah Pemuda*. Jakarta: PT. Gunung Agung.
- Wajidi. 2015. "Eksistensi Partai Indonesia Raya (Parindra) di Kalimantan Selatan, 1935-1942", dalam Patanjala, Vol. 7 No. 1 Maret 2015, BPNB Bandung.

Tesis, Skripsi, Laporan Penelitian

- Aprilia, Lilik Eka, dkk. 2014. *Berakhirnya Pemerintahan Presiden Soeharto Tahun 1998*. Jember: Hasil Penelitian Mahasiswa Universitas Jember.
- Junaidi, Mugnie. 1972. "Sejarah Singkat Bangkit dan Berkembangnya Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI) di Kalimantan Selatan". Banjarmasin: Skripsi Jurusan Sejarah FKG Unlam.

- Justian, Dhani. 1972. "Sejarah Singkat Lahirnya Komando Daerah Militer X Lambung Mangkurat". Banjarmasin: Skripsi Jurusan Sejarah FKG Unlam.
- Iqbal, Muhammad. 2014, "Kesatuan Rakjat jang Tertindas (KRjT): Pemberontakan Ibnu Hadjar di Kalimantan Selatan, 1950-1963", *Tesis* pada Program Pascasarjana Bidang Ilmu Pengetahuan Budaya Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia Program Studi Ilmu Sejarah.
- Nawawi, Ramli. 1972. "Dewan Banjar". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.
- Prawitasari, Melisa. 2010. *Koran Terompet Rakyat sebagai Koran Perjuangan di Afdeling Hoeloe Soengai Onderafdeling Amoentai Pada tahun 1946-1947*. Banjarmasin: Skripsi Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin.
- Saleh, M. Idwar. 1988. "ALRI Divisi IV-A: Suatu Lukisan Tentang Pertumbuhan, Perkembangan, dan Kemundurannya". Banjarmasin: Laporan Penelitian FKIP Unlam.
- Sidi, S. P. 1996. *Gerakan Mahasiswa 1966 dan Perubahan Politik di Indonesia, skripsi*. Yogyakarta: UGM.
- Sjamsuddin, Helius. "Kiprah Pangeran Mohamad Noor dalam Dinamika Politik Indonesia (1945-1967)". *HISTORIA: Jurnal Pendidik dan Peneliti Sejarah*, Vol. I, No. 2 (April 2018).
- Sjarifuddin. 1974. "Sikap Pergerakan Rakyat Menghadapi Pendudukan Belanda di Kalimantan Selatan Periode 1945 sampai dengan 17 Agustus 1950". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.
- Soetanto, Soetopo. 1992. "Sistem Propaganda Jepang Melalui Penerbitan", *Makalah* disajikan dalam Simposium Sejarah Indonesia Modern di LIPI pada tanggal 9-11 Maret 1992.
- Wajidi. 2017. *Nasionalisme dan Revolusi Indonesia di Kalimantan Selatan 1900-1950*. Banjarmasin: Tesis Magister Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Lambung Mangkurat.

Zuhro, R. Siti, M. 2011. *Studi Relasi Birokrasi, Politik Birokrasi, Politik dan Masyarakat di Jawa Timur, Sumatera Selatan, dan Kalimantan Selatan*. Jakarta.

Memoar

- Arief, Mohammad Nawawie. 1981. "Sepak Terjang Haji Mohammad Nawawie Arief Dalam Perjuangan". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Artha, Artum. 1984. "Cita-Cita Mencapai Indonesia Mulia Merdeka dan Berdaulat". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Artha, Artum. 1997. "Perjuangan Bangsa Indonesia Menuju Negara Kesatuan Republik Indonesia". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Artha, Artum. 1999. "Budi Pekerti Pejuang Kemerdekaan Haji Hassan Basry". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Budhigawis, A.H. 1968. "Laporan Perjuangan dari Munggu Raya". Martapura: naskah ketikan.
- Danussaputera. 1985. "Kalimantan Terbakar oleh Semburan Bara Api Divisi IV ALRI Pertahanan Kalimantan". Banjarbaru: naskah ketikan.
- Darmawie, Achmad. 1981. "Detik-Detik Perjuangan Kemerdekaan di Banjarmasin Kalimantan Selatan". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Hadhariyah M. 1981. "Periode-periode Perjuangan di Indonesia yang Saya Alami". Banjarmasin: naskah ketikan.
- Soepardi. 1972. "Sejarah Singkat Pertumbuhan dan Perjuangan Dari: Partai Nasional Indonesia, Pendidikan Nasional Indonesia, Gerakan Rakyat Indonesia, di Kalimantan Selatan". Banjarmasin: Skripsi Sarjana Muda Pendidikan Jurusan Sejarah FKg Unlam.

Artikel, Berita Koran dan Majalah

- "Lebih dari 50 Peladjar S.M.P. dan Normal Barabai masuk ALRI, Antaranya 2 WANITA", dalam Kalimantan Berdjung, Kamis 22 September 1949 No. 806 Tahun ke V, hlm.1
- "Perasaan Bandjar Totok", dalam majalah *Malam Djoema'at*, 24 November 1927, dimuat kembali dalam surat kabar *Indonesia Merdeka*, Nomor 99 Tahun ke VII, Sabtu 28 April 1951, dengan judul "Pers di Kalimantan" oleh Amir Hasan Bondan.

“Surat2 dari Hulu-Sungai: Menindjau daerah gerilja dari dekat (Perdjalananan ketua redaksi kita)”, dalam *Kalimantan Berdjuang*, Senin 19 September 1949 No. 803 Tahun ke V.

“Surat2 dari Hulu-Sungai: Menindjau daerah gerilja dari dekat”, dalam *Kalimantan Berdjuang*, Kamis 22 September 1949 No. 806 Tahun ke V.

Kalimantan Berdjoang, 22 Agustus 1949 (salinan oleh Ahmad Gafuri).

Majalah Mandau. 1948. *Menuju Negara Kesatuan*. Jogjakarta: Madjalah Ikatan Perjuangan Kalimantan (IPK) Pusat Penerangan Penjiaran.

Iqbal, Muhammad. 2011. “Posisi Ibnu Hadjar dalam Sejarah Lokal Kita (1)”, dalam *Radar Banjarmasin*, edisi Kamis, 23 Juni.

Iqbal, Muhammad. 2011, “Posisi Ibnu Hadjar dalam Sejarah Lokal Kita (2)”, dalam *Radar Banjarmasin*, edisi Jum’at, 24 Juni.

Majalah Mimbar Indonesia, No. 11, 13 Maret 1948, hlm. 15.

Soerabaijasch handelsblad 02-01-1929, p. 10.

Kompas edisi 24 Mei 1997

Jawa Pos edisi 28 Mei 1997.

Kompas 31 Mei 1997.

Banjarmasin Post edisi 26 Mei 1997

Wawancara

Abdul Haris Makkie, 10 Oktober 2018, tentang Sejarah Perjuangan Pemuda Kalsel.

Gusti Farid Perdana, 16 Agustus 2018 tentang KNPI Era Kejatuhan Orde Baru.

Setia Budi, 1 Oktober 2018, tentang Sejarah Pergerakan Pemuda Kalsel di FISIP ULM.

Redy Montana, 7 September 2018, tentang Sejarah KNPI Kalsel.

Internet

“Mengenang Peristiwa 51 tahun gugurnya Pahlawan Ampera Pertama HASanuddin HM”,. Dalam <http://www/kalimantanpost.com/>,

Sanusi, D. G. “Jejak Rekam Anang Adenansi di Mata Putra Sulungnya, Anang Rosadi”. <http://jejakrekam.com/>

2018/04/25/jejak-rekam-anang-adenansi-di -mata-put ra-
sulungnya-anang-rosadi/ diakses 4 Oktober 2018.

Sejarah KPU, Komisi Pemilihan Umum Kalimantan Selatan:
<http://kalsel.kpu.go.id/sejarah-kpu.html>

Wibisono, K. "*Eksponen 66: Tritura Belum Terwujud*". Dalam
[https://www.antara news.com/berita/132545/eksponen-66-
tritura-belum-terwujud](https://www.antara news.com/berita/132545/eksponen-66-tritura-belum-terwujud), diakses 5 Oktober 2018.

INDEKS

A

Abdurrachman Abbas, 169
Agresi Belanda I, 142
ALRI, 100, 101, 102, 103,
104, 109, 112, 113, 115,
122, 123, 124, 125, 126,
127, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 134, 135
ALRI Divisi IV, 150, 156,
160, 169, 170, 171
Ambachtschool, 169
Amuntai, 7
Anang Adenansi, 176, 180,
184, 186, 187, 189, 201,
205, 206
Anderson, 2
Angkatan Laut (Kaigun), 66,
78, 80
Angkatan Muda Baitul
Hikmah Unlam, 10
Angkatan Muda Sabilal
Muhtadin, 9
Angkatan Puteri Al-
Washliyah, 142
APRIS, 146, 169, 170
Asahi Simboen, 80

B

Badan Koordinasi, 119
Bandjarmasinse Drukkerij,
76
Banjarmasinse Drukkerij, 76
Barisan Indonesia (Bindo), 8

Barisan Pendukung
Soekarno, 162
Batak, 3, 5
Belanda, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11,
12, 142, 143, 144, 145, 148,
158, 169, 170
Benedict Anderson, 13
Bintang Borneo, 76, 78
Boei Teisin Tai, 69, 85, 86
Booedi Oetomo, 29
Borneo Courant, 76
Borneo Minseibu, 83
Borneo Post, 76
Borneo Simboen, 71, 72, 73,
74, 75, 80, 81, 82, 83, 92,
96, 97, 105, 106
BPOG, 113
BPPKI (Barisan Pelopor
Pemberontak Kalimantan
Indonesia), 108
BPRIK, 108, 109
Brigjend (Purn.) Hassan
Basry, 9
Budi Sempurna, 7, 16, 32, 35
Budi Utomo, 5

C

CDB (Comite Daerah Besar),
167
CGMI, 142
Chairul Saleh, 141
CIA (Amerika), 180
Cina, 4
Clifford Geertz, 163

Corps Lambung Mangkurat,
156

Cut Nyak Dhien, 3

D

Darul Arqam, 7

divide et impera, 117

Dewan Mahasiswa UI/FE, 6

dr. Moerdjani, 146, 151

dr. Murdjani, 153, 171

E

Eropa, 3

F

federalisme Belanda, 99

Filipina, 4

Freeport di Papua, 183

Fujinkai, 8

Fujin-Kai, 69, 87, 88

Fundamentalis, 6

G

G 30 S/PKI, 174, 178

Gamki, 142

GAPIKA, 108

GAPPIKA, 109, 118

gedung Bioskop Osaka

Gekijo, 106

GEPERINDO (Gerakan
Pemuda Republik

Indonesia), 106, 108

GERAK (Gerakan Rahasia
Kalimantan), 108

Gerakan Mahasiswa Kristen
Indonesia (GMKI), 176

Gerakan Mahasiswa Sosialis
(Gemsos), 176

Gerakan Pemuda Islam, 142

Gerakan Tiga "A", 66

GERMERI (Gerakan Rakyat
Mempertahankan

Republik Indonesia), 108

GERPINDOM, 108, 114, 128

GMNI, 142, 162

H

H.J. van Mook, 145

Haji Abdul Hamid, 113

harian API, 185

Hasani, 169

Hasanuddin HM, 179, 181,
182, 183, 184

Hassan Basry, 147

Hassan Basry, 100, 101, 107,
108, 109, 114, 115, 116,
120, 122, 123, 124, 125,
126, 128, 129, 132

Hatta, 141, 144, 156

HCS (*Hollands Chinese
School*), 170

Hidayatullah, 7

Hindia Belanda, 141, 142

Hindia Belanda., 13, 18, 20,
24, 30, 52, 62

Hiragana, 68

HIS, 7, 8, 68

HMI, 7, 142, 162, 176, 203

HTI, 7

I

Ikatan Perjuangan

Kalimantan, 110, 111, 113

Ikatan Pers Mahasiswa

Indonesia (IPMI), 176, 179

Ikatan Putra Putri

Indonesia, 142

Ikhwanul Muslimin, 7

Indra Buana, 7

International Youth Year, 1

IPKI, 157

IPNU, 142

J

Jamaah Salahuddin, 7

Jami'iyah Islamiyah Borneo, 91

Jawa, 13, 14, 15, 19, 25, 29,

31, 36, 38, 39, 42, 43, 49,

52, 55, 57, 58, 59, 60, 62

Jepang, 2, 4, 8, 9, 141, 143,

168, 216, 218

Jong Ambon, 5

Jong Celebes, 5

Jong Java, 5

Jong Minahasa, 5

Jong Sumateranen Bond, 5

Jumat Kelabu, 217

K

Kabinet Ali Sastroamijoyo I, 155

Kabinet Ali Sastroamijoyo II, 155

Kabinet Burhanuddin Harahap, 155

Kabinet Djuanda, 155

kabinet Dwikora, 177

kabinet Natsir, 155

Kabinet Sukiman, 155

Kabinet Wilopo, 155

Kaigun Heiho, 69, 86, 109, 110

kaigun taiso, 70

Kaiin Yosejo, 68

Kalimantan Raya, 77, 78, 79, 80

Kalimantan Selatan, 3, 7, 9, 10, 11, 12

KAMI, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 184, 185, 197, 200, 201

Kan Bo, 94

Kanji, 68

Kapitan Pattimura, 3

Katakana, 68

Keimin Bunka Syidosya, 84

Keimin Syidobo, 84

Keirei, 69, 74

Kenkoku Dosikai, 106

Kesatuan Aksi Pelajar

Indonesia (KAPPI), 178

Kinrohosi, 89, 90

Klein Handel School, 68

KNI (Komite Nasional Indonesia), 106

KNIL, 146, 150, 170

KNPI, 10, 11

Kogyo Djitsumo Gakko, 67

Kolonel Rabson, 107

Komando Daerah Aksi

Derita Rakyat, 161

Komite Nasional, 142

Komite Nasional Indonesia (KNI), 142

komunis, 6

Konan Hokoku, 8

Konan Hokoku Dan, 69, 71, 85

Konferensi Meja Bundar, 142, 145, 159

Kongres Pemuda I, 5

Kongres Pemuda II, 5
KRI, 118
KRyT, 147, 150, 151, 153,
158, 159, 160
Kweekschool Nieuwe Stijl,
169

L

*Lagoe Seinendan Borneo
Selatan*, 70, 71
Laskar Saifullah, 114
Lasykar Syaifullah, 9
LDK, 7
LPKDP, 10
LSM, 10, 11

M

M. Suriansyah Ideham, 143,
145, 159, 164, 168, 169,
170
M. Taufik Effendi, 180, 201
Mahasiswa Lokal (SOMAL),
176
Majapahit, 3, 4
Malari, 218
Maluku, 3
Masjid Salman, 7
Masjid Syuhada, 7
Masyumi, 142, 155, 157, 162,
166
Mataram, 3
Mayor A.L. van Assenderp,
107
Mayor Tjilik Riwut, 113
Minseibu Cho-kan, 84
mitsu-mitsu-nanatsu, 84
Muhammadiyah, 22, 27, 29,
31, 32, 37, 40, 47, 55

MULO, 84

N

Nahdlatul Ulama, 29, 32, 37,
40
nasionalisme, 2, 4, 6, 12
Nasionalisme, 13, 16, 23, 30,
31, 32, 41, 49, 50, 55, 59,
63
NICA, 9, 107, 126, 131, 133,
136, 137, 138, 146, 161,
169
nipponisasi, 67, 69, 75, 91
Nitei Maru, 82
NKK/BKK, 6
Normaal School, 169, 170,
171
Nusantara, 3, 4
Ny. Noorsehan Johansyah,
118

O

Operasi Segitiga, 159
Orde Baru, 6
Orde Lama, 6, 178, 179, 183,
185, 186, 194, 198, 201,
209, 216, 218
organisasi Srie, 8
OSVIA, 16, 17, 18

P

P.M. Noor, 143
Pahlawan AMPERA, 184
Pan Islamisme, 15
Pangeran Antasari, 3
Pangeran Diponegoro, 3
Pangeran Hidayatullah, 3
Panglima Polim, 3

Partai SERMI, 104
 Partai SKI, 104
 Pelajar Islam Indonesia, 142
 Pelopor Mahasiswa Sosialis
 Indonesia (PELMASI), 176
 Pemoeda Pembela Tanah Air
 Kandangan, 70
 Pemuda Betawi, 5
 Pemuda Demokrat, 142
 Pemuda Islam, 142
 Pemuda Katolik, 142, 162
 Pemuda Timor, 5
 Pengakuan Kedaulatan, 141,
 144
 Peperti, 165, 167
 perang Banjar, 7
 Perang Banjar, 3
 Perang Makassar, 3
 PERDI, 82
 Pergerakan, 15, 23, 24, 28,
 29
 Pergerakan Mahasiswa
 Islam Indonesia (PMII,
 176
 Perguruan Taman Siswa, 8
 Perhimpunan Mahasiswa
 Kristen Indonesia
 (PMKRI), 176
 peristiwa G 30 S/PKI, 175,
 179
 Perjanjian Linggajati, 144
 perlawanan fisik, 142
 Persatuan Daya, 157
 Persatuan Pemuda
 Marabahan, 31, 32, 41, 42,
 44, 57
 Persatuan Putera Barabai, 8
 Persatuan Putera Borneo
 Banjarmasin, 8

PERTIWI (Persatuan
 Tindakan Wanita
 Indonesia), 104
**Peta atau Pembela Tanah
 Air**, 86
 PI, 5
 PKDI, 118
 PKI, 9, 142, 155, 157, 161,
 162, 163, 164, 165, 166,
 167, 173, 174, 175, 176,
 177, 178, 179, 185, 199,
 200, 216
 PMC, 113
 PMII, 7
 PMKRI, 142
 PNI, 31, 32, 46, 57, 142, 155,
 157, 162, 163
 Polisi Kilat Belanda, 110
 Politik Balas Budi.
 Pendidikan, 4
 Politik Etis, 4, 24
 PPKI, 141, 142, 143
 PPM, 8
 PPPI, 5
 PPTI, 157
 Pramuka, 8
 PRI, 106, 109, 116, 117
 PRI (Pemuda Republik
 Indonesia), 106
 PRIK, 113, 114
 Putera, 84

R

Reformasi, 216, 217, 218,
 222
Rensei Dodjo, 73
Rensei Seimo Tyosa In, 84
 Renville, 144

Republik Indonesia Serikat
(RIS), 145
Republikein, 169
Republiken, 104, 116, 118,
121, 122, 136, 138
Revolusi Fisik, 99
revolusi kemerdekaan, 99,
101, 105, 133, 136, 139
Rikugun, 78, 80, 82
Robert Van Niel, 15
Roem-van Roijen, 144
RRI Banjarmasin, 179, 180
RTA Milono, 171
Rusia, 4

S

Sei Jingah, 10
Seinendan, 8, 69, 70, 71, 84
Sekar Rukun, 5
Sekolah Guru B (SGB)
Putera, 169
Sekolah Guru B Puteri, 169
Sekolah Menengah Islam
Pertama (SMIP), 169
Sekolah Menengah Tinggi
(SMT), 169
Sekolah MULO, 8
Sekolah Normal, 103, 133
Sekolah Rakyat, 68
Sekolah Rakyat (SR), 168
Sekolah Teknik Pertama
Negeri (STPN), 169
Sekolah Tinggi Islam (STI)
di Yogyakarta, 142
Sekutu, 9, 142
Seri Budiman, 7
SERMI, 118, 119, 120, 121,
122

Sin Po, 81
Sinar Asia, 82
Sisingamangaraja XII, 3
SKI (Serikat Kerakyatan
Indonesia), 104, 116
Soekarno, 2, 141, 152, 153,
156, 162, 163, 165, 167,
216, 218
Sriwijaya, 3, 4
STOVIA, 5
Suara Hulu Sungai, 76
Suara Kalimantan, 76, 77
Sukarni, 141
Sulawesi Selatan, 3
Sultan Ageng Tirtayasa, 3
Sultan Hasanuddin, 3
Sumatera Barat, 3
Sumpah Pemuda, 2, 5, 10,
32, 37, 38, 39, 40, 58
Surabaya, 22, 35, 50, 55, 57,
62, 63

T

Taman Siswa, 14, 26, 41, 57
Tentara Pelajar, 103, 104,
133, 134, 135
Tentara Republik, 147, 150
TMII, 6
Tokubetsu Toku Tai, 86
Tri Koro Dharmo, 5
TRIKESUMA, 161
TRISAKTI, 185
Tritura, 216, 221
Tritura (Tiga Tuntutan
Rakyat), 178, 179
Tuanku Imam Bonjol, 3
Tumenggung Jalil, 7
Turki, 4

U

Undang-Undang Dasar, 145,
155

Undang-undang No.8 tahun
1985, 11

Untung Surapati, 3
UUD, 173, 198, 199, 200
UUD 1945, 10

Z

Zafry Zamzam, 149

Riwayat Hidup Penulis



WAJIDI, lahir di Pagat Hulu Sungai Tengah, 15 Januari 1969. Peneliti Madya pada Balitbangda Provinsi Kalimantan Selatan. Pendidikan S1 (Drs) di Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Unlam Banjarmasin (1992), dan S2 Magister Pendidikan IPS (M.Pd) Universitas Lambung Mangkurat (2017).

Mempublikasikan tulisan di Jurnal Amerta Puslit Arkenas, Jurnal Jnana Budaya dan Jurnal Sejarah dan Nilai Tradisional BPNB Bali, NTB, NTT, Jurnal Kebudayaan Puslitbang Kemdikbud, Jurnal Patanjala BPNB Bandung, Jurnal Patrawidya BPNB Yogyakarta, Jurnal kebijakan Pembangunan Balitbangda Provinsi Kalsel, dan beberapa majalah, buletin, dan surat kabar.

Publikasi berupa buku: Proklamasi Kesetiaan Kepada Republik (Pustaka Banua, 2007; diterbitkan kembali oleh Penerbit Ombak 2015 dengan judul: Revolusi Kemerdekaan di Kalimantan Selatan 1945-1949), Nasionalisme Indonesia di Kalimantan Selatan 1901-1942 (Pustaka Banua, 2007), Glosarium Sejarah Lokal Kalimantan Selatan Periode 1900-1950 (Debut Press, 2008), Mozaik Sejarah dan Kebudayaan Kalimantan Selatan, Sebuah Catatan Ringan (Debut Press, 2008), Artum Artha: Sastrawan, Wartawan, dan Budayawan Kalimantan Selatan (Debut Press, 2008), Akulturasi Budaya Banjar di Banua Halat (Pustaka Book Publisher, 2012), Gerakan Tengkorak Putih Sebuah Kelompok Gerilya di

Kalimantan Selatan 1949-1950 (Pustaka Book Publisher, 2012).

Anggota tim penulis/editor buku: Sejarah Banjar (Balitbangda Kalsel, 2003), Urang Banjar dan Kebudayaannya (Balitbangda Kalsel, 2005), Model Arsitektur Keraton Banjar di Teluk Selong Ulu, Martapura (Pustaka Book Publisher, 2011), Muatan Lokal Kebudayaan Banjar (Disbudparpora Kalsel, 2011), Upacara Daur Hidup Masyarakat Suku Banjar di Kalimantan Selatan (STAIN Pontianak Press-BPNB, 2012), dan buku: Peranan Qadhi Abdusshamad Dalam Penyebaran Islam Pada Masyarakat Dayak Bakumpai di Kabupaten Barito Kuala (Kepel Press-BPNB, 2014).

Aktivitas lainnya adalah pengurus DHD 45 Provinsi Kalsel masa bakti 2012-2017 dan 2018-2022. Menerima Penghargaan Anugerah Budaya (2013), dan Anugerah Astaprana (2014), serta sejumlah penghargaan menulis tingkat nasional. E-mail: wajidi.amberi@gmail.com



MANSYUR, lahir di Selayar, 9 April 1982. Dosen pengajar di Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas LambungMangkurat, Banjarmasin sejak tahun 2009. Menjalani profesi wartawan pada Harian Banjarmasin Post Tahun 2005-2009.

Meraih gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd) di Program Studi Pendidikan Sejarah, FKIP Universitas LambungMangkurat, Banjarmasin Tahun 2004, dengan predikat cum laude. Kemudian gelar Magister Humaniora (M.Hum) di Prodi Ilmu Sejarah, Fakultas Ilmu Budaya (FIB), Universitas Diponegoro (Undip), Semarang, dengan predikat cum laude tahun 2012.

Aktif di Pusat Kajian Budaya dan Sejarah Banjar (PKS-

BSB), Universitas Lambung Mangkurat, sebagai sekretaris dan peneliti. Kemudian ketua dan peneliti di Lembaga Kajian Sejarah, Sosial dan Budaya (LKS2B) Kalimantan; peneliti dan penasehat di Komunitas Historia Indonesia (KHI) Chapter Kalimantan Selatan. Buku ber-ISBN yang sudah terbit adalah *Muatan lokal Sejarah Kalimantan Selatan Untuk SMA/MA Jilid 1-3* (2017/Tim); *Hasil-Hasil Kajian Budaya dan Sejarah Banjar* (2017/Tim); *The Lost City: Menyusuri Jejak Nyai Undang Dalam Memori Suku Dayak Ngaju* (2017/ Tim); *Adipati Danoeradja, Tumenggung Dipanata, Sebuah Inspirasi Dari Regent Banua Lima* (2018/Tim); *Bandjarmasin Tempo Doeloe* (2018); *Memori Haga di Mandiangin* (2018/Tim). E-mail: mansyur_daeng@yahoo.com.



FAZLUR RAHMAN, lahir di Barabai, Kabupaten Hulu Sungai Tengah pada 31 Juli 1990. Meraih gelar Sarjana Hukum (SH) dari Fakultas Hukum Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin tahun 2012 dan gelar Master (MH) dari Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang tahun 2014. Pada tahun 2018 ia mendapatkan

beasiswa untuk melanjutkan studi pada Program Doktor Ilmu Sosial Universitas Airlangga Surabaya. Fazlur yang kini berprofesi sebagai Advokat dan Tenaga Ahli pada DPRD Kabupaten Tanah Bumbu, menjabat sebagai Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Provinsi Kalimantan Selatan Periode 2018-2021. Sebelumnya ia dikenal sebagai aktivis Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) dan Ketua BEM Fakultas Hukum ULM saat masih mahasiswa.

Aktivitas lain yang sering dilakukannya ialah menjadi pembicara pada pelatihan kepemimpinan, diskusi/ seminar serta melakukan penelitian yang terkait dengan isu hukum dan sosial. Penelitian yang pernah dilakukannya seperti

Kajian Data Terpilah Gender Kabupaten Banjar Tahun 2012-2014. Ia juga menjadi peneliti dan penyusun Naskah Akademik beberapa Peraturan Daerah di Kabupaten Tanah Bumbu, seperti Raperda Penataan dan Pengelolaan Pasar (2016), Raperda Pendidikan Alquran (2016), Raperda Pengaturan Tempat Pemakaman (2017) dan lain-lain. E-mail: fazlurisme@gmail.com.



M. ABDAN SYAKURA, lahir bertepatan Hari Jadi Barabai, Kalimantan Selatan 24 Desember 1988. Anak kedua dari pasangan H. Alfian Khairani dan Ibu Hj. Haridatul Baiyah ini merupakan alumni UIN Antasari Banjarmasin (S.Pd.I) dan strata dua (M.Pd.I) di UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Aktivitas sehari-hari mengabdikan sebagai seorang dosen di Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin dan Universitas Muhammadiyah Banjarmasin. Selain menjadi akademisi beliau juga aktif di berbagai organisasi kepemudaan dari tingkat komisariat sampai ke tingkat pusat, pernah menjabat Ketua Bidang Organisasi Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (2014-2016), kemudian menjabat Wakil Ketua DPD Komite Nasional Pemuda Indonesia (KNPI) Kalsel periode (2018-2021) dan Ketua Pemuda Tani HKTI Kalsel. E-mail: muh.abdansyakura@gmail.com.



SITI MAULIANA HAIRINI, lahir di Kota Banjarmasin, pada 10 Oktober 1990. Meraih gelar Sarjana (S.IP) dari Jurusan Hubungan Internasional Universitas Muhammadiyah Yogyakarta tahun 2012. Kemudian melanjutkan studi pascasarjana di Jurusan Politik dan Pemerintahan, Universitas Gadjah Mada dan mendapatkan gelar Master (MA) pada

tahun 2014. Sejak

tahun 2015 menjadi Staf pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat. Kini aktif sebagai Pengurus DPD KNPI Kalimantan Selatan. Selain aktif menjadi pembicara pada diskusi publik juga menjabat sebagai Pembimbing Lambung Mangkurat Debate Society (2017-sekarang).

Publikasi yang telah dihasilkan: PKBI: Aktor Intermediary dan Gerakan Sosial Baru (Jurnal Ilmu Sosial dan Politik/ JSP UGM Volume 16, Nomor 3 Maret 2013/Tim). The Political Habituation of Women's Leadership in Local Election Barito Kuala (Proceeding International Conference and Workshop on Gender oleh LIPI/Tim). Politik Sang Ratu: Dramaturgi GKR Hemas di Yogyakarta (publikasi Buku ber-ISBN/Tim). The 3rd "Kongres Sungai Indonesia" as Hybrid Social Movement: The New Combination of Classic Social Movement and New Social Movements (E-Proceeding/Tim). Political Alienation towards Disability People (Case Study on Local Election in Banjarmasin City at 2015-2020) dan lain-lain. E-mail: YanaHairini@gmail.com.



MELISA PRAWITASARI. Lahir di Banjarmasin pada tanggal 16 Januari 1989. Menempuh pendidikan pada: SDN Mawar 2 Banjarmasin (1994-2000), SLTPN 9 Banjarmasin (2000-2003), SMAN 4 Banjarmasin (2003-2006), Strata I (S.Pd) Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2006-2010) dengan judul skripsi “Koran Terompet Rakyat Sebagai Koran Perjuangan di *Afdeeling Hoeloe Soengai Onderafdeeling Amoentai* Pada Tahun 1946-1947”, Strata II (M.Pd) Pendidikan Sejarah Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta (2012-2014) dengan judul thesis “Penerapan Metode Pembelajaran *Hypnoteaching* Melalui *Mind Mapping* dalam Pembelajaran Sejarah untuk Meningkatkan Prestasi dan Motivasi Belajar Siswa Kelas XI SMA PGRI 6 Banjarmasin.”

Pernah menjadi dosen pada Program Studi Pendidikan Ekonomi Universitas Indraprasta Jakarta (2014) dan sekarang menjabat sebagai dosen pada Program Studi Pendidikan Sejarah FKIP Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin (2015 s.d sekarang). E-mail: melisa.prawita@ulm.ac.id



Sejarah Gerakan Kepemudaan di Kalimantan Selatan

Pemuda di Kalimantan Selatan adalah satu diantara elemen bangsa, garda terdepan menghadapi berbagai persoalan ber-sama. Dalam perspektif sejarah, kelompok ini selalu melahirkan berbagai pemikiran, gerakan menuju perubahan dan perbaikan Bangsa Indonesia. Peran mereka sudah mengemuka, mulai berkibar, jauh sebelum lahirnya Indonesia sebagai negara. Kiprah pemuda Indonesia bisa dilihat dari gerakan mereka sejak pra momentum kebangkitan nasional (tahun 1908) hingga pasca reformasi, tahun 1998 an.

Dalam perjalanan sejarah di Kalimantan Selatan dan Bangsa Indonesia umumnya, peran pemuda membawa perubahan terutama dalam perjuangan melawan dominasi kolonial Belanda. Berawal dari kebangkitan nasional tahun 1908 yang menandakan mulai tumbuhnya rasa nasionalisme. Kemudian disusul Sumpah Pemuda tahun 1928, dasar persatuan Indonesia hingga memasuki gerbang kemerdekaan Indonesia tahun 1945. Pemuda senantiasa menjadi bagian dari sejarah, karena setiap peristiwa sejarah umumnya selalu dipelopori pemuda. Dalam peristiwa-peristiwa tersebut pemuda mengedepankan wawasan dan pikirannya sebagai kekuatan utama perjuangan. Hal ini yang membuat pemuda mampu melaukan terobosan sejarah, dengan memadukan cara pandang dan gaya hidupnya.

*Penerbit
Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi
Kalimantan Selatan
JL. Pramuka, No. 4, Sungai Luhut,
Banjarmasin Timur, Banjarmasin,
Kalimantan Selatan.*